

Editor
Rosidin dan
Umi Masfiah



PENDIDIKAN MASYARAKAT

MODERASI, LITERASI
DAN PERNIKAHAN DINI

Sulaiman, dkk

Sulaiman, dkk

PENDIDIKAN MASYARAKAT

**MODERASI, LITERASI
DAN PERNIKAHAN DINI**



PENDIDIKAN MASYARAKAT: MODERASI, LITERASI DAN PERNIKAHAN DINI

Penulis: Sulaiman, dkk
Editor: Rosidin dan Umi Masfiah
Tata Sampul: Quella
Tata Isi: Mohammad Azzam Ashari
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, November 2020

Penerbit
DIVA Press
(Anggota IKAPI)
Sampangan Gg. Perhutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com
sekred2.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang
(KP) 50185, Telp. (024) 7601327, Fax. (024) 7611386
Email: bla_semarang@kemenag.go.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sulaiman, dkk

Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini/Sulaiman, dkk; editor,
Rosidin dan Umi Masfiah—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2020

xii + 298 hlmn; 15, 5 x 24 cm
ISBN 978-623-293-122-0

I. Judul
II. Rosidin dan Umi Masfiah

SAMBUTAN

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG

Segala puja dan puji bagi Allah Swt. penguasa alam semesta. Atas berkah limpahan karunia-Nya, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dapat menerbitkan buku bunga rampai Pendidikan Agama dan Keagamaan Non Formal dengan judul; “Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini”. Buku ini merupakan kumpulan artikel yang disusun dari hasil penelitian yang dikemas dengan bahasa dan tampilan yang lebih enak dibaca.

Buku “Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini” ini secara umum mengkaji tentang moderasi beragama, tema yang saat ini sering muncul di berbagai forum, baik forum akademik maupun dalam kegiatan masyarakat. Pemerintah juga sedang menggalakkan program moderasi beragama, sehingga buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan wacana moderasi serta mendukung program pemerintah tersebut.

Buku ini menampilkan artikel para penulis dari berbagai hasil riset, di beberapa daerah dengan temuannya masing-masing, yakni:

1. Moderasi Beragama Masyarakat Kelas Menengah Muslim di Kota Malang
2. Nilai-Nilai Pendidikan Non Formal dalam Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim di Kota Surakarta

3. Transmisi Nilai Moderasi Beragama oleh Majelis Taklim di Yogyakarta
4. Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Pesantren Salaf
5. Gerakan Literasi Keagamaan Berbasis Budaya: Studi Pesantren Honocoroko Wonogiri
6. Prinsip Moderasi Beragama dalam Teks Lokajaya
7. Strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Melalui Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gunungkidul
8. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Lombok Barat

Penerbitan buku bunga rampai ini telah melalui proses evaluasi dan pengeditan ketat dari Tim Penjamin Mutu Penelitian dan Pengembangan (TPMPP) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Semua itu dilakukan untuk menjaga kualitas terbitan hasil penelitian dan pengembangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Selain TPMPP, kami juga menggandeng tenaga ahli dari perguruan tinggi di lingkungan wilayah kerja, yakni; Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Wahid Hasyim, Universitas PGRI Semarang dan Institut Islam Mambaul 'Ulum (IIM) Surakarta.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penerbitan buku bunga rampai ini.

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberi amanah dan arahan demi terwujudnya program ini.
2. Para editor internal Tim Penjamin Mutu Penelitian dan Pengembangan (TPMPP) maupun editor eksternal mitra kami, Dr. Noor Miyono, M. Pd. dari Universitas PGRI Semarang dan Dr. Mibtadin dari IIM Surakarta, yang telah tekun mereview dan menyelaraskan naskah sehingga dapat diterbitkan.
3. Para peneliti dan penulis eksternal yang berlapang dada merelakan tulisannya untuk diterbitkan.
4. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi moril maupun materiil dalam merealisasikan program dan kegiatan penerbitan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan balasan yang berlipat ganda serta berkah dunia akhirat. Amin.

Kami mengharapkan penerbitan buku ini selain dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah pengetahuan sosial keagamaan, juga dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan terkait. Akhirnya, sekuat dan sebesar apapun seekor gajah, tetap saja gadingnya retak atau ada kekurangannya. Begitu pun buku ini, tentu masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penerbitan buku-buku selanjutnya sangat kami harapkan.

Semarang, September 2020

Kepala Balai Litbang Agama Semarang

Dr. Samidi Khalim, S.Ag, M.S.I.

PENGANTAR EDITOR

Kementerian Agama bersama seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara berkepentingan memelihara kehidupan damai dan sejuk dalam masyarakat, bangsa dan negara melalui moderasi beragama. Gagasan moderasi beragama tersebut dicetuskan oleh Lukman Hakim Syaifudin (Menteri Agama 2014-2019), sebagai wujud dari suatu pemikiran, betapa pentingnya realisasi moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa nilai moderasi dalam beragama menjadi pangkal untuk menumbuhkan dan mengeksplorasi ajaran agama yang damai dan teduh, sesuai dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Moderasi beragama merupakan sikap tengah-tengah dan tidak berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan masyarakat. Terkait beragama, moderasi beragama berarti tidak terlalu ekstrem, baik kanan maupun kiri. Terkait interaksi sosial, moderasi beragama adalah tidak terlalu memaksakan apa yang ia mau agar diterima orang lain. Moderasi beragama dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai proses transformasi ilmu kepada generasi mendatang.

Tema pembahasan tentang moderasi beragama tersebut dapat dinikmati dalam artikel-artikel buku bunga rampai ini. Tulisan-tulisan dalam buku bunga rampai ini merupakan hasil dari 3 tema penelitian yang dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur, Kota Surakarta Jawa Tengah, Kabupaten Gunungkidul dan Kota

Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Buku bunga rampai yang ada di tangan pembaca ini, diawali dengan prolog sebagai gambaran utuh semua tulisan yang ada di buku. Berikutnya, kajian moderasi dalam masyarakat disajikan oleh Sulaiman dengan artikel berjudul: Moderasi Beragama Masyarakat Kelas Menengah Muslim di Kota Malang Jawa Timur, Lilam Kadarin Nuriyanto berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Non Formal dalam Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim di Kota Surakarta, dan artikel Zakiyah berjudul: Transmisi Nilai Moderasi Beragama oleh Majelis Taklim di Yogyakarta. Ketiga artikel ini berbicara moderasi di kalangan masyarakat kalangan menengah atas.

Kemudian, artikel Joko Tri Haryanto berjudul: Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Pesantren Salaf, tulisan Mibtadin dan Rosidin dengan judul: Gerakan Literasi Keagamaan Berbasis Budaya: Studi Pesantren Honocoroko Wonogiri, dan Agus Iswanto dengan tulisan: Prinsip Moderasi Beragama dalam Teks Lokajaya. Ketiga tulisan ini berusaha mengeksplor moderasi beragama di lingkungan pondok pesantren dan bagaimana moderasi terungkap dalam Teks Lokajaya. Dua tulisan terakhir dengan judul: Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Melalui Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gunungkidul oleh Setyo Boedi Oetomo, dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Lombok Barat oleh Arnis Rachmadhani, mengungkap bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi beserta potensi dan penghambatnya. Kajian tentang pendidikan reproduksi ini diharapkan dapat mengurangi kasus pernikahan dini dan pentingnya taat pada regulasi, termasuk regulasi tentang moderasi beragama. Selanjutnya pada bagian akhir buku, ada sebuah tulisan epilog yang mencoba merangkum persoalan moderasi beragama, kecakapan literasi dan pendidikan multikultural bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian materi buku di atas, buku ini memiliki arti penting bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama, Penyuluh Agama, para tokoh agama dan masyarakat serta pegiat sosial keagamaan dalam pembinaan umat. Kami menyampaikan apresiasi kepada para peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dan penulis eksternal yang telah menghibahkan

tulisan ilmiahnya demi terwujudnya penerbitan buku bunga rampai ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga buku bunga rampai ini ada di tangan pembaca.

Salam takzim dan ucapan terima kasih dari para peneliti kepada semua sasaran penelitian di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang menjadi sasaran penelitian, atas bantuan yang telah diberikan selama para peneliti melakukan penelitian. *Barakallah*, semoga menjadi *ilman nafi'an*, Amiin.

Kami manusia tidak luput dari salah dan lupa, sehingga buku ini tentu masih ada kelemahannya. Untuk itu saran, masukan sangat kami harapkan dari siapa saja. Selamat Membaca.

Editor,

Rosidin

Umi Masfiah

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BALAI PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG..... iii
PENGANTAR EDITOR..... vii
DAFTAR ISI..... xi

Prolog:
MODERASI ISLAM: BERAGAMA SAMADYA
Rosidin 1

MODERASI BERAGAMA MASYARAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM
DI KOTA MALANG JAWA TIMUR
Sulaiman..... 11

NILAI-NILAI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN
MASYARAKAT MENENGAH MUSLIM DI KOTA SURAKARTA
Lilam Kadarin Nuriyanto 37

TRANSMISI NILAI MODERASI BERAGAMA
OLEH MAJELIS TAKLIM DI YOGYAKARTA
Zakiyah 65

MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN
MULTIKULTURALISME BERBASIS PESANTREN SALAF
Joko Tri Haryanto 91

GERAKAN LITERASI KEAGAMAAN BERBASIS BUDAYA:
STUDI PESANTREN HONOCOROKO WONOGIRI
Mibtadin dan Rosidin 117

PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM TEKS LOKAJAYA
Agus Iswanto 143

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK MELALUI
PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Setyo Boedi Oetomo 181

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PROSES PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Arnis Rachmadhani 207

EPILOG

MODERASI BERAGAMA DAN KECAKAPAN LITERASI DIGITAL
BAGI MASA DEPAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Umi Masfiah dan Noor Miyono 239

Bibliografi 259

Biodata Penulis 283

Indeks 295

Prolog:

MODERASI ISLAM: BERAGAMA SAMADYA

Rosidin

Memahami Konteks

Pasca reformasi 1998, terjadi perubahan baru bagi kehidupan sosial, politik, keagamaan, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia. Tidak ketinggalan, umat Islam pun mengekspresikan hak-hak politik dan kebebasannya untuk mendirikan partai yang bernafaskan ideologi Islam (Ulum, 2002: 144). Keterbukaan struktur politik telah mendorong kehadiran Islam di ruang publik mengalami perkembangan yang signifikan (Gaffar, 1999: 17). Selama masa awal reformasi, puluhan partai Islam, ormas keislaman pun tumbuh subur, dengan beragam orientasi ideologinya. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahl Sunnah wal Jamaah (FKWJ), Jamaah Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) Jawa Barat, dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Makassar, merupakan contoh organisasi berbasis ideologi islamisme yang selama masa reformasi sampai dengan saat ini aktif dalam mengembangkan wacana yang lebih purifikatif dengan orientasi formalisasi syariat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ruang publik yang terbuka memberikan kesempatan bagi gerakan islamisme untuk mengartikulasikan kepentingan politik dan ideologi keagamaan mereka secara agresif, reaktif, dan demonstratif (Idahram, 2011: 11).

Kehadiran Islam di ruang publik yang ditampilkan gerakan islamisme merupakan bagian dari penyebaran simbol, identitas, dan nilai agama pada masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan struktur sosial politik. Baik ruang nyata maupun virtual dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan ide, pandangan, dan kepentingan agama (Hardiman, 2009: 68). Sebagai sebuah gerakan, islamisme atau Islam politik menempatkan Islam sebagai bagian dari aksi politik mereka yang bersandar pada paradigma bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah menyediakan segala aturan bernegara dan bermasyarakat. Islam merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan karena hukum yang ada tidak memberi rasa keadilan (Effendy, 2020: 405).

Secara umum, term islamisme merupakan fenomena kebangkitan Islam politik di ruang publik dalam masyarakat muslim. Islamisme dipahami sebagai gejala politik keagamaan kontemporer yang mengambil bentuk, pemikiran, wacana, dan aksi yang didasari oleh sebuah ideologi tertentu, dengan tujuan islamisme tersebut adalah mengubah sistem yang berlaku menjadi islami (Hasan, 2014: 13). Dengan pemahaman, islamisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Akan tetapi islamisme mengakui kekerasan sebagai salah satu manifestasi yang memungkinkan berkembang dari fenomena politik Islam dalam konteks dan situasi tertentu. Pengusung ideologi islamisme ini disebut Islamis, artinya muslim yang berkomitmen terhadap aksi politik untuk menerapkan apa yang mereka anggap dan yakini sebagai agenda Islam. Pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa Islam merupakan sistem yang utuh dan sempurna, yang di dalamnya terdapat rumusan-rumusan tindakan dalam membangun masyarakat Muslim. Perubahan yang diharapkan kalangan Islamis tidak saja pada ranah politik, tetapi juga pada ranah kemasyarakatan. Dalam praktiknya, menurut Asef Bayat kalangan Islamisme ini bersikap eksklusif, tunggal, dan tidak toleran terhadap pluralisme, mewakili golongan ideologi yang absolut, dan totaliter (Bayat, 2012: 97).

Islam dan Moderasi Beragama

Dewasa ini, wacana mengenai moderasi Islam mengemuka di tengah arus anti *mainstream*, radikalisme, *violence extremism*, dan intoleransi. Secara etimologi, kata “*moderasi*” berasal dari bahasa

Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris istilah moderasi merujuk pada kata *moderation* yang artinya adalah *average* (ratarata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Sementara itu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) disebutkan bahwa kata moderasi berarti pengurangan kekerasan dan pengurangan keekstriman. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah moderasi biasanya merujuk kepada kata *wasath* yang bermakna “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Lawan kata ini adalah *tatharruf* yang berarti berlebihan, ekstrem, radikal. Dalam konteks beragama, moderasi dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang tidak ekstrem, di tengah-tengah dan berlaku adil (Tim Penyusun Kemenag RI, 2019: 15-17). Secara terminologi, moderasi bermakna “penengah di antara dua hal yang saling berhadapan. Secara konseptual, *wasathiyah* difungsikan sebagai bentuk “perlawanan” terhadap ekremisme, *wasathiyah* memosisikan dirinya sebagai bentuk keseriusan, ketersinambungan dengan penuh komitmen untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa memisahkan antara agama dan tugas negara.

Moderasi atau *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu, sebagaimana makna “*ummatan wasathan*” dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu umat yang adil dan terpilih. Dalam pengertian yang lebih luas, moderasi beragama adalah cara beragama umat Islam yang tidak terlalu miring ke kanan, tidak condong ke kiri, berdiri di tengah, paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Allah telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Dengan bahasa yang lebih mudah, moderasi beragama adalah sikap beragama secara “*samadya*” tidak ditambahi, juga tidak dikurangi, dengan tetap berpegang pada prinsip kebangsaan, kewarganegaraan, menghargai kelompok di luar dirinya, dan menguatkan *local wisdom*. *Wasathiyah* terfokus pada beberapa aspek, yaitu: *pertama*, pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan demokrasi; *kedua*, antroposentris dan pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam; *ketiga*, kepemimpinan dengan integritas moral yang tinggi; membawa perdamaian, keharmonisan, dan kolaborasi dengan kalangan non muslim; *keempat*, perbaikan pendidikan yang holistik; *kelima*,

kesadaran untuk membangun mental para pemuda muslim; dan *keenam*, keseimbangan dan sinergi antara tradisi agama Islam dan saintifik.

Menurut Alagha (2015), konsep “*ummatan washatan*” dimaknai sebagai komunitas umat Islam secara universal yang mempunyai karakter adil, seimbang dan sempurna untuk mengabdikan kepada Allah. Di dalam arti yang lebih luas, umat yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat yakni terdapat aspek moderasi di dalamnya (Alagha, 2015: 46). Secara praktik, konsep beragama “*samadya*” atau moderasi beragama di Indonesia mencakup beberapa nilai-nilai dasar, di antaranya: *pertama*, menyiarkan Islam dengan ramah dan tanpa ideologi kekerasan; *kedua*, menggunakan cara hidup moderen seperti sains, teknologi, demokrasi, hak asasi dan lainnya; *ketiga*, berpikir rasional; *keempat*, berislam secara kontekstual; dan *kelima*, berijtihad ketika tidak terdapat dasar hukum eksplisit dalam Alquran dan hadits (Hilmy, 2013: 28).

Moderasi Islam atau beragama “*samadya*” secara prinsip adalah konsep teologi moderat untuk memberikan narasi sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerjasama antara komponen masyarakat yang berbeda, suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Dengan demikian, beragama “*samadya*” merupakan nilai organik dari doktrin Islam untuk membingkai hubungan antara sesama manusia, dengan agama lain, juga dengan pemerintah. Di Indonesia, terutama Kementerian Agama (Kemenag) mendorong model moderasi beragama ini menjadi semacam pandangan hidup (*mabda’a al-hayah*) yang menerima perbedaan keberagamaan yang lain di luar dirinya, baik pandangan agamanya, bentuk spiritual maupun tradisi keagamaan. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan aspek penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat saat ini ketika intoleransi dan kekerasan bernuansa agama semakin menggejala di masyarakat. Apabila *violence extremism* dan pola keberagamaan yang eksklusif, klaim kebenaran, dan *absolutely-absolute* akhirnya menggiring umat Islam pada sikap fanatisme beragama bahkan “kesombongan religius.” Pola keberagamaan *hardliner moslems* seperti ini akhirnya bisa mencoreng wajah Islam yang terkenal toleran, ramah (*the smiling Islam*), dan moderat.

Mengenai Buku Ini

Artikel yang ada pada bunga rampai ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang kurun waktu tahun 2018 sampai 2019. Buku ini hadir untuk memotret moderasi Islam di lembaga pendidikan agama non formal, seperti majelis taklim, pesantren dan perkawinan usia dini. Lokasi penelitian tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian tersebut adalah model transmisi moderasi beragama kepada jamaahnya, nilai-nilai moderasi lembaga pendidikan non formal melalui budaya, maupun nilai-nilai moderasi Islam yang ada di teks klasik. Sementara itu, perkawinan usia dini memfokuskan pada pendidikan kesehatan reproduksi pada masyarakat. Secara umum, majelis taklim, lembaga pendidikan non formal, dan pesantren sebagai ruang pendidikan keagamaan Islam menjadi garda terdepan dalam mewariskan moderasi Islam melalui berbagai aktifitasnya. Praktik pendidikan non formal secara umum menyiapkan “perangkat” yang bisa mendorong moderasi Islam yakni sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan yang ada. Model pendidikan dan transmisi nilai moderasi beragama oleh lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren disampaikan dalam beragam bentuk seperti pengajian rutin, *living tradition*, dan kegiatan keagamaan lainnya yang diikuti oleh baik santri maupun masyarakat umum sekitar lembaga tersebut. Dari kegiatan rutin tersebut kemudian membentuk *habits of mind* dan *worldview* keberagamaan mereka. Penguatan moderasi Islam di lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren sebagai upaya untuk tetap menjamin kondisi kehidupan yang damai, saling pengertian, dan saling menghargai antar elemen masyarakat sebagai satu elemen bangsa.

Nilai-nilai moderasi Islam yang sudah ada dalam berbagai sumber dan teks keagamaan menjadi sumber daya (*resources*) dan kekayaan khazanah pengetahuan yang bisa ditransmisikan oleh lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren guna penguatan keberagamaan masyarakat. Transmisi nilai-nilai moderasi Islam tersebut secara prinsip diarahkan untuk membangun karakter masyarakat, bangsa, dan negara yang maju dan beradab, baik melalui pendidikan keagamaan maupun pengajian. Transmisi

nilai-nilai moderasi Islam tersebut dipahami sebagai *liyatafaqqahu fiddin* dan *liyundziru qaumahum* berkaitan sosial kebangsaan, yakni membentuk kepribadian umat Islam yang moderat serta memiliki sikap responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren tersebut melakukan *character building* dan *nation building* sebagai *point of view* dan *starting point* menyelesaikan persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan dewasa ini seperti ancaman radikalisme dan kekerasan berbasis agama. Tujuan akhirnya transmisi nilai-nilai moderasi Islam tersebut adalah terbentuknya masyarakat yang beradab, berbudaya, dan maju dengan landasan *hubbul wathon minal iman*.

Lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren merupakan media untuk *character building* dan *state building* yang dilakukan melalui pengajian dan budaya yang dikembangkan. Melalui transmisi nilai-nilai transmisi moderasi Islam secara prinsip mengedepankan dua hal, yaitu amanat *al-diniyyah* dan *al-wathonniyyah*. Dengan dua amanat tersebut, lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren menjadi media membangun karakter, kepribadian, dan jati diri bangsa melalui pemberdayaan literasi keagamaan masyarakat untuk peningkatan keimanan, penguatan sosial, dan pengembangan masyarakat. Pengajian dan model pendidikan yang dikembangkan lembaga pendidikan non formal, majelis taklim, dan pesantren mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk penguatan keberagamaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang menekankan pada aspek pemahaman pada subjek penelitian, dan tidak melakukan generalisasi dalam memotret persoalan, dalam hal ini mengenai moderasi beragama. Secara umum, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung sehingga mendapatkan informasi yang mendalam ataupun dengan diskusi kelompok terpinpin (*Focus Group Discussion/FGD*) untuk mendapatkan informasi mengenai moderasi Islam dalam berbagai aspeknya, sumber-sumbernya, praktiknya, maupun narasi keagamaan toleran lainnya. Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terkait dengan aktivitas moderasi Islam di pendidikan non formal, majelis taklim, maupun pesantren. Hal ini dilakukan karena beberapa kegiatan di lokasi penelitian menuntut observasi terlibat,

yakni peneliti ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di lokasi penelitian. Sementara itu teknik dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data atau informasi yang berupa catatan, dokumen, dan berupa catatan lainnya terkait dengan teks keagamaan narasi keagamaan moderasi seperti yang ada pada naskah Lokajaya. Dalam artikel-artikel ini digunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji persoalan perkara secara tuntas. Data-data yang diperoleh dikategorisasikan, direduksi, dan diinterpretasikan. Di akhir laporan penelitian dilakukan penarikan simpulan yang sesuai dan valid. Hasil penelitian sebagaimana yang ada bisa bersifat analitis deskriptif, interpretatif, teoretik, dan implementatif.

Bunga rampai ini secara umum berisi tiga hal, yaitu pada bagian awal berisi prolog yang merupakan "jendela" buku ini, serta mengantarkan pembaca untuk masuk menyelami dinamika moderasi Islam dari setiap artikel yang disusun secara sistematis di buku ini. Bagian kedua, berisi ragam artikel mengenai pendidikan di masyarakat yang membahas moderasi Islam dari berbagai aspeknya, literasi dan pernikahan usia dini. Kehidupan beragama masyarakat menengah ke atas menjadi sorotan banyak dikupas dalam tiga artikel pertama, yaitu: Moderasi Beragama Masyarakat Kelas Menengah Muslim di Kota Malang Jawa Tengah yang ditulis oleh Sulaiman, Nilai-nilai Pendidikan Non Formal dalam Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim di Kota Surakarta oleh Lilam Kadarin Nuriyanto, dan Transmisi Nilai Moderasi Beragama oleh Majelis Taklim di Yogyakarta oleh Zakiyah. Selanjutnya, bagaimana pesantren berkiprah memberikan kontribusi dalam mengkampanyekan moderasi beserta literasi yang mendasarinya. Ini dibahas dalam artikel; Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Pesantren Salaf oleh Joko Tri Haryanto; Prinsip Moderasi Beragama dalam Teks *Lokajaya* oleh Agus Iswanto, dan Gerakan Literasi Keagamaan Berbasis Budaya: Studi Pesantren Honocoroko Wonogiri oleh Mibtadin. Dua artikel selebihnya yang berjudul: Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Melalui Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gunung Kidul oleh Setyo Boedi Oetomo, dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Melalui Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Lombok Barat oleh Arnis Rachmadhani. Kedua artikel ini ikut mewarnai buku ini agar pendidikan remaja pun berdamai dengan regulasi yang ada sebagai bagian dari moderasi beragama. Bagian akhir dari bunga

rampai ini adalah berupa epilog, yang menjadi "pintu penutup" yang berisi intisari berbagai artikel yang disajikan dalam buku bunga rampai berjudul: Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini.

Daftar Pustaka

- Affan Ghaffar, 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alagha, Joseph. "Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies." *The American Journal of Islamic Social Sciences*
- Bayat, Asef, 2011. *Post-Islamisme*, Yogyakarta: LKiS.
- Effendy, Bachtiar, 2009. *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta; Paramadina.
- Hasan, Noorhaidi, 2014. *The Making of Public Islam: Piety, Democracy and Youth in Indonesian Politics*, Yogyakarta: SUKA Press.
- Hilmy, Masdar. 2013. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam*.
- Idharam, Syaikh, 2011. *Mereka Memalsukan Kitab-kitab Karya Ulama Klasik: Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren..
- KBBI online. Moderat. diakses pada 20 Juli 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taklim>
- Noorhaidi Hasan, 2014. *Islam Politik; Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press
- Idharam, Syaikh, 2011. *Mereka Memalsukan Kitab-kitab Karya Ulama Klasik: Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren..
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

MODERASI BERAGAMA MASYARAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM DI KOTA MALANG JAWA TIMUR

Sulaiman

Pendahuluan

Berbagai tindak intoleransi dan radikalisme bernuansa agama terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat pada aksi peledakan bom di berbagai wilayah, seperti peledakan bom di Bali, di Jakarta, Cirebon, dan Surabaya. Aksi peledakan bom di Bali terjadi pada tahun 2005, yang dikenal dengan sebutan Bom Bali 2. Aksi peledakan bom berlanjut hingga beberapa tahun kemudian, seperti peledakan bom di masjid kompleks Kantor Kepolisian di Cirebon Jawa Barat dan peledakan bom bunuh diri di Gereja Bethel, Solo pada tahun 2011. Kemudian aksi peledakan bom di depan Kantor Polisi di Poso pada tahun 2013. Bahkan pada tahun 2016, 2017, 2018, secara berturut-turut terjadi peledakan bom di beberapa tempat, yaitu di Sarinah Thamrin Jakarta, peledakan bom di Kampung Melayu Jakarta, dan peledakan bom di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota yang berafiliasi dengan kelompok tertentu, seperti Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansyarut Daulah. (Zakiyah, 2019 : 29).

Perilaku intoleransi dan radikalisme tersebut telah merambah ke dunia pendidikan di sekolah. Qodir (2016:439) mengatakan

bahwa ternyata ada persoalan yang paling mendasar pada *level cultural* bangsa ini, yakni berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Hal ini didasarkan hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tahun 2010-2011 pada beberapa SMA di Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan bahwa dari 993 siswa yang disurvei terdapat 48,9, persen menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, sebanyak 51,1 persen menyatakan kurang setuju atau sangat tidak setuju. Lebih dari itu, dari 980 guru agama yang menjadi responden, sebanyak 28,2 persen menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi berjaj agama.

Kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti pengrusakan rumah ibadat dan pengusiran kelompok minoritas. *The Wahid Institute* (2014: 21) mencatat bahwa kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi terus naik, terutama sejak lima tahun terakhir. Pada 2009, terdapat 121 peristiwa pelanggaran. Jumlah ini meningkat jadi 184 peristiwa tahun 2010, 267 peristiwa (2011), dan 278 peristiwa (2012). Tahun 2013, jumlahnya sedikit menurun jadi 245 peristiwa atau turun 12 persen dibanding tahun 2012, tetapi kasusnya kian menyebar. Pada tahun 2014, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor Negara dan 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non Negara.

Sejalan dengan kasus-kasus tersebut Setara Institute juga menemukan adanya *trend* peningkatan pemahaman intoleransi. Pada tahun 2010, Setara Institute (2011: 19-21) mencatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 provinsi. Terdapat 5 provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, yakni Jawa Barat 91 peristiwa, Jawa Timur 28 peristiwa, Jakarta 16 peristiwa, Sumatera Utara 15 peristiwa, dan Jawa Tengah 10 peristiwa. Sementara daerah lainnya adalah kurang dari 10 peristiwa. Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara sebagai *actor*. Dari 103 tindakan negara, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*).

Pemahaman keagamaan semacam ini memiliki potensi besar terhadap perpecahan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, perlu mewacanakan paradigma baru tentang pemahaman keislaman yang ramah dan toleran, yakni moderasi Islam. Moderasi beragama masyarakat kelas menengah muslim menjadi penting untuk dikaji karena masyarakat kelas menengah muslim adalah kelompok sosial di masyarakat yang menunjukkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang mapan. Dalam hal ekonomi keluarga, mereka memiliki orientasi kegiatan-kegiatan lain yang menopang kehidupan keseharian, salah satunya adalah aktivitas dalam bidang keagamaan. Mereka memiliki akses terhadap ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi informasi sehingga mereka memiliki posisi yang strategis di masyarakat.

Pandangan keagamaan masyarakat kelas menengah muslim ini sangat menarik untuk dikaji karena pada umumnya mereka memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, permasalahan yang perlu dikaji adalah: 1) Bagaimana sebenarnya kondisi keberagamaan masyarakat di perumahan Permata Jingga di Kota Malang; 2) Bagaimana pandangan-pandangan keagamaan, dan kaitannya dengan kebangsaan. Hal ini penting mengingat posisi strategis mereka yang memiliki akses untuk melakukan gerakan, aktivitas sosial, dan mempengaruhi pandangan masyarakat pada umumnya.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk menganalisis data yang ditemukan, yakni: moderasi dan kelas menengah.

1. Moderasi Beragama

Istilah moderasi berasal dari bahasa Inggris "*moderation*" yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan secara terbatas. Kata "*moderation*" ini berasal dari kata "*moderate*", berarti orang moderat atau orang yang lunak (John M. Echol dan Hasan Sadily, 384). Menurut KBBI *online*, istilah "*moderat*" memiliki dua makna, yaitu: (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; dan (2) berkecenderungan ke

arah dimensi atau jalan tengah. Jika dikaitkan dengan paham keagamaan, moderat berarti paham yang tidak ekstrem, dalam arti selalu cenderung pada jalan tengah. Alquran menyebut umat Islam sebagai *ummah wasatha* (Q.S. Al Baqarah: 143), yaitu umat “tengahan”, “moderat”, adil, dan “terbaik”.

Dalam konteks Indonesia, Mukhlis M. Hanafi dalam Akademika (2017) memaknai moderat (*al-wasat*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak. Dengan pemaknaan ini, Islam moderat Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal (*tawasut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan; mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya.

Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal, *tawasut* di dalam mengimplementasikan ajaran agama, toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam Alquran atau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda (Pratama, Lulu Syifa, dkk. 2017).

Dalam Islam, sikap moderat (*tawassut*) tersebut digambarkan sebagai *ummatan wasathan*, sehingga banyak ulama pada saat ini mempromosikan konsep moderasi Islam (*wasatīyyah al-Islām*). Menurut para ulama tafsir (*mufasssirin*), sebagaimana yang dikutip oleh Hanapi, Mohd Shukri, bahwa ada perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan istilah “*wasatīyah*”, antara lain: Ibnu Katsir, Al-Qurtubiy, dan Al-Razi. Ibnu Katsir (1992: 196-197) menyebutkan bahwa *wasatīyah* berarti yang terbaik, paling rendah hati dan adil. Al-Qurtubiy (1993: 104-105) menyebutkan bahwa *wasatīyah* berarti adil dan terbaik. Dalam

konteks ini, *wasatīyah* tidak berarti mengambil posisi tengah atau dalam suatu persoalan, seperti posisi antara yang baik dan yang buruk. Al-Raziy (1990: 88-89) menyebutkan bahwa *wasatīyah* memiliki 4 makna, yakni: 1). Adil, tidak memihak antara kedua belah pihak, 2). Sesuatu yang terbaik, 3). Yang paling rendah hati dan sempurna, dan 4). Tidak ekstrim dalam urusan agama (Hanapi, 2014 : 53).

Salah satu di antara ulama yang banyak menguraikan tentang moderasi (*wasatā*) adalah Yusuf al-Qardhawi. Dia adalah seorang tokoh ikhwan moderat dan sangat kritis terhadap pemikiran Sayyid Quthb, yang dianggap menginspirasi munculnya radikalisme dan ekstrimisme serta paham yang menuduh kelompok lain sebagai *thāghūt* atau kafir (*takfir*). Dia pun mengungkapkan rambu-rambu moderasi ini, antara lain: (1) pemahaman Islam secara komprehensif yang mengandung keseimbangan antara ketetapan syari'ah dan perubahan zaman, (2) pemahaman syariat yang mengandung kemaslahatan dan memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia; (3). dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap keuniversalan Islam yang merupakan rahmat alam semesta (Qordhowi, 20018: 152-159).

Wacana Islam *wasathīyyah* tersebut mendapat dukungan penting dari Mohammad Hashim Kamali dalam karyanya, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford & New York: Oxford University Press, 2015). Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa moderate, yang dalam bahasa Arab berarti wasathiyah, tidak dapat dilepaskan dari dua kata kunci lainnya, yakni berimbang (*balance*), dan adil (*justice*). Moderat bukan berarti kita kompromi dengan prinsip-prinsip pokok ushuliyah) ajaran agama yang kita yakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain; tetapi moderat berarti "... *confidence, right balancing, and justice...*". Tanpa keseimbangan dan keadilan seruan moderasi beragama akan menjadi tidak efektif. Di dalam judul ini, Kamali tidak menggunakan istilah '*Islam wasatīyyah*', yang lazim digunakan di Indonesia, tetapi ia menggunakan istilah 'jalan tengah moderasi Islam' berdasarkan prinsip Alquran tentang *wasatīyah* (Kamali, 2015: 13-14)

Hanya saja, istilah ‘moderasi Islam’ atau yang terkait dengan istilah ‘Islam moderat’ seringkali dipersoalkan karena “Islam hanyalah Islam”, tidak ada moderasi Islam atau Islam moderat. Istilah ‘*Islam wasaṭiyyah*’ yang bersumber dari ayat Alquran (QS al-Baqarah [2]: 143) lebih diterima dan karena itu lebih lazim digunakan. Menurut Din Syamsudin, “*Islam wasaṭiyyah*” penuh dengan toleransi, tidak terjebak ekstrimitas, mengambil jalan tengah, moderasi Islam, dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah. *Islam wasaṭiyyah* itu berarti Islam jalan tengah tidak terlibat kekerasan, sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas untuk semua golongan (Din Syamsudin, 2018).

2. Masyarakat Kelas Menengah

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pelapisan sosial yang berbeda-beda, yang oleh Karl Marx dikenal dengan istilah kelas-kelas sosial. Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai suatu strata (lapisan) dalam rangkaian kesatuan sosial. Pitirin Sorokin (1964:271) menyebutnya sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarchis*) yang perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, dan rendah. Konsep kelas sosial tersebut diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk mengkaji fenomena kehidupan bermasyarakat.

Salah satu tokoh sosiologi yang paling terkenal adalah Karl Marx yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan cara produksi barang-barang material. Marx (dalam Raho, Bernard, 2007: 73) menyatakan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kapitalis/borjuis (pemilik modal) yang menguasai sarana-sarana produksi dan kelompok proletariat (pekerja/buruh) yang jumlahnya lebih banyak dari pada kelompok yang pertama. Cara produksi barang-barang mempengaruhi masyarakat khususnya yang menganggap ekonomi sebagai infrastruktur atau landasan bagi institusi-institusi lain, seperti politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, pembagian kelas sosial pun menjadi semakin kompleks, sehingga muncul “kelas menengah” di antara kedua pembagian kelas yang esktrim tersebut. Definisi

kelas menengah yang paling sering digunakan di Indonesia adalah definisi dari Asia Development Bank (ADB), yang mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pengeluaran per kapita per hari. Pengeluaran per hari di bawah 2 dollar AS dalam penelitian ini digolongkan sebagai kelas miskin atau sangat bawah, 2-4 dollar AS kelas bawah, 4-10 dollar AS kelas menengah, 10-20 dollar AS mencerminkan kelas menengah atas, dan di atas 20 dollar AS mewakili kelas atas (Bambang Setiawan, 2012). Karena itu, kelas sosial ini dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yakni: *upper class* (kelas atas), *middle class* (kelas menengah), dan *lower class* (kelas bawah).

Menurut Weber, sebagaimana yang dikutip oleh Horton, Paul B (2007: 6-7) yang mengatakan bahwa penggolongan stratifikasi sosial didasarkan atas 3 faktor, yakni: pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Pekerjaan merupakan faktor penting dalam kehidupan yang menentukan kelas sosial karena pekerjaan merupakan bagian dari cara hidup yang sangat berbeda. Penghasilan memiliki prestise bagi seseorang karena penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional lebih berfungsi dari pada jenis penghasilan yang berujud pekerjaan kasar. Pendidikan juga berpengaruh terhadap lahirnya kelas sosial di masyarakat karena pendidikan yang tinggi memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan, pendidikan juga melahirkan perubahan mental, selera, etiket, dan cara hidup seseorang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif terhadap masyarakat kelas menengah muslim dalam konstelasi kebangsaan di Kota Malang, Jawa Timur. Lokus penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kota besar yang terdapat masyarakat kelas menengah muslim dan memiliki beragam kegiatan keagamaan. Dalam hal ini masyarakat kelas menengah muslim di Perum Permata Jingga, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data mendalam terkait dengan pandangan dan sikap keberagamaan masyarakat kelas

menengah muslim terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan data tertulis terkait dengan moderasi beragama masyarakat menengah muslim dalam konstelasi kebangsaan. Data ini meliputi sejarah keberadaan masyarakat menengah muslim, sejarah aktivitas masyarakat menengah muslim, gerakan dan relasi sosial keagamaan masyarakat menengah muslim. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat menengah muslim di lokus penelitian. Dari pengamatan yang dilakukan ini akan diketahui tentang sikap dan perilaku keberagamaan dan sikap kebangsaan mereka.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menyelenggarakan *Focused Group Discussion* (FGD), yakni sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan sebuah makna menurut pemahaman sebuah kelompok (Bungin, 2005: 131). Dalam penelitian ini, FGD dilakukan dengan cara diskusi terarah dengan narasumber lapangan yang mengetahui tema penelitian. FGD dilakukan sebanyak dua kali di masing masing lokasi penelitian. FGD pertama dimaksudkan untuk mengetahui informasi awal dan peta keberagamaan masyarakat menengah Muslim. Dari kegiatan ini diharapkan akan muncul informasi tentang aktivitas masyarakat menengah muslim dan sumber-sumber informasi lainnya. FGD kedua dilaksanakan untuk menggali data lebih lanjut tentang moderasi beragama masyarakat menengah muslim dan sebagai media untuk *crosscheck* data yang telah didapatkan sebelumnya.

Temuan dan Pembahasan

Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kota Malang, salah satu kota terpadat kedua di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena banyaknya lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan perguruan tinggi. Di Kota Malang ini dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia karena banyak etnis seluruh Indonesia yang tinggal di daerah ini, bahkan etnis dari luar negeri, seperti Libia, Ethiopia, Sudan, dan sebagainya. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik terutama suku Jawa, Madura, sebagian

kecil keturunan Arab dan Cina. Selain itu, terdapat beberapa kelompok keagamaan Islam, seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Salafi, Jamaah Tabligh, Syiah (al Kausar), dan sebagainya. Meskipun demikian, suasana keberagamaan bersifat kondusif, aman, dan tidak pernah terjadi benturan antar atau pun intern umat beragama.

Di daerah ini terdapat beberapa pemukiman elit, seperti: Perumahan Permata Jingga di Kecamatan Lowokwaru, Perumahan Arraya di Kecamatan Blimbing, dan Perumahan Griya Santha di Kecamatan Lowokwaru, serta Perumahan Dieng di Kecamatan Sukun. Masing-masing perumahan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Perumahan Permata Jingga memiliki karakteristik lebih ke arah pengembangan intern atau perumahan tertutup. Perumahan Arraya memiliki karakteristik lebih banyak ke pengembangan seperti kampung. Perumahan Dieng memiliki karakteristik lebih banyak pengembangan ke berbagai wilayah lain, seperti Kabupaten Malang, dan lainnya. Tipologi perumahan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 01 tahun 2011 bahwa perumahan diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis tipologi perumahan, yaitu perumahan tertutup, perumahan terbuka, non perkampungan, dan perkampungan.

Dalam hal ini, sasaran kajian lebih diarahkan kepada tipe perumahan tertutup, yakni Perumahan Permata Jingga, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Perumahan ini memiliki karakteristik ke arah pengembangan intern “hunian Islami”, dan sistim keamanan professional sehingga banyak para nasabah atau konsumen yang memilih bertempat tinggal diperumahan Permata Jingga ini. Dari segi etnis, banyak warga manca negara yang berdomisili di wilayah ini, seperti: China, libia, Arabia. Mereka adalah orang-orang muslim, yang sedang kuliah di Universitas Brawijaya. Meskipun demikian, etnis Indonesia masih mendominasi kawasan pemukiman ini, seperti Jawa, Sunda, Padang, Banjar, Madura, dan Betawi. Dari etnisitas tersebut, tentu etnis Jawa mendominasi perumahan ini.

Di wilayah Permata Jingga ini terdapat dua masjid, yakni masjid Abdullah dan masjid Cahyaning Ati. Kedua masjid ini bukan berarti ada perbedaan diantara keduanya tetapi pengembang perumahan hanya menfasilitasi warga masyarakat agar lebih efektif di kawasan ini. Di dua masjid inilah masyarakat perumahan Permata Jingga dapat menemukan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-

royongan. Mereka yang biasanya sibuk dengan urusannya masing-masing, namun mereka dapat bertemu di masjid, sehingga mereka bisa saling membantu, saling menghormati, dan saling menghargai. Disinilah mereka bisa berkomunikasi bersama dengan “ngobrol” tanpa membedakan status sosial mereka. Dengan tradisi “ngobrol” ini mereka memiliki kesempatan terbuka lebih banyak bertemu dengan masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan sosial di antara mereka.

Keberagamaan Masyarakat Menengah Muslim

Dalam hal ini keberagamaan masyarakat kelas menengah muslim dapat dilihat melalui dua aktivitas keagamaan, yakni aktivitas keagamaan rutin dan aktivitas keagamaan insidental.

1. Aktivitas Keagamaan Rutin

Aktivitas kegiatan rutin dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kegiatan peribadatan dan kegiatan dakwah atau kajian-kajian. Kegiatan peribadatan meliputi salat lima waktu, salat Idul Adha, Idul Fitri, salat gerhana matahari, dan salat-salat sunah lainnya. Dalam salat lima waktu, jamaah hanya berkisar antara 3-4 baris pada hari-hari biasa, tetapi jika hari-hari *weekend* jamaah bisa mencapai 100–150 orang sehingga jamaah meluber di serambi masjid. Hal ini sebagaimana terlihat pada pengamatan peneliti, sebagai berikut:

“ ... jamaah salat lima waktu pada setiap hari rata mencapai 6-7 *shaf* (baris), terlebih lagi dalam jamaah salat subuh. Perlu diketahui bahwa jamaah salat subuh di masjid kawasan Perumahan Permata Jingga, yakni masjid Abdullah dan masjid Cahyaning Ati adalah murni warga masyarakat Permata Jingga. Bahkan, ada kemungkinan sekitar 90% adalah warga setempat, tetapi jika siang hari (salat dhuhur dan salat Asyar) dimungkinkan ada warga lain, misalnya para pekerja di perumahan, orang singgah, dan sebagainya”. (Pengamatan tanggal 15 Juli 2019).

Masyarakat memandang bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk silaturahmi atau bertemu antara sesama jamaah sehingga masjid itu benar-benar bisa dinikmati oleh warga perumahan masyarakat Permata Jingga. Bahkan, masjid dipandang sebagai sumber solusi, bukan sebagai sumber masalah. Karena itu, masjid dapat dijadikan sumber inspirasi bagi jamaah karena dari sini muncul inspirasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Hal ini disebabkan bahwa di masjid ini terdapat tradisi “unik”, yakni “*ngobrol bareng*”.

Sebagian jamaah Masjid Abdullah, setelah melaksanakan salat berjamaah, terutama setelah Subuh, mereka melakukan obrolan-obrolan yang bersifat bebas, artinya tidak ada tema khusus tentang masalah agama. Dengan obrolan-obrolan tersebut, terdapat komunikasi informal bagi jamaah untuk membangun kesepahaman. Di sini ada dialog antara pengurus dan masyarakat/jamaah. Di masjid inilah, mereka menemukan kenikmatan tersendiri. Mereka memiliki jiwa yang benar-benar sebagaimana yang digariskan oleh Alquran dan hadis. Bahkan, mereka merasakan bahwa belajar agama, terutama bagi muallaf dan atau masa pensiun memiliki kenikmatan dan atau merasakan nikmatnya beragama.

Para jamaah tersebut lebih nyaman di masjid dari pada di rumah. Hal ini disebabkan ketika mereka berada di rumah merasakan keseharian hanya bergelut dengan hal-hal yang bersifat duniawi, akan tetapi mereka tidak menikmatinya. Dengan cara ini mereka merasakan bahwa Islam berbagi ajaran terhadap para jamaah sehingga kekeringan jiwa terisi dengan berbagai kajian Islam. Dalam hal ini, para ustaz dituntut tidak hanya pandai berceramah, tetapi mereka harus paham terhadap kebutuhan umat/jamaahnya. Bahkan, mereka harus bisa membangkitkan emosi jamaah, sehingga dibutuhkan metode tersendiri untuk mentransformasikan pemahaman agama kepada para jamaah.

Kegiatan dakwah atau kajian-kajian dilakukan oleh masyarakat menengah muslim pada setiap saat, yang adakalanya bersifat harian dan ada kalanya bersifat mingguan. Hal ini terlihat pada jadwal kegiatan kajian-kajian di masjid “Abdullah”, dalam tabel 01 berikut.

Tabel 01. Jadwal Kegiatan Mingguan di Masjid Abdullah

Hari Ahad				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Ahad 1	Kesehatan Sifat salat Rasul	Dr. Dicky Kurniawa Ust. Abu Haidar	Bakda subuh Bakda Maghrib
	Ahad 2	Agama (Umum)	Drs. H. Setiaji	Bakda subuh
	Ahad 3	Mengimani ayat- ayat hisabiyah	Ust. Manan Idris	Bakda subuh
	Ahad 4	Riyadhus Salihin	Ust. Abd. Wahab	Bakda Subuh
Hari Senin				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Senin 1 dan 3	Sirah Sohabul Rasul	Ust. Zahid Hadromi, S. Kom	Bakda maghrib
2	Senin 2 dan 4	Tafsir Misbahul Munir	Ust. Dwitriyono	Bakda maghrib
Hari Selasa				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Selasa 1 dan 3	Tafsir Juz Amma	Ust. Khouli KhomarSayuti	Bakda subuh
2	Selasa 2 dan 4	Fikih muamalah Ekonomi syariah	DR. Ahmad Jalaludin Lc	Bakda subuh
Hari Rabu				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Rabu 1 dan 3	Tafsir al Quran	Ust. Alvin Sholeh	Bakda subuh
2	Rabu 2	Materi tematik	Ust. Suriansyah	Bakda subuh
3	Rabu 4	Kitab Syarah as Sunah	KH. Agus Hasan Basori, S. Ag	Bakda maghrib
4	Rabu 4	Mukhtashor Minhajul Qashidin	Ust. Mujahidin	Bakda subuh
Hari Kamis				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	1 dan 3	Kitab Syarah Aqidah Thahawiyah	KH. Wahid Ghazali, S. Ag	Bakda subuh
Hari Jumat				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Jumat 1 dan 3	Tafsir tematik	Ust. Chusnul Hadi M. Si	Bakda subuh
2	Jumat 2 dan 4	Akhlaq dalam Islam	Ust. Chusnul Fatoni, M. Ag	Bakda subuh
Hari Sabtu				
No	Minggu ke	Materi/tema	Pemateri	Keterangan
1	Sabtu 1,3 5	Sirah Nabawiyah	Ust. Abdullah Soleh Hadromi	Bakda subuh
2	Sabtu 2 dan 4	Surga dan nneraka	Ust. Amrizal Arief Lc	Bakda subuh

Sumber: Data takmir masjid Abdullah Perum Permata Jingga 2019

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kajian-kajian agama di Masjid Abdullah sangat padat dan variatif. Kajian tersebut adakalanya disampaikan dalam bentuk baca kitab, seperti Kitab Riyadhus Salihin, *Syarah Akidah Thahawiyah*, Kitab *Minhajul Qashidin*, dan sebagainya. Adakalanya juga disampaikan oleh pematernya dalam bentuk *power point* dan atau ceramah umum. Hal ini sebagaimana model kajian yang disampaikan oleh ust. Chusnul Fathoni, ust. Chusnul Hadi, dan ust. Dr. Dicky Kurniawan. Meskipun demikian, mereka kebanyakan menggunakan metode baca kitab sebagai pegangan, seperti kitab *Ibnu Katsier*, *Riyadhus Shalihin*, *Syarah Aqidah Thahawiyah*, dan sebagainya.

Waktu kajian secara umum kebanyakan dilakukan setelah maghrib dan setelah waktu subuh, karena mereka umumnya sudah berada di rumah masing-masing. Sementara para pengajar atau pematernya umumnya didatangkan dari luar perumahan, baik dari kalangan pesantren maupun perguruan tinggi. Jika dilihat dari paham keagamaan, memang ada beberapa paham keagamaan, antara lain: NU, Muhammadiyah, dan sebagian Salafi, tetapi mereka kebanyakan berpaham ahlus sunah wal jamaah ala NU dan Muhammadiyah.

Hasil dari kajian-kajian tersebut kemudian dikemas dalam bentuk audio visual, seperti: YouTube atau Instagram, bahkan Facebook. Di lingkungan masjid ini, Instagram memiliki pengikut sekitar 1400 an, YouTube diikuti sekitar 200 pengikut, dan Facebook sekitar 1000 pengikut. Hal ini dimaksudkan untuk membantu syiar agama dan sekaligus pemahaman keagamaan sehingga meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat sekitar. Namun, syiar ini terkadang juga dilakukan dalam bentuk *live streaming* terhadap kajian-kajian khusus maupun umum, terutama ustaz-ustaz besar, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Syafik ba Salamah, Alvin Tanjung, Abul Fida', Syafik al Auzai (imam masjid al Haram), Ustaz Maududi (dr Pekanbaru), Ustaz Syafik (dari Jember), Ustaz Abdullah Hadromi Sholeh (Malang). Mereka berpaham salafi, akan tetapi mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi keberagaman masyarakat perumahan yang menghendaki kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati antara satu dengan lain.

Semua golongan bisa berdakwah di masjid ini sepanjang tidak menimbulkan perpecahan antar sesama umat di perumahan ini. Mereka (para jamaah) bisa membedakan kajian-kajian yang baik

dan buruk atau kajian yang meresahkan atau yang tidak meresahkan. Jika dakwah para pemateri menyinggung kelompok lain, maka masyarakat tidak akan menggunakannya lagi. Untuk mengantisipasi hal ini, pengurus takmir masjid senantiasa mengkonsultasikan kepada para Pembina, yakni KH. Wachid Ghazali, Ustaz Alfin Sholeh, dan Ustaz Abdullah Sholeh Hadrhromi. Sebagai contoh, Ustaz Alfian Tanjung dari Jakarta tidak dipanggil lagi ke masjid ini, karena ia menjelek-jelekan pihak lain.

Dengan demikian, masyarakat Permata Jingga merasa tenang, aman, dan damai karena kajian-kajiannya tidak berbau madzhab dan atau *khilafiyah* yang memecah belah umat. Biasanya, materi yang disampaikan oleh para ustadz di masjid ini berkenaan dengan tema akhlakul karimah, peningkatan akidah, kebahagiaan keluarga, dan sirah nabawiyah. Hal ini terlihat pada kajian Ustaz Abdullah Hadrami yang meskipun ia berpaham salaf, tetapi bisa menerima paham NU dan bisa merangkul pihak lain. Dia tidak ekstrim dalam memberikan penjelasan tentang agama, seperti penjelasan tentang bidah dan khurafat. Oleh karena itu, dia bisa duduk bersama dalam sebuah majelis yang sangat heterogen paham keagamaan, seperti NU, Muhamadiyah.

2. Kegiatan Insidental.

Setiap tahun pengurus masjid menyelenggarakan kegiatan PHBI, seperti: peringatan 1 Muharam, Maulid Nabi, Isra dan mikroj, serta Nuzulul Quran. Biasanya kegiatan ini mengundang ustaz-ustaz dari luar dan kegiatan sosial atau bakti sosial. Selain itu, kegiatan yang bersifat insidental adalah mengundang ustaz nasional, seperti Ustaz Abdul Somad (UAS), Ustaz Adi Hidayat.

Di masjid ini tidak ada afiliasi kepada golongan apapun, seperti NU dan Muhamadiyah. Namun, amaliyah perbadatannya ada kecenderungan NU untuk di masjid Cahyaning Ati, dan amaliyah Muhamadiyah untuk di masjid Abdullah. Karena itu, warga Permata Jingga bisa masuk ke salah satu masjid di perumahan ini, apakah di masjid Abdullah ataupun di masjid Cahyaning Ati. Hal ini terlihat beberapa orang yang tinggal di wilayah/sekitar masjid Abdullah, tetapi jamaah kesehariannya berada di masjid Cahyaning Ati. Sebaliknya, ada beberapa orang

yang tinggal di sekitar masjid Cahyaning Ati, tetapi jamaah kesehariannya berada di masjid Abdullah. Kondisi semacam ini tidak hanya berlaku pada kegiatan salat Id (hari raya) baik Idul Fitri maupun Idul Adha.

Demikian juga, ketika terjadi pelaksanaan ‘kurban’, kedua pengurus masjid bersepakat untuk dilaksanakan secara bergantian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bondan, sebagai berikut:

“ Ketika terjadi pelaksanaan ibadah kurban, maka kedua pengurus mengadakan musyawarah untuk membentuk kepanitiaan pelaksanaan kurban itu. Hanya saja, tempat pelaksanaan selalu berganti-ganti. Misalnya, tahun ini pelaksanaan kurban dilaksanakan di masjid Abdullah, maka tahun berikutnya diselenggarakan di masjid Cahyaning Ati. Mereka saling membantu untuk pelaksanaannya, baik dalam penggalangan hewan kurban maupun penyembelihan dan pendistribusian dagingnya” (Wawancara dengan Bondan, tanggal 20 Juli 2019).

Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang baik dan saling membantu antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, para pengajar atau pemateri mempunyai peran yang sangat besar. Karena itu, para penceramah diharapkan tidak memberikan materi yang bisa memecah belah umat, seperti masalah *khilafiyah*. Akan tetapi, materi-materi yang menyejukkan karena warga permata jingga bersifat “heterogen”. Amaliyah bercorak Aswaja dengan 4 mazhab sehingga warga bisa memilihnya sendiri. Itulah sebabnya, pihak pengembang Permata Jingga menjembatani warga sesuai dengan pilihannya, sehingga mereka tidak melaksanakan aktivitas keagamaan ke luar lingkungan perumahan. Dengan begitu, pemahaman keagamaan warga masyarakat sangat “moderat”, sehingga ustaz-ustaz di dalamnya bersifat “moderat”.

Pandangan dan Sikap Keberagamaan

1. Pandangan dan Sikap terhadap Kelompok Keagamaan

Kelompok keagamaan yang berkembang pada masyarakat muslim terdiri atas beberapa kelompok, seperti NU, Muhammadiyah,

LDII, MTA, dan salafi. Akan tetapi, masyarakat kelas menengah muslim di Perumahan Permata Jingga hanya merespon terhadap kelompok keagamaan yang dipandang sesat oleh masyarakat, yakni Syiah dan Ahmadiyah. Hal ini disebabkan kedua kelompok keagamaan ini memiliki karakteristik paham sendiri-sendiri.

Kelompok Syiah dianggap memiliki beberapa ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran tersebut antara lain syahadatnya dan penolakannya terhadap para sahabat nabi. Baginya, Syiah memiliki tiga syahadat, karena menambah teks syahadat dengan lafadz *“wa anna Aliyyan waliyullah”* di belakang kalimat syahadatain. Jadi, syahadat dalam Syiah adalah *“Asyhadu an laa ilaa ha illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa Aliyyan waliyullah”*. Kalimat ini dibaca oleh Syiah ketika melaksanakan azan dan *iqamat*. Menurut Syiah, pada prinsipnya tidak mengakui tambahan lain atas teks syahadat sebagaimana ijmak kaum muslimin. Tambahan teks *“wa ‘Aliyyan waliyullah”* sama sekali tidak ditemukan dalam buku-buku rujukan Syiah. Bahkan, penambahan teks tersebut, sebagaimana yang dituduhkan kepada Syiah dalam azan dan *iqamat* adalah bidah menurut jumhur ulama Syiah. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dimasukkan dengan tidak sah dalam kitab-kitab Syiah. Kalaupun dibenarkan, hukum tambahan *“wa ‘Aliyyan waliyullah”* dalam azan adalah sama dengan hukum pendengar azan bershalawat ketika mendengar kata Muhammad disebutkan dalam bersyahadat (Tim ABI, 2012: 51).

Selain itu, Syiah dianggap menyelewengkan paham-paham yang sebenarnya karena secara umum adalah kelompok Syiah menolak Abu Bakar, Umar, dan sebagian besar sahabat Nabi Saw disertai sikap mengkafirkan dan mencaci mereka, karena diklaim bahwa para sahabat telah mengingkari dan menentang nash wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Dalam literatur Syiah, mengkafirkan dan mencaci sahabat tidaklah benar. Syiah hanya mengelompokkan sahabat Nabi ke dalam beberapa golongan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan hadis. Syiah meyakini bahwa diantara sahabat Nabi terdapat pribadi-pribadi yang agung, tetapi tidak berarti bahwa semua sahabat tidak ada yang ber-

buat salah. Bahkan, banyak sahabat Nabi SAW yang telah kembali murtad sepeninggal beliau sehingga melanggar *baiat* yang telah diberitakan kepada khalifah. Karena itu, siapa saja diantara sahabat Nabi yang selama hidup bersama-Nya, ikhlas dan terus menjaga Islam sesudah wafatnya, maka Syiah mengkategorikannya sebagai orang saleh (Tim Ahlulbait, 141).

Kelompok Ahmadiyah memiliki beberapa ajaran yang dianggap sesat, yaitu pengingkaran Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir (*khatamun nabiyyin*). Memang, sebagian Ormas Islam memandang bahwa Ahmadiyah adalah organisasi sesat karena mengingkari eksistensi Muhammad sebagai nabi terakhir. Pandangan semacam ini yang seringkali menimbulkan aksi kekerasan karena perbedaan paham di masyarakat. Sementara kelompok Ahmadiyah mengklaim sebagai bagian dari umat Islam melanjutkan praktik syariat Islam. Kedua pandangan ini tidak ada titik temunya sehingga menyebabkan konflik dan atau aksi kekerasan hingga saat ini. Aksi kekerasan semacam ini pada hakikatnya dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan tentang kesesatan aliran Ahmadiyah. Fatwa MUI pada tahun 1980 menyebutkan bahwa aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Alquran dan hadis.

Terhadap kelompok-kelompok keagamaan (Islam) lainnya, masyarakat Permata Jingga menganggap tidak masalah, seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII. Pada prinsipnya, mereka bisa menerima kelompok keagamaan apapun, asalkan tidak mengingkari (*takfir*) terhadap kelompok lain, sebab hal ini bisa menimbulkan perpecahan antara sesama umat Islam. Pemahaman semacam ini penting bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada fanatisme yang berlebihan. Sikap fanatisme di kalangan penganut agama-agama seringkali bertumpu pada sikap menganggap ajaran agamanya yang paling benar (*truth claim*), sementara agama-agama lain berada di luar jalur kebenaran, bahkan dianggap sesat (Komarudin Hidayat, 1998). Menurut Yusuf Qordhowi, fanatik kepada satu pendapat, tanpa menghargai pendapat orang lain termasuk sebagai sikap radikal. Selain itu,

beberapa indikator sikap radikal lainnya adalah 1). sikap keras dan kasar dalam bergaul, keras dalam metode dakwah, dan sebagainya; 2). Berburuk sangka kepada orang lain dengan memandangnya dengan kacamata hitam, selalu menuduh orang lain dengan keburukan-keburukannya; dan 3). Suka mengkafirkan orang lain, menggugurkan kesucian orang lain, menghalalkan darah dan hartanya (Yusuf Qordhowi, 2004: 38).

Terhadap kelompok non muslim sekalipun, antara lain jemaat Kristen dan Katolik, mereka juga tidak mempersoalkannya. Bahkan, terhadap antar kelompok etnis sekalipun tidak memperlmasalahkan, seperti etnis Cina. Hal ini terlihat pada warga Cina Muslim di Perumahan Permata Jingga yang hidup berdampingan dengan umat lainnya, seperti Arnold (mualaf). Dia adalah seorang China yang sedang “muallaf” karena baru masuk Islam sekitar 5 tahun yang lalu. Akan tetapi, isterinya adalah seorang muslimah yang konon anak kiyai dari Pontianak Kalimantan Barat. Karena itu, dia menjadi pengurus majelis taklim “khairun nisa’ Permata Jingga. Hal semacam ini juga dialami oleh Bondan, seorang pengusaha muda yang berstatus mualaf. Dia belajar mengaji Alquran dari nol.

Arnold, meskipun seorang mualaf dia memiliki semangat keagamaan yang tinggi karena ia aktif dalam kepengurusan masjid “Cahyaning Ati” dan rajin mengikuti jamaah dan kajian-kajian keagamaan di masjid ini. Salah satu kegiatan yang aktif diikutinya adalah belajar Alquran “Abata” atau “UMI”, semacam pelajaran “Iqro’ atau qiroati. tetapi lebih mendalam tajwid dan makhrojnya. Pengajian ini hanya diikuti oleh 5-6 orang yang berusia tua di serambi masjid. Dengan diawali dengan bacaan hafalan surat-surat pendek secara bergantian, kemudian dilanjutkan dengan bacaan metode Abata atau kitab UMI. Selain itu, dia juga memiliki jiwa sosial besar, karena ia seringkali membantu kegiatan keagamaan Islam, seperti pembangunan rumah ibadat, bahkan sebagai donatur tetap Masjid Cahyaning Ati dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Malang.

Pandangan terhadap Adat Budaya

Nuansa adat budaya lokal masih ada di Perumahan Permata Jingga. Dalam hal ini, masyarakat Perumahan Permata Jingga

memiliki prinsip bahwa tidak boleh mengikuti masalah kesyirikan atau sinkretisme keyakinan, seperti adat memakai ritual kembang-kembang, atau buang kembang-kembang di jalan sebagai sesaji. Akan tetapi, adat budaya yang tidak mencampur-adukkan dan bernilai Islami, maka diperbolekannya, seperti tahlilan dan yasinan. Hal ini terlihat pada adat kematian/jenazah di salah satu keluarga penduduk Perumahan Permata Jingga yang menyelenggarakan selamatan kematian dari hari pertama hingga hari ke tujuh. Demikian juga ketika ada hajatan pengantin, mereka juga mengundang para tetangga untuk membaca doa bersama, seperti tahlilan dan yasinan. Bahkan, di masyarakat terdapat kelompok tahlil dan yasin keliling dari rumah ke rumah oleh ibu-ibu majelis taklim “Khairun Nisa”. Hal ini tidak dilarang karena masing-masing memiliki landasan, bahkan dalam perspektif sosiologis hal semacam ini dapat dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kerukunan (*ukhuwah*), saling menghormati dan saling membantu antar sesama.

Hal semacam ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Heni sebagai berikut:

“... bahwa di Perum Permata Jingga masih ada tradisi lokal yang diterima oleh masyarakat, seperti tahlil, yasinan, solawatan atau rebana. Jika ada kematian, mereka mau datang ke tempat orang terkena musibah. Ketika ada pawai budaya, masyarakat banyak mengikuti di tingkat kelurahan. Bahkan, ada tradisi “Bersih Desa” yang diikuti oleh masyarakat Permata Jingga. Hal ini dikarenakan masyarakat ini ingin menjaga keguyuban, kebersamaan, dan kegotong-royonga” (Wawancara, tanggal 19 Juli 2019).

Jadi, masyarakat masih banyak yang melaksanakan tradisi-tradisi lokal, terutama ketika pindah rumah, kematian, dan atau hajatan keluarga. Dalam tradisi pindah rumah atau menempati rumah baru masyarakat seringkali mengundang jamaah tahlil atau yasin, bahkan tahfidz Alquran. Ketika seseorang terkena musibah kematian, maka masih melaksanakan tradisi *telung dino*, *mitung dino*, *matang puluh dino*, *nyatus* hingga *nyewu*. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar masyarakat berasal dari pedesaan dan keluarga NU.

Relasi Keagamaan Masyarakat Menengah Muslim

Relasi keagamaan masyarakat di Perumahan Permata Jingga ini tergolong baik. Hal ini terlihat hubungan masyarakat dengan pemerintah, hubungan masyarakat dengan masyarakat non muslim, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat sekitar. Dalam hubungan pemerintah, masyarakat Permata Jingga memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena penghuni Permata Jingga berasal dari berbagai kalangan, seperti: mantan-mantan pejabat pemerintah, PNS, Buruh Karyawan Swasta, Purnawirawan Polisi, Purnawirawan TNI, Dokter, mantan Bupati, mantan Walikota, dan Pengusaha.

Bahkan, di perumahan ini walikota seringkali memberikan kajian agama secara rutin pada setiap bulan dan ia juga seringkali membuka pertanyaan dengan cara dialog kepada mereka. Kemudian walikota merespon masukan-masukan mereka sebagai bahan kebijakan pemerintah Kota Malang. Selain itu, warga masyarakat senantiasa patuh terhadap aturan dan peraturan pemerintah, seperti membayar pajak, mengurus KTP, dan surat-surat lainnya. Bahkan, pemangku RT/RW juga aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti pawai budaya.

Hubungan masyarakat muslim di Perumahan Permata Jingga dengan masyarakat non muslim terlihat pada kegiatan halalbihalal dan *family gathering*. Halalbihalal diselenggarakan oleh lingkungan RW dengan cara mengumpulkan seluruh warga tanpa melihat agama apapun, termasuk agama Kristen, Hindu, dan Katholik. Terkadang, umat non Muslim pun menawarkan diri untuk membantu kegiatan keagamaan, seperti memberikan sedekah ramadhan yang berupa makanan. Dalam hubungannya dengan *family gathering*, warga masyarakat perumahan secara bergiliran dari RT ke RT. Dalam waktu tertentu, *family gathering* berada di wilayah RT 01, dalam waktu yang lain *family gathering* berada di wilayah RT 2, dan seterusnya. Kegiatan *family gathering* ini melibatkan semua warga tanpa membedakan status sosial maupun ekonominya.

Hal tersebut menunjukkan sikap toleransi yang sangat tinggi bagi warga masyarakat Perumahan Permata Jingga. Sikap toleransi umat beragama terlihat juga pada acara halalbihalal bersama yang diselenggarakan oleh warga masyarakat pada tingkat Perumahan

Permata Jingga. Menurut teorinya, toleransi terejawantah pada sikap membiarkan orang lain berbeda (tak acuh), sikap memahami dan menerima orang lain berbeda, dan sikap bekerjasama dengan orang lain yang berbeda (Mas'ud, , 2019: 316).

Masyarakat Perumahan Permata Jingga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti khitanan massal, *rehlah* atau tour kunjungan ke tempat-tempat tertentu. Masyarakat Permata Jingga setiap tahun menyelenggarakan khitanan massal kepada warga masyarakat sekitar. Pada tahun 2018, khitanan missal sebanyak 102 orang dari berbagai daerah di Kota Malang.. Program “*rehlah*” atau *tour* religi juga dilakukan ke beberapa daerah, terutama di Kota Malang. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali ditandai dengan program sumbangan pakaian pantas pakai oleh warga setempat. Hasil pengumpulan pakaian pantas pakai tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga super murah, dan hasilnya akan disumbangkan untuk bea siswa anak-anak panti asuhan atau masjid-masjid yang membutuhkan. Daerah sasaran ini berada di daerah tertinggal, yakni di Desa Sidoroyo, Kecamatan Dampir, Kabupaten Malang Selatan. Selain itu, sebagian hasil tersebut didistribusikan ke gunung Kawi, dan Tual Irian Jaya.

Kegiatan sosial ini juga terlihat pada kegiatan sesudah Bulan Ramadan, yakni membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu. Lebih dari itu, pembagian daging kurban juga dilakukan kepada masyarakat lingkungan sekitar pada saat Idul Adha. Bahkan, Yayasan Perumahan Permata Jingga juga menyediakan mobil Ambulans secara gratis untuk semua warga masyarakat Kota Malang, khususnya warga Perumahan Permata Jingga.

Pandangan terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan

Pada prinsipnya, warga masyarakat harus mengakui keunggulan nilai-nilai kebangsaan, seperti NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat hal ini dikenal sebagai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Jika salah satu pilar ini runtuh, eksistensi Indonesia pun terancam runtuh. Karena itu, fungsi sebuah pilar adalah sebagai tiang penyangga yang kekokohannya

akan sangat menentukan konstruk bangunan yang ditopangnya. Keempat pilar inilah yang menurut sejarahnya menjadi dasar eksistensi Indonesia yang majemuk (Masud, 2019: 312)

Semua hal tersebut harus dijunjung tinggi sehingga perlu penanaman nilai-nilai bangsa bagi seluruh masyarakat Indonesia. NKRI merupakan bentuk negara yang terdiri satu negara, yang hanya memiliki satu pemerintahan, satu kepala Negara, dan satu pusat kekuasaan. Masyarakat Permata Jingga memiliki wawasan untuk selalu mendahulukan kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dan integritas nasional. Karena itu, NKRI harga mati yang tidak diragukan lagi oleh anak bangsa. Hal ini terlihat pada masyarakat yang seringkali melibatkan kepada pemerintah, seperti mengurus perijinan, melibatkan lembaga RT dan RW untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat Permata Jingga mengakui dan meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945, yang keduanya merupakan landasan idiologi dan dasar Negara RI. Karena itu, semua warga Negara harus tunduk pada Pancasila dan UUD 1945 karena kesatuan dan kerukunan umat beragama akan terjamin apabila Pancasila dijadikan dasar Negara. Meskipun masyarakat tak pernah membahas dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka menerima sepenuhnya bahwa 'Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana kesepakatan para pemimpin bangsa terdahulu (*founding fathers*). Pengakuan ini akan berimbas kepada keutuhan NKRI sehingga diperlukan usaha semua elemen yang terus berkesinambungan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa dan menjadi kesepakatan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Sebagai semboyan Negara, Bhineka Tunggal Ika memiliki cakupan yang lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat istiadat), agama, dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara. Konsep Bhineka Tunggal Ika ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik dan multikultural. Prinsip pluralistik dan multikultural adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, dan keadaan daerah. Prinsip 'Bhineka Tunggal Ika' ini sebagai symbol heterogenitas bangsa, etnisitas, dan keberagaman. Oleh karena itu, masyarakat sepakat sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah, yakni tidak

akan mengubah ideologi Negara, dasar Negara Pancasila, dan UUD 1945 dengan dasar lainnya, misalnya Islam dan atau lainnya

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pilihan yang harus berlaku di Indonesia. Masyarakat elit perumahan Permata Jingga senantiasa mengikuti sistem demokrasi yang berjalan di negeri ini. Pelaksanaan demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebagaimana terlihat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, Daerah Tingkat I (Provinsi), dan Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Selain itu, juga ada Pemilu Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur), Pemilu Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota). Bagi masyarakat,

Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang patut didukung oleh semua warga Negara, dan karena itu Pemilu merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial, sebagai warga Negara. Hal ini terlihat pada Pilpres tahun 2019, yakni;

“... di kompleks perumahan elit ini pada Pilpres 2019 terdapat 3 TPS, akan tetapi hal ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, akan tetapi, kemenangannya sangat tipis, yakni sekitar 10 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas warga perumahan adalah berpendidikan tinggi atau kelompok berpendidikan. Mereka masih cinta dengan demokrasi dan NKRI, mereka tidak anti pemerintah. Hanya saja, suasana pendukung 01 dan 02 seringkali membuat statemen-statemen yang kurang mengenakan, seperti isu Komunis, khilafah, dan sebagainya. Hal semacam ini bisa mempengaruhi sikap dan pandangannya kepada pemerintah, seolah-olah “anti demokrasi” (Wawancara dengan Sugiyanto, tanggal 18 Juli 2019).

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Permata Jingga masih cinta tanah air di Indonesia. Mereka pada prinsipnya masih kuat dengan demokrasi di Indonesia, yang mendasarkan pada asas musyawarah sebagaimana dalam pemilihan presiden dan lembaga legislatif (Pilpres dan Pileg) tahun 2019. Bagi warga masyarakat Permata Jingga, Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang patut didukung oleh semua warga Negara, dan karena itu Pemilu merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial, sebagai warga Negara.

Simpulan

Moderasi beragama bagi masyarakat kelas menengah muslim di Perumahan Permata Jingga Kota Malang termasuk cukup baik. Di perumahan ini, tidak ada warga masyarakat yang anti NKRI, anti Pancasila, dan UUD 1945, serta demokrasi. Hal ini dikarenakan warga masyarakat menengah muslim sebagian besar berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan ekonomi yang sudah mapan, baik dari segi pekerjaan maupun penghasilannya. Di kawasan ini, sebagian besar masyarakat kelas menengah muslim bekerja sebagai pengusaha, tetapi banyak para warga masyarakat muslim yang berprofesi lain, seperti: pejabat dan atau mantan pejabat, anggota legislatif, para dosen, purnawirawan Polisi dan TNI, bahkan, mantan para pejabat pemerintah maupun BUMN. Semuanya adalah orang-orang yang sudah mapan idiologinya, yakni setia pada Pancasila dan UUD 1945.

Keberagamaan masyarakat muslim di daerah ini tergolong moderat, karena paham keagamaannya sebagaimana yang dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah. Hal ini terlihat pada praktek ibadah, seperti Salat Subuh yang sebagian menggunakan doa qunut dan sebagian tidak menggunakannya. Bahkan, mereka memiliki tradisi “unik” pasca salat berjamaah, terutama Salat Maghrib dan Salat Subuh. Dalam tradisi ini, mereka berkumpul dan mengobrol bersama tanpa membedakan status sosial mereka. Bahkan, mereka yang berbeda paham keagamaan pun bisa berbaur dalam sebuah arena, seperti NU, Muhammadiyah, dan Salafi.

Masyarakat kelas menengah muslim pada prinsipnya bisa menerima kelompok keagamaan apapun, asalkan tidak mengkafirkan (*takfir*) terhadap kelompok lain. Pemahaman semacam ini penting agar masyarakat tidak terjerumus pada fanatisme yang berlebihan. Sikap fanatisme di kalangan penganut agama-agama seringkali bertumpu pada sikap menganggap ajaran agamanya yang paling benar (*truth claim*), sementara agama-agama lain berada di luar jalur kebenaran. Oleh karena itu, sikap toleransi warga masyarakat sangat tinggi yang terlihat pada kegiatan halalbihalal bersama dan *family gathering* yang melibatkan semua warga tanpa membedakan suku, ras, dan agama apapun.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis*. Jakarta : Rajawali Press.
- Din Syamsudin, 2018. Sepuluh Prinsip Islam Wasathiyah. Dalam <http://https://gorontalo.antaranews.com/berita/50712/din-syamsudin-ada-10-prinsip-islam-wasathiyah>, diunggah 2 Agustus 2019
- Hanapi, Mohd Shukri. 2014. The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Sosial Science*. 4 (1): 51-62
- Hasan, Ismail dan Naipospos, Bonar Togor. 2010. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Horton, Paul B., Hunt, Chester L. 2006. *Soosiologi, Jilid 2, terj. Aminuddin Ram*. Jakarta : Penerbit Eirlangga
- John, M. Echols dan Hasan Sadily. Tth. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakaarta: Penerbit Gramedia pustaka Utama
- Kamali, Mohammad Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam*. New York: Oxford University Press
- Masud, Abdurrahman. 2019. *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat*. Jakarta: Pustaka Compas.
- Pitirin A. Sorokin. 1974. *Sosial Stratification, dalam Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI
- Pratama, Lulu Syifa dkk. 2017. Variasi Pemahaman Keagamaan Mahasiswa IAIN Surakarta. *Academika*. 1 (1): 113-125
- Raho, Bernard. 2007, *Teori-Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

- Setiawan, Bambang. 2012. *Siapa Kelas Menengah Indonesia*. Dalam [http:// https://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia?page=all](http://https://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia?page=all), diunggah tanggal 27 Agustus 2019.
- Solihat, M. dkk (ed). 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Pustaka Citasendo
- The Wachid Institute, 2014. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi*. Jakarta: The Wachid Institute dan The Body Shorp.
- Yusuf al-Qardhawi. 2018. *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Zakiyah, 2019. Moderasi Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta. dalam *Jurnal Harmoni*. 18(2): 28-50

NILAI-NILAI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN MASYARAKAT MENENGAH MUSLIM DI KOTA SURAKARTA

Lilam Kadarin Nuriyanto

Pendahuluan

Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami booming warga kelas menengah. Warga Kelas Menengah mempunyai peran penting terhadap publik karena mereka adalah aktor perubahan sosial. Kelompok ini mempunyai modal tertentu yang digunakan sebagai agen perubahan. Meminjam istilah Bourdieu (1994), kelas menengah itu memiliki kapital atau modal, sekurangnya empat modal, yakni: modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Kelas menengah, menurut Kharas (2010), memiliki gagasan-gagasan baru, akumulasi modal fisik, dan modal sumber daya manusianya itu sendiri. Kekuatan modal demikian itu digunakan oleh kelas menengah sebagai sarana untuk melakukan akselerasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kekuatan kapital (modal) yang demikian itu digunakan oleh kelas menengah sebagai sarana untuk melakukan akselerasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pasca Reformasi, jumlah kelas menengah Muslim mengalami peningkatan hingga hari ini, apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan secara stabil (Ridho, 2017: 88-89).

Pada era Reformasi, Kelas Menengah Muslim lebih mudah mengekspresikan identitas keislamannya dibanding pada zaman Orde Baru. Praktik bisnis dan barang-barang yang berlandaskan pada syariah digemari dan diburu oleh mereka. Dengan mudahnya kita menjumpai gerai-gerai busana Muslim, bank syariah, sekolah-sekolah beridentitas Islam yang berbiaya tinggi, tayangan sinetron “Islami”, salon, pegadaian, hingga hotel yang berlabel syariah (Fealy and White, 2008). Hal ini ini dikarenakan agama, sebagaimana Geertz (1992) katakan, telah membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku (Ridho, 2017: 89). Pada umumnya, kelas menengah muslim Indonesia tumbuh karena dua sumber: intelektualisme dan borjuasi. Intelektualisme menandai adanya transformasi pemikiran Islam yang serba ortodoks dan puritan menjadi kritis. Sedangkan borjuasi menandai adanya pergeseran basis ekonomi yang semula bercorak agraris menjadi tergantung pada jasa, perdagangan, maupun birokrasi (Jati, 2016: 375).

Kelas menengah muslim di Surakarta sampai saat ini masih mencari identitas dan terus berupaya membangun eksistensi dan representasi politis melalui upaya “beradaptasi” dengan modernitas. Peran mereka dalam politik informal justru lebih aktif sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Selain itu, keberadaan mereka juga menjadi agen perubahan sosial politik di Indonesia. Mereka senang dengan simbolisasi Islam yang dinilainya sebagai bagian dari soliditas kelompok dalam kesehariannya. Agama dimaknai sebagai identitas.

Mereka memiliki keamanan dalam hal ekonomi, politik dan pendidikan, serta komunikasi sosial. Keberadaan mereka juga semakin dipermudah dengan keberadaan IT. Konten-konten keagamaan untuk *tafaqquh fidin* (mendalami agama) terkadang diproduksi untuk kemudian dibagikan melalui media sosial. Mereka adalah kelompok intelektual karena secara pendidikan mampu mengkonstruksi sebuah gagasan. Melalui media sosial mereka menemukan doa, penggalan ayat, hadits, teks, gambar, jilbab, pengajian, akidah, maupun video yang mendorong gairah beragama mereka secara massif. Di sisi lain, muncul kecenderungan untuk membangkitkan eksklusivisme dalam beragama, yaitu keharusan pemimpin beragama Islam dan aksi

bela Islam. Di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, keberadaan dan semangat berislam mereka semakin menguat dengan pesatnya penerbitan buku-buku Islami, majalah, tabloid, pamflet, dan selebaran yang bernafaskan Islam, serta maraknya pesantren baru.

Masyarakat menengah muslim banyak yang berasal dari kalangan pengusaha. Mereka melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang, yang paling populer adalah perdagangan. Kelompok ini disebut berwirausaha, karena wirausaha tidak bergantung kepada pihak lain, sebagaimana pegawai negeri atau pegawai lainnya. Wirausaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disamakan dengan wiraswasta, sedangkan wiraswasta diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Menurut Joseph C Schumpeter, wirausaha adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar dan kemudian membentuk keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Wirausaha merupakan inovator yang tidak selalu menjadi inventor (penemu). Sedangkan menurut Peter F Drucker, adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) (Zakky, 2018).

Ada beberapa pengertian wirausaha lain yang dikemukakan para ilmuwan, namun pada intinya kewirausahaan adalah sikap berani dalam mengambil resiko yang terjadi pada usahanya dan mengembangkan daya kreativitasnya dalam mengkombinasikan perubahan-perubahan baru di pasar. Dengan adanya pola pengembangan ini maka menjadikan manusia berpikir dan berusaha melakukan perubahan dalam hidup. Hal ini merupakan perintah Allah di dalam Alquran :

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"(Ar-ra'd : 11)

Seiring perkembangan zaman, usaha bisa dilakukan secara *offline/ konvensional* maupun *online*. Maraknya dunia usaha terutama bidang perdagangan tidak bisa hanya dilihat dari sektor real atau transaksi secara konvensional. Transaksi lewat jaringan maya juga beromset besar sekali, Riset Google dan Temasek dalam laporannya e-Conomy SEA 2018 menyatakan Gross Merchandise Value atau GMV industri e-commerce di Asia Tenggara mencapai US\$ 23,2 miliar atau setara Rp 336,4 triliun (asumsi rupiah Rp 14.500 per dolar AS) di tahun 2018. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan angka tersebut meningkat 114 persen dibanding tahun 2017 yang hanya US\$ 10,9 miliar. “GMV e-commerce di Indonesia sendiri pada tahun 2018 ini besarnya US\$ 12,2 miliar (Kartika Anggraeni, 2018).

Keberadaan masyarakat menengah muslim dalam konteks kebangsaan juga menjadi hal yang perlu didiskusikan. Posisi kelas menengah di masyarakat sangat strategis, karena pada umumnya memiliki pengaruh besar bagi masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum melihat Islam sebagai agama di ruang publik dan menjadi *reason public*, yang tidak perlu mengeklusifkan diri, berbaur di tengah pluralitas, kemajemukan dan demokrasi kebangsaan.

Fenomena masyarakat kelas menengah muslim, meskipun masih sedikit, mulai dibahas dalam hasil-hasil penelitian. Penelitian Edi Sutrisno menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk dari sisi suku, ras dan agama, sehingga diperlukan toleransi dalam memahami semua perbedaan yang ada. Penerapan moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural merupakan jalan tengah dalam menghadapi perbedaan baik kelompok ekstrem maupun fundamental. Pendidikan menempati posisi penting dalam penerapan moderasi beragama di masyarakat multikultural. Lembaga pendidikan dapat menjadi basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosio-religius dalam beragama dan bernegara (Sutrisno, 2019).

Edi Junaidi menyebutkan bahwa tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan sebagai “Hari Moderasi Beragama”, bersamaan dengan momen peluncuran buku “Moderasi Beragama”, yang berada di bawah Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Lukman Hakim Saefuddin (LHS),

Menteri Agama saat itu, meninggalkan warisan konseptual pada akhir masa jabatannya. Penyusunan buku ini merupakan bentuk respons Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terhadap seruan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan untuk menyusun buku yang dapat menjadi rujukan terkait moderasi beragama (Junaedi, 2019).

Agus Susanto mengambil fokus pada peran Kepala KUA dalam membangun moderasi beragama di Kabupaten Majalengka. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methodology*), dan disertasi dengan penggunaan analisis SWOT. Ia menyimpulkan bahwa peran kepala KUA dalam membangun moderasi beragama di Kabupaten Majalengka relatif baik dan harus dipertahankan karena mempunyai potensi yang sangat besar untuk kemaslahatan publik. Keberadaan faktor-faktor internal dan eksternal pada dasarnya menjadi dukungan yang sangat besar bagi peran kepala KUA (Susanto, 2019).

Tulisan lain adalah artikel yang ditulis oleh Uup Gufron. Artikel Gufron bertujuan untuk mengetahui corak pemahaman moderasi beragama keluarga muallaf Tionghoa yang berada dalam binaan Masjid Lautze Pasar Baru Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan penelitian, para muallaf Tionghoa menjadi muslim dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yakni (1) faktor spiritualitas; (2) faktor rasionalitas; dari (3) faktor identitas. Faktor spiritualitas lebih dominan dibanding faktor lain, sehingga pemahaman moderasinya lebih mengedepankan perasaan kasih sayang, kelembutan hati, cinta-kasih, dan saling menghormati. Corak moderasi yang dimiliki para muallaf binaan Masjid Lautze dipengaruhi oleh sosok tokoh muslim etnis Tionghoa bernama Haji Karim Oei, yang merupakan tokoh Muhammadiyah yang memiliki pemahaman yang modernis (*tajdidi*), pembauran (*istif'ab*), dan moderat (*tawāsuth*), bersikap toleran (*tasamuh*); dan tidak ekstrim atau *tatharruf* (Gufron, 2019).

Penelitian senada dilakukan oleh Ananda Zhafira, dengan metode analisis kuantitatif. Penelitian Zhafira bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas Islam dan intoleransi politik dan efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan dua variabel tersebut. Ia menggunakan responden mahasiswa muslim di Indonesia sebanyak 841 yang dijangkau secara daring. Hasil penelitian Zhafira menunjukkan bahwa religiusitas Islam

berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Sementara itu, kepercayaan politik tidak berkontribusi sebagai moderator terhadap hubungan religiusitas Islam dan intoleransi politik (Zhafira, 2017).

Reduksi dari kelima penelitian diatas adalah dimana pembentukan sikap moderasi bisa lewat lembaga pendidikan, hal ini didukung oleh Kementerian Agama beserta jajarannya. Moderasi lebih mengemukakan faktor spiritual dengan bentuk kasih sayang, kelembutan hati, cinta-kasih, dan saling menghormati. Sehingga bila moderasi dikaitkan dengan bidang politik akan tetap terjaga bila sikap religiusitas seseorang berpandangan secara positif. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas dari sisi lain dari penelitian sebelumnya, yaitu moderasi beragama dikalangan masyarakat menengah muslim di kota Surakarta dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan praktik moderasi beragama, sikap keagamaan sampai wawasan kebangsaan.

Hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat beragama. Saat ini moderasi beragama menjadi aspek penting dalam “mantra” Kementerian Agama seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama pada rapat kerja nasional tahun 2019. Dalam hal ini Menteri Agama berharap moderasi dapat mempengaruhi pikiran, ucapan dan tindakan masyarakat beragama sehingga masyarakat bisa menjadi lebih toleran. Maka dari pemikiran diatas maka artikel ini akan membahas tentang Nilai-Nilai Pendidikan Non Formal Dalam Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim di Kota Surakarta. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah: Nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam pandangan, sikap, dan aktifitas keagamaan masyarakat menengah pengusaha muslim di Kota Surakarta.

Kerangka Pemikiran

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan *al-Wasathiyah* *al-Islamiyyah*. Al-Qaradawi dalam Amin Abdul Rauf (Amin, 2014: 24-25), menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, yaitu: *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul* dan *istiqamah*. Sementara dalam bahasa Inggris, moderasi Islam disebut dengan *Islamic Moderation*. Moderasi Islam merupakan pandangan untuk bersikap ditengah-

tengah dari dua sikap yang saling berseberangan. Muslim moderat adalah orang yang menilai sesuatu secara tidak berlebihan terhadap dua hal yang berseberangan. Namun karena manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan moderasi secara penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal itu.

Wahbah Zuhaili, dalam Amin Abdul Rauf (Amin, 2014: 25), misalnya, mengartikan moderasi Islam sebagai keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain.

Gerakan moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama menemukan momentumnya dalam rangka membentuk cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Menariknya, ternyata semua agama yang diakui di Indonesia juga mengenal ajaran moderasi beragama. Dalam Islam, konsep *washatiyah* (moderat) memiliki padanan kata *tawassuth* (tengah tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam Alquran, kata *wasath* disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat: 143. Kata *wasath* dalam ayat tersebut bermakna “terbaik dan paling sempurna.”

Hashim Kamali, menegaskan bahwa kata *moderate* tidak dapat dilepaskan dari dua kata kunci lainnya, yakni berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Moderat bukan berarti kita kompromi dengan prinsip-prinsip pokok (*ushuliyah*) ajaran agama yang diyakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain karena moderat berarti “... *confidence, right balancing, and justice*...” Tanpa keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama akan menjadi tidak efektif. Dengan demikian, moderat berarti masing-masing tidak boleh ekstrem di masing-masing sisi pandangnya dan harus saling mendekat dan mencari titik temu (Sutrisno, 2019: 323-328).

Istilah pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* yang mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa

Yunani, yaitu '*Paedagogie*', yang terdiri dari *pais* berarti anak dan *again* yang berarti membimbing, jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan (Mawarti, 2017: 72-73).

Adapun istilah *tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu: pertama kata *robba-yarbu* yang berarti *zada wa nama* atau (bertambah dan tumbuh), seperti terdapat dalam Alqur'an Surat Ar Rum 39. kedua, kata *robiya-yarubbu* dengan mengikuti *wazan mada yamuddu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara. Ketiga, merujuk pada *mufrodad al fadz* Alquran kata *tarbiyah* merupakan akar kata *robb* yang berarti mengembangkan sesuatu. Kata *tarbiyah* itu sendiri mengandung empat unsur nilai, yaitu: 1) menjaga dan memelihara fitrah manusia; 2) mengembangkan seluruh potensi; 3) mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan ; 4) dilaksanakan secara bertahap. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tarbiyah* (pendidikan) merupakan usaha mengembangkan seluruh potensi anak didik secara bertahap menuju kesempurnaan (Mawarti, 2017: 72-73).

Moderasi selalu berhubungan dengan toleransi yang merupakan satu sikap dalam menghargai perbedaan dan kerja sama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keberagaman. Dalam pendidikan Agama Islam, Pendidikan toleransi adalah tercermin pada 4 (empat) isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan toleransi, yaitu : Pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); Kedua, kesatuan kenabian; Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama; dan Keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain. (Mawarti, 2017).

Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya wawancara secara mendalam yang terkait dengan sikap keberagaman, nilai-nilai kebangsaan, dan aktifitas serta jejaring masyarakat menengah pengusaha muslim. Wawancara dilakukan dengan pengusaha muslim, tokoh agama dan masyarakat, majelis taklim, takmir masjid, dan ormas keagamaan.

Data dikumpulkan pula melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai moderasi beragama masyarakat pengusaha muslim menengah dalam konstelasi kebangsaan. Data ini akan ditelusuri melalui dokumen tertulis berupa buku-buku, artikel jurnal, dan pemberitaan media massa.

Data juga diperoleh dari observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat menengah pengusaha muslim. Dari pengamatan yang dilakukan ini diharapkan akan diketahui tentang sikap keberagaman dan kebangsaannya.

Terakhir data didapatkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber lapangan yang mengetahui tema penelitian. Proses FGD dilakukan dua kali di masing-masing lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai peta keberagaman masyarakat menengah pengusaha muslim di Surakarta.

Lokus penelitian ini memilih Kota Surakarta berdasarkan beberapa kriteria, yaitu; merupakan kota besar, terdapat masyarakat menengah muslim terutama dari kalangan pengusaha muslim, dan terdapat beragam kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, Kota Surakarta sangat dikenal dengan gerakan sosial keagamaan yang sangat kompleks, dimana semua warna kelompok keagamaan ada.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sosial Keagamaan Kota Surakarta

Kota Surakarta lebih dikenal oleh orang luar daerah tersebut dengan sebutan Kota Solo. Mereka menyebut nama Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sragen juga dengan sebutan Solo. Perantauan menyebut dirinya “Orang Solo”. Nama-nama perkantoran yang berada di luar Kota Surakarta (masuk Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) memakai nama “Surakarta”, seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS); IAIN Surakarta, Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Hal ini merupakan sebutan antara geografis dan sosial, sehingga penyebutan Solo Raya merupakan penyebutan secara sosial.

Sosial Keagamaan Kota Surakarta menurut BPS Propinsi Jawa Tengah tahun 2018 jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 451.872, Agama Kristen 78.756, Agama Katolik 40.812, Agama Hindu 4.642, dan Agama Budha 1.000. Sedangkan jumlah tempat ibadahnya yaitu Masjid sebanyak 665 buah, Surau/Mushola sebanyak 410 buah, Gereja Katolik sebanyak 6 buah, Gereja Kristen sebanyak 191 buah, Vihara/Klenteng sebanyak 8 buah, dan Pura sebanyak 3 buah.

Persoalan keagamaan di Surakarta tidak berdiri sendiri, melainkan sering dipengaruhi oleh pihak-pihak di sekitar Kota Surakarta (Solo Raya). Banyak masyarakat di luar Kota Surakarta melakukan aktifitas sosial-keagamaan di Kota Surakarta. Padahal keberadaan para aktifis sosial keagamaan itu banyak yang berdomisili di luar atau di sekitar Kota Surakarta. Kota Surakarta dijadikan panggung aksi dengan melibatkan massa yang banyak, seperti demo mensikapi terhadap isu sosial keagamaan tertentu baik yang bersifat nasional maupun global.

Hubungan antar umat beragama secara umum baik, yang sering menjadi permasalahan adalah masalah pendirian rumah ibadah. Ada contoh-contoh hubungan antar umat beragama yang baik dalam hal keberadaan rumah ibadah (Gereja dan Masjid yang letaknya berdampingan atau berseberangan berhadap-hadapan) (Nuriyanto, 2015, 2017). Pengelolaan tempat ibadah tetap berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu walaupun letaknya saling berdekatan, seperti antara Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Mas Al Hikmah yang letaknya berdampingan. Dimana setiap Hari Idu Fitri dan Idul Adha, diadakan sholat Ied dengan memanfaatkan jalan raya yang berada di depan kedua tempat ibadah tersebut. Bila sholat Ied jatuh pada hari minggu, maka kebaktian di gereja diundur sampai selesai sholat Ied, atau pada siang hari. Bahkan saat Idul Adha di depan pagar gereja dijadikan tempat untuk menempatkan hewan kurban. Bila saat Idul Adha jatuh pada hari Minggu, maka pelaksanaan kebaktian diundur sampai selesainya proses rangkaian penyembelihan hewan kurban.

Para pengusaha Kota Surakarta dalam lintasan sejarah memberikan kontribusi yang besar dalam pergerakan perjuangan maupun perpolitikan baik tingkat nasional maupun lokal. Sebagai salah satu kota Kerajaan Jawa, Solo kala itu adalah metropolitan tempat

tradisionalisme berbaur dengan modernisasi. Para pangeran dari Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran adalah penikmat pertama pendidikan dan modernisme Eropa. Bersama komunitas priyayi rendah dan para haji revolusioner, mereka kemudian ikut aktif dalam berbagai organisasi pergerakan yang tumbuh di Surakarta. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang tumbuh di Surakarta. Organisasi yang dianggap pelopor era kebangkitan nasional Indonesia itu membuka cabangnya di kota tersebut pada 1909. Sarekat Islam tampil sebagai generator pergerakan nasionalis di Surakarta. Organisasi ini awalnya tumbuh dari Rekso Rumecko, organisasi ronda bentukan para pengusaha batik Laweyan. Haji Samanhudi, seorang saudagar batik senior, adalah pemimpinnya yang pertama. Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi kuat di bawah pengaruh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Kiprahnya dimulai ketika ia membantu reorganisasi SI pada September 1912. Sejak itu, SI terus membuka cabang-cabang baru hingga pada awal 1913 sudah memiliki 15 cabang dengan anggota sekitar 80.000 orang (Fadrik Aziz Firdausi, 2019).

Berdasarkan dari sejarah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengusaha memberikan kontribusi yang besar dalam suatu kawasan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan perekonomian merupakan penopang sebuah kehidupan. Dimana penggerak perekonomian adalah para pengusaha.

Kota Surakarta yang mempunyai julukan kota batik, sesuai dengan perkembangan dalam sejarahnya, masih lekat sampai sekarang. Sejarah batik di Kota Surakarta berkaitan dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan Kampung Laweyan. Berawal dari perjanjian Giyanti tahun 1755, dimana seluruh busana kebesaran Kerajaan Mataram dibawa ke Keraton Yogyakarta. Sehingga PB III memerintahkan kepada para abdi dalem untuk membuat sendiri motif batik Gagrak Surakarta. Kemudian masyarakat berlomba-lomba untuk membuat corak batik, sehingga muncul banyak motif batik yang berkembang di masyarakat. PB III pun mengeluarkan peraturan tentang kain batik yang boleh dipakai di dalam keraton. Surakarta sendiri memiliki lebih dari 30 corak batik khas, dan industri pertama batik di Surakarta bertempat di Laweyan (Anisah and Dharma Tohjiwa, 2016: 62).

Sampai sekarang Kota Surakarta masih merupakan pusat perdagangan Batik. Pusat perdagangan batik berada di Pasar Klewer dan Beteng Trade Centre (BTC), dan Pusat Grosir Solo (PGS). Selain itu juga ada di Kawasan Kampung Lawean yang merupakan sentra batik sejak jaman dahulu. Semua tempat tersebut merupakan pusat kegiatan penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Perdagangan secara tidak langsung inilah yang mengalami perkembangan yang pesat sekali, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi internet. Perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, baik yang sudah lama berkecimpung dalam dagang maupun pelaku baru. Hal ini bisa juga memunculkan kalangan menengah baru, dimana mereka tadinya hanya sebagai pekerja atau pelayan di toko-toko batik. Setelah mengetahui seluk beluk perdagangan batik, kemudian beajar untuk mandiri. Termasuk didalamnya dilakukan oleh para mahasiswa yang berdagang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sehingga bila melihat perdagangan batik secara konvensional (secara langsung beli ditoko) terlihat sepi atau biasa saja, maka belum bisa disimpulkan bahwa perdagangan batik sedang lesu. Hal ini disebabkan perdagangan secara online sangat besar sekali nilainya. Hal ini disampaikan oleh salah satu peserta FGD sebagai berikut:

“..... akibat dari perkembangan teknologi komunikasi maka banyak sekali yang mendadak menjadi masyarakat menengah, karena yang tadinya hanya pegawai di toko (batik di klewer dan beteng), setelah ikut jualan online lewat HP menjadi juragan semua. Termasuk para mahasiswa banyak juga yang menjadi kaya setelah berdagang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Kalau sampai ada yang mengatakan ekonomi lesu, menurut saya itu keliru. Kalau melihat toko sepi, itu hanya penjualan secara langsung atau konvensional, tetapi kalau mau melihat di jasa pengiriman, maka tidak ada nanya ekonomi lesu. Jadi ekonomi jalan dan menurut saya sangat bagus sekali. Bahkan ada kenalan saya dimana saat mulai bisnis yang mengajari istri saya, sekarang ngeri sekali rumahnya besar sekali....”(AK, politikus dan pedagang batik, FGD tanggal 20 Juni 2019, RM Bakso Kadipolo Kota Surakarta)

Pandangan dan Sikap Keberagamaan Masyarakat Menengah Pengusaha Muslim

Pengusaha merupakan salah satu bagian dari masyarakat menengah muslim dimana secara materi pada umumnya sudah terpenuhi. Kebutuhan menurut teori Maslow yaitu Hirarki Kebutuhan Manusia (*Maslow's Hierarchy of Needs*) bahwa manusia berusaha memenuhi tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya muncul, begitulah seterusnya (Ujang Sumarwan, 2003: 38). Sehingga para pengusaha akan mencari kebutuhan sosial lainnya misalnya berwisata lewat biro wisata, ibadah umroh dan kebutuhan spiritual lainnya seperti yang diungkapkan oleh Maslow.

Pemenuhan kebutuhan spiritual bagi pengusaha diwujudkan dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun lewat filantropi. Kegiatan keagamaan yang paling banyak diikuti adalah menyelenggarakan pengajian baik secara perseorangan maupun kelompok. Para pengusaha ada yang tergabung dalam HIPMI, KADIN, APINDO dan lain-lain. Pengajian secara kelompok ini bukan merupakan program khusus organisasi tetapi hanya kegiatan yang diselenggarakan secara bersama. Kegiatan filantropi antara lain berbagi terhadap sesama, serta keikutsertaan dalam pembangunan tempat ibadah masjid.

Ada beberapa pengusaha mengadakan kelompok pengajian yang dikelola dengan baik dengan membentuk sebuah yayasan. Kemudian yayasan tersebut bergerak dibidang pendidikan dari tingkatan PAUD/TK sampai dengan SMA. Lembaga pendidikan ini termasuk sekolah favorit di Kota Surakarta.

Para pengusaha yang tergabung dalam kelompok kegiatan sosial keagamaan ini tidak bergerak dibidang politik, tetapi mempunyai kecenderungan ke arah politik tertentu. Saat pagelaran Pemilihan Presiden 2019 peran pengusaha terlibat didalamnya. Mereka yang mau terlibat didalamnya bertindak sebagai pendukung capresnya dengan menjadi tim sukses, misalnya sebagai penyandang dana. Dukung mendukung ini ada yang membentuk perkumpulan ter-

tentu, kemudian mengadakan kegiatan keagamaan misalnya pengajian.

Amaliyah harian keagamaan para pengusaha seperti umat muslim lainnya yaitu menjalankan rukun Islam dan iman sesuai perintah agama. Mereka ber-Islam secara umum saja yaitu sholat, puasa senen kamis, dan pengajian umum. Amaliyah harian tersebut secara umum mengacu pada NU dan Muhammadiyah. Selain itu setelah masa reformasi pengaruh amaliyah keagamaan ada juga paham transnasional yang berasal dari Timur Tengah.

Para masyarakat menengah muslim ada juga yang bergabung dalam kelompok keagamaan tertentu seperti NU dan Muhammadiyah, serta kelompok yang masuk dalam kelompok transnasional. Kelompok-kelompok keagamaan ini membangun kekuatan kelompoknya dengan membentuk amal usaha tertentu, seperti yang bergerak dijalur ekonomi (BMT syariah, Koperasi Syariah) dan lembaga pendidikan.

Di beberapa daerah di sekitar Surakarta (Solo Raya) antara NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen mengadakan pertemuan rutin. Agenda ini diinisiasi tokoh-tokoh agama tingkat kabupaten, sudah berjalan lebih dari satu kali. Sedangkan di Kabupaten Karanganyar tempatnya di kecamatan Mojogedang pernah diadakan pengajian empat kelompok keagamaan, yaitu MTA, LDII, Muhammadiyah, dan NU. Pengajian bergantian tempatnya, ustad yang diundang juga bergantian, jamaah yang hadir mencapai sekitar 3000 (wawancara dengan Mstn, Juli 2019).

Masyarakat menengah muslim dalam beragama terpengaruh seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Masyarakat sangat dekat dengan kebutuhan informasi yang bersumber dari internet dan media sosial. Demikian juga dalam beagama, umat Islam dipengaruhi oleh tekonologi dunia maya, seperti dalam pemilihan sumber pengetahuan keagamaan. Seperti temuan dari sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa adanya ketergantungan siswa dalam penggunaan smartphone, dalam satu hari siswa minimal menghabiskan waktu 4 jam lebih untuk berselancar di media sosial; umumnya siswa menyukai tausiyah dari para ustad atau ulama yang dikaguminya. Antusiasme siswa belajar agama dari para ustad pilihannya di media sosial ini, terkadang juga dilandasi oleh

kekaguman yang berlebihan dan bahkan cenderung pada kultus individu (Hatta, 2019).

Agama selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat menjalankan segala perintah Nya dan menjauhi segala larangan Nya, sekarang difungsikan juga sebagai identitas. Penampakannya dalam beragama di wujudkan dalam cara berpakaian, bukan hanya menutup aurat sebagaimana perintah agama tetapi juga sebagai gaya tren dalam berbusana. Usaha pemunculan agama sebagai identitas kemudian bergeser menjadi bersifat keduniawian, walaupun didalam dirinya bermaksud menjalankan perintah agama.

Kini ada Hijaber mom Community (HmC) di Solo Raya. Kegiatan mereka selain berpakaian secara *syar'i*, adalah mengadakan pengajian. Pengajian itu disertai dengan kegiatan arisan yang diselenggarakan di hotel, rumah makan, atau di rumah salah satu anggotanya. Selain pengajian, HmC menyelenggarakan piknik bersama ke luar daerah atau umroh bersama. Komunitas HmC mengalami transformasi dari sekedar forum untuk bersosialisasi menjadi komunitas pengajian dan menjadi lebih peduli terhadap agama.

Masyarakat menengah muslim mengikuti pengajian umum bertujuan untuk menambah pengetahuan keagamaan. Pengajian yang terbuka secara umum akan didatangi oleh semua umat muslim. Pengajian yang membawa warna kelompok tertentu akan didatangi oleh umat muslim yang menjadi pengikutnya. Hal ini bisa misalnya bisa terlihat dari kelompok mana ustad yang mengisi pengajian, atau penyelenggara pengajian dari kelompok keagamaan tertentu.

Pandangan masyarakat menengah muslim terhadap kelompok lain, misalnya pandangan terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah merupakan kelompok di Islam yang dipandang dengan dua asumsi, yaitu masih menjadi bagian dari Islam dan sudah diluar agama Islam. Antara keduanya saat berada di masyarakat lebih jelas Ahmadiyah keberadaannya dibandingkan dengan Syiah. Ahmadiyah secara tegas menampilkan dirinya sebagai Ahmadiyah, sedangkan Syiah lebih cenderung tidak nampak sehingga sulit untuk mengatakan seseorang itu Syiah atau bukan. Syiah itu bermacam-macam, sehingga sering dijadikan tuduhan terhadap kelompok lawan yang tidak sesuai dengan pendapat pribadi maupun kelompoknya. Adanya pandangan ini sehingga perlu dibuka ruang dialog yang lebih jauh lagi ketika memepersoalkan tentang hal ini.

Pandangan masyarakat menengah muslim terhadap non muslim antara lain: umat Islam harus bersikap adil selama mereka baik terhadap umat muslim, maka juga harus dibalas dengan kebaikan pula; pandangan terhadap ucapan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain ada yang perbedaan, ada yang setuju dan tidak setuju; dan pandangan dalam memberikan salam saat menyampaikan pidato juga ada perbedaan, ada yang setuju dan tidak setuju. Ada pengertian bahwa salam dalam agama Islam “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh” sudah mencakup tentang keselamatan, rahmat, dan keberkahan.

Pada sebuah daerah di tingkat RW di Kota Surakarta, untuk mensiasati semua hal di atas maka pada organisasi di tingkat RW dibentuk seksi kerohanian yang anggotanya melingkupi semua agama yang ada di daerah itu. Sehingga ketika ada undangan perayaan keagamaan di tingkat kelurahan, maka Ketua RW akan menugaskan seksi kerohanian yang disesuaikan dengan agamanya.

Pandangan masyarakat menengah muslim terhadap tradisi lokal atau budaya perlu untuk dipertahankan asalkan tidak dilaksanakan sampai melanggar syariat agama Islam atau mengandung kesyirikan. Selain itu agar program pemerintah dalam rangka melestarikan budaya jangan sampai bertentangan dengan syariat agama. Ada beberapa budaya yang masih berlaku sampai sekarang yaitu iringan kerbau Kyai Slamet pada malam satu Suro, dan Sekatenan. Ada kepercayaan dibalik kedua kebudayaan tersebut yaitu mengambil kotoran kerbau kemudian mengusapkan ke wajah, dan berebut makanan yang tersusun di gunung sekaten. Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana tertentu, perlu edukasi makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Sarana kebudayaan misalnya berupa kupat, perlu dijelaskan bahwa konotasinya “*ngaku lepat*” atau mengakui kesalahan. Fungsi edukasi ini adalah supaya generasi berikutnya agar tidak salah tafsir.

Pandangan lainnya tentang budaya adalah menggambarkan cara para Walisongo dalam menyebarkan agama Islam hanya mengambil ajaran Islamnya tanpa budaya Arabnya. Dengan menggunakan logika sebenarnya mempertahankan budaya tertentu itu merupakan sebuah penghormatan terhadap budaya tersebut, tetapi jangan sampai mengkultuskan. Seperti dalam acara budaya dengan persembahan tertentu yang ditujukan untuk penunggu

(mahluk halus) pada suatu tempat, maka hal ini merupakan sebuah kekeliruan. Edukasi yang didapat dari hal ini adalah budayanya jangan dihapus, tetapi berdoanya tetap kepada Allah. Budaya digunakan sebagai komunikasi bersama dalam sebuah ruang, untuk saling bertemu bersama sehingga tercapai persamaan persepsi.

Relasi Keagamaan Masyarakat Menengah Muslim Terhadap Konteks Sosial

Konteks sosial bisa dibedakan menjadi konteks kultural dan konteks situasi. Konteks kultural adalah suatu sistem nilai dan norma yang merepresentasikan kepercayaan di dalam kebudayaan tertentu. Sistem nilai ini meliputi segala sesuatu yang dipercaya benar atau salah, baik atau buruk, termasuk di dalamnya adalah ideologi, yang menyangkut keteraturan sosial yang berlaku secara umum di dalam kebudayaan. Sementara itu, norma merupakan realisasi sistem nilai di dalam bentuk aturan yang mengontrol proses sosial, apa yang harus dan tidak harus dikerjakan anggota masyarakatnya di dalam melakukan proses sosial (Dr. Tri Wiratno and Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., no date).

Pandangan hubungan sosial pengusaha muslim dengan non muslim saat melakukan transaksi bisnis tidak berbeda dengan sesama muslim. Agama tidak menjadi pertimbangan dalam bidang usaha karena bagi para pengusaha ini, keberlangsungan usaha merupakan tujuan utama. Sebagai gambaran, seperti yang ada di Benteng Trade Centre (BTC) yang merupakan pusat perkulakan konveksi, didalamnya terdapat pedagang dengan berbagai agama. Mereka saling menghormati diantara pelaku usaha.

Selain hubungan sosial antara pelaku usaha, juga ada antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitar BTC. Para pelaku usaha di BTC menyalurkan sedekah sebagian rejekinya melalui masjid di komplek tersebut. Pihak masjid menjadi jembatan hubungan sosial kedua belah pihak, dengan membuat program makan siang gratis dan memberikan jatah beras kepada para tukang becak. Sedangkan program sosial diantara para pelaku usaha sendiri yang bernama Orang Baik Solo (OBS) adalah dengan menyediakan kotak tempat makan di pintu masuk parkir. Kotak tempat makan

itu bertuliskan Orang Baik Surakarta (OBS), fungsinya untuk menampung para pelaku usaha maupun masyarakat sekitar pada setiap hari jumat yang ingin bersedekah makanan dengan meletakkannya di dalam kotak tersebut. Demikian pula dengan masyarakat dan konsumen BTC yang membutuhkan makanan tersebut bebas untuk mengambilnya.

Kotak tempat sedekah makanan tidak hanya ditemui di komplek BTC saja, tetapi di beberapa masjid yang ada sekitar Kota Surakarta dan sekitarnya juga ada. Kotak tersebut disediakan oleh pengurus masjid dengan maksud bagi siapa saja boleh mengambil maupun mengisi makanan pada setiap Hari Jumat.

Ada juga model rumah makan/warung makan yang menggratiskan makan minum di warungnya setiap Hari Jumat, salah satunya adalah warung soto yang dikelola oleh mantan narapidana teroris. Warungnya menggratiskan kepada siapa saja yang makan soto pada setiap Hari Jumat, tetapi kemudian diubah setiap Hari Jumat di minggu terakhir setiap bulannya. Hal ini merupakan masukan dari masyarakat agar para pemilik warung makan lainnya tetap laku saat adanya program penggratiskan tersebut.

Ada sebuah perkumpulan para pengusaha yang bernama PPMI kepanjangan dari Persatuan Pengusaha Muslim Indonesia. Organisasi ini bergerak di bidang sosial keagamaan dengan tema yang diusung adalah bahayanya riba. Sifat keanggotaan secara terbuka dan umum, dan tidak condong pada kelompok keagamaan tertentu. Anggotanya ada yang berprofesi sebagai pengusaha, pegawai negeri, dokter, dan lain-lain. Kegiatannya adalah pengajian, temu anggota, Bersih-Bersih Masjid (BBM) dan Bagi-Bagi Nasi (BBN) setiap hari jumat, dan membantu menyalurkan air bersih di daerah kekeringan, seperti di Panggupito Kabupaten Wonogiri.

Pandangan dan Sikap Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan

Pada masyarakat menengah pengusaha muslim mempunyai kepedulian terhadap kebangsaan. Kecintaan terhadap tanah air terlihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Meski pandangan politik berbeda tetapi tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini tidak terlepas dari hubungan pengusaha dan dunia

politik yang merupakan dua keping mata uang yang saling berdekatan, tetapi tidak pernah bertemu secara langsung. Begitu juga saat Pilpres 2019, para pengusaha ikut ambil bagian didalamnya. Mereka berperan sebagai pendukung dari capres dan cawapres dengan masing-masing alasannya. Kepedulian terhadap kebangsaan salah satunya diwujudkan dalam pertemuan para pengusaha, untuk mensikapi situasi kondusif Kota Surakarta agar tetap damai menjelang pilpres. Para peserta yang hadir bertekad menyatakan menjaga keutuhan NKRI.

Pandangan terhadap hukum syariah, menyatakan bahwa negara sudah diakomodir menjadi Undang-Undang seperti UU Zakat, Produk Halal, dan lain-lain. Selain itu dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah ada aturan dari negara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti larangan perzinahan, narkoba, miras, dan perjudian. Sedangkan pandangan terhadap hukuman untuk para pencuri yang harus di potong tangannya, membunuh hukumnya adalah hukuman mati, dan hukum rajam terhadap pezina, ada yang berpendapat hal tersebut merupakan bentuk hukuman agar tidak diulangi lagi oleh yang lainnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat agar tidak muncul korban-korban berikutnya. Pandangan lainnya terhadap hukuman tersebut adalah setelah pelaksanaan hukuman tersebut akan mengakibatkan keluarga yatim dan kalangan difabel. Bila yang dihukum adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga, akan berpengaruh pada kelanjutan kehidupan keluarganya. Sehingga pihak negara tidak boleh abai terhadap keadaan ini, akan muncul pertanyaan sudah siapkan negara menanggung beban semua ini.

Pandangan terhadap paham khilafah yang ingin menggantikan sistem negara NKRI sangat sulit untuk dilakukan, karena negara Indonesia dibentuk dalam sebuah kesepakatan banyak pihak. Sehingga hembusan paham khilafah ini bisa membentuk persepsi seseorang menjadi *phobia* terhadap Islam. Untuk menjaga keutuhan NKRI maka perlu *screening* yang ketat dalam penerimaan aparat pemerintah seperti TNI, Polri, dan ASN. Hal ini merupakan penjagaan terhadap aparat pemerintahan agar terhindar dari paham khilafah.

Pandangan masyarakat menengah muslim tentang radikal, adalah perlu ada pemilahan dibedakan antara dalam menjalankan

syariat agama dan tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Saat melaksanakan syariat agama maka harus tegas dalam menjalankannya. Sebagai contoh umat Islam saat mencari rejeki harus yang halal, jangan yang *subhat* dan haram. Perlu pembakuan istilah radikal, karena kata radikal juga sudah dijadikan sarana untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bila ada tambahan kata “yang merusak” baru tepat, jadi komplitnya “radikal yang merusak”. Jangan sampai istilah dalam beragama seperti jihad dan khilafah dijadikan alat sebagai penyudut umat Islam sendiri. Ada pandangan dimana terjadi salah tafsir tentang radikal, dimana pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam memanfaatkan istilah ini dikaitkan dengan umat muslim yang rajin ke masjid, setuju dengan istilah jihad, memakai celana cingkrang, berjenggot, bercadar, berjilbab lebar, dan lain-lain.

Istilah yang masih ada kaitannya dengan radikal adalah dera-dikalisme, ada pendapat bahwa istilah tersebut sebaiknya diganti dengan bahasa yang lebih lembut, misalnya menjadi kata “pemberdayaan”. Untuk menjadi moderat perlu tiga konsep ukhuwah, yaitu *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniah* sebagai satu bangsa, dan *ukhuwah Wasyariyah* dalam konsep kemanusiaan kepada siapa saja. Bila hanya *ukhuwah Islamiyah* saja yang dipakai maka dalam melihat dalam suatu persoalan adalah agamanya saja yang didahulukan, sehingga benar atau salah kalau beragama sama harus dibela, seharusnya juga dilihat duduk persoalannya baru mengambil sikap. Ada hidup beragama dan hidup bernegara, sebagai contoh saat hormat pada bendera itu hidup bernegara jadi jangan dipertentangkan dalam beragama dan bernegara.

Aktivitas dan Jejaring Kegiatan Ormas Keagamaan Bidang Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu kekuatan bagi ormas keagamaan untuk tetap eksis dalam menjalankan roda dakwah keagamaan. Ormas-ormas keagamaan ini secara terstruktur dari pusat mempunyai amal usaha dari bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Secara kelembagaan, ormas-ormas ini menginstruksikan untuk membuat komunitas-komunitas ekonomi dengan menggunakan produk-produk lokal. Sehingga semangat

nasionalisme muncul dimulai dari sini. Semangat kebangsaan sudah mulai muncul, salah satunya ditandai dengan kembali ke produk-produk lokal.

Seperti Muhammadiyah merupakan salah satu ormas keagamaan yang selain mempunyai lembaga pendidikan dari PAUB/TK sampai dengan Perguruan Tinggi, dan juga Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Dalam lingkup kelokalan Muhammadiyah juga menggiatkan amal usaha bidang ekonomi yang diinisiasi oleh cabang di daerah-daerah. Seperti yang di Kabupaten Karanganyar sudah mempunyai usaha air minum dalam kemasan bernama AirMU, selain itu juga menginisiasi berdirinya TokoMU untuk bidang perdagangan. Seperti yang diliris oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar.

“Semangat kita adalah dari kita untuk kita, bagaimana warga Muhammadiyah menjual barangnya ke TokoMU, dan membelinya juga ke TokoMU,” terangnya. Selain TokoMU, Muhammadiyah Karanganyar sudah mempunyai pabrik untuk memproduksi air minum kemasan AirMU. Dengan adanya AirMU ini, dalam sambutannya di Milad Aisyiyah ke-104, Samsuri mengimbau anggota Aisyiyah agar memakai air kemasan tersebut dalam setiap kegiatannya. “Semangat ini perlu kita mulai, sekecil apapun itu,” katanya (Efrem Limsan Siregar, 2018).

Pengembangan ekonomi dengan membuka amal usaha yang sudah dilakukan oleh kelompok keagamaan bertujuan untuk penguatan ekonomi kelompoknya. Mereka membentuk produk-produk untuk mereka sendiri, seperti MTA memproduksi air mineral merk kaffur, LDII membuka bengkel, laundry, rumah makan, dan lain-lain. mereka membangun jejaring melalui usaha. Mereka juga menggunakan tanda pengenalan agar dikenal oleh anggotanya. Misalnya MTA menggunakan tanda kode angka 234, dan LDII menggunakan kode angka 531 sehingga dimanapun saat jamaahnya menemui kode angka-angka tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengetahui jaringan usaha kelompoknya.

Tidak ketinggalan, PCNU Kota Surakarta juga ingin memperkuat perekonomian khususnya di Kota Surakarta dengan program mengumpulkan seluruh jamaahnya yang mempunyai usaha atau menjadi pengusaha. Tujuannya untuk menyediakan seluruh kebutuhan bagi jamaahnya, dengan membuat *one stop service* di PCNU

Surakarta. Hal ini merupakan terobosan baru dari kepengurusan yang baru saja dilantik tahun ini. Pernah mengadakan pelatihan usaha bagi jamaahnya tentang jual beli on line.

Selain kelompok-kelompok yang telah dijelaskan di atas, di Solo juga terdapat yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan mantan napi teroris (napiter) yang bernama Yayasan Gema Salam. Yayasan yang juga didirikan oleh mantan napiter ini berdiri pada Desember 2018 ini berhasil mengentaskan sekitar 40 mantan napiter. Aktivitas yayasan ini bermaksud melengkapi kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam bentuk pembinaan kehidupan para napiter dalam bidang wirausaha.

Gerakan penguatan ekonomi lewat organisasi keagamaan ini secara tidak langsung akan mengangkat ekonomi umat Islam. Tujuan utamanya adalah penguatan ekonomi bangsa bukan ekonomi kelompok. Kalau umat Islam bisa bersatu secara perekonomian maka bisa mengimbangi kekuatan ekonomi asing yang selama ini menguasai perekonomian nasional.

Nilai-Nilai Pendidikan Non Formal Dalam Moderasi Beragama

Setiap manusia selalu bersikap terbuka terhadap pemikiran. Perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa bersikap terbuka terhadap pemikiran. Hal ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dimana saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga akan menjadikan saling menghargai satu sama lainnya dengan sikap yang sering disebut bijaksana. Hal ini termasuk dalam sikap beragama, bahwa jangan sampai merasa paling benar. Hal ini berkaitan dengan sikap keterbukaan dalam pemikiran yaitu toleransi. Pendidikan toleransi perlu memperhatikan tentang 4 hal dipandang sebagai dasar pendidikan toleransi, yaitu: pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu). Kedua, kesatuan kenabian. Ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain.

Para masyarakat menengah pengusaha muslim dalam pandangan dan sikap keberagamaannya juga mengacu pada empat hal tersebut. Dimana mereka menjalankan keagamaan seperti pada

umumnya umat Islam, hanya saja ada *ghirah* atau semangat yang lebih dalam beragama. Hal ini terlihat dalam cara berpakaian, terutama dari para muslimah yang sekarang sudah lebih banyak yang menggunakan hijab. Hijab inipun berkembang dengan pesat dengan berbagai aksesorisnya. Sehingga ada usaha pemunculan agama sebagai identitas kemudian bergeser menjadi bersifat keduniawian, walaupun didalam dirinya bermaksud menjalankan perintah agama. Semangat beragama juga muncul dari hanya kumpul-kumpul biasa kemudian berubah dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Menjadi lebih peduli dengan keagamaan, muncul kesadaran bahwa hidup tidak hanya mencari uang. Keagamaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Semua berlangsung secara alami juga karena pengaruh dari pergaulan serta perkembangan media sosial yang bisa mempengaruhi pemikiran seseorang.

Pengakuan terhadap eksistensi agama lain terlihat dalam relasi dengan non muslim, terbagi dua yaitu saat bertransaksi bisnis dan hubungan kemanusiaan. Saat bertransaksi bisnis maka tujuan utamanya adalah pekerjaan, jadi tidak ada perbedaan antara sesama muslim dan non muslim. Sedangkan saat hubungan kemanusiaan juga sama semua akan ditolong bila memerlukan pertolongan. Hal ini terbukti dengan program masjid di komplek BTC yang memberikan bantuan disekitar BTC berlaku semua tanpa memandang agama. Demikian juga para pedagang di BTC yang menyediakan kotak tempat makanan di dekat pintu masuk parkir kendaraan, semua orang bebas untuk mengambil mauun ikut menaruh makanan di tempat tersebut.

Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain. Hal ini terlihat dari pandangan dan sikapnya terhadap diluar kelompoknya. Tidak saling menyalahkan terhadap yang tidak sepemahaman atau kelompoknya. Memandang sesuatu selama sesuai dengan dasar agama Alqur'an dan Hadist berarti masih dalam koridor beragama yang benar. Hal ini juga

berlaku terhadap pelestarian budaya, berpandangan asal tidak melanggar konsep agama maka perlu dipertahankan.

Pandangan dan sikap terhadap nilai-nilai kebangsaan para masyarakat menengah pengusaha muslim, ada pengakuan sudah ada aturan-aturan berdasarkan hukum Islam dijadikan peraturan kenegaraan, baik yang berlaku untuk umat muslim maupun untuk semua warna negara. Perlunya penegasan arti dan penggunaan dari beberapa istilah seperti radikal, khilafah, deradikalisasi. Karena hal ini kadang bisa memunculkan *phobia* terhadap Islam. Sehingga jangan sampai penggunaan istilah tersebut malah bisa merugikan umat muslim itu sendiri. Sehingga dalam beragama akan terjadi keseimbangan tidak condong ke kiri atau ke kanan. Hal ini sesuai dengan arti moderasi Islam merupakan pandangan untuk bersikap ditengah-tengah dari dua sikap yang saling berseberangan. Sedangkan muslim moderat adalah sikap dalam menilai sesuatu yang tidak berlebihan terhadap dua hal yang berseberangan.

Adapun istilah tarbiyah (bertambah dan tumbuh), memperbaiki, mengembangkan sesuatu, semuanya merupakan usaha mengembangkan seluruh potensi secara bertahap menuju kesempurnaan. Hal ini sudah dilakukan oleh para masyarakat menengah pengusaha muslim dengan membangun ekonomi keumatan melalui ormas-ormas keagamaan, dengan tujuan agar ekonomi umat bisa mandiri. Sehingga tujuan utamanya adalah penguatan ekonomi bangsa bukan ekonomi kelompok. Kalau umat Islam bisa bersatu secara perekonomian maka bisa mengimbangi kekuatan ekonomi asing yang selama ini menguasai perekonomian nasional.

Simpulan

Moderasi Beragama berkaitan dengan pandangan dan sikap keagamaan termasuk baik, dimana memandang positif terhadap kelompok diluar dirinya selama masih dalam satu rukun Iman dan Islam; bisa berhubungan non muslim atas dasar saling menghormati; bisa menerima budaya dengan syarat tidak melanggar secara syariat Islam. Moderasi Beragama dalam relasi keagamaan masyarakat menengah muslim terhadap konteks sosial termasuk baik, para pengusaha bergerak dalam bidang sosial memikirkan sesama-

nya yang sedang membutuhkan, tanpa membedakan suku agama dan ras.

Moderasi Beragama dalam pandangan dan sikap masyarakat menengah muslim terhadap nilai-nilai kebangsaan termasuk baik, dimana tidak ada yang bertentangan dengan aturan kenegaraan. Tujuannya adalah menjaga agama dan negara, jangan sampai istilah-istilah dalam agama Islam, tetapi digunakan sebagai alat menyerang agama Islam sendiri. Moderasi beragama dalam aktivitas moderasi keberagamaan yang dilakukan oleh masyarakat menengah muslim termasuk baik, dimana menguatkan perekonomian umat lewat organisasi keagamaan, mengutamakan produk lokal. Penguatan ekonomi umat ini bisa menyumbang kemandirian ekonomi bagi negara. Sehingga bisa menimbulkan semangat nasional. Kelemahan tulisan ini adalah belum bisa dijadikan rujukan secara umum, karena pengumpulan data tidak bisa mewakili secara keseluruhan masyarakat menengah muslim pengusaha. Sehingga perlu penelitian lanjutan yang lebih luas cakupannya, baik dari sisi muatan dan wilayah penelitian

Daftar Pustaka

- Amin, R. 2014. Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam, *Al-Qalam*, 20(3), p. 23. doi: 10.31969/alq.v20i3.339.
- Anisah, S. S. and Dharma Tohjiwa, A. 2016. Pusat Batik Surakarta Hadiningrat Di Laweyan, Surakarta, *Jurnal Ilmiah Desain Konstruksi*, 15(1), pp. 60–68.
- Efrem Limsan Siregar, 2018. *Perkuat-ekonomi-di-internal-muhammadiyah-karanganyar-bakal-punya-toko-sendiri*. Available at: <https://solo.tribunnews.com>, Accessed: 23 April 2020.
- Fadrik Aziz Firdausi, 2019. *Pada Era Pergerakan Nasional, Surakarta adalah Kota Radikal*, <https://tirto.id/>. Available at: <https://tirto.id/pada-era-pergerakan-nasional-surakarta-adalah-kota-radikal-enT4>, Accessed: 9 May 2020
- Fealy, G. and White, S. 2008. *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*.
- Gufron, U. 2019. Corak Moderasi Beragama Keluarga Mualaf Tionghoa (Studi Kasus Jamaah Masjid Lautze Jakarta Pusat)', *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), pp. 205–232. doi: 10.37302/jbi.v12i2.115.
- Hatta, M., 2019. Media Sosial, Sumber keberagamaan Alternatif Anak Milenial Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat', *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 22(1), pp. 1–30. doi: 10.15408/dakwah.v22i1.12044.
- Jati, W. R., 2016. Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(2). doi: 10.21274/epis.2016.11.2.375-402.

- Junaedi, E., 2019. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag', *Harmoni*, 18(2), pp. 182–186. doi: 10.32488/harmoni.v18i2.414.
- Kartika Anggraeni, 2018. *Transaksi E-Commerce Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*, *tempo.com*. Available at: <https://bisnis.tempo.co/read/1150204/transaksi-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/full&view=ok>, Accessed: 9 May 2020
- Mawarti, S., 2017. Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam, *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), p. 70. doi: 10.24014/trs.v9i1.4324.
- Nuriyanto, L. K., 2015. Social Integration Management Of Places Of Worship For Islam And Christian In Surakarta', *Analisa*, 22(1), p. 29. doi: 10.18784/analisa.v22i1.144.
- Nuriyanto, L. K., 2017. Kerukunan Umat Beragama Di Kota Surakarta', *Penamas*, 30(2), p. 145. doi: 10.31330/penamas.v30i2.174.
- Ridho, S., 2017. Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), p. 88. doi: 10.22146/jps.v4i2.28582.
- Susanto, A., 2019. Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), pp. 232–245. doi: 10.36052/andragogi.v7i2.92.
- Sutrisno, E., 2019. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions', *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), pp. 323–348.
- Ujang Sumarwan, 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiratno, Tri, dan Santosa, Riyadi, t.t. *Bahasa, Fungsi Bahasa, dan Konteks Sosial*. Available at: <http://repository.ut.ac.id/4240/1/BING4214-M1.pdf> (Accessed: 22 April 2020).
- Zakky, 2018. *Pengertian Wirausaha Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, *www.zonareferensi.com*. Available at: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-wirausaha>, Accessed: 9 May 2020

Zhafira, A., 2017. Efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan antara religiusitas Islam dan intoleransi politik', *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), pp. 122–135. doi: 10.7454/jps.2017.11.

TRANSMISI NILAI MODERASI BERAGAMA OLEH MAJELIS TAKLIM DI YOGYAKARTA

Zakiyah

Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan aspek penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat saat ini ketika intoleransi dan kekerasan bernuansa agama semakin menggejala di masyarakat. Data menunjukkan pada beberapa tahun terakhir tercatat beberapa kasus intoleransi di Yogyakarta, berikut ini di antara kasus-kasus tersebut; (a) bulan Oktober 2018 telah terjadi penolakan acara sedekah laut yang diadakan di Pantai Baru Srandakan Bantul. Aksi penolakan dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap kegiatan sedekah laut ini sebagai syirik dan bertentangan dengan agama. (b) Pemotongan tanda salib pada nisan pemakaman Albertus Slamet Sugihardi di Pemakaman Jambon RT 53/13 Kota Gede Yogyakarta. Makam ini berada di pemakaman muslim, awalnya disepakati bahwa jenazah diijinkan untuk dikebumikan di pemakaman tersebut dengan tidak ada atribut non muslim. Akan tetapi pihak keluarga memasang tanda salib di nisan, sehingga dipotong oleh warga. Kemudian keluarga Albertus dan warga melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya disepakati untuk berdamai dan tidak mempermasalahkan pemotongan tanda salib tersebut (Suara.com, 2019).

Aksi intoleransi berikutnya adalah penolakan terhadap warga non muslim di Pedukuhan Karet, Pleret Bantul Yogyakarta; Slamet Jumiarto beserta istri dan kedua anaknya ditolak untuk bertempat tinggal di desa tersebut karena mereka beragama Kristen, sementara penduduk di wilayah tersebut beragama Islam. Dari mediasi yang dilakukan, sebagian warga mengizinkan keluarga tersebut untuk bermukim, tetapi kepala pedukuhan tetap menolak dan hanya mengizinkan keluarga tersebut tinggal selama 6 bulan di Pedukuhan Karet. Hal ini didasarkan pada surat keputusan pedukuhan Karet No 03/POKGIAT/Krt.Plt/X/2015, yang menyebutkan bahwa pendatang baru harus beragama Islam, sama dengan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Akhirnya Slamet Jumiarto dan keluarganya memilih pindah dari dukuh Pleret meskipun sudah diijinkan untuk tinggal di desa tersebut. Pada 2 April 2019 surat tersebut dicabut oleh kepala Dukuh Karet setelah melalui proses mediasi antara para pihak yang berkonflik (Suara.com, 2019; Tirto.id, 2019). Selanjutnya, terdapat beberapa masalah intoleransi yang pernah terjadi di Yogyakarta dan terekam dalam pemberitaan media massa; (a) pada 19 Februari 2016, Front Jihad Islam (FJI) mendatangi dan meminta Pondok Pesantren Waria Al Fatah yang berada di Kotagede Jagalan Banguntapan Bantul untuk ditutup. (b) pada tanggal 7 Desember 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mendatangi kantor Humas Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan memprotes atas iklan penerimaan mahasiswa baru universitas tersebut dengan menampilkan foto perempuan berjilbab, (c) pada bulan Januari 2017, beberapa warga menolak camat Pajangan Kabupaten Bantul, bernama Yulius Suharto yang sudah dilantik, dengan alasan ia seorang non-Muslim, (d) Tanggal 12 Oktober 2017, kegiatan kebaktian Nasional Reformasi 500 tahun Gereja Tuhan oleh Stephen Thong Evangelistic International (STEMI) dibatalkan karena dianggap sebagai kristenisasi oleh ormas Islam tertentu (Bbc.com, 2019).

Peristiwa intoleransi yang terjadi selanjutnya adalah; (e) pada 28 Januari 2018, kegiatan bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan Bantul ditolak oleh sejumlah ormas Islam karena disebut sebagai kristenisasi, (f) 11 Februari 2018, Pastor dan umat Gereja Santa Lidwina di Bedog Sleman, yang sedang melaksanakan misa diserang oleh seorang pria dengan pedang, akibatnya pastor dan dua umat terluka. (Bbc.com, 2019). Percikan kecil konflik juga

terjadi di desa Mangiran Kabupaten Kulonprogo dimana terjadi ketegangan antara warga Hindu dengan masyarakat sekitar. Konflik ini dipermukaan terlihat seperti konflik antar umat beragama, namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyo Boedi Oetomo (2019) memperlihatkan masalah di Mangiran lebih kompleks, karena di dalamnya terdapat konflik “perebutan” sumber ekonomi, konflik tanah “adat”, dan aspek lainnya.

Beberapa kasus di atas secara umum tidak menimbulkan konflik besar di masyarakat, dan mayoritas penduduknya masih dalam kondisi damai. Meskipun percikan-percikan masalah tersebut secara umum dapat terselesaikan, namun apabila tidak ditangani dengan seksama dapat memunculkan konflik-konflik di masyarakat. Oleh karenanya moderasi dalam beragama menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga harmoni di masyarakat. Bagaimana pesan-pesan keagamaan yang ramah dan sejuk disampaikan kepada umat merupakan salah satu elemen untuk mewujudkan suasana yang rukun dan damai. Dalam hal ini majelis taklim sebagai media penyampai dakwah terhadap umat Islam menjadi penting untuk dibahas.

Di Yogyakarta terdapat beragam majelis taklim yang berkembang baik yang diselenggarakan di masjid-masjid, tempat atau gedung pertemuan, hotel-hotel, maupun di rumah-rumah warga. Dari studi yang dilakukan oleh Zakiyah (2019) terhadap majelis taklim perempuan di Yogyakarta dapat diketahui bahwa terdapat setidaknya 6 varian majelis taklim meliputi; (a) majelis taklim yang berasosiasi dengan ormas keagamaan Islam tertentu, (Aisyiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Islam, dan lainnya), (b) majelis taklim atau pengajian yang diadakan oleh pribadi (kelas menengah ke atas), (c) majelis taklim yang diinisiasi oleh orang tua/wali murid sekolah, (d) majelis taklim yang diinisiasi oleh pengusaha dan atau orang seprofesi, (e) majelis taklim tertentu/tematik, dan (f) majelis taklim perempuan (sosialita) (Zakiyah, 2019: 37-39).

Banyak ragamnya majelis taklim yang ada di masyarakat memberikan manfaat positif bagi peningkatan pengetahuan keagamaan. Namun demikian, di sisi lain terdapat beberapa ceramah yang disampaikan di majelis taklim tertentu dengan pesan-pesan kebencian dan menyebarkan permusuhan terhadap kelompok-kelompok lainnya. Data yang disampaikan oleh hasil penelitian yang dilakukan

oleh Dewan Masjid Indonesia dan Merial Institute memperlihatkan bahwa 6,8 % materi yang disampaikan oleh ulama atau penceramah di masjid berisi ujaran kebencian untuk memusuhi agama atau etnis tertentu. Studi ini melibatkan responden yang berdomisili di kota-kota besar di Indonesia meliputi Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Medan dan Palembang (Cnn Indonesia, 2018).

Bagaimana transmisi dan isi materi moderasi keagamaan yang disampaikan oleh majelis taklim di Yogyakarta menjadi fokus bahasan dalam artikel ini. Tulisan ini merupakan bagian dari upaya menyuguhkan kajian tentang moderasi beragama masyarakat Muslim khususnya melalui majelis taklim. Data ini menyajikan gambaran bagaimana transmisi pesan-pesan moderasi beragama yang dilakukan oleh majelis taklim. Hal ini terlihat dari kegiatan sosial-keagamaan yang mereka selenggarakan, serta pesan-pesan keagamaan yang disampaikan.

Artikel ini ditulis berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian tersebut merupakan studi deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara berikut ini: (a) wawancara mendalam; dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan transmisi nilai moderasi beragama. Metode ini juga digunakan untuk menggali data tentang aktivitas sosial keagamaan oleh majelis taklim. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat muslim, pengurus dan anggota majelis taklim di Yogyakarta. (b) Studi pustaka; metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis terkait dengan transmisi nilai moderasi beragama oleh majelis taklim. Data ini meliputi sejarah dan fenomena majelis taklim di tengah masyarakat muslim, moderasi beragama dalam perspektif Islam, serta data-data terkait lainnya. Data ini ditelusuri melalui dokumen tertulis yang diterbitkan oleh pemerintah, buku-buku, artikel jurnal, dan pemberitaan media massa baik nasional maupun media internasional. (c) Observasi, metode ini dilakukan dengan mengamati kegiatan kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota majelis taklim di lokus penelitian. Dari pengamatan yang dilakukan ini dapat diketahui tentang transmisi nilai-nilai moderasi beragama yang dilakukan oleh subjek penelitian. (d) *Focused Group Discussion* (FGD); kegiatan ini merupakan diskusi

terarah dengan narasumber lapangan yang mengetahui tema penelitian. FGD dilakukan di lokasi penelitian. FGD dimaksudkan untuk mengetahui informasi awal dan peta keberadaan majelis taklim di Yogyakarta. Dari kegiatan ini didapatkan informasi tentang aktivisme majelis taklim dan sumber informasi yang selanjutnya dapat ditemui dan diwawancara lebih lanjut secara mendalam. FGD ini juga dimaksudkan untuk menggali data lebih lanjut tentang transmisi moderasi beragama oleh majelis taklim di Yogyakarta.

Diskursus Moderasi Beragama dalam Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang moderasi beragama masyarakat muslim telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dengan beberapa fokus kajian yang berbeda-beda. Di antara penelitian tersebut membahas tentang relasi antara masyarakat muslim dengan umat lain di beberapa wilayah di Indonesia, konsep toleransi yang ada di agama Islam, moderasi beragama masyarakat muslim, dan lain-lainnya. Selain itu, terdapat beberapa kajian tentang moderasi beragama secara umum. Berikut ini paparan secara singkat penelitian-penelitian tersebut.

Dalam buku “moderasi beragama” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama disebutkan bahwa kajian moderasi beragama menjadi tema penting karena beberapa alasan berikut ini; (a) ide dasar semua agama untuk menjaga martabat manusia, untuk tidak saling membunuh, untuk selalu menjaga perdamaian dan menjaga keseimbangan atau tidak ekstrem. (b) setelah beratus tahun dan beribu tahun paska kehadiran agama, manusia berkembang semakin luas dengan beragam etnis, bahasa dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, penafsiran terhadap agama juga semakin berkembang dan beragam, bahkan kadang-kadang terdapat penafsiran yang hanya disesuaikan untuk kepentingannya politiknya. Kompleksitas tersebut pada tataran tertentu dapat memunculkan konflik, hal ini terlihat di beberapa wilayah baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dimana bermunculan konflik bernuansa agama. (c) Dalam konteks Indonesia yang beragam, moderasi beragama digunakan untuk tetap menjaga ke Indonesiaan, yakni Indonesia yang kaya dengan budaya dan kearifan lokal serta

beragam agama dan keyakinan. Oleh karenanya, moderasi beragama ini menjadi salah satu instrumen untuk merawat keragaman Indonesia sebagai negara-bangsa (Tim Penyusun Kemenag RI, 2019: 10-11).

Tim peneliti Balai penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama Semarang telah melakukan penelitian tentang moderasi beragama masyarakat Muslim menengah dalam konstelasi kebangsaan di enam kota yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hasil studi ini memperlihatkan secara umum kalangan menengah Muslim di lokasi penelitian toleran dan moderat. Aktifitas keagamaan dan pemahaman keagamaan di kalangan menengah Muslim nampak sangat variatif. Di kalangan kelas menengah ini tumbuh kesadaran dan semangat keislaman, mencari majelis taklim, majelis dzikir, guru untuk mengaji dan ustaz. Mereka bersedia berinteraksi dengan kelompok lain dan agama lain. Beberapa sikap keberagamaannya juga menunjukkan Islam yang moderat, misalnya pada kajian tafsir tentang jihad dan ayat perang; ustaz menyampaikan penafsirannya secara moderat bahwa jihad meliputi perjuangan fisik dan perjuangan melalui harta. Sedangkan terkait dengan ide syari'at Islam di laksanakan di Indonesia; mereka berpendapat bahwa konsep tersebut ada di dalam Islam, tetapi karena Indonesia bukan negara Islam maka belum bisa dilaksanakan. Demikian pula dengan ide Khilafah; mereka menyatakan bahwa konsep itu merupakan konsep yang ada dalam Islam, tetapi tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam (Zakiyah, dkk, 2019).

Pandangan dan sikap kebangsaan masyarakat menengah Muslim ini juga cenderung mendukung pada nilai-nilai kebangsaan. Menurut mereka Pancasila relevan menjadi dasar negara, sementara untuk hukum atau syariat Islam tidak dan atau belum bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam, dan terdapat beragam agama. Selanjutnya mereka menyampaikan bahwa bentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) ini untuk mewadahi berbagai etnis dan agama. Kelompok menengah muslim ini ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilukada. Selain itu, mereka juga membangun relasi dengan negara, misalnya beberapa kegiatan mereka bekerjasama dengan instansi pemerintah. Adapun

relasi sosial mereka tercermin dalam kesediaan mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan dengan orang serta masyarakat di luar kelompoknya. Mereka juga bersedia berinteraksi dengan non muslim, serta bersedia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bersama dan kegiatan dan tradisi yang ada di masyarakat (Zakiyah, dkk, 2019).

Aktivitas moderasi beragama di kalangan menengah Muslim terlihat pada kegiatan-kegiatan mereka. Pada dasarnya kegiatan sosial yang mereka lakukan sebagai bentuk kegiatan kebangsaan dan moderasi, misalnya membantu para dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Materi-materi yang disampaikan di dalam kajian: diantaranya tentang pentingnya berbuat baik dengan orang lain, memaafkan, saling mengasihi di dalam keluarga, tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan keluarga. Gerakan penguatan ekonomi yang mereka lakukan juga dapat menjadi upaya yang akan mengangkat ekonomi keumatan (Islam). Pengisi kajian pada majelis taklim tersebut adalah ustaz atau kyai-kyai yang dapat menyebarkan ajaran Islam yang ramah. Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat menengah Muslim tersebut dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial, dimana terdapat tujuan perubahan pada anggota dan masyarakat pada umumnya, diantaranya perubahan pemahaman dan perilaku keagamaan, peningkatan kualitas ekonomi dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat (Zakiyah, dkk, 2019).

Schwedler (2011) menulis artikel dengan judul *“Review Article; Can Islamist become moderate? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis”*. Tulisan ini berisi tentang debat apakah Islamis bisa menjadi moderat dan beberapa bahasan jawabannya yang diambil dari hasil review terhadap beberapa artikel. Di dalam artikel ini diantaranya disebutkan bahwa “moderasi dalam arti luas merupakan sebuah proses yang memerlukan perubahan yang memungkinkan dideskripsikan sebagai gerakan dari radikal ke moderat. Moderasi secara implisit mengikat pada ide liberal dari hak-hak individual dan gagasan demokrasi seperti toleransi, pluralisme dan kerjasama. Untuk menjadi moderat, seseorang harus lebih terbuka terhadap kemungkinan perspektif lain. Akan tetapi partisipasi di dalam pemilihan umum atau proses demokrasi yang mengindikasikan norma liberal dan norma demokrasi dari pemerintah tidak cukup

sebagai indikator moderasi. Partisipasi adalah bentuk perilaku politik yang mungkin mengadopsi untuk tujuan politik strategis sementara di saat yang sama masih melanjutkan dukungan terhadap agenda politik radikal, oleh karenanya untuk mendefinisikan moderasi terdapat beberapa cara dan model (Schwedler, 2011).

Konsep moderasi yang dikaitkan dengan gerakan kelompok Islamisme diteliti oleh Stephanie Wheatley (2011). Studi ini merupakan disertasi untuk program doktor di Universitas Baylor. Penelitian ini fokus pada tiga kelompok yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hisbullah di Lebanon, dan Hamas di Palestina. Hasil studi ini menyebutkan bahwa meskipun tiga kelompok tersebut mempunyai konteks dan ideologi organisasi yang berbeda, mereka menunjukkan adanya elemen moderasi di dalamnya. Wheatley (2011) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok Islamis dapat menjadi moderat kalau mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam negara yang moderat (Wheatley, 2011: 215). Akan tetapi, Ikhwanul Muslimin tidak termasuk dalam kategori kelompok dimaksud karena situasi di Mesir yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, Hamas dan Hisbullah mempunyai kesempatan untuk lebih moderat di dalam gerakannya (Wheatley, 2011: 215-216). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, potensi Hamas untuk menjadi moderat dipengaruhi oleh faktor berikut ini; (a) perjanjian gencatan senjata dengan Israel yang diharapkan tidak akan ada lagi aneksasi atas jalur Gaza dan tepi Barat Palestina oleh Israel. (b) proposal dari Persatuan Bangsa Bangsa atas pengakuan terhadap Palestina dan disetujui oleh Liga Arab pada tahun 2011. Sementara itu, Hisbullah memperlihatkan adanya kapasitas untuk menjadi moderat meskipun hal ini merupakan jalan panjang yang banyak menghadapi tantangan. Misalnya, Hisbullah berpartisipasi dalam pemilihan umum dan bekerjasama dengan masyarakat Kristen di Lebanon Selatan.

Moderasi beragama juga telah diteliti oleh Rusmayani (2018), Fata Asyrofi Yahya (2018), Masdar Hilmy (2013), Munawir Haris (2015), Muhammad Ainul Yaqin (2018). Masing masing studi ini mempunyai fokus yang berbeda, Rusmayani (2018) dan Yahya (2018) membahas moderasi beragama dalam konteks pendidikan. Rusmayani (2018) menyebutkan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam untuk siswa-siswi sekolah dasar di Bali. Aktifitas tersebut dilakukan oleh guru Pendidikan

Agama Islam (PAI) baik di dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun penerapan ketika berinteraksi di luar kelas. Di antara nilai moderasi tersebut adalah materi akhlak, bersikap dan berbicara santun, menghormati dan mengasihi sesama, serta saling menolong dengan sesama (Rusmayani, 2018: 790-791). Yahya (2018) mengkaji aspek pengaruh dan relevansi moderasi dalam etika Islam terhadap pendidikan di pesantren. Dalam studi ini disebutkan terdapat beberapa bentuk moderasi dalam etika Islam meliputi; (a) *tadbir al nafs* yaitu sikap seseorang dengan merujuk pada maqasid syari'ah. Dalam hal ini seseorang dalam bersikap terhadap umat agama lain hendaklah toleran dan inklusif, sehingga tidak akan memunculkan konflik. (b) *tadbir al manzil*, dalam aspek ini terdapat elemen egalitarianisme dalam masyarakat yang dapat diterapkan sebagai moderasi dimana di dalamnya terdapat keadilan dan keseimbangan. (c) *tadbir al mudun*, yaitu tujuan akhir politik untuk mencapai masyarakat yang damai, tentram dan aman di sebuah negara (Yahya, 2018: 471-472).

Sementara itu, Hilmy (2013) meneliti tema moderasi beragama yang ada di NU dan Muhammadiyah. Artikel ini menegaskan bahwa dua ormas ini menjadi contoh bagi moderatisme di Indonesia. Muhammadiyah dengan konsep tajdid perlu untuk merevisi dan lebih mengkontekstualkan dengan kondisi saat ini, sehingga spirit kembali kepada Alquran dan hadits yang ada di ormas tidak akan menghambat proses moderatisme. Di sisi lain, di NU terdapat konsep *tawasut*, *i'tidal*, *tawazun* dan *tasamuh* merupakan prinsip dasar dalam moderasi Islam. Namun demikian, konsep tersebut oleh kelompok-kelompok radikal dianggap tidak mempunyai posisi dalam pemikiran Islam, oleh karenanya NU perlu mengelaborasi dan mengimplementasikan pada sisi yang lebih praktis (Hilmy, 2013: 45). Haris (2015) membahas Islam moderat dalam konteks Indonesia ditinjau dari perpektif sejarah. Moderasi beragama di negeri ini sudah ada sejak masa-masa awal masuknya Islam, misalnya proses penyebaran Islam di tanah Jawa dibawa oleh Walisongo dengan cara damai dan menghormati budaya lokal yang ada. Pada masa sekarang, Indonesia mempunyai dua ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi yang berperan aktif dalam menciptakan moderasi beragama. Sedangkan Yaqin (2018) mengkaji Dzikir manaqib sebagai latihan jiwa untuk membersihkan diri dari sifat-sifat jelek dan mengisinya dengan sifat-sifat baik

dapat digunakan sebagai cara untuk mewujudkan moderasi dalam beragama.

Konsep Moderasi Beragama

Studi ini menggunakan beberapa konsep dan teori untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep tersebut; *pertama*, kata “moderasi” berasal dari Bahasa Latin *moderatio* yang berarti ke-sedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris istilah moderasi merujuk pada kata *moderation* yang artinya adalah *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online disebutkan bahwa kata moderasi berarti pengurangan kekerasan dan pengurangan keekstriman (KBBI online.com, 2020). Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah moderasi biasanya merujuk kepada kata *wasath* yang bermakna “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Lawan kata ini adalah *tatharruf* yang berarti berlebihan, ekstrim, radikal. Dalam konteks beragama, moderasi dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang tidak ekstrim, di tengah-tengah dan berlaku adil (Tim Penyusun Kemenag RI, 2019: 15-17).

Konsep *wasathiyah* yang biasanya dirujuk sebagai padanan moderasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya; “penengah diantara dua hal yang saling berhadapan. Secara konseptual, *wasathiyah* difungsikan sebagai bentuk “perlawanan” terhadap ekstermisme, *wasathiyah* memosisikan dirinya sebagai bentuk keseriusan, ketersinambungan dengan penuh komitmen untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa memisahkan antara agama dan tugas negara.

Wasathiyah terfokus pada beberapa elemen berikut ini:

- Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan demokratik;
- Antroposentris dan pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam;
- Kepemimpinan dengan integritas moral yang tinggi; membawa perdamaian, keharmonisan dan kolaborasi dengan kalangan non Muslim;

- Perbaikan pendidikan yang holistik;
- Kesadaran untuk membangun mental para pemuda Muslim; dan
- keseimbangan dan sinergi antara tradisi agama Islam dan saintifik

Wasath secara terminologi bermakna nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu, sebagaimana makna "*ummatan wasathan*" dalam surat Al-Baqarah ayat 143) yaitu umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Allah swt telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi "*ummatan wasathan*", umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.

Istilah *washatiyah* terkait dengan *ummatan wasathan* tersebut merujuk pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 143, berikut ini:

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia" (Alquran, Surat Al-Baqarah, 143) .

Konsep *ummatan wasathan* dalam ayat tersebut menurut Alagha (2015) diartikan sebagai komunitas umat Islam secara universal yang mempunyai karakter adil, seimbang dan sempurna untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Di dalam arti yang lebih luas, umat yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat yakni terdapat aspek moderasi di dalamnya (Alagha, 2015: 46). Dalam konteks keberagamaan umat Islam di Indonesia, moderasi beragama meliputi beberapa karakteristik berikut ini; (a) Menyiarkan Islam dengan ramah dan tanpa ideologi kekerasan, (b) menggunakan

cara hidup moderen seperti sains, teknologi, demokrasi, hak asasi dan lainnya, (c) berpikir rasional, (d) berislam secara kontekstual, (e) berijihad ketika tidak terdapat dasar hukum eksplisit dalam Alquran dan hadits (Hilmy, 2013: 28)

Nilai nilai moderasi beragama penting untuk disampaikan kepada umat Islam sehingga diharapkan masyarakat muslim menjadi *ummatan wasathan* sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat Alquran. Proses transmisi atau penyampaian pesan-pesan moderasi beragama tersebut dapat dilakukan oleh majelis taklim dengan berbagai cara dan media, misalnya ceramah, diskusi, kegiatan sosial-keagamaan dan lainnya. Pesan-pesan tersebut juga dapat disampaikan melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *youtube*, dan lainnya.

Majelis taklim dalam artikel ini merujuk kepada dua kata yaitu “majelis” yang berarti pertemuan atau perkumpulan orang banyak, dan kata “taklim” yang bermakna pengajaran agama Islam atau pengajian (KBBI online, 2020). Majelis taklim dengan demikian didefinisikan sebagai pengajian atau perkumpulan orang banyak yang mempunyai kegiatan pengajaran agama Islam. Dalam hal ini, majelis taklim yang melakukan transmisi atau penyampaian dan penyebaran pesan moderasi beragama kepada masyarakat.

Temuan dan Pembahasan

Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai banyak keragaman penduduknya dari sisi pendidikan, sosial, ekonomi, dan agama. Bahkan, di wilayah ini juga terdapat beragam suku yang berasal dari berbagai kota atau kabupaten di Indonesia. Hal ini bisa dipahami bila merujuk dengan Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan kota pelajar, dimana banyak mahasiswa dan pelajar dari luar provinsi berdatangan untuk menimba ilmu di wilayah ini. Kondisi ini pada satu sisi menjadi aspek positif karena masyarakat bisa bertemu dan berinteraksi serta belajar dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Akan tetapi di sisi lain apabila tidak saling memahami dan menghormati perbedaan yang ada bisa menimbulkan friksi-friksi, bahkan dapat pula memicu

konflik, karena pada dasarnya setiap etnis dan agama mempunyai ajaran dan prinsipnya masing-masing yang tentu saja antara yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan.

Dari sisi agama, di Provinsi Yogyakarta terdapat 3.341.946 umat Islam, 169.513 umat Katolik, 88.903 penduduk beragama Kristen, umat Hindu berjumlah 3.484, umat Budha sebanyak 3.218, dan lainnya 656 (BPS D.I Yogyakarta, 2019). Data ini menunjukkan bahwa di wilayah ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dalam hal ini, umat Islam di Yogyakarta juga menunjukkan keragaman terkait dengan afliasinya kepada organisasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan lain lainnya. Namun demikian, masyarakat Muslim di Yogyakarta terlihat lebih banyak bercorak kepada Muhammadiyah, hal ini karena kota Yogyakarta merupakan tempat kelahiran ormas Islam ini dan kantor pusat Muhammadiyah juga berada di Yogyakarta. Di daerah ini juga banyak terdapat lembaga pendidikan di bawah bendera Muhammadiyah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut, keragaman agama di provinsi ini tersebar di lima kabupaten/kota yang ada di wilayah ini. Adapun rincian penduduk berdasarkan agama di tiap kabupaten/kota di Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel.1 Penduduk Provinsi Yogyakarta berdasarkan agama

No	Kapupaten/ Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
01	Kulonprogo	420 653	5 879	18 448	23	634	18
02	Bantul	892 955	12 117	25 295	750	213	26
03	Gunungkidul	727 903	13 159	13 054	1 094	403	364
05	Sleman	959 042	31 302	70 328	1 093	693	203
06	Kota Yogyakarta	341 393	26 446	42 188	524	1 275	45
	D.I Yogyakarta	3 341 946	88 903	169 513	3 483	3 218	656

Sumber: BPS Provinsi D.I Yogyakarta, 2019

Keragaman di Yogyakarta juga ditunjukkan dari banyaknya tradisi-tradisi budaya yang masih diselenggarakan oleh masyarakat, baik tradisi yang ada kaitannya dengan agama maupun tradisi

lokal yang bersinergi dengan ajaran-ajaran keagamaan. Misalnya, tradisi Grebeg Maulid dan tradisi Sekatenan yang dilaksanakan oleh Kraton Yogyakarta setiap tahunnya, didalam tradisi ini terpancar adanya akulturasi antara budaya Jawa dengan ajaran-ajaran agama Islam. Tradisi-tradisi memperingati hari kematian, seperti peringatan *telung ndino* (tiga hari), *matang ndino* (empat hari), *pitung ndino* (tujuh hari), dan *matang puluh* (empat puluh hari), *nyatus dino* (seratus hari), *nyewu* (seribu hari), dan seterusnya. Di dalam tradisi terdapat perpaduan antara budaya lokal dan ajaran agama, misalnya pada tradisi yang dilakukan umat Islam maka akan ada doa-doa dengan cara Islam. Sedangkan tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu maka di dalamnya akan ada doa-doa dengan cara agama Hindu.

Selain tradisi lokal yang dilakukan oleh masing-masing komunitas agama tertentu, di Yogyakarta juga terdapat beragam tradisi yang melibatkan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, semua umat bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, kegiatan *merti deso*, tradisi ini diikuti oleh semua masyarakat dari berbagai latar sosial dan keagamaan. Di dalam aktifitas ini terdapat kesempatan mempertemukan orang-orang yang berbeda, dan mereka saling berinteraksi tanpa batas kelas sosial ekonomi, tidak ada lagi sekat-sekat di antara anggota masyarakat yang ada.

Tradisi-tradisi lokal yang ada di masyarakat tersebut, merupakan bagian dari aspek-aspek yang dapat menjalin kerukunan baik di internal maupun eksternal umat beragama, selain elemen-elemen lainnya. Hal ini terlihat dari kondisi Yogyakarta secara umum dalam keadaan yang kondusif dan damai dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak ada konflik bernuansa agama dalam skala yang besar. Meskipun tentu saja terdapat beberapa riak kecil permasalahan terkait hubungan antar ataupun intern umat beragama sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya..

Majelis Taklim dan Transmisi Moderasi Beragama di Yogyakarta

Di Yogyakarta terdapat beragam majelis taklim atau kelompok-kelompok pengajian yang diikuti oleh masyarakat secara luas maupun terbatas. Di antara majelis taklim tersebut diikuti oleh perempuan dan laki-laki, perempuan saja, laki-laki saja, ataupun mayoritas perempuan dengan jamaah laki-laki sedikit. Pengajian

dan atau kajian keagamaan dilaksanakan di berbagai tempat, seperti diadakan di masjid-masjid yang ada di masyarakat, kampus-kampus, dan lembaga-lembaga pemerintah serta lainnya. Selain itu, terdapat majelis taklim yang diselenggarakan di hotel-hotel dan gedung-gedung pertemuan. Berikut ini gambaran beberapa varian majelis taklim tersebut:

Tabel 2. Varian Majelis Taklim di Yogyakarta

No	Varian	Karakteristik	Contoh
1	Majelis taklim umum	Biasanya dilaksanakan di masjid-masjid baik di masjid Agung, masjid gede, masjid jami', dan masjid lainnya. Dilaksanakan secara rutin, mingguan, bulanan, atau waktu-waktu tertentu Pengajian dapat diikuti oleh masyarakat umum dan terbuka bagi semua umat Islam yang hendak mengikutinya. Pengisi kegiatan; terdapat kyai/ustaz yang mengisi secara rutin, dan adapula kyai/ustaz yang mengisi secara bergiliran (variatif) Kajian tematik dan kajian umum	Majelis taklim masjid Syuhada Kota Gede Majelis taklim masjid Jogokaryan Majelis taklim masjid Gede Kauman Yogyakarta
2	Majelis taklim / pengajian selapanan	Dilaksanakan setiap <i>selapan</i> sekali (35 hari sekali) Varian taklim ini dilakukan oleh beragam kelompok, bisa oleh masjid yang ada di masyarakat, kelompok pengajian tertentu seperti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, maupun oleh ormas keagamaan. Jamaah dari kegiatan ini tergantung pada jenis penyelenggara kegiatan (lihat pada varian-varian majelis taklim di tabel ini).	Pengajian <i>selapanan</i> Rabu Pon yang diadakan oleh pemilik usaha Batik Apip di Jl Pandega Marta Raya 37A Jakal Km 5,8 Yogyakarta
3	Majelis taklim masjid kampus	Dilaksanakan di masjid-masjid kampus Kegiatan rutin, satu minggu dua kali, satu kali atau waktu tertentu lainnya. Biasanya diorganisir oleh lembaga dakwah kampus (LDK), atau kelompok-kelompok kajian keagamaan tertentu di lingkungan kampus.	Kajian masjid kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

		Peserta kegiatan; untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh LDK adalah mahasiswa, sedangkan kegiatan kajian keagamaan tertentu diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum	Majelis taklim Mutia di Masjid kampus UGM
4	Majelis taklim ormas Islam	<p>Majelis taklim yang diadakan oleh ormas keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dan NU.</p> <p>Kegiatan pengajian terdiri dari (a) pengajian untuk pengurus dan anggota organisasi, serta (b) pengajian untuk masyarakat umum</p> <p>Pengisi kegiatan biasanya kyai/ustaz berasal dari ormas tersebut dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu mengundang kyai-ulama dari luar ormas tersebut.</p>	<p>Pengajian rutin oleh Muslimat NU</p> <p>Pengajian rutin Griya Lansia Muhammadiyah</p> <p>Pengajian Muhammadiyah</p> <p>Pengajian NU</p>
5	Majelis taklim masjid perumahan-kampung	<p>Kegiatan pengajian dilakukan di masjid yang ada di lingkungan perumahan dan atau masyarakat kampung</p> <p>Peserta kegiatan taklim adalah warga yang tinggal di perumahan tersebut, dan terbuka untuk umum sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.</p> <p>Pengisi acara pengajian kyai/ustaz yang ditentukan oleh pengurus masjid</p> <p>Kegiatan dilakukan secara rutin, mingguan, bulanan atau selapanan. Selain itu terdapat kegiatan peringatan hari besar agama Islam (PHBI)</p>	<p>Majelis Buka Bersama Sunah Senin yang diadakan di Masjid Wiworjati Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta</p>
6	Majelis taklim perempuan ¹	<p>Majelis taklim yang diadakan oleh perempuan dan umumnya diikuti oleh jamaah perempuan</p> <p>Terdapat pengajian yang diikuti hanya oleh pengurus dan anggota majelis taklim tersebut, dan ada pula pengajian yang terbuka untuk umum.</p>	<p>Majelis taklim Salsabila</p> <p>Majelis taklim al Hijrah</p>

¹ Terdapat beragam varian majelis taklim perempuan di Yogyakarta, untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada artikel; “Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta”(Zakiyah, 2019)

		Kegiatan dilakukan secara rutin, mingguan, bulanan atau <i>selapanan</i> . Selain itu terdapat kegiatan peringatan hari besar agama Islam (PHBI)	<p>Majelis taklim Yasmin</p> <p>Majelis taklim Sahabat Saima-Shalimah</p> <p>Majelis Taklim Roudlotul Jannah</p> <p>Majelis taklim Sahabat Cinta</p>
7	Majelis taklim masjid/mushola perkantoran	<p>Majelis taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid dan atau mushola perkantoran pemerintah dan swasta</p> <p>Kajian dilakukan secara rutin dan insidental (PHBI)</p> <p>Pengisi acara ditentukan oleh masing-masing lembaga/kantor</p> <p>Jamaah mayoritasnya adalah pegawai kantor tersebut dan beberapa tamu yang berkunjung di kantor tersebut.</p>	<p>Taklim yang dilaksanakan di masjid Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta</p> <p>Taklim yang diadakan di mushola kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berupa kultum setiap selesai jamaah salat dhuhur dan salat Ashar</p> <p>Taklim belajar baca Alquran di mushola Kantor Polsek Kecamatan Pakualaman Yogyakarta</p>
8	Majelis taklim di hotel-hotel	<p>Majelis taklim yang diadakan di hotel-hotel</p> <p>Terdapat taklim yang diinisiasi oleh manajemen hotel dengan jamaah karyawan hotel, dan taklim yang diinisiasi oleh masjid taklim di luar manajemen hotel dan mereka menggunakan hotel sebagai tempat pertemuan. Jenis taklim yang kedua ini diikuti oleh jamaah tergantung dengan penyelenggaranya (ada yang terbatas dan terbuka untuk masyarakat umum).</p>	<p>Halaqah salat center di hotel Inna Garuda (taklim setiap Selasa malam)</p> <p>Kajian oleh majelis taklim Yasmin di Hotel Wisnugraha setiap Senin pagi</p>

Taklim yang terbuka untuk umum
biasanya melalui pendaftaran secara
online (media sosial/telpon)

Pengisi kegiatan ditentukan oleh
penyelenggara acara.

Sumber: Observasi terhadap majelis taklim, dan wawancara dengan pengurus dan jamaah majelis taklim di Yogyakarta, Juni-Juli 2019.

Masing-masing majelis taklim mempunyai kegiatan kajian keislaman yang dilaksanakan secara rutin dan insidental yang biasanya bertepatan dengan hari-hari besar Islam. Secara umum cara penyampaian pesan keagamaan melalui ceramah dan tanya jawab antara penceramah dengan jamaah. Selain itu, beberapa majelis taklim menyiarkan kegiatannya dengan *livestreaming* (siarang langsung) melalui media sosial seperti *youtube*, *instagram* dan *facebook*. Misalnya, (a) kajian yang dilakukan oleh Majelis taklim Mutia masjid kampus UGM disiarkan melalui *youtube* dan *facebook*, (b) kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Sahabat Cinta disiarkan di laman *facebook* mereka.

Pesan-pesan moderasi beragama oleh majelis taklim terlihat dari pemilihan kyai/ustaz yang moderat dan isi ceramah, serta kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mereka lakukan. Berikut ini dipaparkan beberapa diantaranya; *pertama*, majelis taklim di Kantor Polsek Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki beberapa kegiatan sosial-keagamaan, diantaranya adalah; (a) jama'ah shalat dhuhur di mushola At-Taqwa di dalam lingkungan kantor Polsek, (b) belajar membaca Alquran bagi anggota polisi dan pegawai di kantor tersebut dengan ustaz seorang penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakualaman. Kegiatan ini diiniasi oleh lima anggota polisi di kantor Polsek tersebut yang mempunyai gagasan dan tujuan yang sama, kemudian mereka mengajak anggota-anggota lainnya, dan saat ini terdapat 10-11 anggota yang aktif ikut belajar baca Alquran. Pembelajaran ini dimulai dari nol yakni mulai dari mereka yang tidak bisa membaca Alquran dan atau belum lancar membaca Alquran hingga bisa membaca Alquran dengan baik, benar dan lancar. Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa tahun dan bertahan hingga saat ini (tahun 2019, saat penelitian dilakukan). Proses pembelajaran dilakukan

setiap satu minggu sekali, sedangkan harinya disesuaikan dengan ketersediaan waktu antara pengajar/ustaz dan jamaahnya.(c) kegiatan sosial untuk masyarakat; membagikan bingkisan kepada fakir miskin di Yogyakarta setiap Minggu, adapun dananya bersumber dari sodaqoh anggota polisi di kantor tersebut. Untuk penentuan sasaran penerima bingkisan dengan meminta saran dari Babinsa dan tokoh masyarakat setempat, sehingga diharapkan bingkisan tersalurkan kepada sasaran yang tepat. (d) bakti religi yaitu kegiatan membersihkan tempat-tempat ibadah di masyarakat dan memberikan bingkisan kepada masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari Jum'at pagi (Wawancara dengan Bapak Sujarwo, pengurus majelis taklim dan anggota polisi Polsek Kecamatan Pakualaman, Juni 2019).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota polisi kantor Polsek Pakualaman tersebut secara implisit dapat disebut sebagai upaya transmisi nilai moderasi beragama yaitu kegiatan melibatkan masyarakat dengan beragam latar belakang dan sasaran kegiatan sosial juga masyarakat umum. Di samping itu, kegiatan tersebut dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan tidak menyimpang dari ajaran pokok Islam serta tidak bertentangan dengan asas-asas kebangsaan. Dalam hal ini Bapak Sujarwo menyampaikan pandangannya:

“Negara menjamin setiap warganya untuk menjalankan keyakinan, dakwah dengan kekerasan bertentangan dengan aturan. Prinsipnya kita menjaga kebersamaan, saling menghormati serta tidak menyinggung kelompok lain. Kita menjalankan agama sendiri-sendiri, sesuai dengan porsinya masing-masing, saling jaga dan hormati. Di dalam prinsip keyakinan ada rambu rambunya, kita tidak ada masalah bekerja sama dengan masyarakat. Untuk kegiatan keagamaan kita kerjasama dengan KUA, selain itu kita menurunkan Babin untuk bisa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, serta komunikasi dengan tokoh masyarakat yang ada. Kita juga mengadakan kegiatan dengan masyarakat dan menghadiri kegiatan yang diadakan oleh masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Sujarwo, pengurus majelis taklim dan anggota polisi Polsek Kecamatan Pakualaman, Juni 2019).

Kedua, Majelis Taklim Griya Lansia “Aisyiyah” Baiturahman Yogyakarta beralamat di Jl Pareanom nomer 42 Patangpuluh Yogyakarta mempunyai kegiatan kajian rutin untuk anggotanya. Majelis taklim ini merupakan bagian kegiatan Griya Lansia yang dikelola oleh Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Aisyiyah Yogyakarta. Adapun Griya Lansia ini didirikan pada tahun 2012 dengan harapan untuk memberikan ruang bagi aktifis-aktifis Aisyiyah yang sudah lanjut usia. Dengan wadah ini maka para lansia dapat berkumpul di komunitas yang masih terafiliasi dengan Aisyiah. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari *tanfidz* keputusan muktamar Aisyiyah ke-47 pada program bidang kesejahteraan sosial yakni “meningkatkan sosialisasi pemahaman dan pendampingan bagi warga masyarakat lansia untuk menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki” (aisyiyah.or.id). Adapun kegiatan taklim di Griya Lansia dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum’at pagi, serta kegiatan besar setiap tiga bulan sekali dengan mengundang pembicara dan kelompok-kelompok lansia lainnya.

Transmisi pesan moderasi beragama di majelis taklim ini terlihat dari materi yang disampaikan saat kajian dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah kajian pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019 yang dilaksanakan di Griya Lansia. Kegiatan ini merupakan kajian tafsir Alquran, dengan jamaah membaca ayat per ayat kemudian ustazHajam Rusdi, salah satu pengurus Pusat Muhammadiyah, memberikan penjelasan tafsir atas ayat tersebut. Pembacaan ayat-ayat Alquran ini meneruskan ayat-ayat Alquran yang telah dibaca dan dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini dikaji surat Al Anfal ayat 56-66 yang berisi tentang ayat perang (jihad). Berikut ini diantara penjelasan dan tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Hajam Rusdi:

“Surat Al Anfal merupakan surat tentang perang, yaitu perang menghadapi orang kafir untuk bisa beriman, caranya adalah didakwahi dan perang. Akan tetapi Islam tidak akan berperang kalau orang kafir tidak menyerang duluan, kecuali perang terakhir, tetapi tidak jadi, sudah *FathulMakah*, orang Makah sudah mendapatkan hidayah. Kalau selama ini pandangan dunia baratkalau Islam suka perang maka itu sangat salah, dalam konteks Islam di dalam berperang selama masih ada peluang upaya damai maka upayakan damai jangan menyerang (Penjelasan Ustaz Hajam Rusdi, observasi 12 Juli 2019).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa “damai” merupakan upaya pertama ketika terjadi perang, dan umat Islam tidak akan menyerang sebelum diserang terlebih dahulu. Hal ini meyakini bahwa ketika terjadi kontak perang maka hal tersebut adalah upaya perlawanan dan pertahanan. Lebih lanjut Ustaz Hajam Rusdi menyampaikan penjelasannya berikut ini:

“Islam ketika ada kelompok Mukmin dan Kafir maka akan ada perjanjian, saat masa Nabi Muhammad ada banyak perjanjian untuk damai. Kalau ada tanda tanda orang kafir akan menyerang, tetap upayakan untuk mengadakan perjanjian untuk damai, jika sudah tidak bisa berdamai, maka kita perang” (Penjelasan Ustaz Hajam Rusdi, observasi 12 Juli 2019).

Lebih lanjut disampaikan penjelasan atas surat Al Anfal ayat 66 terkait dengan etika berperang berikut ini:

“Kalau ada kecenderungan untuk damai, mereka sudah mau kalah, kita ajak damai, biar mereka tidak habis, mereka sudah terdesak sekali, maka serukan untuk damai. Walaupun membunuh orang kafir dibolehkan, tetapi kalau mereka sudah terdesak, diajak damai biar tidak habis, sebagai tawanan perang itu diberdayakan, tidak dipenjara, dan ada kemudian yang masuk Islam. Berdamai agar lawan musuh tidak makin banyak dan siapa tahu dari mereka berdamai, mereka akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam” (Penjelasan Ustaz Hajam Rusdi, observasi 12 Juli 2019).

Jihad (perang) di dalam Islam dijelaskan oleh Ustaz Hajam Rusdi pada saat kajian tersebut tidak hanya sebagai perang fisik tetapi juga perang non fisik, seperti jihad dengan harta:

“Perjuangan Islam secara fisik dan non fisik (harta), maka *ojo kumet nak kowe sugih* (jangan pelit kalau kaya) *tatkala berdakwah tengah-tengah, oro kumet yo ara bloboh* (tidak pelit dan tidak terlalu dermawan), *mosok ono duwit 100 ewu kok le ngamal 1000 rupiah, iki kumet* (masak ada uang 100 ribu, beramalnya cuma 1000 rupiah, ini pelit). Dan orang yang beramal di jalan Allah seperti kita menanam biji yang akan tumbuh 100 kali lipat. Maka perang itu jangan dimaknai membawa *bedil* (senjata), dalam rangka membina lansia untuk menuju khusnul khatimah ini juga *fisabilillah*, menegakkan Islam” (Penjelasan Ustaz Hajam Rusdi, observasi 12 Juli 2019).

Pemaknaan dan penjelasan atas ayat-ayat dalam surat Al Anfal tersebut di atas memperlihatkan bahwa Islam cinta damai dan jihad bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berdakwah dan beramal melalui harta. Pesan-pesan moderasi beragama tampak jelas dalam kajian ini. Selain taklim yang dilaksanakan secara rutin, Griya lansia Aisyiyah mempunyai kegiatan sosial yakni bakti sosial membantu masyarakat yang kurang mampu, dan dana untuk kegiatan diperoleh dari iuran dan sedekah anggota Griya Lansia Aisyiyah. Aktifitas ini selaras dengan penjelasan pada kegiatan taklim di atas bahwa menegakkan Islam bisa juga melalui beramal harta dan kegiatan lainnya.

Nilai-nilai moderasi beragama juga disampaikan pada majelis taklim Rabu Bon Batik Apip. Pengajian ini digagas dan didanai oleh pemilik Batik Apip dengan jamaah mayoritasnya perempuan dan dapat diakses terbuka oleh masyarakat umum. Kegiatan ini diselenggarakan setiap hari Rabu Pon sore di pendopo dan halaman rumah pemilik Batik Apip yang beralamat di Jalan Pandega Marta Depok Sleman Yogyakarta. Jamaah yang hadir sekitar 150-200 orang dengan fasilitas minuman, snack dan makan besar yang disediakan *free* oleh penyelenggara pengajian. Pada acara pengajian selapanan tanggal 17 Juli 2019 ceramah disampaikan oleh Ustaz Dedi Junaidi tentang resep untuk disenangi oleh Allah berikut ini:

“resep untuk disenangi Allah diantaranya dengan jalani hidup ini dengan tenang dan apabila ada orang lain berbuat buruk pada kita, balaslah sikap buruk itu dengan kebaikan, kalau ada tetangga fitnah, jangan dibalas dengan fitnah. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Di dalam sirah Nabi, banyak yang cinta Nabi karena Nabi membalas keburukan dengan kebaikan, yang membuat orang benci pada nabi, karena kepentingan-kepentingannya terhadap...”
(Penjelasan Ustaz Dedi Junaidi, observasi 17 Juli 2019).

Penjelasan ini memperlihatkan akan adanya aspek untuk membangun harmoni dengan sesama. Selanjutnya dijelaskan tentang anjuran bersedekah, ustaz Dedi Junaidi mengatakan bahwa:

“Ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah belajar untuk selalu infak, sadaqah, hatinya akan selalu bersyukur, uang jangan hanya dipakai sendiri, janganlah mengikuti hawa nafsu, orang sakit itu karena hawa nafsu makan dan orang tidak bahagia karena diperbudak oleh hawa nafsu”

Aspek moderasi beragama disampaikan secara tidak langsung oleh penceramah dalam acara pengajian tersebut sesuai dengan pengertian *wasathiyah* yakni membangun harmoni, tidak ekstrim atau tengah-tengah, serta berkontribusi dalam perbaikan aspek sosial ekonomi. Selanjutnya, penekanan moderasi beragama juga ditunjukkan oleh pemilihan ustaz yang moderat. Pengurus pengajian Rabu Pon ini menyampaikan;

“Ustaz/kyai yang akan mengisi ceramah ditentukan oleh pengurus dengan mempertimbangkan mereka bukan ustaz yang “keras”, pernah dahulu ada yang ngisi pengajian dengan pesan-pesan agak keras, jamaah merasa tidak cocok dan pengurus juga kurang cocok, kemudian tidak diundang lagi. Sekarang mengundang penceramah yang tidak keras” (Wawancara dengan pengurus pengajian Rabu Pon Batik Apip, 17 Juli 2019).

Transmisi nilai moderasi beragama oleh majelis taklim-majelis taklim tersebut di atas disampaikan dalam pengajian rutin yang diikuti oleh baik anggota maupun masyarakat umum. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk tetap menjamin kondisi keberagaman yang damai dan harmonis baik di internal umat Islam maupun masyarakat secara luas.

Simpulan

Transmisi pesan-pesan moderasi beragama telah dilakukan oleh majelis taklim di Yogyakarta melalui taklim ataupun kajian yang mereka selenggarakan. Masing-masing majelis taklim mempunyai kajian rutin dengan menghadirkan ustaz yang mereka tentukan sendiri. Pesan-pesan tersebut seperti ajakan untuk mengembangkan harmoni dengan sesama, tafsir jihad yang moderat serta kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Nilai moderasi beragama ini penting disampaikan kepada umat Islam dimana saat ini terjadi berbagai tindak intoleransi dan ceramah keagamaan yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok lain.

Daftar Pustaka

- Alagha, Joseph. Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 32 (3): 44-68. 2015.
- Bbc. com. Diusir dari Desa Karena Agama, Bagaimana Mencegah Intoleransi di Tingkat Warga? Update, 3 April 2019, diakses pada 17 Oktober 2019 dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>
- CnnIndonesia.com. 2018. DMI temukan 7,89 Persen Materi Ceramah Ulama berisi Kebencian. Terbit pada 27 Juli 2018, di akses pada 5 Mei 2020, dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180727161824-20-317521/dmi-temukan-689-persen-materi-ceramah-ulama-berisi-kebencian>
- Elsa online. Ringkasan Laporan Kondisi Kebebasan Beragama di Jawa Tengah 2018. Updated 2 Februari 2019, diakses 2 Juni 2019, dari: <https://elsaonline.com/ringkasan-laporan-kondisi-kebebasan-beragama-di-jawa-tengah-2018/>
- Haris, Munawir. 2015. Islam Moderat Konteks Indonesiadalam Perspektif Historis. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 7 (02): 257-272. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>
- Hilmy, Masdar. 2013. Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 07 (01): 24-48.
- KBBI online. majelis. diakses pada 17 Juni 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/majelis>
- KBBI online. Taklim. diakses pada 17 Juni 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taklim>

- Republika.co.id. Ulama Dunia Dukung Pesan Bogor.”*Republika.co.id*, update 3 Mei 2018, diakses 16 Desember 2019 dari: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/03/p858c8313-ulama-dunia-dukung-pesan-bogor>
- Rizqo, Kanavio Ahmad. Konferensi Ulama Hasilkan Lombok Message, Sepakat Lawan Rasisme. Update, Sabtu 28 Juli 2018, diakses pada 14 Juni 2019, dari: <https://news.detik.com/berita/d-4138345/konferensi-ulama-hasilkan-lombok-message-sepakat-lawan-rasisme>
- Rusmayani. 2018. Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswadi Sekolah Umum. *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 - 22 April 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.
- Schwedler, Jillian. 2011. *Review Article; Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis*. *World Politics* 63(2): 347–76. DOI: 10.1017/s0043887111000050
- Suara.com. 2019. *Salib Dipotong hingga Tolak Sedekah Laut, 4 Kasus Intoleransi di Yogyakarta*. Terbit pada 03 April 2019, di akses pada 6 April 2019, dari: <https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut-4-kasus-intoleransi-di-yogyakarta>
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Wheatley, Stephanie. 2011. From Violence to Voting: Toward an Islamist Theory of Moderation. Disertasi untuk program doctor pada Departemen Church studi Universitas Barley.
- Yahya, Fata Asyrofi. 2018. Meneguhkan Visi Moderasi dalam Bingkai Etika Islam Relevansi dan Implikasi Edukatifnya. *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 - 22 April 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.
- Yaqin, Muhammad Ainul. 2018. Dzikir Manâqib Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 - 22 April 2018 UIN

Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.

Zakiah, dkk. 2019. *Laporan hasil penelitian Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.

Zakiah. 2019. Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta. *Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18 (2): 28-50.

MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME BERBASIS PESANTREN SALAF

Joko Tri Haryanto

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berjajar ribuan pulau besar dan kecil yang di dalamnya hidup berbagai suku bangsa dengan beragama budaya, tradisi, dan kepercayaan. Keragaman ini disatukan dengan semangat nasionalisme yang membentuk satu ikatan sosial politik untuk mencapai tujuan bersama sebagai negara bangsa, yaitu Indonesia sebagaimana diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Tidak bisa dipungkiri, umat Islam sebagai mayoritas warga negara memiliki peran besar dalam pembentukan negara ini. Islam menjadi bagian dari landasan moral perjuangan kemerdekaan. Resolusi Jihad yang dimaklumkan Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 22 Oktober 1945 yang ditulis oleh pendiri NU sekaligus pendiri Pesantren Tebuireng Hadratusyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, menjadi bukti nasionalisme pesantren terhadap keberadaan negara Indonesia. Resolusi tersebut muncul disebabkan adanya ancaman Sekutu bersama NICA dan AFNEI yang ingin menjajah Indonesia kembali pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (Saputra, 2019: 205-237; Farih, 2016: 251-284).

Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak saja terjadi di awal-awal kemerdekaan saja. Pada masa sekarang, ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak kalah besarnya meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pasca Reformasi 1998, marak fenomena radikalisme dan terorisme yang mengancam kesatuan bangsa ini. Fenomena ini dalam konteks Indonesia dewasa ini banyak dikaitkan dengan sikap keberagamaan. Radikalisme dan terorisme tidak semata-mata berkaitan dengan agama, tetapi agama menjadi salah satu hal yang dapat mendasari perilaku radikal dan tindak terorisme. Kedua fenomena ini mencederai relasi sosial yang harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdullah, 2016: 1-28; Asrori, 2015: 253-268).

Fenomena keberagamaan yang cenderung pada sikap ekstrem tersebut menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag RI), untuk mendorong dan mempromosikan sikap beragama yang moderat. Terhitung sejak tahun 2018, Kementerian Agama telah melakukan berbagai program moderasi beragama, terutama di lingkungan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanggulangan menyebarnya pemahaman keagamaan ekstrem, radikal, dan gerakan terorisme melalui pendekatan *soft power* (Efendi, 2018). Program tersebut kemudian ditegaskan kembali di tahun 2019, Menteri Agama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2019 menekankan aspek penting dari “matra” Kementerian Agama yaitu moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integritas data. Aspek moderasi beragama ini dipandang penting dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia yang plural dan multikultur. Moderasi beragama ini diharapkan dapat mempengaruhi pikiran, ucapan, dan tindakan masyarakat beragama sehingga masyarakat bisa menjadi lebih toleran. Semua agama mengajarkan ajaran yang moderat, dan tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak ekstrem atau di luar batas (Adriyos, 2019).

Pada konteks tantangan keberagamaan dewasa ini, posisi pesantren di tengah pengarusutamaan moderasi menjadi sangat strategis, terlebih saat fenomena radikalisme menggejala dalam kehidupan beragama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan (Islam) telah memiliki pengalaman panjang dalam menjadi garda terdepan sebagai penjaga kebangsaan Indonesia, sehingga dapat turut membendung ancaman radikalisme keagamaan

(Ramadhan, 2015: 177-190; Mantu, 2015: 131-151; Suprpto, 2014: 246-260). Paham tersebut berkembang di antaranya berawal dari pemahaman yang anti terhadap keragaman dan alergi terhadap perbedaan. Padahal bangsa Indonesia adalah mozaik dari keragaman budaya, tradisi, adat-istiadat, dan keragaman lainnya yang tumbuh berkembang berdampingan dengan nilai-nilai agama. Hal ini karena para penyebar Islam terutama ulama berbasis pesantren mendorong pengamalan agama secara moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan harmonis dalam konteks adat, tradisi, dan budaya masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan kearifan lokal yang penting dalam membangun ikatan sosial di masyarakat, bahkan menjadi modalitas integasi bangsa Indonesia (Haryanto, 2018: 1-14).

Pesantren salaf dalam sejarah kebangsaan dan tradisi internalnya sendiri sesungguhnya telah menunjukkan adanya sifat dan sikap yang membangun toleransi dan penghormatan terhadap keragaman dan perbedaan. Pada sejarah pesantren tersirat dan tersurat kearifan lokal dalam menyikapi perbedaan yang ada. Pesantren salaf bahkan mampu memanfaatkan keragaman tradisi keilmuan dan tradisi budaya di lingkungannya guna penguatan sinergi dan jejaring pesantren. Tradisi keilmuan dan tradisi budaya tersebut berhasil disintesakan dalam memperkaya khazanah keilmuan keagamaan. Semua tradisi dan pandangan khazanah pesantren sesungguhnya merupakan suatu kontra-radikalismesendiri dalam keberagamaan.

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan pendidikan multikulturalisme di pesantren salaf dan kaitannya dengan upaya *mainstreaming* moderasi Islam yang pada akhirnya dapat menjadi gerakan kontaradikalisasi keagamaan yang menggejala dewasa ini. Pendidikan multikulturalisme dapat diupayakan dari pesantren kepada masyarakat lingkungannya. Hal ini karena tradisi multikulturalisme pada dasarnya telah menjadi bagian dari tradisi pesantren dan kalangan santri itu sendiri. Pesantren dapat mendiseminasikan pengaruh multikulturalisme tersebut agar masyarakat dapat terhindar dari ancaman radikalisme keberagamaan. Dengan demikian diskusi ini hendak mendorong pembumian, re-tradisi, dan penanaman ulang nilai-nilai multikulturalisme di pesantren salaf.

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif di mana data-data diperoleh terutama dari sumber-sumber sekunder berupa

hasil kajian-kajian terkait dengan pesantren. Selain itu, data-data juga diperoleh dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pengasuh pesantren dan pengalaman peneliti berkaitan dengan tradisi keagamaan di masyarakat. Pada beberapa kesempatan, peneliti berkesempatan berdiskusi dengan pengasuh pesantren di Solo seperti Pesantren Al-Muayyad dan Pesantren Takmirul Islam. Sementara di Semarang, peneliti berkomunikasi KH. Anasom, pengasuh Pesantren Al-Ibriz. Informasi lainnya dari tradisi pesantren ini peneliti peroleh dari penuturan guru ngaji peneliti sewaktu sekolah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena moderasi Islam dalam proses pendidikan multikulturalisme di lingkungan pesantren.

Berkaitan dengan tema ini, telah banyak kajian mengenai pesantren yang dilakukan oleh peneliti dan akademisi. Muammar Ramadhan (2015) meneliti pesantren Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah dan menemukan di pesantren tersebut terdapat nilai-nilai multikulturalisme yang signifikan menangkal pemikiran dan perilaku keagamaan yang radikal. Nilai-nilai tersebut secara aktif didesiminasikan melalui kegiatan dan pembiasan di lingkungan pesantren. Suprpto (2014) meneliti Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo Jawa Tengah menemukan, pesantren ini telah mengembangkan dan menginternalisasikan model kurikulum agama berbasis inklusivisme multikultural untuk menangkal gerakan radikalisme agama. Kurikulum ini menggunakan seperangkat nilai-nilai yang disusun dan diterapkan oleh siswa, seperti hidup bersama, dan saling memahami keberbedaan. Berbeda dengan penelitian di atas, penulis melakukan pengkajian tidak berbasis pada salah satu pesantren melainkan sintesa dari berbagai hasil temuan penelitian sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait pendidikan multikulturalisme di lingkungan pesantren yang mendorong *mainstreaming* moderasi Islam sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Agama.

Radikalisme dan Moderasi Beragama

Ancaman nasionalisme dan keberagamaan dewasa ini di antaranya berasal dari paham radikalisme. Radikalisme keagamaan ini mendasarkan pada ajaran agama untuk melakukan perubahan

pada masyarakat secara radikal sesuai dengan paham keagamaan yang dimilikinya. Kecenderungan dari paham radikalisme keagamaan adalah hilangnya toleransi dan sikap menghormati terhadap perbedaan. Pandangan radikalisme juga mendorong untuk menolak konsepsi berbangsa dan bernegara, dan berupaya untuk mengubah ideologi dan sistem berbangsa dan bernegara yang telah mapan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lebih ekstrem lagi, munculnya tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan keagamaannya, dan dari sini kemudian meningkat menjadi tindakan terorisme. Oleh karena itu, wajar jika radikalisme sering diasosiasikannya dengan tindak kekerasan, bahkan terorisme. Hal ini memang tak lepas dari meningkatnya aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan atas nama agama atau kelompok agama tertentu (Masfiah dan Haryanto dkk., 2016: 3).

Secara konseptual radikalisme tidak identik dengan terorisme maupun kekerasan. Istilah “radikalisme” yang terbentuk dari kata dasar “radikal” berasal dari bahasa Latin, *radix* yang berarti “akar” (Azca, 2013: 24). Pemahaman radikal atau “berpikir secara radikal” sama artinya dengan berpikir hingga ke akar-akarnya, hal tersebutlah yang kemudian bakal menimbulkan sikap-sikap anti kemapanan. Secara sosio-politik, radikalisme harus dibaca sebagai sikap antitesis pada arus utama (*mainstream*) yang ada di masyarakat baik itu politik, agama, maupun saintifik. Pada perspektif politik, radikalisme menjadi posisi dan ideologi yang mempersoalkan kemapanan oleh karenanya ia berada pada arus kritisisme dalam menuntut adanya perubahan dalam pandangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hasilnya, bisa bersifat radikalisme demokratis-inklusif maupun radikalisme intoleran-eksklusif. Radikalisme demokratis-inklusif menggunakan *logic of inclusion*, logika inklusi dan partisipatoris melalui aksi kolektif untuk bernegosiasi secara politik dengan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara. Adapun radikalisme intoleran-eksklusif menggunakan *logic of exclusion*, logika penarikan diri dari ko-eksistensi pada saat menghadapi dislokasi atau krisis. Pada radikal intoleran-eksklusif sering termanifestasi dalam bentuk sikap-sikap intoleran yang dapat berupa kekerasan (Azca, 2013: 25).

Radikalisme keagamaan ini telah nyata terjadi dalam bentuk kekerasan bernuansa agama bahkan sampai pada tindakan terorisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selama tahun

2016 mendapatkan pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sejumlah 97 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Kasus yang paling menonjol adalah pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah, pembatasan dan pelarangan ibadah, kegiatan keagamaan, dan ancaman/intimidasi kelompok leagamaan (Komnas HAM, 2016: 14-16). Sedangkan Wahid Foundation mencatat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2016 tercatat 204 peristiwa dengan 315 tindakan. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2015 yakni 190 peristiwa dengan 249 tindakan atau naik 7% (Wahid Foundation.,2016: 7). Namun angka ini turun di tahun 2017 menjadi 213 peristiwa dan 265 tindakan, serta di tahun 2018 turun lagi di angka 192 peristiwa dan 276 tindakan (Wahid Foundation., 2018). Walaupun terlihat ada penurunan, jumlah tersebut masih menjadi fakta adanya sikap radikalisme dalam beragama di tengah kehidupan masyarakat.

Tindakan terorisme di Indonesia harus diakui memiliki motif keagamaan telah mencederai kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia yang selama ini harmonis. Tercatat sejak tahun 1997 sampai 2002 terdapat 99 pengeboman dan menewaskan ratusan orang. Ledakan bom teror yang cukup mengemparkan terjadi tahun 2002 bom meledak di *Paddy's Bar* dan *Sari Night Club* di Bali dan menewaskan 202 orang, tahun 2003 bom meledak di hotel JW. Mariot Jakarta, menewaskan 11 orang dan 150 orang terluka, tahun 2004 bom meledak di kedutaan Australia di Jakarta, tahun 2005 bom Bali kedua terjadi, tahun 2009 bom meledak di hotel JW. *Marriot* dan *Rits Carlton* Jakarta, dan tahun 2011 bom meledak di masjid Mapolresta Cirebon dan di Gereja Kepunton Solo (Zakiyah, 2016: 2-4). Berikutnya bom di Sarinah Jakarta tahun 2016, bom di Kampung Melayu tahun 2017, dan kasus terorisme cukup dramatis karena berupa bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak di Surabaya tahun 2018 lalu (Raditya, 2019).

Aksi terorisme berupa peledakan bom di beberapa tempat tersebut kuat diduga memiliki kaitan dengan gerakan militan Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jemaah Islamiyah (JI). Hal ini diketahui dari pelaku pengeboman dan terduga teroris yang sudah tertangkap maupun telah dieksekusi mati bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok Islam radikal, misalnya beberapa

pelaku bom Bali I adalah anggota JI. Selain itu, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dibentuk di antaranya berperan sebagai sayap politik dari JI. Keterkaitan antara pelaku teror dengan kelompok keagamaan dan rangkaian aksi kekerasan atas nama agama merupakan salah satu indikasi adanya gerakan radikal keagamaan di mana fenomena fundamentalisme Islam di Indonesia ini menguat pasca rezim Orde Baru tahun 1998 (Zakiah, 2016: 2-4) .

Sikap dan pandangan keagamaan yang cenderung pada radikalisme menunjukkan pemahaman keagamaan ekstrem. Sikap ekstrem dalam beragama dapat mendorong munculnya tindakan kekerasan. Ekstremisme dalam beragama bisa berarti sikap atau pandangan yang sangat “kanan” atau ultra-konservatisme yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir lainnya. Ekstremisme beragama juga bisa sikap atau pandangan yang sangat “kiri” yakni ekstrem liberalisme yakni mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya. Kedua bentuk ekstremisme ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang *mainstream*, yakni sikap dan pandangan yang tengah-tengah (*wasath*) atau moderat (Tim Penyusun Kementerian Agama, 2019: 7-9).

Islam sebagai agama *rahmatan lil’alamin* secara prinsip mengedepankan ajaran *wasathiyah* atau moderasi sebagaimana yang firman Allah SWT, dalam kitab suci Alquran, yakni: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “*Ummatan wasathan* (umat pertengahan)” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. alBaqarah, 2: 143). Dengan demikian, konsep “Islam moderat” membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam dan bagaimana bersikap moderat dalam ber-Islam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya, baik dalam Alquran, Alhadis, maupun perilaku umat Islam dalam sejarah (Fauzi, 2018: 232-244; Miftahuddin, 2010).

Secara terminologi, kata moderasi semakna kata *wasath* atau *wasathiyah* dalam bahasa Arab, atau *tawassuth* (tengah-tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik” dan menyiratkan makna adil. Dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk bersikap

dan berpandangan yang tengah-tengah di antara pilihan ekstrem. Pilihan ekstrem dalam beragama yang dimaksud adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batasbatas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Tim Penyusun Kementerian Agama, 2019: 16-18).

Beragama yang moderat adalah sikap dan perilaku keberagamaan yang menyeimbangkan diri atas berbagai kepentingan hidup, seperti berimbang memperhatikan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan sebagainya. Moderasi beragama merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi melainkan juga kepentingan hidup bersama, yang dalam konteks Indonesia adalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama, dalam konteks keindonesiaan yang multikultural serta pluralitas sosial-budaya dan agama, diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam rangka merawat keindonesiaan. Kesepakatan awal para pendiri bangsa telah diwariskan dalam bentuk dasar negara Pancasila dan sistem kenegaraan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adatistiadat lokal, beberapa hukum agama di lembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai (Tim Penyusun Kementerian Agama, 2019: 10).

Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural

Bangsa Indonesia adalah mozaik berbagai budaya dan suku bangsa. Indonesia dengan sendirinya menjadi masyarakat majemuk (*plural society*) karena memiliki budaya dan tradisi yang beragam. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya berbagai

masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara (Suparlan, 2004). Keragaman etnis, agama, dan budaya di bentangan Nusantara ini diintegrasikan dan disatukan secara politis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat majemuk yang terbentuk melalui proses politik tersebut cenderung memiliki ikatan sosial yang rendah. Akibatnya, hubungan antar kelompok masyarakat mempunyai potensi untuk diskriminasi yang berujung pada pertentangan bahkan konflik horisontal. Adapun cara yang terbaik untuk mempererat kohesi sosial bangsa Indonesia adalah dengan mengubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multi-cultural society*). Caranya dengan mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup sekaligus keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suparlan, 2004). Masyarakat sebagai pemilik budaya, tradisi, dan agama hidup berdampingan secara egaliter, saling menghormati dan menerima perbedaan akan menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang multikultural.

Masyarakat multikultural meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan dan keragaman dalam budaya. Bhikhu Parekh (dalam Ujan, et.al., 2009: 160-162) menyebut ada 3 bentuk keragaman budaya yang dapat dijumpai dalam masyarakat modern. Pertama, keanekaragaman sub-budaya (*sub-cultural diversity*); di mana warga masyarakat yang sama-sama menganut dan meyakini sebuah kultur atau budaya yang kurang lebih sama, tetapi tidak menjalankan keyakinan dan praktik-praktiknya secara sama dalam sejumlah aspek kehidupan yang penting. Kedua, keanekaragaman perspektif (*perspective diversity*), di mana sejumlah warga teramat kritis dalam menyikapi atau menanggapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya dominan dan berupaya menyusun kembali prinsip-prinsip kehidupan tersebut agar lebih seimbang. Ketiga, keragaman komunal (*communal diversity*), dalam masyarakat terdapat sejumlah komunitas yang sadar diri, yang cukup rapi terorganisasi, dan yang percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu lewat praktik-praktik yang berbeda. Masyarakat yang multikultural setidaknya memiliki dua atau lebih komunitas budaya seperti yang dimaksud dikategori tersebut.

Masyarakat yang memiliki sikap multikultural berkeyakinan: perbedaan bila tidak dikelola dengan baik memang bisa menimbulkan konflik, tetapi jika mampu mengelolanya dengan baik maka perbedaan itu justru memperkaya dan bisa sangat produktif. Dalam masyarakat multikultural berkembang sikap menghargai perbedaan, mengembangkan sikap hormat akan keunikan masing-masing pribadi atau kelompok tanpa membedakan etnis, agama ataupun gender (Ujan, et.al., 2009: 16-17). Masyarakat multikultural tidak saja mengisyaratkan adanya keragaman budaya, tetapi juga pandangan yang positif terhadap keragaman tersebut. Pandangan inilah yang disebut multikulturalisme. Menurut Hendar Putranto (dalam Ujan, et.al. 2009, 153) multikulturalisme adalah paham yang berbasis pada kepercayaan akan adanya dan pentingnya menghargai sekaligus mengakui (*afirmation and recognition*) terhadap keanekaragaman budaya (*cultural diversity*).

Lawrence Blum (dalam Ujan, et.al. 2009, 14) menawarkan definisi sebagai berikut :

“Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.”

Dengan demikian multikulturalisme bukan cara pandang yang menyamaratakan kebenaran-kebenaran lokal, tetapi justru mencoba membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada sehingga tercipta perdamaian dan kesejahteraan bersama (Ujan, et.al. 2009: 15). Indonesia belum (atau tidak) secara langsung menjadikan kebijakan multikulturalisme sebagai bagian dari hukum positif. Namun demikian, dalam konstitusi UUD 1945, hak-hak asasi warga negara mendapatkan jaminan, seperti hak berserikat, berkumpul, berekspresi, dan kebebasan beragama. Di tengah kehidupan masyarakat juga terdapat budaya dan tradisi yang selaras dengan multi-

kuturalisme. Bekerjasama atau gotong royong, sikap ramah tamah dan sopan santun, menghormati orang lain dan menghargai perbedaan-perbedaan merupakan budaya yang telah ada di masyarakat kita jauh-jauh hari sebelum NKRI ada. Realitas tersebut sesungguhnya telah menunjukkan bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikultural.

Sedangkan beberapa sikap yang dapat merusak nilai-nilai multikulturalisme di tengah kehidupan berbangsa di Indonesia antara lain:

1. Klaim kebenaran (*truth claim*), pandangan ini sangat tidak *favourable* dan tidak kondusif bagi upaya membangun tata pergaulan masyarakat pluralistik yang sehat. Selain itu sikap ini berpotensi menjadi eksplosif dan destruktif yang mengarah pada ekstrimitas dalam berbagai bentuknya;
2. Prasangka dan stereotip (pandangan negatif dengan pihak lain)
3. Stigma dan penghakiman (pelabelan bahwa pihak lain buruk)
4. Eksklusivisme (tidak bersedia berhubungan dengan pihak lain)
5. Arogansi kelompok (bahwa kelompoknya lebih unggul daripada kelompok lain)
6. Pembelaan terhadap aksi kekerasan dan/atau aksi melawan hukum atas nama kelompok/agama

Masyarakat perlu didorong menuju sikap multikulturalisme ini melalui konsep pendidikan multikultural. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha pembelajaran yang mendorong manusia secara aktif mengembangkan potensi diri dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Setidak-tidaknya hal itu yang menjadi penekanan dari Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Idris (dalam Ibrahim, 2013: 129-154), bahwa pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia agar mendapatkan kemampuan sosial dan individual yang optimal memberikan relasi yang kuat antar individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Konsep multikulturalisme dikaitkan dengan pendidikan di atas, maka pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk

mengembangkan perasaan (afeksi), pengetahuan (kognisi), dan ketrampilan berperilaku yang menerima kebhinekaan, dan menghormati perbedaan.

Pengertian tentang pendidikan multikultural dari pakar hampir memiliki penekanan yang sama, yakni penghargaan pada keanekaragaman budaya. Menurut Baidhaw (2005: 8) pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*). Pendidikan multikultural ini menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-relatif mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralism, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan. Musa Asy'arie (dalam Fatmawati, Pratiwi, dan Erviana, 2018: 80-92) menyatakan bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat. 4.000.000

Menurut Baidhaw (2005), pendidikan yang berwawasan multikultural menegaskan beberapa prinsip: a) belajar hidup dalam perbedaan dengan mengembangkan sikap toleran, empati, dan simpati; b) membangun sikap saling percaya sebagai modal sosial terpenting dalam masyarakat multikultural; c) memelihara saling pengertian, memahami dan simpati terhadap perbedaan dan memberi kontribusi terhadap relasi yang dinamis; d) menjunjung sikap saling menghargai perbedaan baik pandangan maupun keyakinan yang berujung pada sikap saling berbagi di antara semua individu dan kelompok; e) menumbuhkan kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam menyikapi perjumpaan dengan pluralitas; f) membagi kepedulian tentang apresiasi dan interdependensi di antara perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan agama dan keyakinan; dan g) mengajarkan resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan (Baidhaw, 2005: 78-85).

Pendidikan Multikulturalisme Pesantren

Bangsa ini mampu bertahan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya ditopang oleh sikap masyarakat Indonesia sendiri yang menghargai kemajemukan, keragaman,

dan menghargai perbedaan. Sikap tersebut menunjukkan multi-kulturalisme bangsa Indonesia yang menjadi pengikat integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia salah satunya berasal dari sikap dan paham radikalisme. Maraknya gejala radikalisme bahkan tindakan terorisme dewasa ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan warga bangsa untuk diatasi bersama, termasuk di dalamnya adalah pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pengaderan generasi bangsa memiliki peran penting dalam mempertahankan NKRI melalui penanaman sikap multikulturalisme.

Pesantren telah menunjukkan perannya dalam mendukung, menjaga, dan merawat kemerdekaan NKRI dalam rentang sejarahnya yang bahkan lebih tua dari pada republik ini sendiri. Pesantren, terutama pesantren salaf memiliki pengalaman mengembangkan multikulturalisme, dan bahkan nilai-nilai tersebut terwariskan dari generasi ke generasi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menekankan pada pendidikan karakter dan moralitas, sehingga pesantren dapat menjadi pusat persemaian generasi-generasi Muslim yang cinta damai, moderat, dan anti kekerasan. Karakter otentik pesantren Indonesia, khususnya pesantren tradisional atau salaf dikenal sangat ramah, toleran, berbaur dengan masyarakat, kaya dengan kearifan lokal, dan jauh dari budaya dan ideologi radikalisme. Pemahaman ajaran agama Islam dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di lingkungan pesantren sejak dahulu adalah moderasi Islam. Oleh karena itu, pada saat muncul gejala radikalisme dewasa ini peran penting pesantren adalah mendiseminasikan moderasi Islam melalui nilai-nilai multikulturalisme ke masyarakat umum.

Karakter otentik pesantren salaf adalah jauh dari tradisi kekerasan. Sejak awal, *mainstream* pesantren sesungguhnya menampilkan wajahnya yang toleran dan damai. Di pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan *performance* pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa, terutama yang bermazhab Syafi'i dan memiliki hubungan dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU), menampilkan sikap akomodasi yang seimbang dengan budaya setempat sehingga pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Keberhasilan pesantren seperti ini kemudian menjadi model keberagamaan yang toleran di kalangan

umat Islam pada umumnya. Tak heran, jika karakter Islam di Indonesia seringkali dipersepsikan sebagai Muslim yang ramah dan damai (Mantu, 2015: 131-151; Suprpto, 2014: 246-260; Ramadhan, 2015: 177-190).

Hasil penelitian Mu'ammarr Ramadhan (2015) menemukan di pesantren terdapat berbagai nilai-nilai multikulturalisme yang biasa dikembangkan dalam lingkungan pesantren dan dapat didiseminasikan kepada masyarakat di luar pesantren. Nilai-nilai multikulturalisme tersebut antara lain:

1. kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind: ukhwah bashariyah/ insaniyah, wathaniyah, Islamiyah*)
2. kompetisi dalam kebaikan (*competition in good works: fastabiqul khairat*) memberikan maaf kepada orang lain (*forgiveness toward humankind: halal bihalal*)
3. dialog (ko-eksistensi dan pro-eksistensi: musyawarah, *bahtsul masail, bahtsul kutub*)
4. kehidupan bersama (*living together: senasib sepenanggungan, ro'an/kerja bakti, muamalah*),
5. berperilaku yang baik (*akhlakul karimah*)
6. berpikir positif (*positive thinking: husnudzon*)
7. kesederajatan (*equality/egalitarianisme*),
8. saling memahami (*mutual understanding*),
9. saling menghargai (*mutual respect*),
10. kejujuran (*trust: amanah*),
11. toleran (*tolerance: tasamuh*)
12. rekonsiliasi, resolusi konflik, kedamaian, menghindari kekerasan (*non violence*), dan kesejahteraan sosial

Nilai-nilai multikulturalisme tersebut di lingkungan pesantren diajarkan melalui berbagai metode pembelajaran yang berkembang secara alamiah sebagai bagian dari budaya pesantren. Metode desiminasi nilai-nilai multikulturalisme tersebut di pesantren diterapkan dalam bentuk metode sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan (2015), sebagai berikut :

- a. metode pembelajaran langsung: di mana para pengasuh pesantren memberikan materi tentang pengajaran-pengajaran yang

- memiliki dan kompatibel dengan nilai-nilai multikulturalisme secara langsung melalui ceramah pengajian.
- b. metode diskusi dan dialog: tradisi dialog dan diskusi seperti *bahtsul masail* atau *bahtsul kutub* mengajarkan para santri untuk saling menghargai perbedaan pendapat.
 - c. metode pembiasaan: kehidupan di pesantren sendiri sesungguhnya adalah suatu pembiasaan untuk menerima perbedaan, karena santri umumnya berasal dari daerah yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda pula, tetapi santri dibiasakan menerima segala kondisi tersebut.
 - d. metode keteladanan: para pengasuh memberi contoh keteladanan pada santri mengenai sikap-sikap hormat-menghormat, dan saling menghargai perbedaan.
 - e. metode berkisah: ada metode pembelajaran tentang nilai-nilai keagamaan maupun nilai kehidupan termasuk di dalamnya nilai-nilai multikulturalisme melalui kisah-kisah baik yang berasal dari cerita orang suci (hagiografi) maupun dari kehidupan sehari-hari.
 - f. metode kearifan lokal: pesantren umumnya sangat akrab dan menghormati budaya lokal yang menjadi bagian dari lingkungan pesantren, sehingga nilai-nilai budaya lokal yang mendukung perilaku keseharian dan moralitas termasuk nilai-nilai multikulturalisme disampaikan kepada para santri.

Contoh menarik dari kearifan lokal yang digunakan oleh pesantren untuk mengembangkan multikulturalisme adalah berupa ungkapan tradisional dan lagu atau tembang tradisional. Di pesantren Al-Hikmah Benda, KH Masruri Mughni (alm) sering menyampaikan ungkapan “*jerogno sumurmu*” yang artinya dalam kehidupan ini orang atau santri harus melapangkan dada untuk menerima perbedaan seperti sumur yang semakin dalam ia akan semakin bisa menampung banyak air. Ungkapan itu juga berarti kemauan untuk membuka diri dengan siapa pun, dan siap menerima ilmu pengetahuan (Ramadhan, 2015). Ungkapan “*meluudhu sanajan mungsak klungsu*” disampaikan oleh KH Dian Nafi’, pengasuh PP Al Muayyad Windan Surakarta. Ungkapan ini bermakna agar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setiap warga negara harus ikut memberi dukungan walaupun sekecil biji buah asam (*klungsu*). Bentuk dukungan ter-

sebut di antaranya adalah menjaga keutuhan NKRI (Wawancara dengan KH Dian Nafi’, tanggal 12 Oktober 2013).

Beberapa ungkapan tradisional yang lain terkait kerukunan dan multikulturalisme yang sering disinggung di lingkungan pesantren antara lain:

Tabel 1.Contoh Ungkapan Tradisional Multikulturalisme

Ungkapan Tradisional	Maknanya
<i>Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan</i>	Bukan teman dan juga bukan saudara tetapi kalau seseorang itu meninggal dunia kita ikut merasa kehilangan
<i>Tuna sathak bathi sanak</i>	Walau rugi sedikit tetapi mendapat untung berupa persaudaraan
<i>Ngono yo ngono ning aja ngono</i>	Sesuatu diterapkan tidak kaku tetapi melihat situasi sehingga tidak menyinggung orang lain
<i>Wani ngalah luhur wekasane</i>	Siapa yang berani mengalah untuk menghindari kondlik akan mendapatkan kemuliaan pada akhirnya
<i>Kena iwake aja nganti buthek banyune</i>	Mendapatkan ikan tetapi jangan sampai membuat keruh airnya, dalam mencapai keinginan atau kepentingannyatidak boleh menimbulkan persoalan di lingkungannya
<i>Tepa slira</i>	Selalu melihat dan menimbang dengan diri sendiri sehingga muncul sikap menghargai dan menghormati orang lain

Sumber: Wawancara dengan KH Ali, pengasuh Pesantren Takmirul Islam Surakarta, tanggal 11 Oktober 2013.

Selain melalui ungkapan, ada pula pesan kerukunan dan multi-kulturalisme ada kalanya juga disampaikan dengan tembang atau lagu. KH. Anasom, pengasuh Pesantren al-Ibriz Semarang juga menyampaikan nilai-nilai sosial seringkali diajarkan oleh orang-orang tua dahulu melalui sarana lagu atau tembang dolanan anak seperti *macapat*. Salah satunya adalah tembang *Pucung*, yang menggambarkan tuntunan agar orang saling membangun persaudaraan bukan saling bermusuhan hanya karena perbedaan, yang digambarkan dengan percakapan jari jemari.

Tabel 2. Lagu Macapat

Lirik Lagu	Makna
<i>Kang pinungsun sekawit met dongengipun Dariji tukaran Lawan kadanging pribadi Purwaniro pinuduh jahil manabdo</i>	Yang disusun tentang cerita ini Jari jemari saling bertengkar Pertengkar dengan sesama saudara sendiri Saling menuduh dan menghujat
<i>Enthik enthik patenono si temunggul Gek dosane opo Dosane ngungkul ungkuli Di ojo di malati sedulur tuwo</i>	Wahai kelingking bunuhlah si jari tengah (yang berkata si jari telunjuk) Apakah kesalahannya (yang berkata si jari kelingking) Kesalahannya karena ia paling panjang sendiri (yang berkata si jari telunjuk) Saudara janganlah begitu tidak baik dengan saudara (yang berkata si jari manis)
<i>Bener bener enak seger rasanipun Mangkono prayoga Ojo sok jahil jinahil Seduluran yen rukun gawe santosa</i>	(yang berkata si ibu jari) Memang benar akan terasa nikmatnya Apa yang seharusnya Jangan suka saling mengganggu Persaudaraan kalau rukun akan saling menguatkan

Sumber: Wawancara dengan KH. Anasom, pengasuh Pesantren al-Ibri
Semarang, tanggal 23 Juni 2014.

Selain lagu *macapat* tersebut, ada pula lagu dolanan anak yang pada jaman dahulu sering dinyanyikan anak-anak untuk permainan kalangan umum termasuk pesantren salaf yang mengandung nilai-nilai multikulturalisme, seperti lagu dolanan *Jamuran*. Lagu dolanan *Jamuran* itu merupakan adaptasi dari ungkapan nasehat berbahasa Arab untuk mengembangkan sikap menghormati perbedaan pendapat, sebagaimana liriknya di bawah ini:

Tabel 3. Lirik Lagu Jamuran

Lirik Bahasa Jawa	Bahasa Arab	Bahasa Indonesia
jamuran, jamuran, ya ge ge thok jamur apa, ya ge ge thok jamur gajih brejijih sak ara ara sira mbadek jamur apa?	Ya murren, ya murren, qaula haqqa Ma hadza murren? Qaula haqqa Walau kana murren, qaula haqqa Kana murren, hujjah bil hujjah kulliha Ajib ma hadza murren?	Pahit, pahit, katakan sebenarnya Apa rasa pahit itu? Katakan sebenarnya Walaupun itu pahit, katakan sebenarnya Rasa pahit itu, dialogkan selalu dimana kapan saja Coba terangkan, apakah rasa pahit itu?

Selain itu, ada satu lagu lagi yang cukup terkenal yang muncul dari lingkungan pesantren, yakni lagu yang bernuansa kebangsaan dan kecintaan pada tanah air Indonsia yaitu lagu *Shubbanul Wathon* atau yang lebih dikenal *Ya lal Wathon*. Lagu ini merupakan karangan KH Wahab Chasbullah, seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Berdasarkan berbagai informasi, lagu ini digubah oleh KH Wahab Chasbullah pada tahun 1916, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lagu *Shubbanul Wathon* gubahan KH Wahab Chasbullah memiliki versi yang lebih panjang dari pada lagu *La Yal Wathon* yang lebih terkenal sekarang ini. Lagu *La Yal Wathon* yang populer sekarang ini merupakan lagu mars kebangsaan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren-pesantren salaf adalah saduran yang dilakukan oleh KH Maemoen Zubair (alm) salah satu tokoh NU terkemuka dari Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Beliau memberikan *ijazah* syair lagu *La Yal Wathon* untuk dijadikan lagi mars di tahun 2012 (Gunawan, 2018: 14; Muliati dan Sari, 2018: 5; Aynina, 2019: 51-56) . Syair lagu tersebut sebagaimana di bawah ini:

Tabel 4. Lirik Lagu *La Yal Wathon*

Lirik dalam bahasa Arab	Lirik dalam bahasa Indonesia
<ul style="list-style-type: none">• Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon• Hubbul Wathon minal Iman• Wala Takun minal Hirman• Inhadlu Alal Wathon (2X)• Indonesia Biladi• Anta ‘Unwanul Fakhoma• Kullu May Ya’tika Yauma• Thomihay Yalqo Himama (2X)	<ul style="list-style-type: none">• Pusaka Hati Wahai Tanah Airku• Cintamu dalam Imanku• Jangan Halangkan Nasibmu• Bangkitlah Hai Bangsa (2X)• Indonesia Negriku• Engkau Panji Martabatku• Siapa Datang Mengancammu• Kan Binas di bawah dulumu (2X)

Sumber: Gunawan, 2018: 53-54.

Moderasi Islam Berbasis Pesantren

Moderasi Islam sudah tentu bukan barang baru di lingkungan pesantren. Lembaga pendidikan keagamaan ini telah memiliki pengalaman panjang terkait dengan bagaimana menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam secara harmoni dalam konteks lingkungannya, baik sosial-budaya maupun politik. Konsep moderasi sebenarnya intrinsik ajaran Islam, tentu telah terejawantah dalam bentuk pemahaman, nilai-nilai, dan perilaku kehidupan civitas pesantren. Pesan keagamaan yang menebarkan ajaran toleransi, cinta kasih, damai, hidup berdampingan dengan umat seagama dan umat beda agama, saling menghargai sesama, serta ajakan saling membantu terhadap orang lain sebagai ajaran moderasi beragama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada Munas ke-9 di Surabaya pada tanggal 24-27 Agustus 2015, merumuskan konsep *wasathiyyah* sebagai *mainstream* dan cara pandang dalam menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks budaya dan kemajemukan bangsa. Ada sepuluh prinsip konsep *wasathiyyah* dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang majemuk (dikutip dari Munir dan Saputra, 2019: 67-88), yaitu:

1. *Al-Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrâth* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrîth* (mengurangi ajaran agama).
2. *Al-Tawâzun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirâf* (penyimpangan) dan *ikhtilâf* (perbedaan).
3. *Al-I'tidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Al-Tasâmuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Al-Musâwât* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.

6. *Al-Syûrâ* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Al-Ishlâh* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'amah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhâfazhah 'ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*.
8. *Al-Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. *Al-Tathawwur wa al-Ibtikâr* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.
10. *Al-Tahadl-dlar* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

Pendidikan yang diselenggarakan pesantren mendorong sikap keberagaman santri dan masyarakat lingkungannya bersikap moderat. Berbagai materi terkait perbandingan mazhab, pendidikan akhlak, dan lainnya mendorong sikap saling menghormati perbedaan pendapat, sikap santun, dan kesopanan. Setidaknya sikap moderasi beragama dalam konsep *wasathiyah* di atas menunjukkan pada sikap moderasi yang berkaitan dengan dua hal. Pertama moderasi sebagai sikap individual, yakni sikap diri santri kaitannya dengan kepentingan dan pengembangan dirinya, terutama spiritual dan mental. Kedua moderasi sebagai sikap diri kaitannya dengan relasi dirinya dengan lingkungannya secara sosial, budaya, maupun politik.

Pada konteks sikap moderasi sebagai sikap individu, pesantren mengajarkan perilaku dan mentalitas yang berimbang, misalnya pengajaran tentang sabar dan ikhtiar; pemaksimalan upaya memecahkan persoalan keagamaan dengan berbasis pada diskusi (*basul masail*) yang mengedepankan argumentasi berupa dalil *naqli* (sumber keagamaan) dan dalil *aqli* (sumber ilmiah). Adapun dalam konteks

sikap moderasi kaitannya dengan relasional, pendidikan pesantren mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam sikap toleransi. Masih dalam konteks relasi ini, tidak kalah penting adalah sikap cinta kepada bangsa dan negara serta tanah air. Hal ini yang tidak lepas dari pengajaran di pesantren yakni sebagaimana diajarkan dalam kitab-kitab kuning atau *at-turats*.

Konsep moderasi beragama atau “*al-wasathiyah*” yang dikembangkan pesantren terkait tentang *akidah* (keyakinan), *ibadah* (pelaksanaan hukum dan ritual keagamaan), *dakwah* (syiar agama), dan *akhlak* (etika). Keempatnya menjadi fokus pendidikan pesantren yang disampaikan kepada santri dan masyarakat lingkungannya melalui kegiatan *halaqah* dan pengajian umum sehingga membentuk pola pikir yang moderat. Pendidikan pesantren juga mengajarkan para santri metode pemahaman dan pengamalan teks-teks keagamaan dengan cara: 1) pemahaman terhadap realitas kekinian (*fiqh al-waqi'*); 2) pemahaman terhadap fiqh prioritas (*fiqh alauwlawiyyat*); 3) pemahaman terhadap konsep sunatullah dalam penciptaan makhluk (*fiqh al-alam*); dan 4) pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara komprehensif (*fiqh al-Maqasid*). Pemahaman ini merupakan bekal untuk menguasai budaya, watak masyarakat, tujuan syariah, dan kondisi eksternal di masyarakat sehingga para santri nantinya akan bijaksana melihat fenomena di masyarakatnya (Abdullah, 2019: 55-74).

Kondisi dalam lingkungan juga sesuai dengan konsep multi-kulturalisme, sebagaimana Bhikhu Parekh (dalam Ujan, et.al., 2009: 160-162) sebutkan, yakni keanekaragaman sub-budaya (*sub-cultural diversity*), keanekaragaman perspektif (*perspective diversity*), dan keragaman komunal (*communal diversity*). Pada lingkungan pesantren, latar belakang santri yang berasal dari berbagai daerah bahkan suku yang berbeda sehingga membentuk watak budaya santri yang berbeda-beda pula. Hal ini membentuk kesadaran para santri untuk menerima perbedaan budaya dalam berinteraksi sosial di lingkungan pesantren. Penghormatan terhadap sikap dan pandangan yang berbeda ditunjukkan dalam pengajaran fiqh yang umumnya dalam pembelajaran santri ditunjukkan macam-macam pendapat ulama terkait persoalan fiqh, dan materi perbandingan mazhab. Adapun penerimaan terhadap keragaman komunal dengan sendiri terbentuk dalam berbagai pembelajaran di pesantren terutama dalam

pembelajaran berorganisasi, baik internal pesantren maupun di luar pesantren. Kondisi lingkungan dan metode pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung di pesantren sangat mendukung terciptanya pendidikan multikultural.

Simpulan

Tantangan keberagaman di Indonesia adalah menjaga pendulum agama, terutama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, agar berada dalam posisi moderasi. Moderasi ini sesungguhnya menjadi sifat ajaran agama Islam dan bahkan ditekankan dalam sumber Alquran. Namun fenomena radikalisme, kekerasan bernuansa agama, dan bahkan terorisme pada dekade terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman Islam oleh sebagian umat Islam ke sudut ekstrem. Tentu saja ekstremisme beragama ini tidak hanya ke arah “kanan” fundamentalisme, tetapi juga ke arah “kiri” liberalisme seperti munculnya sikap permisif dalam beragama.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam rentang sejarahnya telah menjadi garda terdepan dalam menjaga moderasi Islam ini. Praktik pendidikan di lingkungan pesantren mendorong sikap keberagaman yang moderat. Hal ini didukung pula oleh adanya “rasa” multikulturalisme di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, moderasi beragama ini dapat didorong kembali melalui lembaga pesantren. Tradisi multikultural telah membentuk sivitas pesantren menjadi manusia yang memiliki kebijaksanaan, sikap toleran, saling menghargai dan menghormati. Tidak hanya itu, pesantren juga menjadi pembentuk watak nasionalisme dan kebangsaan, salah satu hal penting dalam konsep moderasi atau *wasathiyah Islamiyah*. Berangkat dari hal tersebut, maka rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada pemerintah terutama Kementerian Agama agar melibatkan pesantren dalam kegiatan mainstreaming moderasi beragama. Dunia pesantren memiliki bekal dan modal yang berlimpah kaitannya dengan moderasi beragama ini, baik substansinya maupun metodenya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Anzar. 2016. Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *Jurnal Addin* Vol.10 No.1 Februari 2016. Hlm. 1-28
- Abdullah, Mukhammad. 2019. Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Beragama: dari Klasik ke Modern. *Prosiding Nasional*
- Adriyos, Benny. 2019. “Rakernas Kemenag 2019 Usung Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat” <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/rakernas-kemenag-2019-usung-moderasi-beragama-untuk-kebersamaan-umat> diakses 14 Desember 2019
- Asrori, Ahmad. 2015. Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.9 No.2 Desember 2015. Hlm. 253-268
- Aynina, Rizki. 2019. “Sejarah dan Perkembangan Lagu Syubbanul Wathan”. *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Azca, Muhammad Najib. 2013. “Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru”. *Jurnal Maarif* Vol. 8, No. 1 — Juli 2013, hlm. 14-44
- Baidhawiy, Zakiyudin, 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga
- Efendi, M.Arif. 2018. “Kemenag Canangkan Program Moderasi Beragama Tanggulangi Paham Ekstrim”. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-canangkan-program-moderasi-beragama-tanggulangi-paham-ekstrim> diakses 14 Desember 2019

- Farih, Amin. 2016. Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, hlm. 251-284. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.2.969>
- Fatmawati, Laila; Pratiwi, Rani Dita ; dan Erviana, Vera Yuli. 2018. Pengembangan Modul Pendidikan Multikultural Berbasis Karakter Cinta Tanah Air dan Nasionalis pada Pembelajaran Tematik. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol.8 No.1 Januari 2018. Hlm. 80-92
- Fauzi, Ahmad. 2018. Moderasi Islam Untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 02 No.02 Juli-Desember 2018. Hlm.232-244.
- Gunawan, Muhammad Arif. 2018. “Nilai-nilai Islam dalam Lagu Ya Lal Wathon dan Implementasinya bagi Pengokohan Jiwa Nasionalisme Siswa MI Ma’arif Al-Hasani Gresik”. *Skripsi* Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Haryanto, Joko Tri. 2018. “Nilai Kerukunan Pada Cerita Rakyat Dayuhan-Intingan Di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan”. *Jurnal Smart* Vol.4 No.1 Juni 2018, hlm: 1-14. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.598>
- Komnas HAM. 2016. Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan 2016. Jakarta : Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf> diunduh tanggal 30 Januari 2020
- Mantu, Rahman. 2015. Bina-Damai dalam Komunitas Pesantren: Sebuah Upaya Counter-Radikalisme. *Jurnal Walisongo* Vol.23 No.1 Mei 2015. Hlm. 131-151
- Masfiah, Umi, dan Haryanto, Joko Tri.. 2016. “Prolog: Melacak Radikalisme Kelompok Keagamaan dalam Konstelasi Kebangsaan”. Dalam Haryanto, JT (ed). (2016). *Radikalisme dan Kebangsaan: Gerakan Sosial dan Literatur Organisasi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- Miftahuddin. 2010. Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Mozaik*. Vol.5, No.1. Juni 2010
- Muliati, Binti dan Sari, Rismalia. 2018. Menanamkan Karakter Bangsa Melalui Lagu-lagu Patriotik bagi Peserta Didik Tingkat Pendidikan Dasar. *Jurnal al-Hikmah* Vol.6 No.1 Maret 2018. Hlm. 1-11
- Munir, Ahmad, dan Saputra, Agus Romdlon. 2019. Impelemntasi Konsep Islam Wasathiyah Studi Kasus MUI Eks Karesidenan Madiun. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* Vol.13 No.1 tahun 2019. Hlm. 67-88.
- Raditya, Iswara N. 2019. "Kronologi & Sejarah Bom Bunuh Diri di Indonesia: Bali Hingga Medan", diakses dari <https://tirto.id/kronologi-sejarah-bom-bunuh-diri-di-indonesia-bali-hingga-medan-elAt> , diunduh 2 Juni 2020.
- Ramadhan, Mu'ammarr. 2015. Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan Multikultural dan Inklusivisme (Studi pada Pesantren al-hikmah benda Sirampog Brebes). *Jurnal Smart* Vol.01 No.02 Desember 2015. Hlm.177-190.
- Saputra, Inggar. 2019. Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara* Vol.3 No.1 Januari-Juni 2019. Hlm.205-237.
- Suparlan, Parsudi. 2004. "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas". Makalah dalam *Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?*, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004
- Suprpto, Rohmat. 2014. Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan Multikultural-inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo). *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* Vol.15 No.2 Desember 2014. Hlm.246-260
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litvang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Ujan, Andre Ata et.al. 2009. *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT.Indeks

- Wahid Foundation. 2016. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Wahid Foundation. Hlm. 7.
- Wahid Foundation. 2018. “presentasi laporan tahunan kemerdekaan beragama berkeyakinan wahid foundation 2018. Bahan presentasi. <https://drive.google.com/file/d/1b16CEUlwXcDZXhDhR-rj71goChb1DZWE/view> diakses pada tanggal 30 Januari 2020
- Zakiah, dkk. 2016. “Radikalisme Kelompok-Kelompok Keagamaan dalam Konstelasi Kebangsaan”. *Laporan Hasil Penelitian* Balai Litbang Agama Semarang.

GERAKAN LITERASI KEAGAMAAN BERBASIS BUDAYA: STUDI PESANTREN HONOCOROKO WONOGIRI

Mibtadin dan Rosidin

Pendahuluan

Kehadiran pesantren di tengah masyarakat bukan semata sebagai institusi pendidikan keagamaan saja, tetapi juga mengembangkan budaya, membentuk sistem sosial, dan menguatkan kearifan lokal. Sebab pesantren merupakan produk dari sistem pendidikan pribumi yang memiliki akar sejarah, budaya, dan sosial asli Indonesia (Ismail, 2002: XIV). Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam berfungsi mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu, 1994:7). Karena itu, pesantren telah menjadi milik budaya bangsa dalam dunia pendidikan, dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Mastuhu, 1994:7). Tidak mengherankan jika pesantren muncul sebagai komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas (Wirosardjono, 1987: 213). Pada akhirnya, sistem pendidikan yang awalnya bercorak tradisional, mengalami perkembangan lebih bersifat dinamis, adaptif, emansipatif, dan responsif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman.

Pesantren Honocoroko merupakan salah satu pesantren bercorak budaya yang ada di Wonogiri, dirintis pada tahun 2010. Sebagai pesantren rintisan bercorak budaya Jawa modern di Wonogiri, Honocoroko terpanggil untuk menguatkan dan mengembangkan diri, berangkat dalam kearifan masa silam untuk menjangkau kejayaan masa depan dengan konsep tarbiyah yang utuh. Mempertimbangkan visi dan misi lembaga dakwah strategis dan penguatan ukhuwah Islamiyah, Honocoroko memandang bahwa pendidikan keagamaan bagi generasi muda haruslah memenuhi empat kriteria kecakapan. Pertama, kecakapan Alquran sebagai dasar utama ajaran agama Islam. Kedua, kecakapan keilmuan, baik ilmu-ilmu yang langsung untuk mendalami ajaran agama dari kitab-kitab kuning beserta ilmu penunjangnya maupun untuk mencerdaskan kehidupan; ketiga, kecakapan humaniora yang memungkinkan santri untuk hidup secara arif melalui bahasa, sastra, tarikh, dan kebudayaan. Keempat, kecakapan transformatif yang menguatkan bakat para santri untuk kreatif memfungsikan ilmu ke dalam praktik kehidupan sehari-hari yang bermartabat (Wawancara, Mahabie, 2019).

Selain itu, Pesantren Honocoroko juga berperan dalam menguatkan kearifan lokal masyarakat sekitar pondok yang menjadi penyangga keberadaan pesantren ini dengan membuka pengajian untuk mereka yang dikenal dengan *Legawa*. Tujuan dari pengajian *Legawa* ini adalah penguatan literasi keagamaan, terutama pembelajaran Alqur'an, selain itu ada yang lain, yaitu mengajak kembali masyarakat Segawe Wonogiri untuk belajar kearifan lokal, terutama pesantren dan komitmennya terhadap nilai-nilai keadaban dan kemajemukan. Menurut Ahans Mahhabie, keberadaan pesantren yang menjadi satu dengan kehidupan masyarakat telah menjadikan pesantren berperan sebagai motor penggerak proses perubahan sosial yang ada di masyarakat sekitarnya (Wawancara, Mahabie, 2019). Karakter Pesantren Honocoroko yang tidak terpisah dengan budaya dan tradisi masyarakat menjadikan pesantren ini di satu sisi memerankan sebagai pendorong perubahan sosial di Sedawe Wonogiri, di sisi lain juga sebagai filter atas perkembangan dunia di luar pesantren bagi masyarakat sekitar. Beragam pemberitaan yang seringkali bernada ujaran kebencian oleh pesantren ini disaring dan kemudian disampaikan ke masyarakat. Disinilah peserta bisa belajar bagaimana pesantren memerankan peran ganda tersebut.

Dalam perkembangannya, Pesantren Honocoroko berbenah dengan menyelenggarakan pendidikan formal setingkat RA dan MI Al-Mu'alim. Secara prinsip, pendidikan keagamaan dan sekolah formal yang dikembangkan Pesantren Honocoroko diorientasikan untuk membentuk perilaku santri dengan akhlak karimah dan memiliki kemampuan intelektual. Hal itu bisa tercapai dengan adanya kualitas literasi keagamaannya, salah satunya dengan metode *duqqoh*, yaitu cara membaca Alquran dengan teknik *kethuk* atau irama dengan menggunakan tembang-tembang Jawa. Literasi keagamaan dalam pendidikan Islam dengan metode membaca Alquran dengan teknik *duqqoh*, yakni metode ketukan sehingga menjadi harmoni dan terasa indah ini menjadi kartu *as* dan memiliki daya tawar tinggi di tengah masyarakat, karena menarik, menyenangkan, dan sejalan dengan budaya masyarakat Segawe Wonogiri. Tentu untuk mewujudkan *tafaqquh fi ad-din* yang dibutuhkan bukan hanya literasi keagamaan saja, tetapi juga metode, pendekatan, dan manajemen pesantren, sarana pendidikan, dan media pembelajaran. Literasi keagamaan pembelajaran Alquran dengan metode *duqqoh* yang ditawarkan Pesantren Hanacaraka tentu melalui *by design* sesuai dengan lokal genius lembaga tersebut.

Karakter khas dari Pesantren Honocoroko yang berbasis budaya dan tradisi Jawa modern akan memberikan pemahaman dan pembelajaran penting bagi masyarakat bahwa antara Islam dan budaya tidak selalu harus dipertentangkan. Agama dan budaya seperti dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Agama menjadi sumber nilai, ruh, dan spirit sedangkan budaya memberikan wadah bagi berkembangnya nilai agama tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam metode *duqqoh* (*kethuk*). Di ranah ini, Pesantren Honocoroko menjadi mediator penting bagi berkembangnya ajaran agama dengan basis kebudayaan Jawa salah satunya melalui tembang yang diintegrasikan pada pembelajaran membaca Alquran. Bagi Pesantren Honocoroko, metode *duqqoh* hal ini memberikan pelajaran bahwa media kemasyarakatan seperti budaya bisa menjadi sarana yang baik untuk mengajarkan literasi keagamaan untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Media kemasyarakatan yang dipilih Pesantren Honocoroko ini sangat lekat dengan tata nilai dan norma serta pranatan sosial yang berkembang di masyarakat Segawe Wonogiri. Karena itu, artikel ini mengelaborasi bagaimana metode *duqqoh* sebagai bagian literasi keagamaan Pesantren Honocoroko

berbasis budaya digunakan untuk menguatkan pendidikan agama Islam guna mendorong moderasi beragama, khususnya bagi masyarakat Segawe Wonogiri.

Penelitian tentang pandangan mengenai pendidikan keagamaan dan moderasi beragama di Pesantren Honocoroko Wonogiri adalah penelitian kualitatif deskriptif (Strauss dan Corbin, 2007: 5). Dengan penelitian kualitatif deskriptif diharapkan mampu mengungkap makna yang ada dari sisi pemikiran dan tindakan dari objek penelitian. Agar penyampaian mengenai pendidikan keagamaan dan moderasi beragama di Pesantren Honocoroko lebih terbuka dan natural, dikemukakan dengan model deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama (Connolly, 2002: 267), yakni agama dipandang sebagai fakta sosial, sesuatu yang nyata, faktual, dan dapat diamati serta mempengaruhi perilaku masyarakat (Sodik, 2006: 78). Agama menjadi bagian dari kehidupan nyata pemeluknya yang terlihat dalam kehidupan keseharian pemeluk agama, gagasan, aktivitas dan karya pemeluk agama (Kahmad, 2002: 88). Dengan kata lain pendekatan sosiologi agama mempelajari aspek sosial agama (Suprayogo dan Tobroni, 2003: 192).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi terlibat dan teknik dokumentasi (Sutopo, 1988: 53). Wawancara mendalam ini dilakukan dengan pola dan struktur yang ketat, dalam hal ini pertanyaan yang diajukan pada informan sesuai dengandaftar pertanyaan yang lebih dahulu disusun peneliti. Dengan demikian informasi yang diterima tetap terarah dan mendalam. Observasi terlibat sebagai pengamatan langsung dan terlibat pada kegiatan dan aktivitas keseharian pendidikan keagamaan dan literasi keagamaan Pesantren Honocoroko Wonogiri. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk sumber data penunjang dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis interaktif mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan (Suprayogo dan Tobroni, 2003: 192). Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaktif dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah yang ada dalam catatan lapangan terkait dengan pendidikan keagamaan dan moderasi beragama Pesantren Honocoroko dalam menguatkan literasi keagamaan.

Pada tahap penyajian data dilakukan dalam suatu susunan yang sistematis sesuai dengan alur yang dibuat. Dalam penyajian data memungkinkan peneliti akan menyajikan dalam bentuk gambar, matriks dan skema. Hal dimaksudkan untuk memaparkan kondisi yang utuh dan terstruktur dengan baik. Untuk lebih menghargai perasaan informan peneliti menggunakan cara penyajian model *emik* dan *etik*. Sedangkan penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal yang memiliki landasan data yang kuat dalam penelitian. Kesimpulan yang didapatkan diuji validitasnya dengan dengan dua cara: (1) triangulasi data; dan (2) review informan.

Temuan dan Pembahasan

Pesantren Honocoroko: Rintisan Pesantren Jawa Modern Berbasis Budaya

Pondok Pesantren Modern Jawa Honocoroko secara geografis terletak di Dusun Segawe RT 02/RW 07, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Pesantren ini berjarak ± 5 kilometer ke arah timur dari kota Wonogiri. Secara kontur tanah, Dusun Segawe tidaklah rata karena terletak di area perbukitan, sehingga untuk menyesuaikan kontur tanah dijumpai beberapa perundakan yang menghubungkan antara beberapa tempat. Pesantren Honocoroko berada di jalan utama Desa Segawe, kemudian terdapat jalan menurun untuk memasuki area pesantren. Letak Pesantren Honocoroko ini tidak cukup strategis dari jalan raya Wonogiri, karena terletak di desa yang agak masuk kedalam namun bisa dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi. Sejak awal, pesantren ini diinisiasi untuk mewujudkan strategi dakwah dan ukhuwah Islamiyah berbasis pada kearifan lokal. Pada Maret 2010, H. Harmoko bersama tokoh masyarakat Purwosari, Ki Widodo Wilis Prabowo dan Kadri (Kades) mengadakan diskusi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal pendirian Pondok Pesantren Modern Jawa, ditujukan untuk melestarikan budaya Jawa yang *adiluhung*. Proposal tersebut disusun H. Harmoko dan K.H. Rosyidin Ali Said dengan judul: Strategi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kultural Melalui Pondok Pesantren Moderan Jawa (MoJo/MaJa).

Proposal tersebut kemudian disampaikan ke H. Begug Purnomosidi dan Prof. Dr. Sarwanto, serta berbagai kalangan yang menyetujui berdirinya MoJo/MaJa. Mereka diskusi secara intensif untuk menggodok konsep pondok pesantren dengan mengkaji cara Walisongo dalam mengembangkan dakwah, khususnya Sunan Bonang, Kalijaga, Drajat, dan Muria yang menekankan kearifan budaya lokal, yaitu dengan cara mengembangkan dan menghidupkan kembali budaya lokal melalui metode kreatif kesenian Jawa.

Mereka menyampaikan dakwahnya dengan metode "*wicaksono*" atau *wisdom* yang menekankan pada tiga nilai dasar paugeran masyarakat Jawa yaitu: *momong*, *momor*, dan *momot*. Pertama, *momong*, bermakna bersedia untuk *ngemong*, membimbing, atau mengarahkan. Diharapkan kehadiran Pesantren Honocoroko di tengah masyarakat Segawe Wonogiri bisa menjadi *pamomong* dalam hal sosial keagamaan dan budaya. Ditinjau dari segi keagamaan, masyarakat Segawe mayoritas beragama Islam, dan hanya satu keluarga yang non-muslim. Di Segawe, terdapat dua masjid dan satu mushola, salah satunya adalah masjid milik Pesantren Honocoroko yang digunakan masyarakat luas untuk kepentingan peningkatan literasi keagamaan dan moderasi beragama melalui aktivitasnya seperti sholat, pengajian, peringatan hari besar Islam, dan pusat informasi. Kedua, *momor*, yaitu bersedia bergaul, bercampur, dan bersahabat, dengan siapa saja. Hal ini diharapkan Pesantren Honocoroko bisa menemani masyarakat Segawe dalam berbagai hal, termasuk menjadi ruang konsultasi soal keagamaan masyarakat. Ketiga, *momot*, bermakna menampung aspirasi, inspirasi, dan inovasi dari berbagai kalangan, sebagaimana Sunan Kalijaga yang mampu menempatkan agama, kekuasaan, dan kebudayaan dalam porsi yang seimbang. Prinsip dasar lainnya adalah sikap *narima ing pandum* yang tercakup dalam lima nilai utama, yaitu: *rela*, *narima*, *temen*, *sabar*, dan *budi luhur*.

Dengan akta notaris Susana Widjianti, dengan No. 37 Tanggal 16 November 2010 dicantumkan beberapa nama pendiri, yaitu: H. Harmoko, Prof. Dr Sarwanto, Ir. Azisoko, M.SC., H. Begug Purnomosidi, Ki Widodo Wilis Prabowo, S.Sn., dan K.H. Rosyidin Ali Said. Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Honocoroko yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan cetak biru (*blue print*) pondok pesantren dan mengundang beberapa

kalangan untuk mulai pembangunan pesantren. Mengapa di Wonogiri? Sebab Wonogiri mempunyai program pembangunan yang kental dengan budaya Jawa, sekaligus menjadi pusat pelestarian budaya Jawa. Mereka menyadari bahwa budaya Jawa memerlukan modernisasi, bukan westernisasi sehingga tetap berjalan sesuai jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan, sehingga yang diperlukan adalah memadukan antara tradisi dan modernisasi. Lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Jawa Honocoroko ditujukan untuk membentuk kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai moral agama Islam dan menjunjung nilai-nilai jati diri bangsa khususnya budaya Jawa.

...diharapkan, Pesantren Honocoroko menjadi pusat pengajaran, pelatihan, keteladanan, dan literasi keagamaan untuk moderasi beragama guna mencapai kepribadian manusia dalam semua aspeknya., baik fisik, intelektual, spiritual, budaya, imajinatif, keilmuan, bahasa, dan lainnya. hal ini dilakukan secara individual maupun kolektif dengan cara mendorong masyarakat menjadi pribadi yang sempurna sehingga tujuan akhirnya adalah pengabdian yang sempurna kepada Allah Swt, yang diwujudkan dengan menjaga keharmonisan kehidupan dan kelestarian tradisi serta budaya lokal. Di sisi lain, Pesantren Hanacaraka bisa dijadikan sebagai media untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masyarakat, terutama generasi muda agar dapat menunaikan kewajiban dan tanggungjawab individu dan sosial secara baik. Dengan demikian, pendidikan keagamaan adalah mengembangkan berbagai potensi dasar santri agar menjadi aktual secara maksimal. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan adalah pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya (Mahabie, 2019).

Berangkat visi, misi, dan tujuan yang ada, Pesantren Honocoroko menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya literasi keagamaan, termasuk menggunakan metode *duqqoh*, bisa menjadi benang merah yang dapat menjadi pesantren, masyarakat, dan kebudayaan Jawa sekaligus menjadi *entry point* untuk mencari titik temu dan dialog antar agama dan budaya. Karena itu, Pesantren Honocoroko berkeyakinan bahwa agama masa depan adalah "agama baru" yang mendialogkan antara teks, relaitas, dan kemanusiaan, antara budaya dan agama, sehingga tidak terjadi konflik sosial keagamaan. Jika agama tidak menggandeng budaya, maka akan menimbulkan keke-

rasan berbasis agama, maka agama telah kehilangan sentuhan spirit kemanusiaan dan literasi keagamaan dimana ia hanya menampilkan wajah dogmatis—doktriner dengan karakter fundamental dan tidak ada penghargaan untuk kebudayaan dan kemanusiaan. Karena itu, peran lembaga pendidikan agama terutama pesantren, termasuk Honocoroko berada pada garda terdepan untuk *tafaqquh fi ad-din* berbicara tentang keterbatasan, keterputusan epistemologi (*epistemological break*), dan keterkejutan literasi keagamaan (*shock religious literacy*) terutama di masyarakat diharapkan mereka bisa mendorong moderasi beragama di tingkat lokalitas masing-masing, dan Indonesia pada umumnya.

Metode *Duqqoh*: Pengembangan Literasi Berbasis Budaya

Pesantren, termasuk Honocoroko mempunyai tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mengembangkan pendidikan keagamaan moderat di tengah masyarakat plural. Pemahaman ini menjadi tujuan adanya Pesantren Honocoroko sebagai lembaga pendidikan yang diorientasikan untuk mencetak santri yang agamawan, berakhlak mulia, serta menjadi manusia yang siap hidup di tengah masyarakat dengan berbagai keberagaman di dalamnya. Secara umum, Pesantren Honocoroko merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang secara emosional dan kultural erat kaitannya dengan masyarakat bawah, yaitu masyarakat Segawe Wonogiri. Tidak mengherankan jika Pesantren Honocoroko memiliki peran strategis (*strategic role*) dalam mengembangkan pendidikan keagamaan moderat yang berdasarkan kearifan budaya lokal. Dalam konsep pendidikan Islam, moderasi beragama ditempatkan Pesantren Honocoroko sebagai paradigma, gaya hidup, dan wacana yang kontekstual dengan masyarakat dewasa ini.

Sejak awal rintisannya, Pesantren Honocoroko sangat menekankan adanya pandangan dan sikap hidup multikultural yang kemudian akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, Pesantren Honocoroko sebagai pusat literasi keagamaan masyarakat Segawe Wonogiri sangat menekankan adanya pendidikan karakter dan moralitas, tidak mengherankan pesantren ini diharapkan bisa menjadi ladang persemaian generasi Muslim Indonesia yang cinta damai, toleran, dan anti pada kekerasan. Sebagaimana pondok

tradisional atau *salafiyah* lainnya, Pesantren Honocoroko dikenal sebagai pesantren yang ramah, toleran, berbaur dengan masyarakat, kaya muatan budaya lokal, dan jauh dari ideologi kekerasan. Pemahaman keagamaan, literasi keagamaan, dan pandangan dunia (*worldview*) yang diajarkan oleh Pesantren Honocoroko berbasis pada nilai-nilai kehidupan Islam yang mengedepankan moderasi beragama.

Karakteristik Pesantren Honocoroko yang sejuk dan jauh dari tradisi narasi keagamaan intoleran, hal ini dikuatkan dengan *setting* geografis di lereng pegunungan Wonogiri yang dingin sehingga keberadaan pesantren ini harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Sejak awal kemunculannya, Pesantren Honocoroko selalu mewacanakan Islam *mainstream*, terlebih pengelolanya yakni Ahans Mahabie secara ideologi keagamaan mengikuti Nahdlatul Ulama (NU), yang selalu menampilkan sikap akomodatif yang seimbang dengan budaya masyarakat Segawe Wonogiri. Keberhasilan Pesantren Honocoroko dalam membangun integrasi dengan masyarakat inilah yang kemudian digunakan oleh Ahans Mahabie untuk menguatkan literasi keagamaan yang moderat berbasis budaya lokal seperti tembang-tembang mainan Jawa sebagai cara pengajaran Alquran yang dirumuskan dalam bentuk metode *duqqoh* (*kethukan*). Tidak mengherankan jika metode membaca Alquran dengan model kethukan atau *duqqoh* ini mengakar kuat pada santri, masyarakat, dan kelompok pengajian *Legawa*. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu mudah diingat oleh masyarakat, sebab belajar Alquran dengan cara dilagukan, dan ini menjadi ciri khas masyarakat Jawa yang gemar menyanyikan dalam memberikan pembelajaran kepada generasi selanjutnya. Metode *duqqoh* secara prinsip membangun harmoni dengan budaya lokal, selain itu juga dengan nyanyian bisa menjadikan jiwa dan karakter seseorang lemah lembut dan menguatkan moralitas santri dan masyarakat Segawe Wonogiri.

Pandangan moderasi beragama tersebut dibentuk dari literasi keagamaan yang diajarkan di Pesantren Honocoroko dengan memberikan beberapa nilai utama seperti kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pengakuan pada perbedaan yang ada, dan nilai-nilai ini merupakan prinsip dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi perubahan dunia global. Pesantren Honocoroko sebagai sub-multikulturalisme menjadikan literasi keagamaan sebagai

gerakan budaya (*cultural movement*), sesuatu yang integral dalam berbagai aspek sosial dalam masyarakat termasuk didalamnya ada pendidikan keagamaan. Sebagai gerakan budaya, literasi keagamaan yang dikembangkan Pesantren Honocoroko seperti metode *duqqoh* (ketukan) menuntut adanya legitimasi dan pengakuan terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dilindungi, dan dijamin eksistensinya.

Metode *duqqoh* merupakan metode pembelajaran Alquran yang dibuat oleh Ahans Mahabie dan dikembangkan Pesantren Honocoroko bagi masyarakat sekitarnya yang terhimpun dalam pengajian *Legawa*. Pengajian ini dimulai dari kegiatan yang biasa digemari masyarakat, seperti berkumpul bersama, ngopi bareng, main musik, jalan-jalan sampai pada akhirnya mengajak para remaja untuk mengaji bersama. Dengan harapan, mereka yang mengikuti pengajian *Legawa* dapat meninggalkan kegiatan yang kurang bermanfaat. Meskipun sebagian dari mereka ada yang merasa malu belajar mengaji karena faktor usia, tetapi penguatan literasi masyarakat terutama belajar membaca Alquran dengan menggunakan metode *duqqoh* menjadi alternatif paling memungkinkan sebab dirasa mudah untuk dipraktikan segala usia. Awalnya model pembelajaran Alquran menggunakan metode *duqqoh* keresahan Ahans Mahabie, karena masyarakat merasa belajar Alquran terkesan membosankan, sulit, lama, dan menggunakan pendekatan yang kaku. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Ahans Mahabie membuat metode pembelajaran Alquran dengan cara pengucapan yang lebih mudah tanpa mengurangi atau meninggalkan hakikat huruf pada aslinya dan menggunakan ketukan (*duqqoh*) untuk mempermudah bacaan, agar lebih presisi, dan pembelajaran menyenangkan.

... metode *duqqoh* adalah metode belajar membaca Alquran dengan *duqqoh* (ketukan/irama) yang memperhatikan kepada ketepatan, ketelitian, presisi, kelembutan, dan kepekaan dalam membaca Alquran. Ketukan mempunyai peran penting dalam membaca karena dengan ketukan/irama yang stabil akan memudahkan pembaca dalam menguasai huruf demi huruf dan menjaga keaslian bacaan serta makna setiap kalimat dalam Alquran (Mahabie, 2019).

Alquran terdiri dari beberapa surat, setiap surat terdiri dari beberapa ayat, setiap ayat terdiri dari beberapa kata, dan setiap kata terdapat huruf-huruf, yang merupakan bagian terkecil dari kitab suci. Sejak awal, metode *duqqoh* sebagaimana para ulama salafiyah berusaha untuk mempelajari huruf-huruf dalam Alquran baik namanya, tempat keluarnya (*makhraj al-huruf*) atau sifatnya. Mereka menyakini, siapa yang mengetahui tempat keluarnya huruf yang benar dan bisa memberikan sifat pada setiap huruf dengan tepat, telah dapat membaca Alquran (*tilawatil Alquran*) dengan baik. Setelah mengetahui huruf, metode *duqqoh* menekankan pada penguasaan harakat/tanda baca “*sandangan*” yang ditandakan kepada setiap huruf dalam Alquran sehingga mempunyai bunyi yang berbeda dari huruf aslinya baik panjang pendeknya dan penekanannya. Setelah mengetahui huruf dan harokahnya pembaca diajarkan cara membaca dalam metode *duqqoh* yang dibedakan menjadi tiga, mulai dari membaca dengan pelan disertai dengan irama ketukan yang pelan, sedang dan cepat sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1. Cara Membaca Alquran dalam Metode *Duqqoh*

No	Pola	Keterangan
1	<i>Tahqiq</i>	Membaca dengan tenang (pelan-pelan) diperhatikan mahrojnya dengan tidak menambahi suatu apapun
2	<i>Hadr</i>	Mempercepat cara membaca dengan menjaga aturan (<i>tajwid</i>) dengan ketukan yang tepat. Pembaca memperhatikan huruf-huruf mad (اِي), lagu yang digunakan, dan harakat pada bacaan.
3	<i>Tadwir</i>	Tingkatan cara membaca di tengah-tengah (tidak pelan dan tidak terlalu cepat) diantara tingkatan <i>tahqiq</i> dan tingkatan <i>hard</i>

Untuk mempelajari metode *duqqoh*, ada tiga tahapan yang harus dilalui, yang setiap tahap merupakan bagian jilid berisi materi yang berbeda dan bertahap, yaitu sebagaimana disebutkan dalam tabel 02 berikut:

Tabel 2. Metode *Duqqoh I*

No	Metode <i>Duqqoh I</i>	Keterangan
A.	Metode <i>Duqqoh I</i>	Disebut dengan <i>ta’rif</i> atau pengenalan, dalam jilid ini terdiri dari beberapa materi pembelajaran dasar
1	Huruf hijaiyah	Pada materi huruf hijaiyah yaitu tentang pengenalan huruf asli hijaiyah dan kronologi terjadinya bunyi (huruf hidup/vokal)
2	<i>Duqqoh</i>	Materi <i>duqqoh</i> ini mengajarkan bahwa untuk satu ketukan maka untuk bunyi satu huruf
3	Harakat I	Mempelajari tentang harokat pada huruf hijaiyah yang meliputi <i>fathah</i> , <i>dhommah</i> dan <i>kashrah</i>
4	Harakat I	Mempelajari tentang harokat pada huruf hijaiyah yang meliputi <i>sukun</i> , <i>tasydid</i> dan <i>tanwin</i>

Tabel 3. Metode *Duqqoh II*

No	Metode <i>Duqqoh II</i>	Keterangan
A.	Metode <i>Duqqoh II</i>	Disebut dengan <i>tadqiq</i> atau yang berarti pendalaman, setelah santri menyelesaikan jilid I maka akan dilanjutkan dengan jilid II
1	Muraja’ah	Berisi beberapa ringkasan dari materi jilid I. Sebelum melanjutkan pada bab selanjutnya diawal bagian jilid II ini santri diminta untuk mengulang kembali materi jilid I
2	Guhunnah	Materi yang membahas mengenai ghunnah atau bacaan yang mendengung yang disebabkan oleh nun tasydid (نْ) dan mim tasydid (مْ)
3	Mad	Materi yang mempelajari hukum bacaan mad atau huruf yang dibaca panjang ketika membaca Alquran.
4	Lam Ta’rif	Materi yang mempelajari hukum bacaan lam (ل) dan alif (ا) atau yang disebut dengan <i>lam ta’rif</i>
5	Tadqiqul Qira’ah	Pendalaman bacaan. Pada bagian <i>Tadqiqul Qira’ah</i> berisi latihan-latihan untuk memperdalam bacaan yang mengandung materi-materi sebelumnya

Tabel 4. Metode *Duqqoh* III

No	Metode <i>Duqqoh</i> III	Keterangan
A.	Metode <i>Duqqoh</i> III	Materinya disebut dengan <i>tahsin</i> atau yang berarti perbaikan, dalam jilid ini terdiri dari beberapa materi pembelajaran dasar
1	Keutamaan Membaca Alquran	Berisi penjelasan yang menerangkan keutamaan dari membaca Alquran
2	Pengertian Tajwid	Pada materi ini yaitu berisi tentang pengertian ilmu tajwid serta hukum mempelajarinya
3	Pembaca Alquran yang Baik	Bagian ini berisi materi tentang tingkatan cara membaca Alquran serta macam-macam cara membaca Alquran
4	Cara Membaca <i>Isti'azah</i> (<i>Ta'awwuz</i>)	teori bagaimana membaca <i>Ta'awwuz</i>
5	Cara Membaca <i>Bismillah</i> (<i>Basmalah</i>)	Teori bagaimana cara membaca <i>basmalah</i> di antara dua surat
6	Sifat-Sifat Huruf Hijaiyah	Materi sifat-sifat dari huruf hijaiyah, yakni mengenai keluarnya nafas pada huruf hijaiyah
7	Makharijul Huruf	Pada materi ini berisi tentang tempat keluarnya huruf hijaiyah
8	Nun Tanwin dan Nun Mati	Bagian ini berisi tentang materi hukum nun mati dan tanwin
9	Mim Mati	Materi mengenai hukum bacaan mim mati atau mim sukun
10	Mad dan Pembagiannya	Berisi tentang macam-macam mad dan cara menggunakan ketukan atau <i>duqqoh</i>
11	Qolqolah	Berisi tentang huruf <i>qolqolah</i> dan pembagiannya
12	Waqof	Pada bagian ini berisi teori tentang hukum <i>waqof</i>

Sejalan dengan Parekh, gerakan literasi keagamaan berbasis budaya lokal dengan metode *duqqoh* Pesantren Honocoroko pada prinsipnya menampilkan tiga aspek. Pertama, pada dasarnya manusia terikat oleh struktur sosial dan sistem budaya yang melingkupinya di mana ia hidup, berinteraksi, serta membangun komunikasi. Adanya sistem budaya (*cultural system*) yang mengikat tidak berarti

masyarakat kehilangan aspek kritisnya terhadap budaya tersebut, tetapi menempatkannya sebagai alat baca dalam melihat realitas keberagaman yang ada. Kedua, adanya perbedaan budaya merupakan bentuk dan representasi dari sistem nilai (*values system*) serta cara pandang tentang sesuatu yang berbeda pula. Suatu budaya tertentu merupakan hal yang parsial, maka diperlukan budaya lain untuk memahaminya, dan budaya tersebut tidak bisa dipaksakan dalam sistem budaya yang lainnya. Ketiga, secara internal, budaya merupakan entitas yang plural serta merefleksikan interaksi antar perbedaan nilai dan cara pandang. Dalam hal ini budaya merupakan sesuatu yang majemuk, terus berproses, dan bersifat terbuka (Parekh, 2003: 230).

.... pembelajaran membaca Alquran dengan metode *duqqoh* ini biasa namun lebih menyenangkan karena menggunakan nyanyian atau tembang-tembang Jawa. Jadi masyarakat akan lebih mudah untuk mengingat. Metode *duqqoh* menekankan pada penggunaan ketukan, misalnya: *ba to ro na ro do*, bisa pula menggunakan lagu Gundul-gundul Pacul. Di metode ini ada unsur perpaduan antara budaya Jawa (Mahabie, 2019).

Komitmen Pesantren Honocoroko untuk mengembangkan wacana literasi keagamaan berbasis budaya dengan metode *duqqoh* menjadikan pesantren ini lebih dekat dengan kearifan lokal masyarakat Segawe Wonogiri, yang notabene-nya adalah masyarakat seni. Hal ini disebabkan banyaknya komunitas paguyuban kesenian Jawa di wilayah ini, bahkan Pesantren Honocoroko juga menjadikan gamelan Jawa sebagai ekstra kurikuler yang diwajibkan kepada santrinya. Selain itu, santri dari pesantren ini juga mempunyai prestasi menjurai lomba dalang tingkat Provinsi Jawa tengah tahun 2019. Karena itu, gerakan literasi melalui metode *duqqoh* menjadi spirit alamiah yang telah tumbuh berkembang dalam lingkungan Pesantren Honocoroko. Sebab, sebagai subkultur multikultural masyarakat Segawe sudah seharusnya Pesantren Honocoroko merekonstruksi dirinya sebagai pusat belajar untuk kesadaran multikultural berdasarkan literasi yang disampaikan di pesantren, baik Alquran, kitab kuning, dan kajian keislaman lainnya seperti Burdah, Manaqib, dan Al-Barjanzi. Karena itu, literasi keagamaan Pesantren Honocoroko dengan metode *duqqoh* menjadi *role model* bagi pengembangan nilai

dasar utama dalam Islam, yaitu: *tawasuf, tawazun, tasamuh, ta'adul*, dan *tasyawur*.

Pesantren Honocoroko melalui literasi keagamaan dan pendidikan agamanya mengembangkan nilai-nilai multikultur dan penjagaan terhadap kelestarian budaya lokal masyarakat Segawe Wonogiri. Karena itu, Pesantren Honocoroko merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang digunakan untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam dengan memberikan penekanan pada pentingnya literasi keagamaan dan moral keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari santri dan masyarakat sekitarnya. Dengan identitas tradisionalnya, Honocoroko juga mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (*need society*), meski demikian tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai pesantren berbasis kearifan lokal. Perubahan yang terjadi di Pesantren Honocoroko baik kurikulum, sistem pembelajaran, dan metode pengajaran termasuk metode *duqqoh*, tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat pesantren sendiri, tetapi juga adanya faktor eksternal seperti politik, budaya, ataupun masyarakat sipil (*civil society*).

Perubahan sosial tersebut mendorong Pesantren Honocoroko untuk hidup bersama secara terbuka dengan kelompok lain, meski secara ideologi dan gerakan mempunyai pandangan yang berbeda. Selain itu, pengembangan metode pembelajaran Alquran dengan metode *duqqoh* ini tidak dapat dilepaskan dari keragaman pemikiran keislaman yang ada sesuai dengan nilai lokal masing-masing, sehingga mengakibatkan pemikiran keagamaan yang beragam pula di lingkungan pesantren misalnya adanya Amsilasti, Nun, Iqra, Tarsana, dan lainnya. Di tengah arus global yang deras, Pesantren Honocoroko tetap komitmen dan berakar pada budaya lokal Jawa dengan menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tanpa harus kehilangan sentuhan modernitas. Sehingga, Pesantren Honocoroko bisa tetap eksis menjadi lembaga pendidikan yang melestarikan nilai-nilai ajaran Islam yang dibungkus dengan kearifan lokal yang toleran dan inklusif serta mampu menyelesaikan persoalan sosial tanpa harus menghilangkan keragaman budaya yang ada.

Peran sebagai subkultur menjadi ciri serta eksistensi pesantren untuk mendapatkan pengakuan publik (Wahid, 1999: 21). Sebagai

sub kultur, Pesantren Honocoroko pada dasarnya bentuk masyarakat kecil (*small society*) yang mempunyai tata nilai, budaya, sistem kepemimpinan, dan manajemen tersendiri. Melalui metode *duqqoh*, Pesantren Honocoroko menjadi tempat untuk belajar hidup bermasyarakat, membangun komunikasi dengan mereka, mengamalkan sistem sosial baru, serta mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moralitas keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan demikian, menjadikan Pesantren Honocoroko kaya berbagai sumber daya budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa sebagai pondasi untuk mengembangkan moderasi agama berbasis pendidikan keagamaan, salah satunya metode *duqqoh*. Komunitas pesantren dengan berbagai macam tradisinya sebenarnya mendorong untuk tumbuhnya budaya damai (*peaceful culture*) (Shaleh, 2005).

.... secara prinsip, literasi keagamaan melalui metode *duqqoh* yang dikembangkan Pesantren Honocoroko bertujuan untuk: pertama, mengaktualisasikan potensi santri dan masyarakat Segawe sehingga dapat memecahkan persoalan literasi keagamaan yang dihadapi. Kedua, memberikan wawasan yang luas dalam pengembangan model-model pembelajaran literasi keagamaan, terutama yang berbasis budaya. Ketiga, memberikan bekal dengan latihan-latihan dasar tentang nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, memberikan kesempatan kepada masyarakat Segawe dan santri untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan berbasis budaya; dan kelima, mengoptimalkan sumberdaya budaya di masyarakat, terutama tembang-tembang Jawa. Karena itu, literasi keagamaan dengan metode *duqqoh* di Pesantren Honocoroko diorientasikan untuk pengembangan kecakapan *skill* atau ketrampilan masyarakat sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan (Mahabie, 2019).

Literasi keagamaan berbasis budaya seperti metode *duqqoh* memegang peranan dalam sistem pembelajaran Alquran di Pesantren Honocoroko, karena menjadi corak dan ciri khas pesantren itu sendiri. Di samping itu, dengan metode *duqqoh* ini Pesantren Honocoroko berperan dalam mewariskan *values system* dari pengasuh kepada santri dan masyarakat sekitar pesantren. Hal itu, metode *duqqoh* bisa menjadi wacana alternatif dalam pemahaman literasi keagamaan yang bersifat ideologis (*Islam in books*) dengan pola pemahaman kebaragamaan yang ada di masyarakat yang bersifat kontekstual

(*Islam out books*). Literasi keagamaan dengan model *duqqoh* secara prinsip diarahkan untuk studi pengembangan keilmuan sehingga mampu mendialogkan *Islamic in-books* dan *Islamic in-action*, bahkan kajian keislaman tidak mampu menyentuh kajian-kajian yang bersifat empiris-sosiologis berbasis budaya lokal masyarakat Segawe Wonogiri.

Literasi keagamaan berbasis budaya dengan model *duqqoh* sebagai seperangkat kemampuan untuk mengolah informasi, mengorganisir, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Pesantren Honocoroko. Kemampuan literasi keagamaan yang ingin menguatkan tidak sekedar membaca, menulis, menganalisa, dan memahami bahan bacaan literatur *an sich*, melainkan mencakup semua aspek kehidupan lingkungan sosial termasuk moralitas (*moral literacy*). Dengan demikian, literasi keagamaan di Pesantren Honocoroko dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat sekitar yang terhimpun dalam jamaah pengajian *Legawa* itu sendiri. Dengan demikian, tujuan Pesantren Honocoroko dengan metode *duqqoh* adalah untuk mengembangkan kepribadian masyarakat pengajian *Legawa* yang taat kepada Allah Swt dalam kondisi beriman dan bertakwa. Ketaatan ini memancarkan kewajiban moral untuk menyebarkan ajaran dan spirit Islam di antara warga masyarakat Segawe Wonogiri. Pesantren Honocoroko dengan galian literasi keagamaan yang ada menekankan keberagamaan moderat dengan nilai-nilai fundamental ajaran Islam seperti keikhlasan, kesederhanaan, solidaritas, dan kontrol diri.

Pesantren, Pendidikan Keagamaan, dan Islam Ramah

Maraknya gerakan Islam garis keras di tengah masyarakat Soloraya, termasuk Wonogiri merupakan fenomena bangkitnya gerakan keagamaan radikal di Indonesia. Hal ini menjadi keprihatinan bagi gerakan Islam moderat karena mengalami penurunan daya jelajah dalam menyerap opini publik dan memengaruhi masyarakat bawah (Zada, 2002: 78). Pada titik ini, semua elemen gerakan Islam moderat *mainstream* termasuk Pesantren Honocoroko harus bekerja keras dalam mengembangkan ide dan praktik keberagamaan saling menghargai perbedaan yang ada. Pesantren Honocoroko satu dari sekian banyak pesantren Islam tradisional yang memiliki afiliasi dengan

Aswaja an-Nahdliyah sebagai basis ideologi keilmuan dan paham keagamaannya. Karena itu, Pesantren Honocoroko mempunyai keterbukaan intelektual terhadap semua pemikiran baru yang datang dengan tetap berpegang pada tradisi kepesantrenan.

Pesantren Honocoroko dengan ideologi salafiyahnya menggunakan pola *itibā'* ulama terdahulu dengan merujuk pada kitab kuning (*yellow books*), diantaranya dengan metode *duqqoh*. Dengan ideologi pendidikan salafiyah, Pesantren Honocoroko memperlihatkan sikap akomodatif terhadap semua perubahan yang terjadi pada tataran realitas, termasuk budaya. Implementasi teologi inklusif tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Segawe Wonogiri. Sebab Islam tidak bisa membangun komunitas sendiri yang terlepas dari realitas sosial, Islam harus membaaur menjadi satu-kesatuan di masyarakat (Qomar, 2002: 173). Karena itu, Pesantren Honocoroko mengedepankan prinsip *tasamuh*, kata tersebut salah satu prinsip dari moderasi sehingga corak keagamaannya bersifat inklusif, moderat, dan pluralis. Pesantren Honocoroko sebagai lembaga pendidikan Islam memberikan literasi keagamaan kepada santri dan masyarakat penyangga agar mereka tahu mengenai ajaran Islam. Karena itu, lembaga ini dituntut bisa mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan agama Islam yang berbasis pada budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan metode *duqqoh* dan ideologi pendidikannya, Pesantren Honocoroko selain memperteguh keimanan juga menguatkan aspek sosial dalam masyarakat luas.

Islam bercorak budaya lokal dalam bentuk literasi keagamaan metode *duqqoh* Pesantren Honocoroko telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat Wonogiri, terutama kalangan muda dan generasi milenial yang terhimpun dalam pengajian *Legawa* dan grup rebana Madraguna. Secara doktrin, Islam bercorak budaya sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika perkembangan zaman dan budaya yang kemudian membentuk identitas dan habitus. Eksistensi Islam dengan cita rasa budaya lokal diadopsi dan menjadi *way of life* bagi masyarakat Pesantren Honocoroko baik *fashion* dengan khas Jawa, musik, gaya bahasa, dan aktivitas keseharian yang berusaha mencerminkan nilai-nilai Islam Jawa. Keberagamaan mereka yang mengusung Islam dengan cita rasa budaya secara prinsip menge-

depankan beberapa nilai utama yaitu: pertama, tradisi lokal yang dipengaruhi oleh ajaran agama sehingga menghasilkan adat Islam lokal. Kedua, Islam populer bukan hanya dipahami sebagai modernisasi Islam *an sich*, tetapi lebih dari itu, menerapkan Islam secara fleksibilitas di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berada di dalam koridor *syar'i*. Ketiga, pengertian Islam populer sendiri tidak dapat disamaratakan dengan "populis" atau mayoritas; dan keempat, Islam populer sendiri menekankan kebangkitan Islam untuk pemberdayaan masyarakat (Weintraub, 2011: 5).

Sejauh ini, pengajian *Legawa* dengan metode *duqqoh* menjadi corong untuk sosialisasi model belajar membaca Alquran dengan *kethukan* sekaligus sebagai literasi keagamaan menjadi semacam "politik identitas" tersendiri bagi Pesantren Honocoroko, sebagai bentuk konstruksi yang dilekatkan sebagai simbol komunal yang mengikat bersama. Dalam pengertian lain, pemaknaan terhadap konstruksi dimaksudkan bentuk "penempelan" simbol-simbol kultural yang kemudian menjadi identitas kolektif yang menjadi ciri khas Pesantren Honocoroko sebagai pesantren berbasis budaya Jawa modern. Kehadiran literasi keagamaan dengan metode *duqqoh* dijadikan Pesantren Honocoroko sebagai *worldview* moderasi beragama bagi masyarakat sekitar yang tergabung dalam pengajian *Legawa*, yang kemudian memegang nilai *syar'i* sebagai pedoman nilai dan norma. Karena itu, Islam bercorak budaya yang terwujud dalam metode *duqqoh* Pesantren Honocoroko sebagai "habitus" yakni bentuk perilaku yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan tersendiri yang membedakan dengan pesantren lainnya.

Dewasa ini, publik melihat keberagaman masyarakat Wonogiri telah mengalami pergeseran, yang ditandai mulai muncul keberagaman baru, yakni Islam populis yang diinisiasi kalangan mudamilenial mendirikan pengajian berbasis pada hobi, salah satunya Pengajian *Legawa* Pesantren Honocoroko. Tingginya minat masyarakat sekitar pesantren untuk belajar literasi keagamaan dipahami sebagai pencarian identitas keislaman baru, sehingga keberadaan mereka menjadikan ruang publik Wonogiri begitu berwarna. Pesantren Honocoroko melalui gerakan literasi keagamaannya mengedepankan *Islamic values* dan moralitas untuk penguatan perilaku yang bercorak Islami. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar pesantren yang tergabung dalam pengajian *Legawa* tidak terjebak

dalam pemahaman keagamaan yang tekstual-simbolik, identitas keislaman, dan doktrin agama yang bersifat normatif yang anti budaya lokal.

Pesantren Honocoroko dengan metode *duqqoh*, pengajian *Legawa*, dan group rebana Mandraguna sebagai penjaga tradisi yang diwariskan ulama terdahulu untuk penguatan moralitas masyarakat. Metode *duqqoh* dan Mandraguna, Pesantren Honocoroko berusaha menggugah kembali masyarakat Segawe Wonogiri atas pentingnya mengembangkan moralitas berbasis kearifan lokal. Kehadiran Pesantren Honocoroko menjadi penting karena berusaha mewujudkan terciptanya kesadaran masyarakat mengenai makna hidup bersama dalam suasana damai dan kebersamaan yang dimulai diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Nilai dasar Pesantren Honocoroko ini adalah menggerakkan kembali segala potensi masyarakat untuk memberikan solusi atas masalah sosial keagamaan yang ada. Sebagai bagian dari arus *mainstream* NU, Pesantren Honocoroko menjadi garda terdepan untuk *asy-syuhud al-hadhari* sekaligus *asy-syuhud ats-tsaqafi* masyarakat dalam membangun kerukunan dan moralitas bangsa agar warganya berkarakter baik sebagai bentuk *rahmatan lil 'alamin*. Menurut Said Aqil Siraj, kekuatan NU bertumpu pada tiga hal: pertama, paham *Aswaja* yang melahirkan wacana Islam moderat; kedua, nilai, tradisi, dan lembaga budaya seperti pesantren dan jaringan thariqat; dan ketiga, jaringan struktur sebagai infrastruktur organisasi yang tersebar di seluruh pelosok nusantara (Siraj, 2013: 25).

Pesantren Honocoroko dengan pengajian *Legawa*, rebana Mandraguna, dan metode *duqqoh* dipahami sebagai usaha membumikan nilai-nilai keislaman moderat berbasis budaya Jawa serta untuk menarik minat masyarakat untuk belajar literasi keagamaan. Hal ini tepat di tengah munculnya ideologi Islam intoleran radikal, *life style*, dan *Islamic pop* yang menggejala di masyarakat Segawe Wonogiri yang mengabaikan budaya lokal bahkan berusaha untuk memberangusnya, pesantren mengambil jalan tengah dengan prinsip *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* untuk menguatkan literasi keagamaan dan moderasi beragama masyarakat dari gerakan tersebut. Fenomena yang berkembang di masyarakat Wonogiri adalah adanya krisis keagamaan berupa pemahaman keagamaan eksklusif, merasa paling benar, dan menganggap ajaran agama yang tidak ada

dalilnya dan bercampur dengan budaya adalah syirik, bid'ah, dan "laisa minal Islam." Mereka beranggapan kelompok di luar pemahamannya adalah salah serta "harus diislamkan kembali" sesuai dengan doktrin keagamaan intoleran yang mereka anut. Dalam gerakannya, kelompok ini sering melakukan tindak kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan (Kurtz, 1995: 215). Sikap ini sering diikuti pandangan anti dialogis yang menolak jalan dialog untuk menemukan solusi bersama (Aijudin, 2017: 121).

Selain itu, prinsip tersebut juga mendorong pengajian *Legawa* Pesantren Honocoroko beragama secara vertikal (*habl min Allah*) dan horisontal (*habl min nas*) secara seimbang, yaitu memuliakan Tuhan dengan memuliakan manusia dengan segala kemanusiaannya sebagai manifestasi dari keimanan yang mengarah pada nilai persamaan, toleransi, dan penghormatan atas pluralitas. Prinsip tersebut akan mewujudkan spiritualitas kemanusiaan yang mendorong *the seed of moderate muslims* serta pengembangan kultur sipil. Secara prinsip, kultur sipil adalah nilai, norma, dan *moral guide* di masyarakat yang menghormati aspek pokok dalam wacana demokrasi, seperti kemanusiaan, kesetaraan, HAM, dan kemandirian. Prinsip *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* yang dikembangkan Pesantren Honocoroko dengan pengajian *Legawa* dan rebana Mandraguna secara prinsip mendorong Islam bermain pada ranah *civil society* sebagai *moral reasoning* bagi pengembangan masyarakat Segawe Wonogiri. Pada ranah ini, Pesantren Honocoroko sebagai bagian dari kekuatan *civil society* mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan tanpa harus mendiskriminasi agama lain atau kelompok sosial yang berbeda.

Melalui metode *duqqoh* dan rebana Mandraguna di pengajian *Legawa*, Pesantren Honocoroko meningkatkan kualitas literasi dan pendidikan keagamaan masyarakat sehingga menjadi *common values* membangun dialog kebudayaan kondusif dan prospektif. Dengan pengajian *Legawa* yang diselenggarakan pesantren, diharapkan masyarakat memiliki cara pandang yang toleran, ramah, dan moderat untuk menjaga dinamika keberagaman sosial agar tidak tenggelam pada radikalisme agama dan konflik sosial. Artinya, melalui prinsip *tawassuth*, *tawazun* dan *tasamuh* yang disampaikan Pesantren Honocoroko, Islam didorong terlibat aktif dalam berbagai persoalan masyarakat baik sosial, ekonomi, dan budaya sekitar pesantren,

terutama Segawe Wonogiri. Di tengah masyarakat yang majemuk, Pesantren Hanacaraka mendorong pengajian *Legawa* untuk mengedepankan prinsip Aswaja an-Nahdliyah dengan menampilkan Islam bukan sebagai agama eksklusif, kaku, dan anti budaya, tetapi agama ramah yang mengskomodir budaya lokal. Karena itu, bagi Ahans Mahabie menyebut, Islam dituntut mampu merumuskan solusi atas tantangan kemanusiaan dan yang lebih penting adalah penghargaan terhadap fitrah dasar kemanusiaan seperti kebebasan beragama dan ekspresi budaya (Mahabie, 2019).

Model pengembangan literasi keagamaan dengan pengajian *Legawa* dan rebana Mandraguna yang mengedepankan metode *duqqoh* berbasis budaya secara prinsip Pesantren Honocoroko menempatkan Islam sebagai etika sosial. Melalui pengajian *Legawa* dan rebana Mandraguna kini menjadi media efektif guna melakukan penyemaian nilai-nilai toleransi keberagamaan dengan jalan memotret Islam sebagai *logical frame work* guna membangun teologi ramah yang responsif pada perubahan sosial selaras dengan *duqqoh* (*kethukan*). Pesantren Honocoroko dengan rebana Mandraguna, pengajian *Legawa*, dan metode *duqqoh* sangat menekankan Islam sebagai agama yang mampu berakulturasi dengan budaya lokal, yaitu menekankan pentingnya penguatan budaya baru, kesalehan sosial, dan membangun keberdayaan masyarakat Segawe Wonogiri. Prinsip *gugur gunung*, *guyub rukun*, kebersamaan, dan gotong royong sebagai bagian dari spiritualitas sosial yang dikembangkan Pesantren Honocoroko sebagai upaya menghidupkan dan menumbuhkan kembali *elan* profetik seperti yang tercermin dari para rasul pembawa risalah kenabian untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, melalui pengajian *Legawa* Pesantren Honocoroko bertujuan mengembangkan pemahaman keagamaan yang ramah dan perilaku keagamaan moderat. Pengajian tersebut diiringi dengan rebana Mandraguna guna menampilkan diskursus Islam ramah sebagai pencarian identitas Islam dengan citra rasa khas Indonesia, khususnya Jawa, Wonogiri. Pemahaman keagamaan dengan corak ramah, bercorak lokal, dan terbuka dalam memahami teks keagamaan sehingga Islam dengan kesan Arabisme hilang dengan sendirinya. Islam yang ditampilkan Pesantren Honocoroko adalah Islam dengan corak akulturasi dengan tradisi

lokal yang relevan dengan perkembangan zaman seperti model salawatan, bentuk pengajian, syi'iran, pakaian, dan model jilbab yang khas masyarakat pedesaan.

Secara prinsip beragama, pengajian *Legawa* Pesantren Honocoroko yang didalamnya menggunakan metode *duqqoh* mengusung spirit teologi ramah, ajaran Islam yang mengedepankan asas *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* dengan menempatkan Islam sebagai pandangan hidup dan diturunkan pada nilai dasar kehidupan seperti toleransi, menghargai budaya lokal, dan penjagaan terhadap tradisi yang ada. Pengajian *Legawa* melalui metode *duqqoh* mengenalkan kepada jamaahnya yang kebanyakan anak muda dan masyarakat Segawe Wonogiri bahwa Islam adalah agama damai, harmonis, dan beradab sebagaimana keselarasan tembang Jawa yang terbaca dalam *duqqoh* atau *kethukan*. Keharmonisan model *duqqoh* ini yang kemudian digunakan pengajian *Legawa* Pesantren Honocoroko untuk membangun landasan spiritualitas serta membangun etika sosial sehingga tercipta kerukunan di tengah masyarakat Segawe sebagaimana prinsip Jawa “*rukun agawe santoso, crah agawe bubrah*.” Pola ini sejalan dengan pandangan Said Aqil Siraj, “*Nahnu ash-habul haqq, haqqudini wal haqqul ijtima'* (kami kelompok yang benar, benar dalam beragama dan benar dalam bermasyarakat-bernegara). Pesantren Hanacaraka dalam pengembangan Islam, NU menggunakan prinsip: *al-amnu qobla iman* (menciptakan keharmonisan sebelum mengajarkan keimanan) serta *al-mua'asyaratu qabla 'aqidah*, yaitu membangun komunikasi sebelum mengenalkan akidah (Siraj, 2013: 55).

Simpulan

Pesantren Honocoroko merupakan salah satu pesantren yang terletak di Segawe Wonogiri dengan keunikan tersendiri karena mencoba mensintesis antara keislaman, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Pesantren ini didirikan dengan tujuan sebagai media pendidikan agama Islam yang menawarkan literasi keagamaan dengan harapan moderasi beragama. Hal tersebut dilakukan Pesantren Honocoroko melalui pengajian *Legawa* sebagai upaya untuk *tafaquh fi ad-din* untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat akan keterbatasan, keterputusan epistemologi keagamaan, serta

keterkejutan literasi keagamaan generasi muda sehingga mampu mendorong moderasi beragama di tingkat lokalitas masing-masing.

Salah satu metode yang digunakan adalah *duqqoh* (*kethukan*), metode yang digunakan mempelajari Alquran dengan menggunakan *kethukan* tembang-tembang Jawa seperti Gundul-gundul Pacul seperti *ba to ro na ro do*. Dengan metode *duqqoh* ini, diharapkan pemahaman dan literasi keagamaan masyarakat Segawe Wonogiri bisa meningkat sehingga bisa terwujud moderasi beragama dalam bentuk pemahaman keagamaan yang ramah, moderat, bercorak lokal, dan terbuka dalam memahami ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Aijudin, Anas, 2017. Mengelola Pluralisme Melalui Dialog Antar Agama. Tinjauan Teoritik. *Jurnal SMarT*, Vol. 03, No. 01, 2017.
- Andrew N. Weintraub, 2011. "The Study of Islam and Popular Culture in Indonesia dan Malaysia", dalam Andrew N. Weintraub dkk, *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. New York: Routledge
- Bhiku Parekh, 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: harvard University Press
- Connolly. Peter, 2002. *Approaches to the Study of Religion*. Yogyakarta: LKiS.
- Ismail SM, dkk. (ed.), 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kahmad , Dadang S, 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya
- Khamami Zada, 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju
- Kurtz, Lester, 1995. *Gods in the Global Village* (London: the Words Religions in Sociological Perspective
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Siraj, Said Aqil, 2013. *Meneguhkan Islam Nusantara. Biografi Pemikiran dan Kiprah Kebangsaan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA*. Jakarta & Surabaya: Khalista
- Sodik, Mochammad, 2006. "Pendekatan Sosologi" dalam Dudung Abdurrahman (ed.) *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta

- Sutopo, HB, 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Teoretis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shaleh , Badrus, 2005. “Pesantren, Konflik dan *Peace Building*”, dalam *Republika*, tanggal 23 Februari 2005.
- Wahid, Abdurrahman, 1994. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Muh. Shaleh Isre (ed.), Yogyakarta: LkiS
- Wirosardjono, Soetjipto, 1987. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin
- Qomar, Muzammil, 2002. *NU Liberal: dari Tradisionalisme ke Kosmopolitanisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM TEKS *LOKAJAYA*

Agus Iswanto

Pendahuluan

Moderasi beragama menjadi istilah atau wacana yang lantang disuarakan oleh Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini, terutama melalui Kementerian Agama. Hal itu karena moderasi beragama dipandang sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk merawat keindonesiaan yang beragam (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019: 10). Oleh karena itu, Kementerian Agama menerbitkan buku “Moderasi Beragama” yang dapat dikatakan sebagai “cetak biru” kampanye moderasi beragama di Indonesia. Buku tersebut dapat juga dikatakan sebagai suatu tawaran moderasi beragama dalam perspektif Kementerian Agama, artinya moderasi beragama dilihat dalam beragam perspektif agama-agama di Indonesia. Ada buku lain yang juga membahas soal moderasi beragama di Indonesia, tetapi kebanyakan buku tersebut hanya mendasarkan pada ajaran Islam tentang moderasi atau paham *wasatiyyah* (Junaedi 2019).

Terlepas dari kelebihan yang ada dalam buku tersebut, buku “Moderasi Beragama” belum memberikan gambaran secara apik tentang sumber-sumber historis tertulis yang sebetulnya mengandung suatu pandangan moderasi beragama. Memang, buku tersebut telah memaparkan pengalaman empirik praktik moderasi beragama

bangsa Indonesia, misalnya dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural. Namun demikian, pengalaman empirik tersebut belum mengelaborasi bukti tertulis tentang pemikiran dan pengalaman moderasi beragama yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, kecuali hanya menyebut secara singkat dalam satu paragraf tanpa penjelasan lebih lanjut (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019: 55–56). Ada memang tulisan lain yang menguraikan pengalaman historis praktik moderasi beragama Islam di Indonesia (Miftahuddin 2010), tetapi uraiannya masih umum, tidak terfokus dan tidak jelas apa bukti historis yang dimaksud. Bukti historis yang tertulis ini penting artinya sebagai salah satu modal kultural dan pembelajaran bagi praktik moderasi beragama masyarakat Indonesia saat ini, karena dengan membuka bukti historis ini, masyarakat akan tidak mengalami krisis ingatan kolektif (Kansteiner 2002: 179–97), sehingga melupakan jati dirinya.

Bukti historis tertulis adalah sumber, atau dokumen tertulis yang dapat menjadi bukti historis (Burke 1993: 101) terhadap suatu pemikiran, atau kegiatan intelektual yang pernah muncul pada suatu masa. Bukti tertulis tersebut diharapkan dapat bermakna sebagai pendidikan moral masyarakat (Kuntowijoyo, 2013: 20; Pownall, 2004: 1–2), khususnya dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam konteks saat ini. Salah satu bentuk bukti historis tertulis tersebut adalah teks *Lokajaya*.

Teks *Lokajaya* (selanjutnya LJ) mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh bernama Lokajaya, Seh Malaya, atau Sunan Kalijaga menuju “manusia sempurna.” Sebuah kisah yang mencerminkan suatu pandangan pemikiran keagamaan yang khas dan populer pada masyarakat Islam di Jawa. Kisah perjalanan sang tokoh menggambarkan hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (Iswanto 2019: 203–4). Teks ini telah disunting dan diterjemahkan oleh Marsono (2019) melalui metode penelitian filologi. Selain menyunting, dia juga melakukan telaah intertekstual dan semiotika. Tulisan ini adalah sebuah hasil penelitian terhadap teks LJ yang telah disunting tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama direfleksikan dalam teks LJ?

Tulisan ini berdasarkan pada penelitian terhadap hasil suntingan dan terjemahan teks LJ. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan

hasil-hasil analisis intertekstual dan semiotika Marsono terhadap tema-tema tertentu yang terkandung di dalam teks LJ. Hal yang belum dilakukan oleh Marsono adalah kontekstualisasi tema-tema tersebut dalam konteks kehidupan keagamaan saat ini, terutama untuk permasalahan moderasi beragama, terutama tentang prinsip moderasi beragama. Ini menjadi sumbangan yang ingin ditawarkan oleh tulisan ini, sehingga dapat menjadi modal kultural bagi praktik moderasi beragama di masa sekarang. Maksud prinsip moderasi beragama di sini adalah pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar dalam menjalankan moderasi beragama.

Untuk membahas permasalahan tersebut, pertama tulisan ini terlebih dahulu menjelaskan metode yang digunakan, dan memberikan penilaian atas kredibilitas hasil suntingan LJ yang telah dilakukan oleh Marsono. Sesungguhnya penilaian hasil suntingan Marsono atas teks LJ sudah merupakan penelitian tersendiri, tetapi penulis perlu sampaikan di sini secara ringkas untuk memberikan pertanggung jawaban penulis dalam menggunakan hasil suntingan. Selanjutnya, langkah kedua adalah mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dan latar belakang sosial budaya penulisan/penyalinan teks LJ. Hal ini sebagai upaya untuk menjelaskan wawasan teks LJ. Ketiga menganalisis teks LJ yang dihubungkan dengan tema utama pembahasan tulisan ini, yakni moderasi beragama.

Konsep moderasi beragama ini perlu dijelaskan terlebih dahulu. Dua pengertian akan coba digunakan dalam tulisan ini. Dua pengertian tersebut, penulis sebut dengan “pengertian umum” dan “pengertian khusus.” Pengertian yang pertama mengacu pada sebuah pengertian moderasi yang tidak membatasi pada batasan dalam ajaran Islam, sementara yang kedua terbatas pada pengertian moderasi dalam konteks Islam. Diharapkan dua pengertian ini dapat dihubungkan dengan suatu prinsip umum yang menengahi antara pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum dapat mengacu pada pengertian secara bahasa yang kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana agama. Pengertian umum ini sudah disinggung oleh buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Buku tersebut menyebutkan moderasi adalah “penghindaran keekstreman.” Kata ini berasal dari bahasa Latin, yakni *moderatio* yang berarti ke-sedang-an, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

Arti-arti tersebut bisa diringkas menjadi “sesuatu yang seimbang.” Secara umum, moderat berarti keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019: 15–18). Oleh karena itu, moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019:15–18). Selain itu, moderasi beragama dapat dipandang sebagai kesediaan orang-orang beragama untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, yakni menyesuaikan diri dengan sikap mereka dengan standar budaya yang berlaku untuk suatu perdamaian sosial (Liebman, 1983: 79).

Konsep ini adalah konsep umum yang substansinya bisa dipahami oleh berbagai agama, tidak hanya satu agama tertentu saja. Salah satu bukti bahwa konsep ini dapat diterapkan, atau juga dipahami adalah konsep *Nostra Aetate* yang dipandang dapat diterjemahkan sebagai moderasi beragama dalam umat Katolik (Sihombing, Abdullah, and Prasojo, 2020: 18–32). Begitu juga dengan agama Hindu dengan ajaran *Susila*-nya, yang berarti menjaga hubungan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Hal yang sama juga tampak substansi moderasi beragama dalam ajaran agama Buddha, yakni ajaran *Metta* yang berarti berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 35–36). Berangkat dari pengertian umum ini, lalu muncul konsep umum yang substansinya sama tetapi dengan beragam istilah yang berbeda di dalam berbagai ajaran agama.

Adapun pengertian khusus adalah pengertian yang terkait dengan agama Islam. Pengertian khusus ini penting disampaikan, karena teks LJ terkait dengan beberapa ajaran atau pandangan dalam tradisi pemikiran Islam, seperti pemikiran tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Biasanya para sarjana mengajukan terjemahan moderat atau moderasi dalam Islam sebagai *wasatiyyah* (bahasa Arab), yang secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai “tengah-tengah,” “berimbang,” dan “segala yang baik sesuai dengan objeknya.” Adapun lawan dari *wasatiyyah*, adalah *tatharuf* atau *ghuluw* (berlebihan) (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 15–16).

Sementara itu, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) ada sepuluh karakteristik Islam *wasatiyyah*, yakni: *tawasuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter non diskriminasi), *syura* (musyawarah), *islah* (reformasi), *awlawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawur wa ibtikar* (dinamis, kreatif, dan inovatif), dan *tahadhur* (berperadapan) (MUI, 2018).

Metode Hermeneutika Gadamer

Tulisan ini meminjam metode penafsiran yang diajukan oleh Hans Georg Gadamer (selanjutnya Gadamer), sebagai salah satu pemikir hermeneutik. Hermeneutik atau hermeneutika di sini dipahami sebagai “proses menguraikan makna yang laten dari konten yang manifes,” atau menafsirkan makna yang tersembunyi di balik konten yang tampak (Palmer, 1980: 43).

Ada tiga alasan mengapa tulisan ini menggunakan hermeneutika Gadamer sebagai metode penafsiran (interpretasi). Pertama, obyek interpretasi dalam tulisan ini adalah teks LJ, dan teks tersebut adalah suatu teks sastra yang berisi pemikiran (Wellek and Warren, 2014: 121). Disebut sebagai teks sastra yang berisi pemikiran, karena teks LJ adalah karya sastra (dicirikan dengan kode sastra) yang isi teksnya mengandung ajaran atau pemikiran mistik. Pemikir-pemikir hermeneutika yang secara eksplisit membahas tentang penafsiran terhadap teks-teks kesusastaan dan pemikiran adalah Gadamer, selain Schleiermacher, Paul Ricoeur, dan Jacques Derrida.

Kedua, metode hermeneutika Gadamer menawarkan suatu “cara” untuk menafsirkan secara “produktif,” tidak hanya “reproduktif” sebagaimana yang ditawarkan oleh Schleiermacher, karena penafsiran reproduktif, yakni meraih makna “asli” sebagaimana yang dimaksudkan pengarang adalah di luar kapasitas tulisan ini. Sementara tujuan tulisan ini adalah melakukan pemaknaan produktif, yakni kontekstualisasi makna satu teks dalam terang horizon (wawasan/cakrawala) saat ini.

Ketiga, sesuai tujuan tulisan ini yaitu mengambil pelajaran dari masa lalu, yang dapat diterapkan atau diaplikasikan, serta relevan untuk masa kini. Hermeneutika Gadamer memungkinkan hal

tersebut dengan salah satu konsepnya, yakni “aplikasi sebagai pemahaman.”

Prinsip metode penafsiran yang digunakan dalam tulisan ini berada pada uraiannya tentang “tugas penafsiran.” Tugas penafsiran menurut Gadamer, sebagaimana dijelaskan oleh Hardiman (2015: 185), adalah memproyeksikan horizon (wawasan/cakrawala) historis yang berbeda dari horizon kekinian. Artinya tugas penafsiran merupakan bukan rekonstruksi atau representasi makna dari masa silam, melainkan persilangan atau dialog antara tradisi dan kekinian penafsir (penulis/peneliti) sedemikian rupa sehingga dihasilkan sesuatu yang baru. Dengan bahasa lain, pemahaman atas sebuah teks adalah interseksi atau dialog persilangan antara situasi pembaca dan teks, atau suatu “peleburan horizon”—suatu istilah yang diajukan oleh Gadamer (2004: 305). Maksud peleburan horizon adalah seorang penafsir yang melebarkan horizon kekinian, sampai menjangkau horizon masa silam teks untuk memahami teks itu secara kreatif. Maksud horizon di sini adalah cakrawala wawasan atau konteks, yakni cakrawala wawasan teks dan pembaca.

Suatu proses penafsiran dapat diaplikasikan melalui peleburan horizon tersebut. Aplikasi, menurut Gadamer adalah bagian dari (hasil) pemahaman atau penafsiran (Hardiman, 2015: 186). Hardiman menyajikan bagaimana Gadamer memberikan contoh tentang aplikasi yang merupakan juga sebuah pemahaman, atau lebih tepatnya sebagai bagian integral dari proyeksi makna. Misalnya, seorang pengkhotbah dalam agama Kristen mula-mula dia membaca dan memahami teks Injil, lalu mengaplikasikan penafsiran teks Injil dalam khotbahnya menurut isu kekinian. Contoh lainnya pada penafsiran karya teks sastra atau pemikiran dari masa lalu: seorang yang berupaya agar teks tersebut “berbicara” kepada pembaca atau audiens sekarang dalam konteks kekinian. Hal tersebut adalah upaya untuk mengaplikasikan teks dalam konteks pembaca, dan upaya aplikasi itu adalah sebuah penafsiran.

Melalui prinsip metode penafsiran Gadamer tersebut, penafsiran atas teks LJ ini dilakukan. Hal yang dilakukan pertama adalah memahami wawasan teks LJ, yakni dengan memahami segala hal yang terkait dengan unsur-unsur intrinsik teks tersebut hingga latar belakang sosial-budaya teksnya. Untuk tahap ini, penulis banyak mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

Marsono dengan beberapa elaborasi dari sumber-sumber yang penulis temukan. Tahap selanjutnya adalah menggali makna-makna kontekstual yang tersembunyi di balik yang tampak dalam teks, atau yang belum dimunculkan oleh peneliti sebelumnya. Tahap ini adalah upaya peleburan horizon dan makna, yakni menghubungkan makna-makna yang terungkap dalam teks, dengan makna-makna yang tersirat di dalam teks LJ dan relevan dalam konteks isu moderasi beragama sekarang. Sehingga, diharapkan nanti dihasilkan suatu “bahasa” atau “bentuk” dari teks LJ yang mengandung suatu makna yang dapat diaplikasikan di masa kini.

Kredibilitas Suntingan Teks *Lokajaya*

Sebelum masuk pada pembahasan isi teks LJ, penulis perlu menjelaskan kredibilitas suntingan teks LJ yang telah dikerjakan oleh Marsono. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan suntingan adalah sebuah teks hasil suatu proses olahan (*editing*) dengan teori dan metode tertentu, yang dalam hal ini adalah teori dan metode filologi. Suntingan terhadap teks dalam sebuah naskah kuna tulisan tangan (manuskrip/naskah) berbeda dengan suntingan teks yang tercetak pada umumnya. Agar hasil suntingan teks yang tertuang dalam naskah lebih dapat dipercaya (kredibel), maka seorang penyunting naskah harus mengikuti teori dan metode filologi. Karena itu, hasil suntingan terhadap teks naskah biasanya juga merupakan hasil sebuah penelitian filologi.

Meskipun filologi bisa dipandang sebagai “peralatan” dalam rangka penyuntingan teks, dan oleh karena itu filologi dipandang “hanya sebagai metode,” tetapi karena tujuannya menghasilkan teks “yang terbaik,” maka alat ini menjadi penting. Sebabnya adalah, memindahkan suatu teks (transliterasi) dari suatu sistem tulisan ke sistem tulisan lainnya adalah proses yang tidak mudah dan tidak berakibat. Tugas melakukan suntingan adalah “tugas transformatif” yang memerlukan pemikiran yang matang, dan berbagai pertimbangan pilihan yang argumentatif (Chambert-Loir, 2009: 271).

Selain sebagai sebuah metode, filologi memiliki pandangan teoritis tentang teks, khususnya teks dalam naskah, karena obyek penelitian filologi adalah teks dalam naskah (naskah adalah wujud fisik berupa bundel lembaran yang berisi teks). Setidaknya ada dua pandangan teoritis filologi tentang teks. Pertama, teks yang terbaik adalah teks yang asli sebagaimana yang ditulis oleh pengarang. Teori filologi ini menitikberatkan penelitiannya pada bacaan yang berbeda (varian), dan bahkan bacaan yang rusak, yang dipandang sebagai suatu kesalahan dan tidak asli sesuai apa yang ditulis oleh pengarang. Adapun teori kedua berpandangan bahwa perbedaan bacaan (varian) adalah sebagai suatu kreativitas penyalinannya. Pandangan teoritis yang pertama disebut dengan “filologi klasik”, sementara yang kedua disebut dengan “filologi modern” (Fathurahman, 2010: 34; Maas, 1958: 1; Sangidu, 2016: 16; Shepard, 1930: 130; Witzel, 2014: 9–90).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya Marsono lebih mengikuti pandangan yang kedua dalam menyunting teks LJ. Alasannya adalah karena di antara keempat sumber naskah teks versi LJ, salah satunya memiliki bacaan yang lebih baik. Alasan lainnya adalah naskah yang dipilih sebagai dasar atau landasan dalam menyunting lebih sakral (Marsono, 2019: 17). Menurut penulis, alasan yang pertama yang lebih dapat diterima karena naskah yang dipilih adalah naskah yang terbaik bacaannya dibanding yang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan teoritis filologi yang kedua. Sementara alasan kesakralan naskah yang digunakan hanya karena menggunakan aksara Pegon tidak dapat diterima (Iswanto, 2019: 209).

Menurut penulis, untuk menunjukkan kesakralan sebuah naskah tidak hanya melalui aksaranya, tetapi juga melalui isi atau substansi dan konteksnya. Apalagi jelas, naskah yang diteliti bukan sebuah naskah yang teksnya dipandang sakral oleh masyarakat Islam. Teks sakral dan teks profan memerlukan diskusi lebih lanjut yang tidak hanya terbatas pada soal aksara, terlebih dalam hal teks-teks keagamaan (Eliade, 1959). Oleh karena itu, alasan kedua tidak dapat diterima. Namun demikian, hal itu tidak kemudian menyebabkan hasil suntingan Marsono tidak kredibel. Suntingan Marsono tetap kredibel karena alasan yang pertama. Cukuplah alasan pertama menjadi penilaian kredibilitas hasil suntingannya. Jadi secara teoritis, hasil suntingan Marsono dapat diterima.

Sebagaimana banyak dikemukakan oleh para filolog, bahwa langkah-langkah penelitian filologi adalah inventarisasi, deskripsi, perbandingan, penentuan metode penyuntingan, transliterasi, terjemah, dan interpretasi (Baried et al., 1985: 53–73). Langkah terakhir, yakni interpretasi, juga adalah bagian dari tugas filologi (Robson, 1994: 11; Sangidu, 2016: 14–15). Langkah-langkah tersebut juga telah dilakukan oleh Marsono, terutama tampak dalam bab tiga. Bukan pada tempatnya tulisan ini mengulang apa yang telah dipaparkan oleh Marsono tersebut secara rinci. Pembaca dapat langsung membaca hasil penelitian tersebut. Penulis hanya ingin merangkum dan menjelaskan pada bagian-bagian penting dari langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Marsono.

Pertama, inventarisasi. Setelah melakukan inventarisasi, Marsono menemukan empat naskah yang memuat teks LJ. Empat naskah itu di beri kode dengan naskah A, B, C, dan D. Empat naskah tersebut tersimpan di masing-masing tempat penyimpanan atau koleksi. Naskah A tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode LOr. 11. 629. Naskah B tersimpan di Museum Sana Budaya Yogyakarta dengan kode PB C 78. Naskah C tersimpan di tempat yang sama dengan naskah B, tetapi dengan kode PB A 21. Naskah D tersimpan di Perpustakaan Sana Pustaka Keraton Surakarta dengan kode 231 ha. Penting dicatat bahwa naskah-naskah tersebut adalah kumpulan teks yang tidak hanya memuat teks LJ, tetapi teks-teks lain. Berdasarkan aksara yang digunakan, hanya naskah A yang menggunakan aksara Pegon, sementara naskah B hingga D menggunakan aksara Jawa.

Hal yang luput dari perhatian Marsono adalah tidak memberikan gambaran mengenai sejarah koleksi masing-masing naskah. Seharusnya dia menjelaskan asal-usul koleksi naskah A yang tersimpan di Leiden, sehingga bisa menjadi naskah yang lebih lengkap dari naskah-naskah yang lain. Dengan informasi tentang sejarah koleksi, pembaca dapat mengikuti sejarah penyalinan naskah, sehingga pembaca dapat lebih menilai kualitas naskah yang dijadikan naskah dasar dalam penyuntingan.

Kedua, perbandingan. Aspek yang diperbandingkan oleh Marsono adalah jumlah pupuh (*lagu/tembang*), inti cerita, usia naskah, gaya bahasa, dan asal-usul naskah atau tempat penulisan. Jumlah pupuh terbanyak memang ada pada naskah A dan B, yakni 12 pupuh,

sementara yang lain kurang dari 12 pupuh. Perbedaan naskah A dan B hanya pada jumlah bait, yakni naskah A jumlah baitnya lebih banyak dari naskah B. Jumlah pupuh ini sejalan dengan perbandingan inti cerita, di mana naskah A dan B memiliki kesamaan dalam hal inti dan panjang cerita. Sementara naskah C lebih ringkas dari naskah A dan B, dan naskah D paling ringkas. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memang naskah A dan B memiliki cerita yang paling lengkap dari dua naskah lainnya (C dan D).

Usia naskah A, B, dan C dapat diketahui dari *candra sengkala* (ungkapan waktu). Adapun untuk naskah D diperkirakan dari catatan yang terdapat dalam halaman dua naskah. Naskah A disalin pada 1893 M, naskah B disalin pada 1887 M, naskah C disalin pada 1934, sedangkan naskah D disalin pada 1910. Oleh karena itu, dari segi usia diketahui bahwa naskah yang penyalinannya paling tua adalah naskah B, lalu A, D, dan terakhir C. Tampak bahwa memang yang diterapkan oleh Marsono di sini adalah memang “teori teks terbaik” sebagaimana dalam filologi modern, bukan “teks terasli atau tertua” sebagaimana dalam filologi klasik.

Berdasarkan gaya bahasa, Marsono berkesimpulan bahwa gaya bahasa naskah A, B, dan C menunjukkan gaya bahasa pesisiran utara Pulau Jawa (Marsono, 2019: 49). Gaya bahasa sastra Jawa pesisiran dengan pedalaman atau keraton memang terdapat perbedaan. Hal tersebut telah dibahas oleh Behrend (1995: 377 dan 439). Oleh karena itu, Marsono menyimpulkan bahwa naskah A, B, dan C berasal dari lingkungan non keraton, khususnya Pesisir Utara Pulau Jawa, dan dimungkinkan penulisnya adalah pengikut setia Sunan Kalijaga. Namun hal yang perlu dikritisi dari kesimpulan ini seolah-olah membedakan secara diametral (berhadap-hadapan) antara sastra pesisir dan sastra keraton (Jawa pedalaman). Penting dicatat bahwa, perbedaan itu relevan dalam hal gaya bahasa sebagaimana telah dikemukakan oleh Behrend dan Marsono, tetapi dalam hal substansi pemikiran perlu penelaahan lebih jauh. Apalagi teks LJ menyangkut tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat Islam Jawa, baik yang di keraton maupun pesantren (Iswanto, 2019: 203; Woodward, 2011: 145). Hal tersebut dibuktikan oleh *Babad Tanah Jawi*, yang menceritakan pertemuan Senapati (pendiri kerajaan

Mataram Islam) dengan Sunan Kalijaga dalam rangka meminta restu untuk mendirikan sebuah kerajaan.

Ketiga, suntingan teks berupa transliterasi (alih aksara) dan terjemahan teks LJ. Setelah melalui langkah perbandingan, selanjutnya adalah suntingan dalam bentuk transliterasi (alih aksara) dan terjemahan. Marsono menerapkan metode suntingan naskah dasar atau landasan, yakni menjadikan satu naskah (naskah A) sebagai dasar atau landasan dalam melakukan transliterasi teks LJ. Adapun naskah-naskah lain dijadikan saksi atau catatan yang ditampilkan dalam aparat kritik (berupa catatan kaki setelah transliterasi). Adapun metode terjemahan yang digunakan adalah metode terjemahan harfiah dan bebas. Terjemahan harfiah dilakukan jika bahasa Jawa yang diterjemahkan terdapat ekuivalensi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan metode terjemahan bebas dilakukan jika bahasa Indonesia tidak ada ekuivalensi dengan bahasa Jawa yang diterjemahkan.

Ketiga langkah ini sudah dapat menunjukkan kredibilitas suntingan teks LJ yang dilakukan Marsono. Oleh karena itu, selanjutnya suntingan ini dapat digunakan oleh para peneliti setelahnya sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas atau bidang masing-masing, termasuk dalam masalah moderasi beragama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Sutrisno (2008:35), penelitian apapun yang berdasarkan pada teks dari masa lalu atau yang berupa tulisan tangan, hendaknya menggunakan teks yang terasli dan terbaik mungkin. Karena jika tidak demikian, kemungkinan besar hasil penelitian atau kesimpulan mengenai teks itu sebagai keseluruhan, atau mengenai bagian pokok atau sampingan dari teks itu akan jauh dari apa yang dikatakan atau tidak dikatakan dalam teks.

Wawasan Teks *Lokajaya*

Sesuai dengan hermeneutika Gadamer, hal pertama yang perlu dilakukan dalam menafsirkan teks adalah masuk ke dalam cakrawala (wawasan/horizon) teks. Hal tersebut penulis lakukan dengan mendeskripsikan tentang isi dan konteks teks LJ. Bagian ini menyampaikan beberapa aspek intrinsik dan ekstrinsik, atau latar belakang sosial budaya penulisan/penyalinan teks.

1. Ringkasan Isi Teks

Penyajian ringkasan ini penulis banyak terbantu oleh Marsono (2019: 153–58) yang telah menyampaikan dalam hasil penelitiannya, yakni sebagai berikut.

- Berandal Lokajaya anak Adipati Tuban
- Bagian awal menceritakan kenakalan Lokajaya, anak Adipati Tuban. Karena itu, dia kemudian diusir dari istana kadipaten. Istrinya ditinggalkan di istana. Suatu ketika Lokajaya bertemu dengan Sunan Bonang yang hampir dirampok olehnya.
- Lokajaya bertobat dan berguru kepada Sunan Bonang
- Setelah itu, Lokajaya bertobat dan akhirnya berguru kepada Sunan Bonang. Lokajaya kemudian diperintahkan bertapa menunggui tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang. Setelah dua tahun bertapa, Sunan Bonang memberi nasihat tentang asal dan tujuan hidup kepada Lokajaya. Lalu Sunan Bonang memerintahkan Lokajaya mengambil air suci zamzam ke Kabah, Mekah. Namun dalam perjalanannya, ia menyimpang.
- Pembicaraan hidup sesudah mati oleh burung belatuk, perkutut, dan puyuh
- Lokajaya namanya berubah menjadi Seh Malaya. Saat melakukan perjalanan, Seh Malaya mendengar percakapan segitiga antara burung perkutut dengan puyuh dan belatuk tentang hidup sesudah mati, tentang raga, tentang suksma, tentang hakikat hidup di dunia, dunia akhirat, dan surga-neraka.
- Seh Malaya menuju dan masuk Samudera untuk mencari air suci zamzam, lalu bertemu Nabi Khidir
- Seh Malaya masuk ke dalam badan Nabi Khidir, dan diberi pelajaran tentang ilmu kesempurnaan
- Episode ini menceritakan Seh Malaya yang diberikan pelajaran tentang hakikat manusia dan kewajibannya, serta hakikat Tuhan dan sifatnya, tentang iman dan tauhid, tentang orang yang meninggal (bagaimana jasad dan ruhnya).

- Seh Malaya menjadi manusia sempurna di Pulau Jawa, dan hidup di alam para nabi “sifat kenabian”
- Seh Malaya (Lokajaya) dicari anak dan istrinya
- Saat Lokajaya pergi, anaknya baru berumur tujuh hari. Setelah dewasa anaknya menanyakan ayahnya (Lokajaya). Anaknya bernama Jaka Sahida. Karena menanyakan ayahnya, ibunya (istri Lokajaya) menceritakan asal-usulnya. Lalu anaknya pergi mencari ayahnya. Ketika di perjalanan saat mencari ayahnya, Jaka Sahida bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan berkata jika mau bertemu dengan ayahnya harus mengaji syariat ke Demak.
- Seh Malaya menemui Ki Gedhe Pandhanarang
- Seh Malaya bertemu anak dan istrinya
- Seh Malaya melapor kepada Sunan Bonang tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir, lalu Sunan Bonang memberi pelajaran lagi
- Episode ini juga menceritakan pelajaran Sunan Bonang kepada Seh Malaya tentang pentingnya orang harus berguru dan bertanya untuk menuntut ilmu, jangan tenggelam dalam sifat duniawi, ingat kepada yang menjadikan manusia, hendaknya selalu prihatin. Lalu Seh Malaya dinobatkan menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga.
- Sunan Kalijaga ikut andil dalam pendirian Masjid Demak
- Sunan Kalijaga membuat salah satu saka guru (tiang utama) masjid Demak dengan bahan serpihan kayu. Sunan Kalijaga juga membentulkan arah mata angin kepala masjid, sesuai dengan arah Kabah.
- Ki Gedhe Pandhanarang melaksanakan perintah gurunya, Sunan Kalijaga, dan menjadi Sunan Bayat
- Sunan Kalijaga memberi pelajaran ilmu kesempurnaan kepada Jaka Sahida, anaknya. Jaka Sahida kemudian bergelar Pangeran Wijil di Kadilangu
- Episode ini menceritakan tentang pelajaran Sunan Kalijaga kepada Jaka Sahida, yakni pelajaran tentang ilmu dunia akhirat atau ilmu lahir batin.
- Sunan Bayat meninggal

2. Unsur-Unsur Cerita

• Tema

Marsono menuliskan bahwa tema cerita dalam teks LJ adalah perjalanan Sunan Kalijaga untuk mencari ilmu kesempurnaan (Marsono 2019:158). Hal tersebut berdasarkan bukti tekstual yang disampaikan dalam pupuh 1 Dhandanggula bait pertama dan kedua, yakni sebagai berikut.

Pupuh I Dhandanggula	Pupuh I Dhandanggula
Bait 1: <i>Pan kacaryan pasêmoning ati,</i> Ingkang rinipta ing sêkarkara, Nalika ing tarbukane, Nulari ing pitutur Kang tutur têmbung termah Kawi, Lampahan kang tinelad, Ing têt kalanipun, Kanjêng Sunan Kalijaga, Duk ndhugale cinoba marang sang yogi, Kanjêng Sinuwun Bonang	Bait 1: Hati kagum Terhadap cerita yang ditulis dalam bentuk puisi Tembang dengan pupuh Dhandanggula. Hati terbuka Hendak menyebarluaskan cerita Yang patut diteladani Yang ditulis dalam kata-kata Kawi (pujangga) Yaitu perjalanan dugalnya (nakalnya) Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada waktu nakal, ia dicoba oleh sang yogi Kanjeng Sinuhun Bonang

Shipley (dalam Nurgiantoro, 2013: 130–33) mengajukan lima tingkatan tema. Pertama, tema tingkat fisik, yakni tema yang banyak berkaitan dengan mobilitas fisik daripada konflik kejiwaan. Kedua, tema tingkat organik, yakni tema yang lebih banyak menyangkut atau mempersoalkan masalah seksualitas. Ketiga, tema tingkat sosial, yakni tema yang banyak menyangkut masalah-masalah sosial. Keempat, tema tingkat egois, yakni tema-tema yang banyak membahas masalah individualitas atau hak-hak individualitas manusia. Kelima, tema tingkat *divine* (Tuhan), yakni tema-tema yang banyak membahas hubungan manusia dengan Sang Pencipta, masalah religiusitas, atau berbagai masalah-masalah filosofis, seperti pandangan hidup, visi, dan keyakinan.

Berdasarkan lima tingkatan tema tersebut, dapat dikatakan cerita LJ lebih menekankan pada tema tingkat kelima, yakni tema yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan, serta masalah pandangan-pandangan religius, seperti yang disebut dengan ilmu kesempurnaan, yang banyak ditemukan dalam teks.

Pembahasan tentang tema ini penting kaitannya dengan amanat cerita. Amanat adalah gagasan yang mendasari diciptakannya karya sastra, biasanya merupakan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang (Nurgiyantoro, 2013: 430). Sebagaimana telah disebutkan, amanat yang terkandung dalam cerita teks LJ adalah pelajaran tentang hakikat manusia dan Tuhan, serta tentang perumusan ajaran untuk menjadi manusia sempurna. Secara terperinci, amanat-amanat tersebut telah disampaikan oleh Marsono (2019: 322–498). Penulis di sini hendak meringkaskan amanat-amanat tersebut sebagai bahan lanjutan dalam upaya melakukan kontekstualisasi di bagian selanjutnya.

Tabel 1. Unsur Amanat dan Uraianya dalam Teks Lokajaya

Unsur Amanat	Uraian
Konsepsi manusia dan hakikatnya	<ul style="list-style-type: none">• Manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan• Manusia dijadikan dari air• Manusia wajib menunjut ilmu• Dalam menuntut ilmu tugas guru hanya memberi petunjuk• Manusia tidak memiliki, karena segala yang ada hanya milik Allah• Manusia bagaikan bayangan dalam cermin• Hidup manusia bagaikan wayang• Manusia harus selalu ingat, awas, dan waspada

Konsepsi Tuhan dan hakikatnya	<ul style="list-style-type: none">• Tuhan dalam berbagai nama• Tuhan yang menjadikan segala yang ada• Tuhan yang menguasai segalanya, tidak dapat dilihat dengan makna• Tempat Tuhan tiada arah• Tuhan Sang Pencipta itu Satu• Roh (Yang Permana)• Tuhan membebaskan kehendak manusia (Marsono menulisnya dengan kalimat: “Tuhan tidak menyuruh dan melarang kehendak manusia)
Empat tahap menuju manusia sempurna	<ul style="list-style-type: none">• Syariat• Tarekat• Hakikat• Makrifat

Sumber: Marsono (2019: 322-498)

Penting dicatat bahwa unsur-unsur amanat tersebut bukan merupakan sesuatu yang berurutan, tetapi ditemukan dalam keseluruhan teks, tempatnya bisa di bagian awal, tengah, ataupun akhir. Hal tersebut misalnya dalam pemaparan tahap hakikat sudah muncul di bagian-bagian awal teks, seperti cerita tentang pertemuan Nabi Khidir dan Seh Malaya. Upaya perincian amanat tersebut adalah upaya identifikasi tentang amanat-amanat yang terdapat di dalam teks LJ.

• **Tokoh**

Tokoh utama dalam cerita ini tentu Sunan Kalijaga. Terlepas dari bukti-bukti historis yang masih diperdebatkan, kronik-kronik Jawa, seperti *Babad Tanah Jawi* menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga merupakan tokoh penting dalam Islamisasi Jawa (Ricklefs, 2001: 12). Sebelum menjadi wali, dia dikenal sebagai putra adipati Wilwatikta (Tuban), dan banyak melakukan perbuatan jahat. Semenjak bertemu dengan Sunan Bonang, dan menjadi muridnya, barulah dia menjadi orang saleh, dan bahkan menjadi wali (Muljana, 2007: 98-99). Sunan Kalijaga juga dipercaya banyak

menyampaikan nasihat keagamaan melalui wayang (Shihab, 2001: 23).

• Latar

Marsono tidak menjelaskan unsur latar dalam penelitiannya. Beberapa latar tempat disebutkan secara jelas dalam cerita LJ. Contoh beberapa latar tempat yang secara jelas disebutkan adalah Tuban, hutan belantara, samudera, Demak, Kadilangu, Gunung Jabalkat, dan Bayat. Dari tempat-tempat tersebut, nama-nama tempat yang dapat dirujuk secara konkret adalah Tuban, Demak, Kadilangu, dan Bayat. Nama-nama tempat tersebut terkait dengan nama-nama tempat yang menunjuk pada tokoh utama dan tempat khusus, yakni Tuban sebagai tempat daerah asal Sunan Kalijaga atau tokoh Lokajaya, Demak menjadi tempat yang menyimbolkan daerah penting dalam Islamisasi Jawa, begitu juga Kadilangu dan Bayat. Jadi, latar tempat itu juga menandakan latar yang fungsional (Nurgiyantoro, 2013: 307), yang menunjukkan sifat khas latar yang menjadi latar belakang cerita. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa, latar tempat cerita LJ adalah pulau Jawa, atau setidaknya Jawa bagian tengah, baik bagian pesisir utara maupun pedalaman bagian selatan.

Teks LJ tidak menunjukkan latar waktu secara jelas. Namun dari beberapa penelitian tentang Islamisasi di Jawa, jelas bahwa waktu cerita ini dapat diperkirakan. Jika yang menjadi acuan adalah masa-masa akhir Majapahit, dan awal kemunculan Kerajaan Demak, maka dapat diperkirakan latar waktu cerita LJ adalah pada abad ke-14 dan ke-15, yakni masa-masa awal Islamisasi Jawa, dan di ambang keruntuhan Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha, sebelumnya akhirnya Kerajaan Demak berdiri ada abad ke-16 (Ricklefs, 2001: 41). Latar waktu ini dapat dikatakan bersifat latar fungsional, karena menunjukkan masa-masa awal Islamisasi Jawa.

Setelah mengetahui latar waktu cerita LJ, barulah kemudian dapat ditelusuri latar sosial budaya dari cerita LJ. Hal yang penting diketahui adalah latar waktu dan

sosial budaya cerita LJ berbeda dengan latar penulisan atau penyalinan teks LJ. Penulis berpendapat bahwa latar waktu cerita LJ tetap terjadi di masa-masa awal Islamisasi Jawa, yakni di masa-masa pertumbuhan Islam di pulau Jawa yang ditandai dengan munculnya tokoh para wali dan berdirinya Kerajaan Demak yang bercorak Islam, serta runtuhnya Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha.

Dengan latar waktu yang demikian, pendapat para ahli tentang peran tasawuf dalam Islamisasi Indonesia, termasuk Jawa dapat diterima (Azra, 2004: 2; Johns 1961, 1995; Kersten, 2017: 16–23; Shihab, 2001:13). Hal tersebut tampak dalam seluruh teks cerita LJ, ajaran-ajaran yang disampaikan hampir semuanya merupakan ajaran yang sarat dengan nilai-nilai tasawuf, seperti hakikat manusia, hakikat Tuhan, jalan menuju kesatuan antara manusia dan Tuhan (*manung-galing kawula lan Gusti*), yang tampak nyata dalam cerita teks LJ. Jadi dapat dikatakan bahwa, latar waktu ini juga fungsional dengan latar sosial budaya cerita LJ, yakni menunjukkan bagaimana tasawuf menjadi ajaran Islam yang mula-mula disampaikan dan diterima oleh masyarakat Islam di Jawa.

3. Latar Belakang Sosial Budaya Penulisan/Penyalinan Teks Lokajaya

Menurut Marsono (2019: 25), teks LJ ditulis pada abad ke-19 yang merupakan hasil transformasi dari sumber-sumber utama sebelumnya. Perlu diketahui bahwa transformasi adalah istilah dalam kajian resepsi teks. Makna awal “transformasi” adalah “perubahan,” yaitu perubahan suatu hal atau keadaan. Jika sesuatu yang berubah itu adalah teks—sebagai salah satu unsur atau produk budaya—maka teks itulah yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena teks tersebut muncul dalam kondisi atau lingkungan yang berbeda (Nurgiyantoro, 1998: 18). Perubahan tersebut karena adanya resepsi estetika yang produktif dari seorang pembaca terhadap suatu karya seseorang atau pujangga (Sudewa, 1991: 12).

Marsono menyebut beberapa karya-karya sebelum teks LJ yang menjadi teks hipogram (karya sebelumnya), sehingga menghasilkan hasil transformasi teks berupa LJ. Teks-teks tersebut adalah *Dewaruci Macapat*, *Asmarakandhi*, *Kitab Bonang*, *Kitab Primbon*, *Suluk Wujil*, *Ajaran Martabat Tujuh*, *Babad Tanah Jawi*, dan *Babad Bayat* (Marsono, 2019: 8–16). Oleh karena itu, bisa dikatakan pula bahwa salah satu latar belakang intelektual yang melahirkan teks LJ adalah adanya teks-teks hipogram yang sudah disebut tadi.

Teks-teks hipogram tersebut kebanyakan bernuansa tasawuf, kecuali *Babad Tanah Jawi*, oleh karena itu rasional jika Marsono mengatakan bahwa latar belakang sosial budaya yang pertama adalah masuknya agama Islam dan tasawuf di Nusantara. Apabila dikatakan bahwa teks LJ ditulis pada abad ke-19, hal itu dapat dibuktikan dengan perkembangan banyaknya teks-teks *piwulang* atau *suluk* di Jawa pada abad itu (Pigeaud, 1967: 107).

Selain populernya ajaran tasawuf, latar belakang kedua adalah masalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Marsono menjelaskan bahwa setelah Perang Jawa (Dipanegara) berakhir, Belanda lebih berkuasa di Jawa. Keadaan tersebut menimbulkan keguncangan sosial ekonomi masyarakat. Kekuasaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada abad ke-18 dan 19 sangat berkurang. Kegiatan keraton kemudian diarahkan pada budaya spiritualismenya. Ketentraman dan kebahagiaan rohani dengan menulis dan mengubah buku-buku klasik ke dalam bahasa Jawa Baru lebih dipentingkan daripada kepuasan material yang memang tidak mungkin didapat. Begitu banyaknya karya sastra yang dihasilkan oleh pujangga Surakarta pada masa ini, yang menyebabkan abad ke-18 dan 19 sering disebut sebagai masa kebangkitan kesusastraan Jawa (Pigeaud, 1967: 235; Simuh, 1998: 25). Hal tersebut juga ditambah dengan berkembangnya tradisi *macapat* (puisi Jawa) dalam masyarakat Jawa. Kebangkitan sastra pesantren dengan huruf Pegonnya juga berlangsung di lingkungan pesantren, yang merupakan bagian dari protes dan adaptasi terselubung terhadap kolonialisme Belanda. Hal inilah yang kemudian melahirkan teks LJ.

Prinsip Moderasi Beragama dalam Teks *Lokajaya*

Berdasarkan uraian unsur instrinsik dan ekstrinsik (latar belakang penulisan/penyalinan) teks LJ, dapat diketahui bahwa cerita LJ sesungguhnya adalah sebuah ajaran—bukan semata cerita—tentang hakikat manusia, Tuhan, dan prinsip-prinsip menuju manusia sempurna melalui empat tahapan: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ajaran-ajaran tersebut diberikan oleh para guru Sunan Kalijaga sebagai tokoh utama, selain juga Sunan Kalijaga mengajarkannya kepada orang lain seperti kepada Ki Gedhe Pandhanarang, termasuk kepada anaknya Jaka Sahida. Cerita tersebut memiliki alur lambat, hal tersebut menunjukkan bahwa bukan cerita dan konflik yang dipentingkan, tetapi tema dan amanat yang ingin disampaikan lebih diutamakan. Selain itu, alur lurus dan lambat dapat ditafsirkan bahwa demikianlah perjalanan manusia dalam mencapai ilmu kesempurnaan, lurus terus melaju ke depan, naik satu tingkat secara bertahap, hingga mencapai ilmu kesempurnaan. Amanat yang berupa ajaran tentang hakikat manusia, Tuhan, dan prinsip-prinsip manusia menuju manusia sempurna melalui empat tahapan: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, jika dilihat dari segi latar cerita, baik waktu, tempat, maupun sosial budaya, maka hal itu dapat dipahami karena Islam yang lebih banyak diterima pada masa awal Islam berkembang di Jawa, dan Nusantara umumnya, adalah ajaran-ajaran tentang menuju manusia sempurna yang populer dalam dunia tasawuf. Oleh karena itu, berdasarkan tema dan amanat utama cerita LJ, selanjutnya penulis akan menunjukkan kesejajaran ajaran-ajaran dalam tema dan amanat utama cerita LJ dengan prinsip moderasi beragama.

Teks LJ tidak secara eksplisit menyebutkan istilah moderasi atau *wasatiyyah*, tetapi prinsip moderasi dapat ditafsirkan melalui berbagai ajaran yang disampaikan dalam teks. Secara ringkas, penulis akan mengajukan prinsip-prinsip moderasi beragama dengan cara memperluas makna amanat. Perluasan makna amanat adalah upaya peleburan wawasan teks LJ dengan wawasan kekinian yang sesuai untuk diterapkan sebagai prinsip moderasi beragama. Hal tersebut sesuai dengan metode hermeneutika Gadamer. Perlu dicatat bahwa perluasan makna ini adalah makna-makna yang sebelumnya tidak disadari oleh penulis teks LJ atau peneliti sebelumnya. Penggunaan metode hermeneutika Gadamer di sini tampak pada

peluasan makna ini yang dapat diaplikasikan saat ini dalam konteks moderasi beragama.

Tabel 2 Peluasan Makna Berdasarkan Unsur Amanat Teks Lokajaya

Unsur Amanat	Uraian	Prinsip Moderasi
Konsepsi manusia dan hakikatnya	Manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan Manusia dijadikan dari air Manusia wajib menuntut ilmu Dalam menuntut ilmu tugas guru hanya memberi petunjuk Manusia tidak memiliki, karena segala yang ada hanya milik Allah Manusia bagaikan bayangan dalam cermin Hidup manusia bagaikan wayang Manusia harus selalu ingat, awas, dan waspada	Memiliki ilmu pengetahuan (literasi) Rendah hati
Konsepsi Tuhan dan hakikatnya	Tuhan dalam berbagai nama Tuhan yang menjadikan segala yang ada Tuhan yang menguasai segalanya, tidak dapat dilihat dengan makna Tempat Tuhan tiada arah Tuhan Sang Pencipta itu Satu Roh (Yang Permana) Tuhan membebaskan kehendak manusia (Marsono menulisnya dengan kalimat: “Tuhan tidak menyuruh dan melarang kehendak manusia)	Toleransi
Empat tahap menuju manusia sempurna	Syariat Tarekat Hakikat Makrifat	Keseimbangan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat

Sumber: Hasil pengolahan data penulis

1. Memiliki ilmu pengetahuan (literasi)

Teks LJ ada yang bercerita dan menyampaikan pesan tentang pentingnya menuntut ilmu dan berguru. Teks LJ juga menyampaikan tentang tugas guru. Berikut penulis sampaikan beberapa kutipan yang menunjukkan hal-hal tersebut.

Pupuh III Durma

Bait 36:

...

Mulane tapa,
Angel p rnatan urip.

Bait 37:

Aja lunga yen tan wruh kang
pinaranan,
Lan aja nganggo ugi,
Yen durung w ruha,
Warnane kang busana,
Aja sira nganggo b kti
Yen during wruha
Rasane kang bin kti.

Bait 38:

Awit w ruh atakon samane jalma,
Klawan t tiru nengguh,
Dadi lan tumandang,
Mengkono wong ag sang,
Ana jugul saking wukir,
Arsa suku mas,
Mring k masan denwehi.

Bait 39:

Layung kunging denangg  k ncana
mula,
Mengkono ingab kti,
Yen durung w ruha,
P rnahe kang sin mbah,

Pupuh III Durma

Bait 36:

...

Karena itu bertapalah,
Karena tata cara kehidupan itu
sulit

Bait 37:

Jangan pergi jika tidak tahu yang
dituju,
Dan jangan memakai pakaian juga,
Jika belum mengetahui,
warna pakaian yang akan dipakai.
jangan engkau berbakti
jika engkau belum tahu
Rasa yang disembah

Bait 38:

Bisa tahu karena bertanya sesama
manusia
dan menirunya
kemudian bertindak melakukan
Demikianlah orang hidup.
Ada sibodoh dari gunung
bermaksud membeli emas
oleh pandai emas diberi

Bait 39:

Kertas kuning dianggap emas
mula.
Demikianlah dalam bersembah
bakti
jika belum mengetahui
tempat arah yang disembah

Bait-bait di atas memang tidak secara eksplisit memberikan pesan kepada seseorang untuk menuntut ilmu, tetapi ditunjukkan dengan kata “tapa”, “w ruh”, “atakon.” Bisa dikatakan, “tapa” (“bertapa”) dan “atakon” (bertanya) adalah cara untuk

“wêruh” (mengetahui). *Tapa* adalah kosa kata Jawa yang berarti *“nglakoni matiraga sarta sumingkir saka ing alam rame”* (Poerwadarminta, 1939:539). *Tapa* atau *“tapabrata”* juga sudah dikenal sejak masa Hindu, yang diambil langsung dari konsep Hindu, *“tapas,”* yang berasal dari kitab-kitab *Veda*. Selama berabad-abad para pertapa dianggap sebagai orang keramat. Mereka menjalankan kehidupan yang ketat dengan disiplin tinggi, menahan hawa nafsu, agar mencapai tujuan-tujuan yang sangat penting. Bagi orang Jawa, *tapa* merupakan salah satu cara yang penting dan utama untuk bersatu dengan Tuhan (Koentjaraningrat, 1994: 372–74). Ketika melakukan *tapa*, konsentrasi batin merupakan praktik yang paling penting (Zoetmulder, 1991: 58). *Tapa* juga dilakukan oleh beberapa tokoh penting di Jawa, termasuk Sunan Kalijaga, Pengeran Senapati, dan Sultan Agung (Woodward, 1989: 167). Istilah *tapa* ini dalam tradisi tasawuf biasanya dilakukan dengan suatu tarekat untuk mendapatkan hakikat dan makrifat, biasanya dilakukan *‘uzlah* (menyepi di suatu tempat atau keadaan tertentu).

Singkatnya, *tapa* lebih merupakan usaha batiniah, yakni dengan berupaya mensucikan batin untuk mendapatkan pengetahuan sejati. Adapun kata *“atakon”* lebih bermakna mencari pengetahuan dengan bertanya. Oleh karena itu, bisa dimaknai sebagai upaya lahiriah dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi LJ memberikan pesan jika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan yang sejati, yang sempurna, maka seseorang harus melakukannya secara batin dan lahir, yakni bertapa dan bertanya, sehingga orang menjadi *“wêruh,”* mengetahui dengan benar atas apa yang dihadapi dalam kehidupan (*“kawêruhan/pengetahuan”*). Dengan *wêruh* orang akan terhindar dari kebodohan (*jugul*).

Untuk mencapai pengetahuan, orang bisa bertanya (*atakon*) dengan guru. Oleh karena itu teks LJ juga menyatakan seseorang yang ingin mencapai ilmu pengetahuan, hendaknya bertanya dengan guru. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut.

Pupuh V Mijil

Bait 12:

Lamun sira tan wêruh Yang Widi,
Ngolamaa kang wong
...

Pupuh IX Dhandhanggula

Bait 11:

Wuruk iku kang minangka wiji,
Kang winuruk upamane papan,
Kaya kacang lan kedhêle,
Sinebarna ing watu,
Yen watune datanpa siti,
Kodanan kêpanasan,
Pêsti nora thukul,
...

Pupuh V Mijil

Bait 12:

Jika engkau tidak tahu Yang Widi
(Tuhan)
Bergurulah kepada yang tahu.
...

Pupuh IX Dhandhanggula

Bait 11

Ajaran itu bagaikan biji,
Yang menerima ajaran ibarat
tempat tumbuhnya,
Bagaikan kacang dan kedelai
Disebar di atas batu,
Jika batunya tanpa tanah,
Kehujanan dan kena panas
Niscaya tidak akan tumbuh
...

Kutipan tersebut secara literal bisa dipahami sebagai berikut. Jika tidak tahu Tuhan, maka hendaklah mencari guru. Namun, ajaran yang disampaikan guru itu seperti sebuah biji kacang dan kedelai, sementara sang murid seperti batu. Kalau batunya itu tanpa panah, meskipun kehujanan dan kepanasan, maka biji kacang dan kedelai itu tidak tumbuh. Arti ini dapat dimaknai bahwa guru hanya memberi petunjuk, sang murid yang selanjutnya menentukan keberhasilan pencarian pengetahuan apapun (tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang Tuhan). Meskipun sang guru terus memberikan ajaran atau pengetahuan, kalau murid tidak berupaya untuk terus memperdalam ilmu yang diberikan, maka ilmu itu tidak akan berkembang. Oleh karena itu, dapat dikatakan guru hanya sebagai petunjuk. Dengan demikian, kemandirian sang murid amat diperlukan dalam mencapai pengetahuan.

Demikianlah dua kutipan yang menyiratkan pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Jika ditarik ke dalam konteks sekarang, sesungguhnya ilmu pengetahuan juga diperlukan untuk memupuk moderasi beragama. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sarjana kajian Islam, Hashim Kamali (2015:

9), yang berpendapat bahwa pandangan *wasatiyyah* (moderat) mengajarkan seseorang untuk berpikir dan bertindak dengan bijak, tidak fanatik atau terobsesi dengan pendapat, individu, atau kelompok, tanpa mempertimbangkan fakta dan pengetahuan yang ada (Kamali, 2015: 14). Berpikir dan bertindak dengan bijak tentu mensyaratkan pengetahuan yang cukup, tanpa pengetahuan yang cukup orang akan cenderung fanatik dan ekstrim.

Memiliki ilmu pengetahuan saat ini sering disebut dengan literat (orang yang berliterasi). Literasi saat ini tidak lagi dimaknai sekadar kemampuan untuk membaca dan menulis, tetapi juga orang yang memiliki beragam pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Salah satu literasi yang diperlukan di abad ke-21 adalah literasi budaya dan kewargaan (*World Economic Forum*, 2015: 2). Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Literasi budaya dan kewargaan menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21. Hal itu karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak (Hadiansyah et al., 2017: 3).

Sebagai bagian dari literasi budaya dan kewargaan adalah literasi agama-agama, sebab literasi agama-agama selain memiliki pengetahuan terhadap agama yang dianut, juga memiliki pengetahuan keagamaan lain. Dengan literasi agama-agama dimaksud menyadari bahwa agama-agama memiliki keragaman, sejarah penganutnya terus bertransformasi, dan pengaruh agama tertanam dalam semua dimensi budaya yang bertentangan dengan asumsi bahwa agama berfungsi dalam konteks yang terpisah, terisolasi, dan “pribadi” (*The Religious Literacy Project Harvard Divinity School*, 2020). Berdasarkan hal itu, literasi agama diperlukan untuk menumbuhkan moderasi beragama.

2. Rendah hati

Berilmu pengetahuan bukan satu-satunya yang memungkinkan orang dapat hidup secara moderat, sebab ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan orang sombong. Oleh karena itu orang juga harus selalu rendah hati terhadap ilmu pengetahuan yang belum dimiliki, karena segala hal yang belum diketahui belum tentu tidak ada dan tidak benar. Hal ini juga yang diajarkan dalam teks LJ. Penjelasan amanat menunjukkan bagaimana posisi manusia dalam kehidupan, yakni manusia berasal dari Tuhan, dan akan kembali ke Tuhan, tidak memiliki apa-apa karena manusia hanya milik Tuhan, dan manusia layaknya seperti wayang dimainkan oleh sang dalang. Selain itu, teks LJ di pupuh lain juga mengingatkan untuk tetap hati-hati meskipun telah mendapatkan ilmu kesempurnaan. Hal tersebut dinyatakan dalam kutipan berikut.

Pupuh IX Dhandhanggula

Bait 3:

Lawan sasama-saming jalmi,
lamun ing sira ngérasanana,
yen nora lan nugrahane,
yen ana nêdya padu,
angrasani kawêruh reki,
ya sira kalahana
ja kongsi kêbanjur
aja anggêdhekakên sira,
denkêraket marang dipayaning
urip,
balik sikêpan uga.

Bait 14:

Yen wus mudhêng pratingkah
puniki,
Denwingit sarta dipunsabab,
Sasab awor pênggawebe,
Naming ing batinipun,
Pan sakêdhap tan kênâ tali,
...

Pupuh IX Dhandhanggula

Bait 3:

Kepada sesama manusia,
Jika kamu memperbincangkan,
Tidak boleh tidak dengan
anugerah-Nya,
Jika ada yang bermaksud
memperdebatkan,
Membicarakan pengetahuan ini,
Hendaknya kamu mengalah,
Jangan sampai terlanjur,
Engkau jangan memperbesar,
Dekat-dekatlah engkau kepada
Yang Menguasai Hidup.
Simpanlah ajaran ini.

Bait 14:

Jika sudah paham ilmu
kesempurnaan ini, hati-hati,
karena ilmu ini rahasia.
Dalam menerapkan ilmu ini hati-
hatilah.
Dalam hati dalam sekejappun
jangan sampai lupa,
...

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana peringatan untuk tetap berhati-hati meskipun sudah menguasai pengetahuan. Karena ada pengetahuan-pengetahuan rahasia lain yang tidak semua diketahui oleh manusia. Kutipan itu juga mengingatkan bahwa untuk tetap hati-hati ketika menerapkan ilmu, jangan sampai lupa, harus tetap waspada. Tampak sekali, prinsip kehati-hati lebih ditekankan dalam kutipan di atas. Hati-hati menunjukkan untuk tetap waspada dan tidak sombong atas pengetahuan yang telah dimiliki. Penguasaan ilmu pengetahuan juga harus diimbangi dengan kerendah hatian terhadap segala hal yang tidak diketahui manusia, agar manusia tidak terjebak ke dalam bahaya yang akan menjerumuskan manusia. Prinsip rendah hati juga menjauhkan manusia untuk memberikan penilaian lebih dari penilaian yang dilakukan Tuhan. Prinsip rendah hati ini dapat membawa pada orang untuk terlalu cepat menyalahkan orang yang berbeda dan bertindak ekstrim, atau berlebih-lebihan.

3. Toleransi

Prinsip toleransi ini tidak secara eksplisit muncul dalam teks LJ, tetapi itu bisa ditafsirkan berdasarkan pilihan kosa kata yang ada dalam teks LJ. Pengertian toleransi di sini dipahami sebagai sikap menenggang atau menghargai kepercayaan atau pandangan yang berbeda. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, cerita LJ berlatar di masa peralihan Hindu-Buddha ke masa Islam. Selain itu, teks LJ ditulis dan disalin dalam konteks budaya Jawa yang masih menghargai keyakinan-keyakinan sebelumnya.

Sebagaimana sudah diulas oleh Marsono dalam sebuah artikel (2011: 8), teks LJ menyajikan nama Tuhan disebutkan dengan lima belas nama. Masing-masing nama memiliki konsep Tuhan yang merujuk pada masing-masing kepercayaan, baik kepercayaan Hindu, Islam, maupun apa yang disebut dengan kepercayaan Jawa. Berikut dipaparkan beberapa nama Tuhan dan rujukannya dalam berbagai kepercayaan agama yang ada di kalangan masyarakat Jawa.

Tabel 3 Penyebutan Tuhan dalam Teks Lokajaya

Penyebutan Tuhan dalam Teks LJ	Rujukan Kepercayaan/Agama
Hyang Suksma (Tuhan)	Hindu
Hyang Widi (Tuhan Sang Pencipta)	Hindu
Allah (Tuhan Allah)	Islam
Pangeran (Tuhan)	Jawa
Yang Agung (Yang Maha Besar)	Perpaduan Islam, Hindu, dan Jawa
Yang Manon (Yang Mahatahu)	Jawa
Gusti (Tuhan)	Jawa
Kang Mahamulya (Tuhan Yang Maha Mulia)	Jawa
Yang Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa)	Perpaduan Islam dan Jawa
Kang Murbeng Alam (Yang Menguasai Alam)	Jawa
Inggang Amurba (Tuhan Yang Menguasai)	Jawa
Pangeran Inggang Minulya (Tuhan Yang Mahamulia)	Jawa
Mahaluwih (Tuhan Yang Mahalebih)	Jawa
Yang Mahaagung (Tuhan Yang Mahabesar)	Perpaduan Jawa dan Islam
Yang (Tuhan)	Jawa

Sumber: Marsono (2011: 8).

Contoh kutipan yang menyebutkan Tuhan dengan konsepsi Hindu dan Jawa sebagai berikut.

Pupuh II Asmaradana

Bait 1 baris 4:

Sang wiku ngandika aris,
Jênênge Seh Mlaya sira,
Sira mêlayu maune,
Sêh iku kasihing Suksma

Pupuh II Asmaradana

Bait 1 baris 4:

Sang biksu berkata pelan,
Nama engkau sekarang Seh
Malaya,
Sebab sebelumnya engkau
berkelana,
Seh itu mendapat kasih dari
Suksma (Tuhan)

Pupuh II Asmaradana

Bait 6 baris 3:

Denbêcik agamanari,
Agama pan tata krama,
Krama kramate Yang Manon

Pupuh II Asmaradana

Bait 6 baris 3:

Peliharalah agama ini.
Agama sebagai pedoman dalam
kehidupan
Pedoman dalam kehidupan dari
Yang Maha Tahu.

Tabel dan kutipan di atas menunjukkan bahwa justru konsep Jawa yang banyak digunakan dalam penyebutan nama Tuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa teks LJ menghormati kepercayaan atau konsepsi Tuhan yang telah ada sebelumnya. Meskipun teks LJ adalah cerita tentang tokoh Islam dan berisi ajaran-ajaran Islam, terutama tasawuf, tetapi teks LJ tetap menghormati kepercayaan-kepercayaan yang pernah tumbuh dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Hal ini juga sekaligus membuktikan tentang dimensi batin dalam beragama yang didahulukan dalam menyikapi perbedaan kepercayaan, dan dimensi batin adalah dimensi yang banyak diajarkan oleh tasawuf. Dimensi batin beragama bermanfaat ketika dihadapkan pada keragaman pandangan, keyakinan, dan agama di masa sekarang. Dengan toleransi ini berarti teks LJ berupaya menghargai dan menerima keragaman untuk mencapai perdamaian masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan diajukan oleh Kamali (2015:49–58) bahwa, pandangan *wasatiyyah* atau moderasi beragama cenderung menerima keragaman, dan memelihara perdamaian.

Keseimbangan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat

Teks LJ menunjukkan bahwa untuk mencapai ilmu kesempurnaan harus melewati empat tahapan, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Artinya pencapaian kesempurnaan bukan terletak hanya di aspek tarekat, hakikat, atau makrifat, tetapi semua tahapan itu perlu dilewati, bahkan dilaksanakan secara seimbang. Jadi, tidak bisa dikatakan teks LJ hanya mengunggulkan hakikat saja, atau makrifat saja, tetapi semua perlu dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Bisa dikatakan bahwa kesempurnaan ada pada keseimbangan.

Contoh redaksi-redaksi teks LJ yang menunjukkan pelaksanaan empat aspek atau tahapan itu adalah sebagai berikut.

Syariat	Syariat
Pupuh XI Dhandhanggula Bait 29: Bakda salat Jêng Sinuwun Kali, Sigra lajêng dhatêng ing Bintara, Para wali pêpêk kabeh, Seh Malaya pan sampun, Sinamadan kang para wali, Mupakat juluk Sunan, Kalijaga iku. Nuli samya parêmbagan, Karya masjid ing Dêmak pan sampun rakit, Saka kirang satunggal.	Pupuh XI Dhandhanggula Bait 29: Sesudah salat Kanjeng Sinuhun Kali Segera pergi ke Bintara. Semua wali hadir Seh Malaya Diberkati oleh para wali. Mereka bermufakat memberi gelar Sunan Kalijaga. Kemudian merea berembuk Akan membuat masjid di Demak. Masjid sudah dirakit. Tiang kurang satu.
Tarekat Pupuh I Dhandhanggula Bait 10: ... Payah sang Lokajaya, Andheprok sang bagus, Pinaranan Sunan Bonang, Lokajaya engêt tobat marang Widi, Amba nut karsa Tuwan. Bait 11: Sira têtên tobat maring mami, Nggih Sang Wiku amba nuwun gêsang, Sakarsa kawula ndherek	Tarekat Pupuh I Dhandhanggula Bait 10: ... Tidak berkutik sang Lokajaya, Duduk lunglai sang tampan. Ia ditemui oleh Sunan Bonang. Lokajaya bertobat, ingat kepada Yang Widi, “Hamba berserah diri kepada Tuan.” Bait 11: “Engkau betul-betul bertaubat kepada saya” Ya, Sang Biksu, hamba meminta hidup. Sekehendak Tuan hamba ikut
Hakikat Pupuh IV Dhandhanggula Bait 1: Lamun sira arsa munggah kaji, Marang Mèkah kaki ana apa, Ing Mèkah tilasan bae, Nabi Ibrahim karuhun, Ingkang yasa iku ing masjid, Nabi Ibrahim wus sirna, Keri among watu, Gumantung tanpa canthelan, Apa iku kang arsa sira békteni, Dadi mangran brahala	Hakikat Pupuh IV Dhandhanggula Bait 1: “Jika engkau berniat naik haji Ke Mekah, Buyung, ada apa? Di Mekah hanya bekas. Nabi Ibrahim Dahulu yang membuat masjid Nabi Ibrahim sudah meninggal. Yang tinggal hanya batu Tergantung tanpa pengait. Apakah itu yang hendak engkau sembah? Dengan demikian menyembah berhala.”

**Makrifat
Pupuh IX Dhandhanggula**

Bait 4:

...

Rupa ingkang sakbênêre,
Sinêngkêr buweneku,
Urip nora nana nguripi,
Datan antara mangsa,
Iya ananipun,
Pan wus ana ing sarira,
Tuhu tunggal sêksana lawan
sireki,
Tan kêna pinisahna.

**Makrifat
Pupuh IX Dhandhanggula**

Bait 4:

...

Rupa yang sesungguhnya
Meliputi pada segala yang ada di dunia,
Dunia tidak ada yang menghidupkan,
Tidak terikat oleh waktu.
Itulah ada-Nya,
Sudah ada padamu,
Sungguh telah manunggal dengan
engkau,
Tidak dapat dipisahkan.

Pupuh XI Dhandhanggula bait 29 menunjukkan tentang pelaksanaan syariat, yang berupa ibadah salat. Tokoh yang digambarkan melaksanakan salat adalah Sunan Kalijaga sendiri. Syariat di sini dipahami sebagai tahap perjalanan menuju manusia yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan lahiriah dari segala hukum agama Islam. Oleh karena itu, digambarkan Sunan Kalijaga melaksanakan salat dan mendirikan masjid sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam.

Pupuh I Dhandhanggula bait 10 dan 11 menjelaskan tentang pelaksanaan tarekat. Arti tarekat adalah tahap perjalanan menuju manusia sempurna yang lebih maju dari syariat, yakni amalan-amalan lahiriah sudah dilakukan secara lebih sadar dan mendalam. Biasanya ditunjukkan dengan stasiun-stasiun (*maqamat*) yang menunjukkan tahap perjalanan seseorang *salik* (orang yang menempuh tarekat), yakni: taubat, zuhud, tawakal, sabar, syukur, dan rida (Schimmel 1975:109–25). Contoh redaksi yang ditampilkan adalah contoh bagaimana Sunan Kalijaga bertaubat dan akhirnya berguru kepada gurunya, yakni Sunan Bonang.

Pupuh IV Dhandhanggula bait 1 menunjukkan tahap hakikat. Hakikat yang dimaksud di sini ketersingkapen pengetahuan yang sejati (Schimmel 1975:16). Kutipan tersebut adalah pertanyaan Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga ketika akan menuju Mekah. Pertanyaan tersebut bukan untuk mengatakan bahwa Kabah dan Mekah tidak penting, tetapi ingin menunjukkan bahwa yang perlu diingat dan diketahui adalah apa hakikat Kabah dan Mekah: Kabah dan Mekah hanyalah fisik semata yang bukan merupakan tujuan

utama menuju Tuhan. Namun, meninggalkan Kabah dan Mekah juga tidak bisa karena Kabah dan Mekah adalah wujud syariat yang harus juga dilalui. Oleh karena itu, dalam mencapai hakikat, orang melalui syariat dan tarekat terlebih dahulu, seperti salat, zikir, berdoa, dan tawakal.

Pupuh IX Dhandhanggula bait 4 menunjukkan tahapan makrifat. Tahapan ini ditunjukkan dengan tersingkapnya hakikat Tuhan, sehingga seorang hamba bersatu dengan Tuhannya (Schimmel, 1975: 99). Tahap ini biasanya dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan *manunggaling kawula lan Gusti* (menyatunya hamba dengan Tuhan). Artinya, seorang hamba yang bisa mengikuti segala perintah Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Sifat-sifat Tuhan telah masuk menjadi satu pada manusia (Marsono, 2019: 461).

Kutipan lain dari teks LJ menunjukkan tentang keseimbangan antara lahir dan batin. Kutipan ini memberikan amanat tentang pentingnya aspek lahir dan batin dari ajaran agama. Tidak menonjolkan salah satu aspek, tetapi keduanya didalami dan diamalkan. Kutipannya adalah sebagai berikut.

Pupuh XII Kinanthi	Pupuh XII Kinanthi
Bait 36: Wus tampi sêdayanipun, Kang kalêbu lair batin, Ingsun nutugakên lampah, ...	Bait 36: Seluruh ilmu sudah diterimanya, Baik ilmu untuk lahir maupun batin, “Saya akan melanjutkan perjalananku,” ...

Kalau diperhatikan berdasarkan alur cerita, tahap syariat tidak selalu muncul di awal cerita, tetapi malah di tengah, tetapi justru yang muncul di awal adalah tahap tarekat, yakni ketika Sunan Kalijaga bertaubat. Menurut penulis, hal itu menunjukkan bahwa tahapan-tahapan itu bukan menunjukkan mana yang lebih dahulu dilakukan, tetapi sebaiknya melakukan keempatnya secara seimbang untuk menjadi “manusia sempurna.” Sikap melebihkan satu aspek atau tahap di banding aspek atau tahap lainnya, malah justru terjebak dari sikap berlebih-lebihan (ekstrim/*ghuluw*).

Simpulan

Teks LJ berisi amanat tentang ajaran konsepsi hakikat manusia dan Tuhan, serta ajaran menuju manusia sempurna melalui empat tahapan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Melalui pembacaan dengan metode hermeneutika Gadamer, ajaran-ajaran tersebut secara implisit juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip dalam moderasi beragama, khususnya dalam konteks Islam. Ada empat prinsip yang secara tersirat diajarkan melalui amanat cerita LJ, yakni: prinsip literasi (memiliki ilmu pengetahuan), rendah hati, toleransi, dan keseimbangan dalam menjalankan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

Prinsip literasi ditunjukkan dengan adanya redaksi dalam teks LJ yang menunjukkan tentang pentingnya mencari ilmu dan berguru. Prinsip rendah hati ditunjukkan dengan adanya redaksi dalam teks LJ yang mengajarkan untuk tidak sombong, mawas diri, dan waspada, meskipun memiliki pengetahuan, baik di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Adapun prinsip toleransi ditunjukkan dengan berbagai penyebutan Tuhan yang menggunakan berbagai nama Tuhan dalam kepercayaan dan agama yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebelumnya. Sedangkan Prinsip keseimbangan ditunjukkan dengan cerita berbagai tokoh, terutama tokoh utama (Sunan Kalijaga) yang menyeimbangkan dalam pelaksanaan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Beberapa prinsip sesuai dengan yang telah dijelaskan MUI tentang karakteristik Islam *wasatiyyah*, seperti toleransi dan keseimbangan. Sementara prinsip literasi dan rendah hati sejajar dengan apa yang dijelaskan oleh Kementerian Agama dalam “Moderasi Beragama.”

Prinsip-prinsip tersebut memang tidak secara eksplisit disampaikan teks LJ, tetapi ditafsirkan dengan mempertimbangkan wawasan teks dan wawasan kontemporer moderasi beragama dalam Islam. Dengan begitu teks LJ dapat menjadi basis pengetahuan lokal terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia. Prinsip literasi dan rendah hati berarti menyarankan pada pentingnya dunia pendidikan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan agama, untuk berperan serta dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. New Jearsey: Allen & Unwin.
- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe, Sulastin Sutrisno, and Moh. Syakir. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Behrend, T. E. 1995. *Serat Jatiswara: Struktur Dan Perubahan Di Dalam Puisi Jawa 1600-1930*. Jakarta: INIS.
- Burke, Peter. 1993. *History and Social Theory*. New York: Cornel University Press.
- Chambert-Loir, Henri. 2009. *Hikayat Nakhoda Asik Sapirin Bin Usman. Hikayat Merpati Mas Muhammad Bakir*. Depok dan Jakarta: Masup Jakarta, Ecole française d'Extrême-Orient, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Eliade, Mircea. 1959. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, The Significance of Religious Myth, Symbolism, and Ritual within Life and Culture*. New York: A Harvest Book.
- Fathurahman, Oman. 2010. "Filologi Dan Kajian Islam Indonesia." in *Filologi dan Islam Indonesia*, edited by Muchlis. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Truth and Method*. London: Continuum.
- Hadiansyah, Firman, Ratna Djumala, Syaifuddin Gani, Anwar Hikmat, Meyda Noorthertya Nento, Nur Hanifah, Miftahussururi, and Qori Syahriana Akbari. 2017. *Materi Pendukung Literasi Budaya Dan Kewargaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Iswanto, Agus. 2019. "Menelisik Sosok Dan Ajaran Sunan Kalijaga Melalui Manuskrip." *Manuskripta* 9(1):203–12.
- Johns, Antohy. 1961. "Sufism as a Category in Indonesian Literature and History." *Journal of Southeast Asian History* 2(2):14.
- Johns, Antohy. 1995. "Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations." *Journal of Southeast Asian Studies* 26(1):15.
- Junaedi, Edi. 2019. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18(2):182–86.
- Kamali, Mohamad Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam : The Qur'ānic Principle of Wasāṭiyyah*. New York: Oxford University Press.
- Kansteiner, Wulf. 2002. "Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies." *History and Theory* 41(2):179–97.
- Kersten, Carool. 2017. *A History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Liebman, Charles S. 1983. "Extremism as a Religious Norm." *Journal for the Scientific Study of Religion* 22(1):75–86.
- Maas, Paul. 1958. *Textual Criticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Marsono. 2011. "Akulturasi Penyebutan Konsepsi Tuhan Pada Teks Sastra Suluk." *Jumantara* 2(1):1–22.
- Marsono. 2019. *Akulturasi Islam Dalam Budaya Jawa: Analisis Semiotik Teks Lokajaya Dalam LOr. 11.629*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miftahuddin. 2010. "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis." *Mozaik* V(1):41–54.

- MUI. 2018. "Definisi Islam Wasathiyah." Retrieved October 5, 2020 (<https://mui.or.id/produk/infografis/23935/definisi-islam-wasathiyah/>).
- Muljana, Slamet. 2007. *Nusantara, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1998. *Transformasi Unsur Pewayangan Dalam Fiksi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palmer, Richard E. 1980. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Fifth Prin. Evanston: Northwestern University Press.
- Pigeaud, Theodore. 1967. *Literature of Java: Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands*. Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde.
- Poerwadarminta, W. J. .. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen.
- Pownall, Frances. 2004. *Lessons from the Past : The Moral Use of History in Fourth-Century Prose*. Ann Harbour: The University of Michigan Press.
- Ricklefs, M. C. 2001. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Hampshire: Palgrave.
- Robson, S. O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Universitas Leiden.
- Sangidu. 2016. *Tugas Filolog: Teori Dan Aplikasinya Dalam Naskah-Naskah Melayu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schimmel, Annemarie. 1975. *Mystical Dimensions of Islam*. Bandung: Mizan.
- Shepard, William P. 1930. "Recent Theories of Textual Criticism." *Modern Philology* 28(2):129–41.

- Shihab, Alwi. 2001. *Islam Sufistik: "Islam Pertama" Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Sihombing, Adison Adrianus, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasojjo. 2020. "Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia." *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 19(55):18–32.
- Simuh. 1998. *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Ngabehi Ranggawarsita*. Jakarta: UI Press.
- Sudewa, Alex. 1991. *Sêrat Panitisastra: Tradisi, Resepsi, Dan Transformasi*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sutrisno, Sulastin. 2008. *Hikayat Hang Tuah: Analisis Struktur Dan Fungsi*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa.
- The Religious Literacy Project Harvard Divinity School. 2020. "Four Principles of Religious Literacy." Retrieved April 12, 2020 (<https://rlp.hds.harvard.edu/our-approach/four-principles>).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wellek, Rene and Austin Warren. 2014. *Teori Kesusastraan*. Cetakan Ke. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Witzel, Michael. 2014. "Textual Criticism in Indology and in European Philology during the 19th and 20th Centuries." *Electronic Journal of Vedic Studies (EJVS)* 21(3):9–90.
- Woodward, Mark. 1989. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Arizona: The University of Arizona Press.
- Woodward, Mark. 2011. *Java, Indonesia and Islam*. London and New York: Springer.
- World Economic Forum. 2015. *New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology*. Geneva: World Economic Forum.

Zoetmulder, P. .. 1991. *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme Dan Monisme Dalam Sastra Suluk Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Setyo Boedi Oetomo

Pendahuluan

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia menjadi masalah serius. Riset yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menemukan sekitar 26% dari angka perkawinan nasional dilakukan oleh perempuan di bawah usia 19 tahun. Mereka itu terdiri dari 2,6% perempuan 10-15 tahun, dan 23,9% usia 15-19 tahun Hakiki, dkk. (2020: x) menyebutkan tahun 2018 di Indonesia ada 1 dari 9 anak perempuan yang menjalani pernikahan dini. Tahun 2018, sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah saat usianya belum mencapai 18 tahun. Kenyataan ini menempatkan Indonesia sebagai kelompok 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pernikahan dini kontraproduktif dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut Djamilah, pernikahan dini potensial mengganggu siklus kemiskinan, meningkatnya resiko kematian ibu remaja dan bayi, dan gangguan keharmonisan karena psikologi pasangan remaja yang belum siap berumah tangga sehingga rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan resiko perceraian. Perempuan di bawah usia 19 tahun organ reproduksinya belum berkembang dengan optimal (Djamilah, 2014: 2).

Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari Propinsi Yogyakarta, daerah dengan angka pernikahan dini cukup tinggi. Data BPS Propinsi Yogyakarta tahun 2012 menyebutkan, pernikahan di bawah usia 16 tahun ada 13,62% dari total perkawinan tercatat, padahal untuk Propinsi Yogyakarta hanya 7,95%. Sedangkan perkawinan dalam rentang usia 17-18 tahun ada 26,78% dari total perkawinan tercatat di Gunungkidul, untuk Propinsi Yogyakarta 13,62% (Tsany, 2015: 95). Tingginya angka pernikahan dini di Gunungkidul juga bisa dilihat dari tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Wonosari sebanyak 109 permohonan (PA Wonosari, 2015: 16). Fenomena pernikahan dini ini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian, yang disebabkan adanya gangguan keharmonisan dan psikologis mereka yang belum siap. Angka perceraian di Gunungkidul tahun 2013 ada 1.819 kasus, tahun 2014 ada 1.559 kasus, tahun 2015 ada 1.447 kasus, tahun 2016 ada 1.303 kasus (DP3AKBPMD, 2017).

Tabel 1. Data Perceraian PA Wonosari Gunungkidul 2015-2017

Perkara	Tahun			
	2015	2016	2017	2018*
Cerai Gugat	1.007	1.142	908	1.043
Cerai Talak	445	497	359	390
Jumlah	1.452	1.639	1.267	1.433

Sumber: Laporan Tahunan PA Wonosari 2015, 2016, 2017; BPS Gunungkidul 2018

Di sisi lain, angka pernikahan dini yang tinggi jika dikompasikan dengan partisipasi usia sekolah anak antara 13-18 tahun. Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017 tentang partisipasi sekolah anak-anak di Gunungkidul menunjukkan ada 221 anak usia 13-15 tahun yang tidak lagi sekolah, dan ada 4.712 orang anak usia 16-18 tahun yang tidak lagi bersekolah. Masih ada 221 anak yang hanya tamat SD, sedangkan SMP dan SMA serta tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ada 4.712 (BPS Gunungkidul, 2017: 113). Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja jajaran Kementerian Agama (Kemenag), khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Gunungkidul. Sebelum Oktober 2019 calon

pengantin (catin) yang belum genap berusia 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (pria) tidak dilayani dalam proses pencatatan nikah di KUA, kecuali mendapatkan dispensasi kawin (nikah) dari PA setempat. Dalam proses pendaftaran itulah sering terjadi salah paham antara orang tua catin dengan petugas di KUA. Selain pada jajaran Kemenag, angka pernikahan dini yang tinggi di Gunungkidul tentu mempengaruhi performa kinerja instansi yang memiliki tupoksi pendidikan, kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta perlindungan anak dan perempuan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius pimpinan daerah dan para pihak terkait, seperti Kemenag, termasuk keterlibatan jajaran Kemenag Gunungkidul. Bupati Gunungkidul memberi respons cepat dengan menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini. Dampaknya cukup signifikan dalam menekan angka perkawinan pada usia anak, salah satu indikatornya adalah turunnya angka permohonan dispensasi kawin. Hal ini berdasar data dari GPPA Wonosari. Paparan sebelumnya disebutkan bahwa tahun 2015 ada 109 permohonan dispensasi kawin di PA Wonosari, tahun 2016 turun menjadi 8,5% dan tahun 2017 tinggal 65 (P A Wonosari, 2017). Di tahun berikutnya, sejak 2016 Gunungkidul ada tren penurunan angka permohonan dispensasi kawin. Hal ini merupakan hasil pendidikan kesehatan reproduksi kepada masyarakat (baik orang tua dan remaja) melalui pendidikan non formal yang dilakukan secara sinergis antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi terkait. Program tersebut ternyata mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dan aparaturnya desa-kecamatan.

Kajian Teori

Pendidikan non formal merujuk pada Pasal 1 (12) UU No 20/2003 adalah: Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 26 (ayat 1-6) UU No 20/2003 dijelaskan: penyelenggaraan pendidikan non formal diperuntukkan bagi warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seumur hidup (*long life education*) yang berguna untuk mengganti, menambah, dan/atau melengkapi pendidikan formalnya. Fungsinya untuk mengembangkan potensi

masyarakat dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pembentukan profesionalisme, baik sikap maupun kepribadian. Kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik bisa diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal. Penyelenggaraanya boleh dilakukan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Sebelum membicarakan temuan penelitian, beberapa konsep dan teori berikut ini perlu menjadi acuan untuk menyamakan persepsi penulis dengan pembaca. Kesehatan reproduksi menurut Family and Reproduksi Health WHO (1992) adalah: suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya (BKKBN, 2009: 4; Dewi, 2018: 10; Marmi, 2013: 2-3; Pasal 1 (1) PP No 61/2014 tentang Kespro). Kesehatan sistem reproduksi merupakan kesehatan dari suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembangbiak. Merujuk Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun termasuk kategori sebagai perkawinan anak (Djamilah, 2014: 3). Tujuan pengaturan kespro dalam Pasal 3 PP No 1 Tahun 2014 agar hak kesehatan reproduksi melalui layanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan dapat terjamin agar bisa diakses oleh setiap orang yang membutuhkan.

Metode Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan, pengambilan datanya dilakukan bulan Pebruari-Maret 2018, menggunakan teknik wawancara, observasi,

dan, studi dokumen. Sumber data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB), PA Wonosari, Kemenag Gunungkidul, KUA, Rifka Annisa Yogyakarta, dan Dinas Kesehatan Gunungkidul, dan masyarakat. Uji keabsahan data, mengacu pada Bungin (2012: 204), dilakukan dengan teknik triangulasi informan, triangulasi data primer-skunder, triangulasi data hasil wawancara-observasi-studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model analisis data Miles and Hubberman (Sanapiah dalam Bungin, 2012: 69). Hasil analisis penelitian dipaparkan dengan deskriptif kualitatif.

Temuan dan Pembahasan

Kebijakan Pemda Gunung Kidul: Penguatan P2UA

Kabupaten Gunungkidul, dengan ibukota Wonosari, terletak di ujung tenggara Provinsi DI Yogyakarta, dengan konstur geografis perbukitan kapur, lembah, dan pantai, Samudera Hindia. Wilayah Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 desa, dan 1.431 pedukuhan. Klasifikasi desa di Gunungkidul terdiri dari 122 desa swadaya, 17 desa swakarya, dan 5 desa masuk swasembada (Kabupaten Gunung Kidul, 2020; BPS Gunungkidul, 2019; Dinas Pariwisata. tt.: 5). Mayoritas penduduk Gunungkidul berada di kawasan pedesaan. Gunungkidul pada tahun 2018 jumlah penduduknya adalah 764.500 jiwa, terdiri dari 96,25% umat Islam; 1,71% umat Kristen Protestan; 1,71% umat Katholik; 0,14% umat Hindu; 0,05% umat Budha; <0,001% umat Khonghucu; dan 0,04% penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME (BPS Gunungkidul, 2018: 149). Sata di atas memperlihatkan, mayoritas penduduk Gunungkidul adalah umat Islam, maka permasalahan pernikahan dini bisa dilihat dari fenomena permohonan dispensasi kawin yang tercatat di PAWonosari dan data pernikahan dini dari Kemenag Gunungkidul. Selain itu, di Gunungkidul terdapat kebijakan untuk gerakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (P2UA), kebijakan ini berdasar praktik baik masyarakat bersama aparat birokrasi level bawah yang diangkat ke level lebih tinggi (*bottom up*).

Kebijakan tersebut berangkat dari jumlah perkawinan pada usia anak (pernikahan dini) di Gunungkidul yang cenderung meningkat

menjadi perhatian serius pimpinan daerah setempat. Pimpinan daerah menyadari gerakan pencegahan perkawinan dini tersebut mendesak, agar hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi dalam pembangunan bagi anak-anak dan remaja bisa terpenuhi. Meskipun instansi/dinas terkait melakukan programnya masing-masing, tetapi hasilnya kurang optimal karena dilakukan tidak dikoordinasikan lintas instansi. Hal tersebut mendasari terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (P2UA, pada tanggal 24 Juli 2015. Gerakan P2UA melibatkan orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta anak itu sendiri. Gerakan ini berupaya melepaskan diri dari belenggu masalah pernikahan dini yang nyata menjadi hambatan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Gunungkidul. Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan P2UA tersebut dengan mensinergikan kebijakan program kabupaten layak anak dengan kearifan lokal yang ada, dengan mengepankan kepentingan terbaik bagi anak. Program terpadu dan berkelanjutan (*sustainable*) tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya, dan batas-batas kewenangan pemerintah daerah tingkat dua.

Melalui Perbup ini, masyarakat dan *stakeholders* didorong berperan aktif mensukseskan gerakan P2UA ini secara informal (keluarga) dengan memberikan pendidikan karakter, keagamaan, dan penanaman budi pekerti dan budaya luhur, serta membekali pendidikan kesehatan reproduksi. Setiap orang tua diwajibkan berpartisipasi melakukan pembinaan, pengasuhan, dan bimbingan bagi anaknya dan mencegah agar tidak terlibat perkawinan pada usia anak. Pelibatan anak dalam program P2UA ini antara lain: 1) menjaga dan menghormati nama baik orang tua, wali, dan guru; 2) mencintai keluarga, menyayangi teman-sahabat, dan masyarakat, bangsa, dan negara; 3) menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing; 4) berperilaku berdasar etika sosial dan akhlak mulia; 5) menyelesaikan pendidikan dasar; 6) mengikuti nprogram pendidikan kesehatan reproduksi; dan 7) berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) bersama elemen masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan program ini (psikolog anak,

konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak bahu-membahu mendukung gerakan P2UA. Mereka dilibatkan dalam sistem manajemen gerakan P2UA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga monitoring-evaluasi. Partisipasi masyarakat bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain: 1) melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi mengenai perlindungan anak; 2) memberi saran dan rekomendasi kebijakan terkait gerakan P2UA; 3) aktif memantau dan melaporkan pada pihak berwajib jika ada kasus pemaksaan pada anak untuk melakukan pernikahan; 4) membantu anak korban kawin paksa atau nikah dini dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial; 5) membangun konsensus dan mempromosikan program P2UA dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan; 6) partisipasi masyarakat bisa disalurkan melalui gugus tugas kabupaten/kecamatan/desa layak anak, Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pemerintah daerah membentuk gugus tugas tingkat kabupaten-kecamatan-desa dan forum-forum FPK2PA kabupaten-kecamatan, dan P2TP2A untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan sekolah/lembaga pendidikan, forum anak, sanggar anak, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan lembaga lain yang konsen pada masalah tersebut, serta *stakeholder* dari unsur SKPD atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, dan sinergi program. Secara umum, gerakan P2UA ini memberikan akses layanan pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang terlibat masalah pernikahan dini, serta untuk orang tua, keluarga, dan masyarakat. Layanan tersebut terdiri dari: 1) orang tua dapat konsultasi dengan psikolog anak atau konselor ketika akan mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya; 2) layanan ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, atau melalui FPK2PA dan P2TP2A; 3) anak yang akan diminta dispensasi kawin wajib diperiksa kesehatannya di rumah sakit atau Puskesmas oleh orang tuanya; 4) anak yang akan menjalani pernikahan dini dapat diupayakan oleh Kadinkes Gunungkidul melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Wonosari untuk diperiksa kesehatannya; 5) FPK2PA dan P2TP2A bekerjasama dengan instansi terkait dapat melakukan pendampingan dan pemberdayaan

pada anak sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan; 6) hak pendidikan dasar 12 tahun wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai upaya penundaan usia nikah.

Penanganan kasus perkawinan pada usia anak ini juga dilakukan dengan mengajak semua masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada kasus pemaksaan perkawinan pada usia anak, baik langsung maupun tidak langsung. Korban perkawinan pada usia anak juga bisa mengadukan masalahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan disampaikan kepada FPK2PA atau P2TP2A dilampiri identitas pengadu, pengaduan tersebut dalam waktu tujuh hari (maksimal) harus sudah ditindaklanjuti oleh FPK2PA atau P2TP2A dengan tindakan yang sesuai dengan materi aduan. Untuk mendalami masalah aduan, FPK2PA atau P2TP2A bisa melakukan verifikasi dan klarifikasi pada pihak terkait agar menemukan inti persoalan yang sesungguhnya.

Membangun Sinergi Antar Instansi

Program P2UA ini secara operasional dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD P2UA) dalam jangka waktu lima tahun. Penyusunannya maksimal satu tahun setelah penetapan Perbup Nomor 36/2015 tersebut. Anggaran program P2UA tersebut dari APBD Gunungkidul, sedangkan untuk program P2UA di setiap desa dianggarkan dari APB-Desa. Implementasi program P2UA ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh OPD (SKPD) yang memiliki tupoksi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sistem monev tersebut dibangun secara terpadu dan berjenjang, dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Program terpadu OPD (SKPD) lintas sektor serta melibatkan kelembagaan swasta, organisasi kemasyarakatan dalam menurunkan angka perkawinan pada usia anak didukung dengan oleh kepala daerah. Pada tanggal 20 Juni 2016, telah diterbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul No 170/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD P2UA). Setiap OPD atau SKPD yang terlibat dalam rencana aksi P2UA membuat program kegiatan, sasaran, dan ukuran capaian program. Dalam Lampiran Bab II, Surat Keputusan Bupati Gunungkidul

No 170/KPTS/2016), ada dua belas (12) lembaga/instansi yang dilibatkan, yakni: Badan Perencana Pembangunan Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) kemudian menjadi DP3AKBPMD; Inspektorat Daerah; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora); Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi; Dinas Penerimaan Pajak dan Keuangan Daerah; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk setiap satuan wilayah 18 kecamatan dan 144 desa masing-masing dibuatkan program/kegiatan, sasaran, target capaian yang seragam untuk tingkat kecamatan dan program/kegiatan, sasaran, target capaian yang seragam untuk tingkat desa.

Instansi vertikal di Gunungkidul yang terlibat ada tiga, yakni jajaran Polres Gunungkidul; PA Wonosari; dan jajaran Kemenag Gunungkidul. Ormas Keagamaan (melalui organisasi *underbow*) di Gunungkidul yang terlibat dalam program P2UA antara lain Muslimat NU, Aisyiyah, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katholik, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia. Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat antara lain: Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA); jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Forum Anak Gunungkidul; Rifka Annisa Yogyakarta; SOS Childrens Vilages Yogyakarta; Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul; Kaukus Perempuan Parlemen Gunungkidul (anggota DPRD); dan jaringan Badan Penasehatan Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (sumber: dokumen, Lampiran Bab II, Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No 170/KPTS/2016).

Rencana Aksi Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta

Lampiran II Keputusan Bupati Gunungkidul No 170/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD P2UA) tertuang uraian program/kegiatan, sasaran, dan target capaian masing-masing lembaga/instansi pemerintah dan swasta yang terlibat dalam program P2UA. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sebagai

leading sector program P2UA membuat program/kegiatan, sasaran, dan target capaian sebagai berikut: 1) sosialisasi aturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dari pusat, provinsi, dan daerah setempat dengan sasaran perangkat desa, lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, OPD/SKPD, masyarakat, dan *stakeholder* lain; 2) menyusun draf hingga melaksanakan dokumen Kesepakatan Bersama Program P2UA tingkat kabupaten, yakni antara Pemda dengan pimpinan Kankemenag, PA Wonosari, Pengadilan Negeri, Polres, DPRD, dan LSM di Gunungkidul; 3) melakukan pendampingan, konseling, dan pemberdayaan pada anak dan orang tua yang terlibat perkawinan pada usia anak melalui FPK2PA dan jaringan P2TP2A; 4) sosialisasi Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak melalui workshop kepada seluruh *stakeholder*; 5) membentuk dan memfasilitasi Forum Anak dan sanggar anak untuk seluruh anak di Gunungkidul; 6) membentuk kelompok masyarakat sadar gender di tingkat desa; dan 7) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD P2UA secara menyeluruh.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Gunungkidul merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) setiap sekolah semua jenjang (kemudian SMA/SMK menjadi kewenangan Disdikpora Provinsi DIY) wajib memberikan materi kespro sesuai tingkat kebutuhan dan pemahaman siswa; 2) Setiap sekolah yang memiliki siswi mengalami hamil di luar nikah diwajibkan agar memberi solusi dengan mengedepankan kepentingan dan pemenuhan hak anak; 3) melakukan sosialisasi pendidikan kespro dan pendidikan karakter bagi siswa.

Dinas Kesehatan Gunungkidul merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) melakukan penyuluhan kespro bagi remaja di sekolah/ desa/ wilayah di Gunungkidul; 2) melakukan penyuluhan dan pendidikan kespro bagi anak usia dini; 3) menyiapkan dan membina *peer conselor* (konselor sebaya) tentang kespro di SLTP/SLTA dan wilayah; 4) menggerakkan semua Puskesmas di Gunungkidul dalam pelayanan kesehatan peduli remaja; 5) menggerakkan jajaran Dinas Kesehatan-Puskesmas dalam melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 6) memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin

terkait status gizi, status imunisasi, tes laborat (untuk HB, golongan darah, kehamilan), layanan Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk pasangan calon pengantin terkait perencanaan kehamilan, KB, gizi, dan kespro; dan 7) merencanakan anggaran untuk kegiatan P2UA koordinasi lintas sektor.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) memantau dan memetakan kasus-kasus perkawinan usia anak melalui TKSK, PSKS, dan pekerja sosial berdasar data dari pihak berwenang; 2) melakukan penyadaran pentingnya mencegah perkawinan pada usia anak kepada masyarakat; 3) melaksanakan program pemberdayaan ekonomi anak pelaku pernikahan dini melalui *workshop*, pelatihan, dan kursus *life skill*; dan 4) memfasilitasi rehabilitasi sosial pada anak pelaku nikah dini.

PA Wonosari merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) berpartisipasi dalam penyuluhan hukum terkait Perbup 36/2015 tentang P2UA dan UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, bersama Bagian Hukum Setda Gunungkidul; 2) melayani konsultasi hukum terkait dispensasi kawin. Kakemenag merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) intensifikasi pendidikan pra-nikah bagi remaja serta siswa SLTP-SLTA; 2) menyelenggarakan kursus calon pengantin (*suscatin*) bagi pasangan yang akan menikah; 3) membuat *MoU* dengan Dinas Kesehatan setempat agar setiap KUA bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas setempat dalam rangka fasilitasi pemeriksaan kesehatan calon pengantin; 4) mengaktifkan kembali lembaga BP4 di tingkat kabupaten dan kecamatan; 5) optimalisasi program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di setiap KUA dan desa-desa; 6) memberi penghargaan kepada pemerintah desa dan kecamatan yang paling baik dalam pencegahan perkawinan pada usia anak; 7) mencegah dan membina orang tua calon pengantin dan anak calon pengantin yang terlibat rencana pernikahan dini; dan 8) setiap KUA didorong untuk melakukan *updating* data perkawinan pada usia anak, dan menyampaikan data tersebut pada progresnya kepada pihak kecamatan setempat.

Kaukus Perempuan Parlemen Gunungkidul merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut:

1) berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Perbup 36/2015 dengan mitra kerja; 2) mengawal penganggaran program P2UA di setiap OPD/SKPD terkait; 3) melakukan pengawasan implementasi kebijakan P2UA. Rifka Annisa Yogyakarta merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) melakukan advokasi kebijakan mengenai P2UA kepada pemkab, DPRD, kecamatan, dan desa; 2) promosi program P2UA melalui media cetak dan elektronik untuk remaja dan masyarakat; 3) mendorong FPK2PA, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; 4) mendorong *stakeholder* tingkat kabupaten-kecamatan-desa agar membentuk dan menguatkan keberadaan FPK2PA dan FA tingkat kabupaten-kecamatan-desa; 5) memberikan konseling kepada orang tua dan anak yang akan mengajukan dispensasi kawin; 6) memberikan kursus calon pengantin bagi anak yang telah mengajukan dispensasi kawin; 7) memberikan pendidikan pra-nikah (terkait bahaya seks pra nikah dan hamil di luar nikah) bagi pelajar SLTP dan SLTA; 8) sosialisasi pendidikan kespro dan pencegahan kekerasan dalam pacaran bagi remaja di sekolah maupun komunitas; dan 9) menyelenggarakan diskusi terfokus mengenai persoalan keluarga dalam kelompok klaster suami, istri, dan remaja.

Jaringan P2TP2A dan FPK2PA merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) melakukan sosialisasi Perbup 36/2015 kepada masyarakat; 2) melakukan koordinasi dan pelayanan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) menerima dan menindaklanjuti pengaduan kasus pemaksaan perkawinan pada usia anak. Sayap wanita ormas keagamaan (WKRI, PWKI, WHDI, Aisyiyah, dan Muslimat NU) berpartisipasi dalam mensosialisasikan Perbup 36/2015 serta pendampingan ruhani bagi anak dan orang tua yang terlibat perkawinan pada usia anak pada lingkup komunitas umat masing-masing.

Setiap kecamatan di Gunungkidul beserta jajarannya merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) membuat kesepakatan bersama dengan lembaga/instansi tingkat kecamatan untuk melakukan kegiatan P2UA; 2) menginisiasi dan menyelenggarakan deklarasi dukuh melaksanakan program P2UA tingkat kecamatan; 3) menganggarkan program/kegiatan

P2UA; 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama program P2UA; 5) melakukan sosialisasi Perbup 36/2015 kepada masyarakat, aparat desa/kecamatan, dan semua stakeholder tingkat kecamatan. Setiap Pemerintah Desa di Gunungkidul merumuskan program/kegiatan, sasaran, dan target capaian P2UA sebagai berikut: 1) menyusun anggaran untuk P2UA bersama Badan Permusyawaratan Desa; 2) menggerakkan masyarakat, orang tua, anak, dan *stakeholder* desa untuk optimalisasi jam belajar masyarakat; 3) menggerakkan masyarakat, orang tua, anak, dan *stakeholder* desa untuk memperkuat kontrol atas pergaulan remaja dengan menanamkan nilai-nilai moral sesuai agama dan kepercayaan masing-masing; 4) menyediakan arena dan fasilitas kegiatan anak-anak dan remaja untuk kegiatan positif (misal; Forum Anak Desa); dan 5) melakukan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan kesepakatan bersama P2UA tingkat desa dan deklarasi dukuh.

***Best Practice* Pengarus-utamaan P2UA Gunungkidul**

Penanganan masalah pernikahan dini di Gunungkidul sebenarnya sudah dilakukan oleh instansi terkait. Menurut M Tantowi, bahwa sinkronisasi antara lembaga dalam penanggulangan perkawinan pada usia anak belum baik (Wawancara, 20/03/2018). Hal tersebut karena masih kuatnya ego sektoral instansi dalam menghadapi masalah pernikahan dini sehingga perlu ada kebijakan yang bisa mengikat semua *stakeholder*, pemerintah, dan swasta bersama menangani persoalan tersebut. Salah satunya melalui Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang P2UA dengan model gotong royong semua elemen masyarakat lembaga swasta dan instansi pemerintah. Saat itu Rifka Annisa belum memiliki kerjasama yang jelas dengan BKKBN setempat. Rifka Annisa mencoba melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mempromosikan pendidikan kesehatan reproduksi dan pentingnya penundaan usia nikah. Ada beberapa sekolah terlibat dalam kegiatan promosi tersebut dengan membuat *MoU*. Camat Saptosari mengajak Rifka Annisa melakukan deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah-sekolah dengan melibatkan para siswa SLTP dan SLTA. Mantan aktivis Rifka Annisa di Gunungkidul menjelaskan kepada penulis sebagai berikut:

Tahun 2013, angka permintaan disposisi kawin warga Gunungkidul pada PA Wonosari sangat tinggi, ± 150 perkara. Pengajuan itu didominasi oleh pihak wanita yang disebabkan KTD (kehamilan tidak diinginkan, penl.). Daerah paling banyak mengajukan dispensasi kawin adalah Kecamatan Saptosari. Urutan kedua di Kecamatan Gedangsari dengan 19 kasus. Angka tersebut belum termasuk yang nikah siri dan yang tidak menikah. Angka persalinan usia remaja juga tinggi (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).

Kegiatan tersebut ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini menjadi motivasi bagi Rifka Annisa dan *stakeholder* setempat untuk memperluas cakupan dan meningkatkan intensitas promosi dan melibatkan masyarakat dari level bawah hingga pedukuhan. Hal ini dituturkan oleh mantan aktivis Rifka Annisa sebagai berikut:

Kemudian pada Oktober 2013 ada *MoU* antara Rifka Annisa dengan instansi/ lembaga yang ada di Gedangsari, yaitu KUA, Camat bersama kepala desa-kepala desa, Puskesmas, Ormas Keagamaan, Petugas KB, Koramil, Polsek, dan instansi lain di Kecamatan Gedangsari. *MoU* itu sifatnya umum, untuk merespon persoalan di masyarakat utamanya soal PUD. Hasil kerja tersebut kemudian dipublikasikan di media dan dilaporkan ke Wakil Bupati. Pihak pemda merespon positif, pada Maret 2014 dilanjutkan dengan deklarasi sampai pada level dukuh. Para Kepala Dukuh di Gunungkidul masih cukup berperan dalam pengendalian sosial, keberadaanya dihargai masyarakat. Strategi ini lebih irit anggaran, dengan menggunakan Kadus sebagai agen perubahan di desa. Sejak deklarasi, ada progres penurunan permohonan dispensasi pernikahan dini. Pada 2016 sudah nol permohonan dispensasi nikah dini di Gedangsari. *Best practice* di Gedangsari itu pada 2014 perluas ke Kecamatan Wonosari dengan deklarasi dan *MoU* tingkat kecamatan hingga dukuh-dukuh. Kecamatan Patuk juga mulai deklarasi dari masyarakat hingga dukuh-dukuh dikoordinir Rifka. Januari 2015 menyusul Kecamatan Saptosari mulai deklarasi dan *MoU* hingga dukuh-dukuh (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).

Pernyataan mantan aktivis Rifka Annisa tersebut menunjukkan bahwa embrio gerakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Gunungkidul muncul dari masyarakat, dari level bawah. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan P2UA ini diusulkan dari level bawah, dari masyarakat (*bottom up*). Keberhasilan masyarakat bersama

aparatur pemerintah desa dan kecamatan didampingi LSM Rifka Annisa Yogyakarta gotong royong menahan laju angka P2UA di Gunungkidul direspon sangat positif oleh dinas terkait dan pimpinan daerah. Hal itu diwujudkan dengan perintah kepala daerah untuk menyusun rancangan kebijakan kepala daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia anak di Gunungkidul. Mantan aktivis Rifka Annisa menuturkan sebagai berikut:

Januari 2015 di Kecamatan Saptosari ada penandatanganan *MoU* dan deklarasi. Momen ini sekaligus digunakan untuk mempromosikan kepada Bupati mengenai keberhasilan level kecamatan (lokal) untuk dibawa naik ke level kabupaten. Saat itu Bu Badingah, selaku Bupati Gunungkidul, sudah akhir masa jabatan periode pertama. Kami mengusulkan agar ada regulasi yang mengatur kerjasama lintas sektor menanggulangi dalam menanggulangi PUD. Bupati memerintahkan kami, Rifka Annisa, untuk melakukan koordinasi dengan BPM2KB Gunungkidul. Maret 2015 mulai proses awal menyiapkan draf kebijakan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Mei 2015 draf Perbup itu diserahkan ke Bagian Hukum Pemkab. Juni 2015 sudah penandatanganan Perbup, jadi, *MoU* tentang kespro remaja ini betul-betul kebijakan yang diangkat dari bawah atau *bottom up policy* kemudian diangkat hingga level kabupaten dan propinsi (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).

Tindak lanjut dari perintah yang dimaksud adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul No 29/KPTS/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul (Raperbup) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Gunungkidul. Tugas tim tersebut adalah melakukan kajian, mengumpulkan bahan-bahan, materi, dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyusunan Raperbup Gunungkidul tentang P2UA. Tim tersebut diketuai oleh Kepala BPMPKB, wakil ketua dijabat Sekretaris BPMPKB, dan sekretaris tim dijabat oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan BPMPKB. Anggota tim ada 25 orang, terdiri dari berbagai instansi/ lembaga pemerintah dan swasta. Saat draf kebijakan sedang disusun oleh tim, gerakan P2UA di lapangan masih terus menggelinding mengikuti teori bola salju, semakin menggelinding turun semakin besar. Dengan munculnya dukungan dari pimpinan daerah berupa kebijakan Perbup No 36/2015 semakin mempercepat gerak dari

program P2UA itu. Hal ini diungkapkan oleh mantan aktivis Rifka Annisa sebagai berikut: “pada akhir 2015 Kecamatan Nglipar dan Kecamatan Purwosari melakukan deklarasi dan MoU. Maret 2016 Kecamatan Panggang melakukan deklarasi dan MoU” (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).

Keberlangsungan program dan kestabilan semangat masyarakat dalam mendukung program P2UA perlu dijaga. Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi-Bidang Keluarga Berencana BPMPKB Gunungkidul menyatakan ada *reward* untuk keberhasilan program ini. *Reward* untuk tingkat kecamatan diberikan oleh masing-masing kecamatan yang konsen terhadap bidang ini. M Tantowi mengatakan beberapa kecamatan membuat kebijakan dengan memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Salah satu contoh Kecamatan Gedangsari yang menerapkan kebijakan *reward and punishment* melalui *Gedangsari Award* untuk level desa terbaik. Kriterianya adalah desa yang angka dispensasi pernikahannya nol. Penerima *reward* berhak mendapatkan uang pembinaan, bagi yang progresnya rendah mendapatkan *punishment* dengan bentuk diekspose ke desa/kecamatan lain. Pada tahun 2015 hadiahnya dari KUA setempat dan diberikan pada Desa Watugajah, diserahkan dalam acara *Gedangsari Award 2015* pada awal tahun 2016. Tahun 2016 hadiahnya dari Camat setempat untuk Desa Watugajah dan diserahkan pada awal tahun 2017. Pada 2017 hadiahnya dari Bupati untuk Desa Watugajah yang diserahkan pada awal tahun 2018.

Keberhasilan program P2UA di Gunungkidul ini tidak terlepas dari dukungan dana. Program ini merupakan dari gabungan kegiatan sosialisasi di berbagai instansi-lembaga sehingga anggaran untuk setiap kegiatan melekat pada DIPA instansi/lembaga masing-masing. Keberhasilan program P2UA di Gunungkidul telah banyak memberikan perubahan positif di masyarakat, beberapa catatan keberhasilannya sebagai berikut.

1. *Best practice* program P2UA turut mendorong terbitnya Peraturan Gubernur DIY No 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja Nopember 2015 (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).
2. Tahun 2016 Kecamatan Saptosari mendapat penghargaan nasional. Daerah di pesisir selatan dekat Pantai Baron, sebelum ada program P2UA jumlah kasus pernikahan di bawah umur

- cukup tinggi, sekarang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan (Kasi Pengendalian Penduduk, DP3AKBPMD, 14, 03, 2018).
3. Tahun 2017 Rifka Annisa bersama dinas terkait diminta presentasi program P2UA di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak di Jakarta. Saat itu dilaporkan mengenai: 1) Penurunan angka permohonan dispensasi kawin bagi pelaku perkawinan usia dini (PUD) turun 100% sejak ada MoU 2013; 2) Persalinan remaja turun drastis; 3) Angka perceraian di Gunungkidul dari 1.500, sekarang turun menjadi <1.000 kasus. (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018)
 4. Desa Karangawen Kecamatan Girisubo menjadi juara II lomba PIK-R tingkat Propinsi DIY (Kasi Kelembagaan dan Partispasi Bidang KB, DP3AKBPMD, 26 Maret 2018).
 5. Keberhasilan program P2UA di Gunungkidul diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota di luar propinsi, seperti Malang—Jawa Timur, dan kabupaten/kota dari Provinsi NTB dan Bali (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018).

Dukungan dan Hambatan Program P2UA di Kabupaten Gunung Kidul

Faktor Pendukung Program P2UA

Faktor struktural yang mendukung program P2UA di Gunung Kidul, baik dari tingkat daerah dan provinsi, antara lain:

1. Pemerintah Gunungkidul serius dalam menyelesaikan masalah P2UA dengan membuat kebijakan strategis sebagai berikut, yaitu: Peraturan Daerah Gunungkidul No 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, diterbitkan 24 Juli 2015; Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 170/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anaka Tahun 2016-202, diterbitkan 20 Juni 2016.
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi

Remaja, diterbitkan 27 November 2015. Kebijakan Gubernur DIY ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen “Komitmen Bersama Para Penyelenggaran Program Kesehatan Reproduksi Remaja” tanggal 3 Agustus 2016. Mereka adalah Gubernur DIY, Bupati dan Walikota se-DIY, Kepala Disdikpora DIY, Kepala Dinkes DIY, Kepala Dinsos DIY, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Kepala Kanwil Kemenag DIY, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY. Tahun 2017 Pemprov DIY memperluas program *MoU* (Komitmen Bersama Para Penyelenggaran Program Kesehatan Reproduksi Remaja) level kecamatan seluruh wilayah Provinsi DIY. Awal tahun 2018 BPPM Yogyakarta mengadakan deklarasi KRR tingkat dukuh se-Kabupaten Gunungkidul (M Tantowi, wawancara 20, 03, 2018)

3. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak semakin memperkuat program P2UA dengan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari merupakan gerakan yang dikelola oleh masyarakat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk melindungi anak. Gerakan PATBM diharapkan mampu menginisiasi masyarakat untuk: “mengenal, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri” (Dewi, 2018: 9). Program ini melengkapi program sejenis dari Dinas Kesehatan dengan BKKBN dalam program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Program itu memberikan literatur penting bagi remaja dan masyarakat sehingga tingkat literasi masyarakat dan remaja terkait kesehatan reproduksi semakin meningkat.

Faktor kultural yang mendukung program P2UA di Kabupaten Gunungkidul berdasar analisis peneliti antara lain:

1. Kepedulian sekelompok aktivis yang membela hak perempuan dan perlindungan anak di Yogyakarta yang tergabung dalam lembaga Rifka Annisa *Womens Crisis Centre* untuk terlibat menyelesaikan masalah perawinan pada usia anak di Provinsi DI Yogyakarta. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah untuk lebih serius dan membangun sinergi dalam mengatasi masalah

perkawinan pada usia anak. Hal itu diperkuat pernyataan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang mengatakan:

2. Perbup Gunungkidul No 36 Tahun 2015 diinisiasi oleh LSM Rifka Annisa bekerjasama dengan Dinkes Gunungkidul, hal ini merupakan pengembangan dari hasil kerja selama ini pada masyarakat Gedangsari bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Hasil kerja mereka telah menunjukkan hasil positif untuk menurunkan angka KTD, persalinan remaja, dan kematian ibu melahirkan (Trianawati, wawancara 21, 03, 2018).
3. Kultur masyarakat Jawa yang cenderung *manut* (menurut) kebijakan pimpinan menjadi faktor penting keberhasilan program P2UA. Kultur masyarakat Jawa yang masih menjunjung tinggi tradisi gotong royong juga sangat mendukung kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan kepala daerah memerlukan berbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menyelesaikan masalah P2UA, *stakeholder* pemerintah dan swasta bersama-sama menyusun rencana aksi mendukung program P2UA.

Faktor Penghambat Program P2UA

Faktor struktural yang menjadi penghambat penanggulangan masalah perkawinan pada usia anak di Gunungkidul sebagai berikut.

1. Regulasi yang ada menyebabkan kebijakan antar lembaga/kementerian kurang sinkron. BKKBN dan Kementerian Kesehatan mencanangkan usia perkawinan ideal untuk wanita 20 tahun ke atas dan laki-laki 25 tahun ke atas. Acuan BKKBN adalah Pasal 6 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, bahwa anak bisa menikah tanpa harus mendapat ijin dari orang tua ketika usianya sudah mencapai 21 tahun (BKKBN, 2009: 22). Sementara itu, jajaran Kementerian Agama (KUA) membatasi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sesuai Pasal 7 (1) UU Nomor 1/1970 tentang Perkawinan. Namun harus tetap menikahkan ketika ada calon pengantin yang belum memenuhi usia Pasal 7 (2) UU Nomor 1/1970 tentang Perkawinan.

2. Saat penelitian, di Gunungkidul belum ada kebijakan kepala daerah yang mengintegrasikan pendidikan kespro ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, guru mata pelajaran yang ada kaitannya dengan pendidikan kespro belum dikondisikan untuk melakukan koordinasi. Hal ini menjadi hambatan bagi percepatan pemahaman remaja di sekolah terhadap pendidikan kespro. Pada saat penelitian, penulis mendapat informasi bahwa di Kabupaten Kulonprogo sedang proses penyusunan materi pendidikan kespro yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah.
3. Lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (MTs, MA) belum bisa menerapkan integrasi materi kespro ke dalam kurikulum sekolah, karena konten pendidikan kespro kurang bisa diterima seluruhnya berdasar norma-norma agama. Sementara dari level pusat belum ada instruksi untuk mengintegrasikan pendidikan kespro dengan kurikulum sekolah.

Faktor kultural yang menjadi penghambat program penanggulangan masalah perkawinan pada usia anak di Gunungkidul antara lain:

1. Sebagian masyarakat di daerah selatan di Gunungkidul masih ada yang mempercayai mitos bahwa jika ada anak gadis yang menolak pinangan/lamaran (*ditakokne*) oleh laki-laki maka nantinya akan sulit mendapatkan jodoh hingga tua. Anak gadis yang telat menikah dari umumnya perempuan di desanya akan menjadi beban bagi orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa memiliki anak gadis yang telat menikah merupakan aib keluarga;
2. Keluarga muda di Gunungkidul cukup banyak yang merantau ke luar kota. Kebiasaan masyarakat setempat, anak-anak mereka ikut kakek/neneknya sehingga anak-anak itu kurang mendapat pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya. Dampaknya mereka kurang serius belajar, rata-rata lulusan SLTP kemudian bekerja atau menikah. Hanya sedikit yang sekolah dan lulus SLTA, jika ada yang lulus SLTA pun umumnya jarang yang kuliah (Penyuluh Agama Islam Tanjungsari, wawancara 23 Maret 2018);

3. Kultur Jawa tradisional menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Perempuan Jawa sering diistilahkan sebagai *konco wingking* (teman belakang) dengan peran sebagai *partner* dalam aktivitas suami-istri di “*dapur, kasur, sumur*”. Cara pandang terhadap istri seperti itu masih dipegang oleh sebagian masyarakat pedesaan di Jawa, terutama oleh generasi tua. Cara pandang seperti ini tentu akan membatasi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkreasi mengaktualisasikan potensinya sehingga mendorong anak perempuan menikah atau menjadi objek pemaksaan orang tua untuk kawin pada usia anak;
4. Budaya barat dan negara maju lainnya masuk ke berbagai negara berkembang bagaikan gelombang besar yang susah untuk dibendung. Media yang paling efektif internet. Berbagai informasi, konten yang baik maupun yang buruk, bisa diakses dengan mudah di warung internet maupun *handphone*. Sehingga konten-konten negatif bisa leluasa masuk sampai ke dalam rumah bahkan kamar pribadi remaja, termasuk remaja di pedesaan di Gunungkidul, tanpa menimbulkan kecurigaan orang tua atau kakek/nenek yang gagap teknologi. Fenomena ini menimbulkan efek gegar budaya, dari masyarakat desa yang cenderung tertutup tiba-tiba mereka bisa mengakses dengan mudah hal-hal merangsang libido remaja yang baru mengalami pubertas. Warung internet di Gunungkidul turut berperan dalam perubahan perilaku negatif remaja (M Tanthowi, 24, 03, 2018).

Paparan di atas menunjukkan bahwa hambatan utama program rendahnya akses masyarakat terhadap literasi kesehatan reproduksi. Literasi kesehatan reproduksi bagi suami/istri remaja sangat penting karena remaja menikah umumnya tidak melanjutkan sekolah. Berdasar hasil sebuah kajian, 85 % anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja (Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, 2016: 12). Satu hal penting dalam membangkitkan tingkat literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi adalah membangun relasi kemitraan antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Dalam pendidikan berbasis

masyarakat, menurut Freire, masyarakat menjadi tuan bagi pemikirannya sendiri dan merasa memiliki program karena dilibatkan dalam pengembangan pendidikan. Konsep ini disebut dengan demokratisasi pendidikan berbasis masyarakat (Suharto, 2012: 115).

Negara menyadari bahwa batasan usia kawin antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam Pasal 7 UU No 1/1974 tentang Perkawinan menimbulkan permasalahan di masyarakat dan perbedaan standar usia pernikahan serta memunculkan pandangan stereotip terhadap eksistensi perempuan. Aturan itu telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 UU No 16/2019 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni sembilan belas (19) tahun. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat penting dimana hak untuk sekolah dan mendapatkan pengalaman hidup pra-nikah akan sama, antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini tentu menjadi penting dalam merubah kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang belum menempatkan perempuan dalam posisi sederajat atau masih memiliki pandangan stereotip terhadap posisi perempuan. Dalam Islam, Alquran Surat Annisa ayat 1 Allah SWT bersabda bahwa perempuan pertama (Hawa) tercipta dari tulang rusuk laki-laki pertama (Adam) sehingga diperintahkan untuk selalu menjaga hubungan yang baik dalam berkeluarga (Faqih, 2012: 130).

Program pencegahan pernikahan pada usia anak mendapatkan perhatian serius dari *stakeholder* setempat. Pimpinan Daerah Gunung Kidul didukung masyarakat bersama lembaga swasta secara terpadu telah mengkonstruksi pemahaman baru bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang harus dicegah semaksimal mungkin. Kebijakan strategis yang dilakukan memberikan dampak (*impact*) perubahan yang signifikan pada masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan yakni dengan promosi intensif kepada stakeholder mengenai pentingnya program P2UA; membangun komitmen kerja bersinergi antar instansi/lembaga dan masyarakat (gotong royong) dan dideklarasikan; melaksanakan komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akses literasi tentang kesehatan reproduksi; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan instansi/ lembaga dan masyarakat; dan *reward and punishment* atas kinerja pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Pelajaran yang bisa dipetik (*lesson learnt*) bahwa kebijakan P2UA di Gunungkidul berhasil memberi perubahan di masyarakat karena mengikuti model *bottom up*, dimana masyarakat merasa ikut memiliki program dan kemudian ikut bertanggung jawab keberlanjutan program. Rekomendasi penulis untuk meningkatkan kinerja kebijakan P2UA di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut

1. Pemerintah pusat perlu mengangkat *best practice* program pencegahan perkawinan pada usia anak di Gunungkidul untuk menjadi model bagi daerah lain untuk mengatasi hal serupa dengan pendekatan kultural yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, selain pendekatan struktural yang mendorong kerja sinergis antar instansi/ lembaga dan masyarakat.
2. Kementerian Agama perlu mengembangkan hasil kajian terhadap mengenai dampak negatif pernikahan dini dengan bahasa agama agar mudah diterima masyarakat muslim awam. Selain itu, Kementerian Agama perlu mengembangkan literatur pendidikan kespro yang bernuansa Islami, ramah anak, dan tidak bertentangan dengan norma agama. Bahan tersebut bisa diimplementasikan untuk masyarakat muslim, terutama para remaja muslim. Dengan demikian, remaja muslim bisa mengakses literasi tentang kesehatan reproduksi dalam kegiatan tanpa rasa canggung.

Daftar Pustaka

- Afridah, W; Fajariani, R. 2017. Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa Sma Kanjeng Sepuh Gresik. *Medical and Health Science Journal*, Vol. 1 (1) February 2017: 53-57.
- Astuti, TMP. 2013. *Penghargaan Sosial Semu dan Liminalitas Perempuan Migran*. Semarang: Widya Karya.
- BKKBN. 2009. *Pedoman KIE: Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN DIY. 2010. *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)*. Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS Gunungkidul. 2019. *Gunungkidul Dalam Angka 2019*. Wonosari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Prameswari Puspa. 2018. *Modul Kesehatan Reproduksi: Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Kementerian PPA kerjasama dengan Rutgers WPF Indonesia.
- Dinas Pariwisata. tt. *Exotic Gunungkidul*. Wonosari: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kerjasama dengan UNESCO.
- Djamilah, Reni Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 3 (1) Mei 2014: 1-16.
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (cet. 14)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Geldard, K dan Geldard, D. 2011. *Konselin Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda (edissi 3)*. Diterjemahkan oleh Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakiki, G dkk. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia bekerjasama dengan BPS, BAPPENAS, PUSKAPA Universitas Indonesia.
- Kabupaten Gunung Kidul. 2020. Kondisi Umum, diakses dari <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>. 18 April 2020.
- Marmi. 2013. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masfiah, S. Shaluhiyah, Z. Suryoputro, A. 2013. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8 (1) Januari 2013: 69-78.
- Musthofa, SB; Winarti, P. 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1 (1) Desember 2016: 33-41.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2016. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2015. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2017. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2016. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2018. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2017. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pertiwi, KR; Salirawati, D. 2014. Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Permasalahannya. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19 (2) Oktober 2014: 104-115.

- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2016. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anaka di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik kerjasama dengan UNICEF.
- Suharto, Toto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Suryoputro, A; Ford, NJ; Shaluhiah, Z. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Makara Kesehatan*, Vol. 10 (1) Juni 2006: 29-40.
- Tsany, F. 2015. Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. Vol. 9 (1) Juni 2015: 83-103.
- Yulianti, N. 2015. Hubungan Pergaulan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Pada Siswa Kelas XI IPS Di SMA N 1 Semin Gunungkidul Yogyakarta. *Skripsi*. Prodi Ilmu Keperawatan STIK Aisyiyah Yogyakarta.

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Arnis Rachmadhani

Pendahuluan

Kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat pada sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi, baik secara medis maupun mental serta sosial kultural (Lukman, 2004: 15, Djabbar, 2004: 13). Reproduksi sehat yang dimaksud dalam artikel ini adalah pendidikan seks. Fanggidaej (1995: 192) seperti dikutip oleh Wibowo (2011: 197-210) menjelaskan bahwa pendidikan seks bukanlah mengajarkan bagaimana berhubungan kelamin atau hal-hal yang negatif seperti anggapan masyarakat selama ini, tetapi pendidikan seks mempunyai dimensi bermacam-macam. Dari sudut dimensi fisik, ini berarti kita harus bisa mengerti anatomi, fisiologi organ-organ reproduksi, dan harus tahu bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksinya. Sedangkan dimensi mental/psikologis artinya kita harus bias mengerti sifat-sifat yang berkaitan dengan seks, perilaku seks, dan dapat mengatasi dorongan seksual terhadap lawan jenis secara tepat.

Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi sudah banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi, seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Tetapi fakta di lapangan masih

sering terjadi adanya perilaku terkait dengan kesehatan reproduksi tidak sehat dan bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang masih sering dipublikasikan oleh media cetak maupun elektronik, seperti masih maraknya prostitusi dan hubungan seks bebas dalam pergaulan di kalangan pelajar.

Berbagai penelitian mengenai remaja menunjukkan bahwa remaja membutuhkan informasi, terutama informasi tentang kesehatan reproduksi. KPAI memiliki data jumlah kasus anak dan remaja sebagai korban prostitusi online di Indonesia sebanyak 83 kasus di tahun 2014 dan sebanyak 117 kasus di tahun 2015. KPAI juga mencatat kasus anak sebagai korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 46 kasus pada tahun 2014 dan sebanyak 72 kasus pada tahun 2015. KPAI juga memiliki data kasus pornografi dan cyber crime pada anak sebanyak 322 kasus pada tahun 2014, 463 kasus pada tahun 2015, dan 315 kasus pada Januari – Juli tahun 2016. KPAI juga menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak di tahun 2015, sebanyak 120 kasus di tahun 2016, dan sebanyak 116 kasus di tahun 2017. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tersebut tidak dapat ditangani tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak. (KPAI, 2016).

BKKBN juga mengungkapkan data terkait remaja yang mengaku mempunyai teman yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah usia 14-19 tahun sebesar 34,7% perempuan dan 30,9% laki-laki (BKKBN, 2013).

Kementerian Kesehatan memiliki data Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 terdapat sebanyak 2,6% perkawinan pertama dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% usia perkawinan pertama berada pada usia 15-19 tahun. Angka kehamilan pada remaja umur kurang 15 tahun adalah sebesar 0,02% dan kehamilan pada usia 15-19 tahun sebesar 1,97%. Data tersebut mengindikasikan kesadaran anak dan remaja terhadap pentingnya kesehatan reproduksi remaja di Indonesia masih jauh tertinggal. (Kemenkes, 2015)

Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa sekitar 33,3% remaja perempuan dan 34,5% remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun. Usia yang masih belia tersebut dikhawatirkan remaja belum

memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga mereka memiliki resiko untuk melakukan seks pranikah. (Kemenkes, 2015)

Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis, dan juga intelektual. Beberapa karakteristik remaja yaitu memiliki keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan pada remaja, salah satunya adalah permasalahan mengenai kesehatan reproduksi. (BKKBN, 2013)

Remaja zaman sekarang berada dalam lingkup yang serba modern. Pendidikan remaja dipengaruhi dari berbagai sumber, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial. Keluarga turut berperan sebagai institusi mini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak demi pengembangan kepribadiannya (Lestari, 2010: 4). Remaja perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah perlu adanya suatu cara penyampaian informasi yang baik dan benar, baik dari sekolah maupun dari petugas kesehatan. Upaya ini dapat diimplementasikan melalui Bimbingan Konseling (BK), Program Kerja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Namun, implementasi kegiatan tersebut belum sesuai yang diharapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tahun 2006 tentang pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). (Irawati, 2011)

Bagaimana Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam perspektif Pendidikan Agama Islam ? Ada beberapa definisi terkait pendidikan seks yang dikemukakan para pakar. Anshori menjelaskan tentang pendidikan seks adalah perlakuan proses sadar dan sistematis di sekolah, keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkawinan menurut ilmu kesehatan, agama dan norma yang sudah ditetapkan masyarakat (moral). (Anshori LAL. 2012: 95)

Utsman ath-Thawiiil mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pemberian pelajaran dan pengertian kepada anak laki-laki maupun perempuan sejak mereka mulai memasuki usia balig serta berterus terang kepadanya tentang masalah-masalah yang berhubungan seks, naluri dan perkawinan. (Ath-Thawiiil, 1997: ix)

Definisi lain tentang pendidikan seks dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam Abdullah Nashih Ulwan. Menurutnya pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. (Ulwan, 1993. 572)

Pendidikan Agama Islam di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Dalam ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMA berkenaan dengan fiqh, dikaji dalam standar kompetensi antara lain tentang memahami hukum berkeluarga dan memahami ketentuan dan cara-cara *thaharah*. Berkenaan dengan aqidah akhlak, dikaji antara lain tentang membiasakan diri menghindari sifat, sikap dan perilaku tercela. Tamatan Sekolah Menengah Atas diharapkan memiliki kemampuan/kompetensi antara lain: 1) Memiliki keyakinan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2) Memiliki nilai dasar humanisme untuk menerapkan kebenaran dalam kehidupan. 3) Mengembangkan pola hidup berdasarkan nilai-nilai kebersihan, kesehatan, rohani dan kebugaran jasmani. (Uno, 2007: 123).

Pendidikan reproduksi sehat, sebenarnya telah diberikan pada satuan pendidikan mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs sampai dengan SMA/MA. Materi yang membedakan pada tiap-tiap tingkatan satuan pendidikan adalah pembahasan yang lebih mendalam pada satuan pendidikan tingkatan yang lebih tinggi. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi memerlukan adanya pembelajaran dengan metode yang tepat, sosialisasi yang tepat dan intensif, agar setiap peserta didik memahami tentang kesehatan reproduksi, baik ditinjau secara

medis, mental, sosial kultural maupun agama atau hukum Islam. Pendidikan agama berusaha melakukan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai *way of life* (Saleh, 1973: 19).

Berkaitan dengan masalah Pendidikan Kesehatan Reproduksi di SMA, usia peserta didik pada masa ini merupakan usia yang paling rawan. Siswa memasuki pada masa pubertas yaitu masa yang harus dilewati sebelum menuju masa dewasa. Pada masa ini, terjadi perkembangan fisik, seperti adanya peristiwa haid untuk perempuan dan mimpi basah serta muncul kumis pada laki-laki. Masa pubertas adalah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja (Santrock, 2007: 7). Akibat perubahan masa pubertas terlihat antara lain pada sikap dan perilaku (Hurlock, 1980: 92).

Kesehatan reproduksi masih belum dipahami secara utuh oleh peserta didik. Remaja yang mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, akan mudah lemah kualitas iman dan ketakwaan-nya sehingga kepribadiannya mudah rapuh dan hubungan komunikasi dengan orangtua menjadi kurang harmonis yang bisa mengakibatkan dekadensi moral. Upaya untuk membenahinya dengan cara melibatkan berbagai pihak terkait, melalui jalur orangtua, guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kesehatan reproduksi memerlukan adanya pembelajaran dengan metode dan sosiaslisasi yang tepat dan intensif.

Merujuk penjelasan di atas dan berangkat dari fakta di atas maka artikel ini membahas tentang Bagaimana Materi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Kesehatan Reproduksi melalui Mapel PAI?; Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Program Kesehatan Reproduksi?; Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pembelajaran Kesehatan Reproduksi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menurut Moleong bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan sebagainya, secara kolektif dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang minati (Moleong 2008: 6).

Sasaran penelitian ini pada siswa SMA yang berada di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan lokus ini didasarkan pada daerah tujuan wisata yang memiliki SMA Negeri dengan asumsi bahwa siswa SMA merupakan generasi muda bangsa yang sedang berada dalam masa transisi dimana gejala atau pertumbuhan libido seks sedang mengalami kenaikan sedangkan penentuan lokasi didasarkan merupakan basis wilayah pariwisata yang cukup rentan dengan kasus pernikahan dini. Selain itu, proses akulturasi budaya yang datang dari wisatawan yang merupakan salah satu faktor pengaruh dari luar terutama berkaitan dengan pergaulan anak remaja tidak diikuti dengan proses penguatan Pendidikan Kesehatan Reproduksi.

Adapun fokus yang menjadi kajian adalah dilihat dari perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal ini dikarenakan PAI dalam kurikulum yang diberikan pada siswa di tingkat SMA cukup memberikan porsi dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Disamping itu, penetapan PAI sebagai fokus kajian karena memiliki benang merah dengan Kementerian Agama.

Subjek penelitian ini adalah peserta didik SMA kelas X dan kelas XI dari SMA Negeri 1 Batu Layar dan SMA kelas X dan kelas XI dari SMA Negeri 1 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang diperoleh siswa melalui mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dan pemahaman siswa terhadap kesehatan reproduksi yang diperoleh melalui instansi pemerintah, seperti dari Puskesmas, BKKBN, LSM. Kpolisian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun dari lembaga terkait dan lembaga non pemerintah lainnya merupakan kelengkapan dari keseluruhan Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang saling melengkapi.

Peneliti menganalisis data-data penelitian dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode analisis penelitian yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000, 115). Data-data penelitiannya diperoleh di lapangan melalui teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat macam teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008: 187). Wawancara dilakukan kepada peserta didik, pengelola sekolah seperti kepala sekolah, guru/pendidik, maupun informasi terkait kesehatan reproduksi dari perspektif petugas kesehatan dan pejabat instansi pemerintahan sebagai wadah utama remaja mendapatkan pendidikan reproduksi sehat.

b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung di lapangan, data langsung diperoleh dengan terjun ke lapangan. Data bisa berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2010: 112).

Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melaksanakan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (Moleong 2008:176).

c. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk tulisan, seperti peraturan-peraturan kebijakan, biografi dan catatan-catatan lain (Sugiyono, 2013: 329). Sebagaimana yang disampaikan Arikunto (2008:135), dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya. Telaah dokumen digunakan untuk mendapatkan data tentang regulasi atau peraturan-peraturan dan dokumen lainnya.

d. *Focus Group Discussion (FGD)*

Selain itu data secara kualitatif juga dikumpulkan melalui FGD pejabat instansi pemerintahan, guru, dan kepala sekolah yang bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendidikan kespro bagi remaja yang meliputi materi, metoda dan pemberinya yang ramah remaja, berdasarkan pengalaman guru/kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan tersebut dan solusinya.

Temuan dan Pembahasan

Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum

Kementerian Pendidikan masih menempatkan materi pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi di mata pelajaran biologi dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun melalui mata pelajaran pendidikan jasmani olah raga kesehatan masih belum fokus membahas kesehatan reproduksi hanya membahas kesehatan secara umum. Sedangkan guru bimbingan konseling memberikan materi layanan kesehatan reproduksi remaja melalui metode diskusi dan konseling.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum secara khusus dibahas dalam kurikulum mata pelajaran kesehatan reproduksi. Pembahasan pada mata pelajaran biologi sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran biologi kelas XI semester II menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan/atau penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya; menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, fertilisasi serta kelainan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Sedangkan pembahasan pada mata pelajaran biologi sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran biologi kelas XII semester I menjelaskan tentang konsep gen, DNA, dan kromosom.

Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi kajian utama di Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) hanya membahas tentang cara menjaga martabat manusia

dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Materi pergaulan bebas dan zina disampaikan di kelas X semester Genap. Sedangkan materi yang disampaikan di kelas XII semester 1 tentang memahami hukum Islam terkait Hukum Keluarga.

Begitu pula Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi kajian utama di materi pelajaran pendidikan jasmani olah raga kesehatan (PJOK). Materi pelajaran PJOK hanya membahas narkotika, psikotropika, zat-zat aditif (NAPZA) yang disampaikan di kelas X semester II.

Adapun bentuk layanan bimbingan klasikal yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling yang diberikan di kelas X semester 2 mencakup materi layanan tentang perkembangan remaja; kesehatan reproduksi remaja; bahaya miras, rokok, dan narkoba; serta pemahaman ciri khas diri.

Oleh karena itu, dari perspektif kurikulum, kesimpulan yang bisa diambil adalah Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi mata pelajaran secara khusus bagi pelajar di Indonesia, artinya Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi mata pelajaran utama yang memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa disampaikan secara spesifik di luar mata pelajaran biologi, pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan, maupun dalam bentuk layanan bimbingan klasikal oleh guru bimbingan konseling.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menyampaikan materinya berpedoman pada kurikulum tahun 2013 dan KTSP. Implementasinya oleh guru dengan metode masing-masing dalam menjelaskan muatan materi pembelajaran kesehatan reproduksi yang disampaikan kepada peserta didik. Hal ini terkait dengan adanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pornoaksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka dari itu diakui oleh guru ketika menyampaikan materi kesehatan reproduksi masih sangat berhati-hati ketika menyampaikan materi tersebut terutama penyampaian ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan dengan reproduksi. Pada kegiatan pembelajaran kesehatan reproduksi, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menggunakan alat peraga dan LCD sehingga peserta didik bisa memahami materi tersebut. Namun, adapula visualisasi materi kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh PUSKESMAS terkait HIV/AIDS yang lebih fokus

pada masalah kesehatan sehingga lebih vulgar penyampaian visualisasinya (FGD, tanggal 27 Maret 2018).

Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di SMA

Profil SMA Negeri 1 Gunung Sari

SMA Negeri 1 Gunung Sari adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memiliki SK Pendirian Sekolah dan SK Izin Operasional nomor 0260/O/1994. SK Pendirian Sekolah dan SK Izin Operasional yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gunung Sari tertanggal 5 Oktober 1994. Saat ini sudah memperoleh SK Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tertanggal 6 Desember 2010.

SMA Negeri 1 Gunung Sari sebagai sekolah berstatus negeri memiliki NPSN/NSS 50200386/301230109009 terletak di Jalan Pariwisata nomor 78 di Dusun Medas Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SMA Negeri 1 Gunung Sari memiliki visi sekolah yaitu Edukatif, Religius, Berbudaya serta misi sekolah (1) sekolah sebagai pusat pembelajaran yang edukatif, religius dan berbudaya, berkepribadian, mengutamakan nilai-nilai moral, budi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan; (2) melaksanakan belajar mengajar dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya; (3) menumbuhkan pembelajaran dan penghayatan pendidikan keagamaan dan budaya bangsa sehingga setiap siswa mampu mengimplementasikan dirinya dalam kehidupan dunia akhirat serta menjadi sumber kearifan dalam bertindak; (4) menerapkan manajemen partisipatif untuk menjadikan olahraga, karya ilmiah remaja, dan kesenian menjadi bagian utama dari kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menunjang bagian hidup masa depan.

Saat ini SMA Negeri 1 Gunung Sari dipimpin oleh Lalu Sapoan, S.Pd sebagai Kepala Sekolah. SMA Negeri 1 Gunung Sari memiliki 43 orang guru tetap terdiri atas 3 orang berpendidikan S2 dan 40 orang berpendidikan S1. Guru berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang dan guru perempuan sebanyak 21 orang,

sedangkan guru yang sudah sertifikasi sebanyak 39 orang dan guru yang belum sertifikasi 4 orang. Sedangkan guru tidak tetap yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gunung Sari sebanyak 18 orang yang terdiri atas 1 orang berpendidikan S2 dan 17 orang berpendidikan S1. Guru berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang dan guru perempuan sebanyak 7 orang, sedangkan guru yang sudah sertifikasi sebanyak 3 orang dan guru yang belum sertifikasi 15 orang. Keadaan peserta didik di SMA Negeri 1 Gunung Sari sebanyak 883 orang yang terbagi atas 407 siswa dan 476 siswi.

Materi Kesehatan Reproduksi melalui Mapel PAI

Materi pembelajarannya adalah Q.S.al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur/24:2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai RPP mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) Kelas X Semester Genap SMA Negeri 1 Gunung Sari tersebut antara lain:

1. Meneliti secara lebih mendalam pemahaman Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur /24:2, tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
2. Menyajikan model-model jenis cara membaca indah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur/24:2.
3. Membacakan sari tilawah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan nada yang khidmad, menarik dan indah, Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur /24:2.
4. Meneliti makna larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan IT, Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur /24:2.
5. Memberikan contoh perilaku berdasarkan tambahan bacaan ayat Alquran dan hadis yang mendukung lainnya, Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S. an-Nur/24:2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.

(RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X Semester Genap SMA Negeri 1 Gunung Sari).

Profil SMA Negeri 1 Batu Layar

SMA Negeri 1 Batu Layar memulai operasional pembelajaran sejak tahun 2003. Sekolah ini terletak di Jalan Raya Senggigi KM. 5 Desa Seneluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMA Negeri 1 Batu Layar memiliki nomor operasional 331 A/40/PDK/2003, NSS 30.1.23.01.14.018/23/12/DPK/2008 tertanggal 6 Februari 2008, NIS 300180, dan NPSN 50205413.

Saat ini SMA Negeri 1 Batu Layar dipimpin oleh Budi Harto, S.Pd sebagai Kepala Sekolah. Beliau adalah seorang Sarjana Fisika. SMA Negeri 1 Batu Layar memiliki 22 orang guru yang terbagi atas 16 guru tetap berpendidikan S1 dan 6 guru tidak tetap berpendidikan S1. Pegawai tata usaha di SMA Negeri 1 Batu Layar sebanyak 15 orang yaitu pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 orang berpendidikan S1 dan 6 orang berpendidikan SLTA. Sedangkan pegawai yang masih berstatus honorer sebanyak 2 orang berpendidikan S1, 5 orang berpendidikan SLTA, dan 1 orang berpendidikan SD.

Keadaan peserta didik di SMA Negeri 1 Batu Layar sebanyak 217 orang yang terbagi atas 2 rombongan belajar (rombel) di kelas X sebanyak 78 peserta didik yaitu kelas X MIA sebanyak 17 orang, kelas X IIS sebanyak 37 orang, kelas X MIA (filial) sebanyak 24 orang; 3 rombongan belajar (rombel) di kelas XI sebanyak 82 peserta didik yaitu kelas XI MIA sebanyak 16 orang, kelas XI IIS sebanyak 28 orang, kelas XI MIA (filial) sebanyak 38 orang; 4 rombongan belajar (rombel) di kelas XII sebanyak 57 peserta didik yaitu kelas XII MIA sebanyak 11 orang, kelas XII IIS sebanyak 24 orang, kelas XII MIA (filial) sebanyak 22 orang.

SMA Negeri 1 Batu Layar tidak memiliki peserta didik yang beragama Kristen, Katholik, dan Buddha. Menurut keyakinan agama yang dianut oleh 217 peserta didik, jumlah peserta didik yang beragama Islam di SMA Negeri 1 Batu Layar sebanyak 211 peserta yang tersebar di kelas X MIA sebanyak 14 orang, kelas X IIS sebanyak 37 orang, kelas X MIA (filial) sebanyak 24 orang; kelas XI MIA sebanyak 16 orang, kelas XI IIS sebanyak 28 orang, kelas XI MIA (filial)

sebanyak 38 orang; kelas XII MIA sebanyak 9 orang, kelas XII IIS sebanyak 23 orang, kelas XII MIA (filial) sebanyak 22 orang. Penganut agama Hindu di SMA Negeri 1 Batu Layar sebanyak 6 peserta yang tersebar di kelas X MIA sebanyak 3 orang, kelas XII MIA sebanyak 2 orang, kelas XII MIA (filial) 1 orang.

Visi SMA Negeri 1 Batu Layar adalah “Dengan berlandaskan iman mampu meraih prestasi dalam persaingan global”. Misi SMA Negeri 1 Batu Layar adalah 1) mampu menyiapkan *output* berkemampuan akademik/non akademik yang bermutu dan berkualitas; 2) mampu beradaptasi dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Materi Kesehatan Reproduksi melalui Mapel PAI

Rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) mengalokasikan waktu 12 X 45 menit untuk kelas X semester genap. Materi pokok tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina.

Kompetensi Inti (KI) dalam pembahasan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi Dasar (KD) adalah pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama; menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S an-Nur/24:2 serta hadits terkait; dan menganalisis Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S an-Nur/24:2 serta hadits terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.

Adapun indikator pencapaian kompetensi (IPK) adalah (1) mempercayai bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama; (2) menjauhi diri pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra'/17:32 dan Q.S an-Nur/24:2 serta hadits terkait; (3) memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, menjelaskan pengertian zina, menganalisis hukum zina, memahami kategori zina, memahami hukuman bagi pezina, mengidentifikasi hukuman bagi orang yang menuduh zina (*qazaʿf*), mengetahui ayat-

ayat al-Quran tentang larangan mendekati zina, memahami hadits tentang larangan mendekati zina.

Tujuan dari pembelajaran berkaitan dengan materi tersebut, peserta didik diharapkan dapat (1) mengidentifikasi makna larangan pergaulan bebas dan zina; (2) menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan mendekati zina; (3) menunjukkan hadits tentang larangan mendekati zina; (4) menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari (RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X Semester Genap SMA Negeri 1 Batu Layar).

Di perspektif pembelajaran yang lain, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disampaikan di kelas XII semester 1 tentang memahami hukum Islam terkait Hukum Keluarga. Pendidikan Kesehatan Reproduksi secara tersirat tidak nampak di RPP tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di aspek Fiqih mengalokasikan waktu 6 X 45 menit untuk kelas XII semester 1. Standar kompetensi adalah memahami hukum Islam tentang Hukum Keluarga. Kompetensi Dasar (KD) adalah (1) menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam; (2) menjelaskan hikmah perkawinan; (3) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia.

Adapun indikator pencapaian kompetensi (IPK) adalah (1) menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang nikah; (2) menjelaskan hukum Islam tentang talak; (3) menjelaskan hukum Islam tentang rujuk; (4) menjelaskan hikmah nikah; (5) menjelaskan hikmah talak; (6) menjelaskan hikmah rujuk; (7) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia; (8) menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia.

Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi ini siswa diharapkan mampu untuk (1) menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang nikah; (2) menjelaskan hukum Islam tentang talak; (3) menjelaskan hukum Islam tentang rujuk; (4) menjelaskan hikmah nikah; (5) menjelaskan hikmah talak; (6) menjelaskan hikmah rujuk; (7) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia; (8) menguraikan kompilasi hukum tentang perkawinan di Indonesia (RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII Semester 1 SMA Negeri 1 Batu Layar).

Kegiatan pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam pada topik kesehatan reproduksi disampaikan berdasarkan KTSP. Pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi di kelas X semester genap membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Di kelas XI tidak ada materi yang membahas kesehatan reproduksi, materinya tentang etos kerja muslim. Di kelas XII semester I membahas materi *munakahat* yaitu materi yang membahas hukum Islam tentang Hukum Keluarga (Wawancara Muazah, 15 Februari 2018).

Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di kelas X semester genap dilaksanakan dengan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* yang dipadukan dengan metode *mind mapping* dan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas.

Alokasi waktu yang diberikan oleh guru selama 12 X 45 menit pada pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat (1) mengidentifikasi Makna Larangan Pergaulan Bebas dan Zina; (2) menjelaskan Ayat-ayat Alquran tentang Larangan Mendekati Zina; (3) menunjukan Hadis tentang Larangan Mendekati Zina; (4) menerapkan Prilaku Mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik (RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X Semester Genap SMAN 1 Batu Layar).

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) kelas X Semester Genap berpedoman pada *Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016* sesuai RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas X Semester Genap SMAN 1 Batu Layar. Salah satu mata pelajarannya adalah membacakan sari tilawah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan nada yang khidmad, menarik dan indah, Q.S. al-Isrā'/17:32 dan Q.S. an-Nur/24:2. (RPP Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas X Semester Genap SMAN 1 Batu Layar)

Pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi di kelas XII semester I membahas materi *munakahat* yaitu materi yang membahas hukum Islam tentang Hukum Keluarga. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di kelas XII semester 1 dilaksanakan dengan melalui kegiatan ceramah, Tanya jawab, dan praktek. Alokasi waktu yang diberikan oleh guru selama 6 X 45 menit pada pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Strategi pembelajaran dengan tatap muka, terstruktur, dan mandiri. Materi Ajar (Materi Pokok) adalah Ketentuan hukum pernikahan dalam Islam yaitu rukun nikah, muhrim, kewajiban suami istri, talak, ruju', hikmah perkawinan, ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. (RPP Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas XII Semester 1 SMAN 1 Batu Layar).

Program Kesehatan Reproduksi oleh Pemerintah Provinsi NTB

Gubernur Tuan Guru Bajang Zainal Majdi memiliki program Pulau Lombok sebagai daerah wisata syariah berbasis nuansa agamis dalam masyarakat dalam mempertahankan adat dan budaya Sasak. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah menanggulangi bertambahnya kasus pernikahan dini. Di Pulau Lombok ada kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Kearifan lokal "*merariq*" masih menjadi daya tarik remaja untuk menikah di usia dini sehingga menjadi salah satu alasan yang sangat menarik untuk dikaji tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMA.

Merariq sebagai salah satu tradisi masyarakat Sasak identik dengan peristiwa nikah dini di masyarakat Sasak. Adat *merariq* ini terjadi pula di kalangan pelajar di tingkat SMA. Meskipun pihak sekolah telah melakukan upaya pendekatan kekeluargaan secara personal setelah pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk membujuk siswa/siswi pelaku nikah dini agar mau kembali ke bangku sekolah, dan pendekatan juga diperuntukkan kepada orangtua mempelai pengantin agar putra-putrinya bisa menempuh pendidikan setelah mereka menikah, namun usaha pihak sekolah belum bisa berhasil membujuk mereka. Orangtua yang memiliki putra-putri yang menikah

dini biasanya memiliki semacam perasaan malu dengan tetangga (dalam tradisi Sasak ada ungkapan *endek semel*, ila' yang artinya malu) (Wawancara Haryati, tanggal 13 Februari 2018; Hilman, tanggal 15 Februari 2018)

Nikah *merariq* di masyarakat Sasak menjadi sebuah kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Sasak meskipun tradisi adat ini sudah mulai jarang terjadi di masyarakat Sasak, namun di beberapa sekolah masih terdapat kasus peserta didik meninggalkan bangku sekolah karena menikah di usia muda. Adat merarik biasanya diatur di *awiq-awiq* desa, salah satu peraturan yang harus ditegakkan adalah adat merarik. Apabila ada warga yang belum menikah dan pulang larut malam bersama pasangannya, maka secara adat mereka harus dinikahkan secara adat (Wawancara Joko, tanggal 14 Februari 2018).

Fenomena yang pernah terjadi di sekolah adalah adanya peristiwa nikah dini yang terjadi di kalangan pelajar. Pernikahan di usia muda juga terjadi di SMA yang menjadi subyek penelitian. Data yang dimiliki oleh guru BK tercatat peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan di kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018 yaitu 1 orang dari kelas XII IPS pada bulan Agustus tahun 2017, 1 orang dari kelas XII IPS pada bulan November tahun 2017, 1 orang dari kelas XII IPS pada bulan Januari tahun 2018, dan 1 orang dari kelas XII IPS pada bulan Februari tahun 2018. Mereka meninggalkan bangku sekolah karena pernikahan dini (Wawancara Heni, tanggal 26 Maret 2018).

Upaya menekan angka pernikahan dini juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Remaja Independent (LSM ARI) pernah membuat film tentang adat *merariq* dengan mengambil lokasi syuting di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Pemeran utama film ini adalah siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Gunung Sari. Syuting film adat merarik dilakukan oleh LSM ARI pada tahun 2016 (Wawancara Zulkarnain, tanggal 14 Februari 2018).

Konsekuensi yang ada saat ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku masyarakat, khususnya generasi muda yang dalam hal ini sering disebut sebagai generasi milineal. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu membuat program pola teman sebaya dengan membentuk *peer group* pada jam pembelajaran menjadi strategi

dari Dinas Kesehatan dalam membuat program sosialisasi terkait Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi peserta didik di sekolah. Program *peer group* yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan sama seperti program Pusat Informasi Kesehatan Remaja yang dimiliki oleh BKKBN. Realisasi program *peer group* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu melakukan penyuluhan terkait gizi, narkoba, kesehatan reproduksi, dan HIV/AIDS pada peserta yang menjadi pengurus OSIS dan ROHIS di 20 sekolah pada tahun 2016 dan di 30 sekolah pada tahun 2017, sehingga program *peer group* ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di pada pengurus OSIS dan ROHIS yang berasal dari 50 sekolah. Stakeholder Dinas Kesehatan yang terlibat dalam penyuluhan yaitu BKKBN, Kementerian Agama, dan Non Government Organisation (NGO), yang disebut sebagai *District Working Group* di Kabupaten Lombok Barat (Wawancara Abdullah, tanggal 16 Maret 2018).

Sekolah juga memiliki program penguatan religiusitas sebagai benteng keimanan bagi siswa-siswi melalui program ngaji Al-Qur'an, pembinaan Iman dan Taqwa (IMTAQ) saat kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan sebelum pelaksanaan sholat jumat berjamaah di sekolah (Wawancara Haryati dan Budiharto, tanggal 13 Februari 2018).

Upaya membendung beredarnya konten-konten yang tidak mendidik bagi siswa juga menjadi perhatian Tuan Guru Bajang sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memberikan instruksi yang diimplementasikan di sekolah yaitu melarang peserta didik untuk membawa alat komunikasi (*handphone*) saat belajar di sekolah. Pihak sekolah menyediakan alat komunikasi dalam menyikapi instruksi Gubernur. Hal ini sangat bagus dan positif bagi peserta didik, karena remaja saat ini melalui *handphone* dapat mengakses semua konten-konten informasi baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya semua yang ada di dunia maya bisa diakses oleh pengguna *handphone* melalui jaringan wifi/internet. Hal ini dapat dibuktikan ketika ada razia *handphone* yang dimiliki oleh peserta didik, maka bisa ditemukan *folder* film-film porno oleh guru Bimbingan Konseling (BK). Maka, pihak sekolah akan memanggil orangtua dan peserta didik untuk dikonfirmasi oleh guru BK (Wawancara Hilman, 15 Februari 2018).

Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi sudah dilakukan oleh instansi pemerintah bekerjasama dengan *stakeholder-stakeholder* di Kabupaten Lombok Barat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dengan menjalin dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, BKKBN, BNN, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan bagi pelajar di Kabupaten Lombok Barat. Kerjasama jejaring kemitraan antarinstansi diwujudkan oleh Dinas Kesehatan melalui petugas penyuluh kesehatan di PUSKESMAS dengan memberikan sosialisasi terkait dengan masalah kesehatan secara umum juga khusus tentang kesehatan reproduksi. BKKBN juga ikut berperan dengan memberikan sosialisasi tentang kesejahteraan keluarga yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Kerjasama antara Kepolisian dengan BNN juga ikut aktif berpartisipasi mendatangi pelajar di tiap sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya NAPZA beserta bagaimana pencegahan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Kepolisian beserta BNN yang berkompeten di bidang sosialisasi masalah narkoba dan kenakalan remaja dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah. Di samping itu pola teman sebaya dengan membentuk *peer group* pada jam pembelajaran menjadi strategi dari Dinas Kesehatan dalam membuat program sosialisasi terkait Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi peserta didik di sekolah. Program *peer group* yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan sama seperti program Pusat Informasi Kesehatan Remaja yang dimiliki oleh BKKBN. Realisasi program *peer group* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu melakukan penyuluhan terkait gizi, narkoba, kesehatan reproduksi, dan HIV/AIDS pada peserta yang menjadi pengurus OSIS dan ROHIS di 20 sekolah pada tahun 2016 dan di 30 sekolah pada tahun 2017, sehingga program *peer group* ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di pada pengurus OSIS dan ROHIS yang berasal dari 50 sekolah. *Stakeholder* Dinas Kesehatan yang terlibat dalam penyuluhan yaitu BKKBN, Kementerian Agama, dan *Non Government Organisation* (NGO), yang disebut sebagai *District Working Group* di Kabupaten Lombok Barat (Wawancara Abdullah, tanggal 16 Maret 2018).

Menurut Saparudin, sebagai narasumber FGD menyampaikan bahwa Pemerintah (melalui Kementerian Agama dan KUA) juga sudah memberlakukan undang-undang tentang batasan perkawinan yakni minimal usia perkawinandengan usia 21 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Apabila laki-laki usianya 19 tahun keatas dan kurang dari 21 tahun maka wajib ijin dari oarng tua, dan apabila kurang dari 19 tahun maka harus memperoleh dispensari dari Pengadilan Agama. Begitu pula perempuan, apabila umurnya 16 tahun keatas maka harus ijin dari orang tua apabila kurang dari 16 tahun maka wajib ijin dari pengadilan. Maka bagi para orang tua boleh mencegah suatu perkawinan apabila anaknya belum cukup umur untuk melakukan suatu perkawinan.

Banyak lagi organisasi-organisasi yang dibuat pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia muda misalnya di daerah lokal atau daerah Desa Adat Sasak ada Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK), ada juga ditingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat yang disebut Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Semua program pemerintah yang berwujud “Gerakan” ini bertujuan untuk mencegah perkawinan di usia dini. Program Pendewasaan Usia Remaja (PUP) digagas oleh Pemerintahan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fungsi PUP adalah menghimbau ke komponen masyarakat agar tidak menikah dini karena bisa mengakibatkan tidak awetnya pernikahan. Program PUP merupakan kerja bersama antarinstansi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah BKKBN, Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PUP menjadi program kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membentengi moral generasi muda dengan memberikan sosialisasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meangani kesehatan reproduksi menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menanggulangi dekadensi moral generasi muda adalah melalui penguatan iman dan taqwa (IMTAQ) di sekolah-sekolah. Menurut nara sumber bahwa Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi siswa SMA merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan memahami tentang kesehatan reproduksi maka peserta didik dapat memilah dan memilih pergaulan remaja

beda jenis kelamin secara benar. Maksudnya dengan pengetahuan kesehatan reproduksi itu peserta didik akan dapat mengetahui dampak positif maupun negatifnya ketika bergaul dengan teman lawan jenisnya. Pelajar SMA selama ini belum terkontaminasi dengan pola pergaulan bebas karena norma agama dan adat Sasak masih kuat dijaga oleh masyarakat, meskipun potensi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata cukup pesat perkembangannya dengan kehadiran wisatawan mancanegara maupun domestik. Tuan Guru Bajang Zainal Majdi sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan program-program religiusitas kepada masyarakat sehingga mampu menangkal dekadensi moral di kalangan remaja. Dekadensi moral di kalangan remaja saat ini yang perlu serius ditangani adalah tawuran antarremaja.

Wujud kehadiran pemerintah dalam hal kesehatan reproduksi ini adalah kehadiran Kementerian Agama bersama *stakeholder* instansi pemerintah dalam membuat persyaratan nikah bagi calon pengantin. Salah satu syarat menyebutkan bahwa calon pengantin harus memperoleh surat keterangan sehat dari PUSKESMAS dan dibawa sendiri oleh calon pengantin saat melapor kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat juga menyusun buku saku panduan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada calon pengantin saat mengikuti kursus calon pengantin. Masalah pernikahan dini memang dirasakan masih perlu penanganan serius, karena merarik sebagai adat masyarakat Sasak masih dilestarikan. Remaja Sasak yang memegang teguh kearifan lokal norma adat, norma agama, dan norma Sasak akan terlindungi dari berbagai macam dekadensi moral.

Menurut Zulkarnain tantangan guru PAI saat ini adalah menahan derasnya arus informasi yang berasal dari media sosial. Informasi yang bagus bisa diterima untuk dikonsumsi oleh remaja, namun informasi yang buruk dari media sosial dapat menjadikan pribadi anak menjadi cepat dewasa dalam konteks yang negatif. Oleh karena itu, bila sasaran sosialisasi belum mengenai sasaran maka diperlukan pelibatan peran Tuan Guru (kyai) dalam penyuluhan kesehatan reproduksi saat memberikan khotbah pengajian. Selama ini peran Tuan Guru (kyai) belum dilibatkan dalam program kesehatan reproduksi. Masyarakat Sasak akan lebih mematuhi dan melaksa-

nakan program pemerintah di bidang kesehatan reproduksi bila disentuh secara langsung oleh Tuan Guru (kyai). Inilah yang menjadi harapan dari guru Pendidikan Agama Islam dalam menyikapi kesehatan reproduksi.

Senada dengan Zulkarnain, Samsul Hadi sebagai Kepala KUA Kecamatan Batu Layar juga memberikan masukan agar ada pelibatan Tuan Guru (kyai) dalam program kesehatan reproduksi khususnya dalam memberikan pemahaman tentang alat reproduksi kepada jamaah lewat penyuluhan model kombinasi antara dakwah dan sosialisasi kesehatan reproduksi yang dikemas oleh Tuan Guru (kyai) melalui khotbah pengajian, tentunya akan sangat mudah dipahami oleh jamaah dibandingkan ketika jamaah mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi dari penyuluh kesehatan reproduksi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerjasama antarinstansi yaitu Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah juga sudah melaksanakan pendidikan dan latihan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait materi dakwah kesehatan reproduksi. Peserta mendapat SK resmi dari Pemerintah Daerah Cq. Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berdakwah dengan materi kesehatan reproduksi.

Hilman sebagai guru BK menambahkan informasi bahwa fungsi layanan yang dilakukan oleh BK yaitu layanan pribadi dan layanan sosial berhubungan sangat erat dengan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi peserta didik. Kedua layanan tersebut dikombinasikan dengan pengembangan dan penguatan imtaq, maka hal itu sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan penguatan imtaq maka menjadi salah satu benteng adanya dekadensi moral peserta didik. Penguatan Imtaq dilaksanakan di mushola sekolah dengan didukung program-program pendidikan agama Islam oleh guru PAI. Adapun kehadiran PUSKESMAS di sekolah juga memberikan nilai positif bagi peserta didik karena pemahaman kesehatan reproduksi diberikan oleh penyuluh kesehatan melalui tayangan-tayangan film kesehatan reproduksi.

Tina sebagai pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa peran Tuan Guru (kyai) di bidang kesehatan reproduksi perlu dilibatkan lebih intensif dalam program pemerintah. Kesehatan reproduksi memang menjadi tugas bersama, antara orangtua, sekolah, dan pemerintah harus bekerjasama mewujudkan

kan keberhasilan program kesehatan reproduksi bagi remaja. Orangtua yang memiliki latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan yang tinggi tentunya memiliki wawasan kesehatan reproduksi yang lebih baik dan lebih paham dalam menyikapi pentingnya kesehatan reproduksi bagi anak-anaknya. Bila orangtua sudah memahami pentingnya arti kesehatan reproduksi, maka selanjutnya adalah faktor lingkungan yang harus mendukungnya. Peserta didik juga perlu dibekali pendidikan karakter, pendidikan akhlaq, dan pendidikan moral. Apabila semua sudah tercapai maka anjuran Gubernur Tuan Guru Bajang untuk menjadikan sekolah aman dan nyaman akan berhasil dicapai.

Sulhiyah sebagai Guru Biologi menjelaskan bahwa seharusnya tentang materi kesehatan reproduksi itu dijelaskan secara transparan namun adanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pornoaksi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka penyampaian materi kesehatan reproduksi ada batasan-batasan yang disampaikan oleh Guru Biologi sehingga penayangan materi kesehatan reproduksi tidak bisa vulgar kepada peserta didik. Maka diharapkan perlu adanya inovasi kurikulum dari pemangku kebijakan di bidang pendidikan dengan membuat ilustrasi-ilustrasi yang menambah pemahaman siswa dalam memahami kesehatan reproduksi (FGD, 27 Maret 2018).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat turut memberikan kontribusi dalam faktor pendukung terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam perspektif agama Islam di sekolah, salah satunya instruksi Gubernur untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman sehingga instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah untuk memberikan perhatian terkait dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi tersebut. Pihak sekolah mengirimkan pelajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, BNN, PKK Propinsi NTB, Kepolisian, Kementerian Agama yang membahas tentang pernikahan usia dini, kesehatan reproduksi, dan narkoba. Kepala Sekolah berhasil membuat jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga NGO di Kabupaten Nusa Teegara Barat.

Berbagai program sudah diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, BNN, PKK Propinsi NTB, Kepolisian, Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kesehatan reproduksi bagi peserta didik. Upaya Kepala Sekolah dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai relevansi dan kompetensi bidang reproduksi maupun keremajaan, menjadi bekal utama dalam membentuk karakter peserta didik dalam menanggulangi dekadensi moral remaja.

Faktor pendukung keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi terletak pada proses kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Saat ini pembelajaran bagi peserta didik diberikan sesuai dengan KTSP dan Kurikulum tahun 2013 untuk pendidikan reproduksi bagi peserta didik SMA, terutama melalui pembelajaran mata pelajaran Biologi. Sedangkan dari bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bimbingan Konseling (BK) untuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi merupakan penguatan pengetahuan dan pemahaman dari perspetif norma agama, norma social, norma perilaku dengan mengemas pendidikan karakter bagi peserta didik. Sehingga cukup membekali peserta didik untuk memahami kesehatan reproduksi.

Faktor penghambat dalam mensosialisasikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi diantaranya adanya pemahaman masyarakat yang masih memperbolehkan putra-putrinya untuk menikah dini. Budaya lingkungan masyarakat Sasak dengan tradisi kawin merarik berdasarkan persepsi hampir seluruh peserta didik yang menjadi obyek penelitian mempunyai perspektif dan menyatakan “benar” bahwa faktor budaya dan lingkungan mempunyai pengaruh terhadap perilaku penyimpangan seksualitas. Hal ini bisa menghambat program pemerintah dalam bidang Pendewasaan Usia Pernikahan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu pelibatan Tuan Guru sebagai tokoh agama yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Sasak sangat perlu disinergikan dalam program-program Pendidikan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat untuk memberikan dakwah terkait sosialisasi tentang keremajaan dan kesehatan reproduksi.

Kondisi psikologis sebagai faktor terjadinya perilaku penyimpangan seksualitas karena keretakan hubungan orang tua dan depresi akibat kerusakan alat reproduksi juga menjadi faktor yang

berpengaruh bagi remaja. Maka, faktor pendukung terjadinya perilaku penyimpangan seksualitas dapat juga dipengaruhi oleh kondisi budaya dan lingkungan. Demikian pula dengan faktor sosial ekonomi dan demografi mempengaruhi perilaku menyimpang seksualitas tersebut. Selain itu hampir keseluruhan siswa menyatakan benar bahwa terjadinya penyimpangan seksualitas adalah karena kurangnya informasi tentang fungsi alat reproduksi.

Faktor lainnya adalah posisi Guru PAI belum mempunyai tugas khusus terkait dengan materi kesehatan reproduksi, karena pembelajaran materi kesehatan reproduksi memang menjadi wilayah domain pembelajaran dalam perspektif pendidikan biologi. Guru PAI hanya memberikan pemahaman Pendidikan Kesehatan Reproduksi dari perspektif religius sehingga penyampaian materi masih sangat normatif dalam koridor norma-norma religius terkait dengan kesehatan reproduksi itu. Bagi remaja jaman *now* yang sangat membutuhkan berbagai informasi terkait kesehatan reproduksi, tentunya sangat mengharapkan Guru PAI mempunyai kemampuan mengeksplorasi materi perzinahan maupun pernikahan dikaitkan dengan pembelajaran kesehatan reproduksi. Saat ini, Pendidikan Kesehatan Reproduksi masih disampaikan secara normatif karena guru harus bisa memberikan batasan-batasan dalam memberikan materi bahan ajar kepada peserta didik dikarenakan adanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pornoaksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai konsekuensi hukum bila ada perbuatan yang dikategorikan melanggar UU tersebut.

Simpulan

Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi kajian utama di Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) hanya membahas tentang cara menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Materi pergaulan bebas dan zina disampaikan di kelas X semester Genap. Sedangkan materi yang disampaikan di kelas XII semester 1 tentang memahami hukum Islam terkait Hukum Keluarga.

Oleh karena itu, dari perspektif kurikulum, kesimpulan yang bisa diambil adalah Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum men-

jadi mata pelajaran secara khusus bagi pelajar di Indonesia, artinya Pendidikan Kesehatan Reproduksi belum menjadi mata pelajaran utama yang memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa disampaikan secara spesifik di pendidikan agama Islam.

Berbagai program sudah diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, BNN, PKK Propinsi NTB, Kepolisian, Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kesehatan reproduksi bagi peserta didik. Upaya Kepala Sekolah dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai relevansi dan kompetensi bidang reproduksi maupun keremajaan, menjadi bekal utama dalam membentuk karakter peserta didik dalam menanggulangi dekadensi moral remaja.

Faktor yang menjadi pendukung terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam perspektif Agama Islam yaitu adanya kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang turut memberikan kontribusi dalam faktor pendukung terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam perspektif agama Islam di sekolah. Salah satu instruksi Gubernur adalah menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman sehingga instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah untuk memberikan perhatian terkait dengan Pendidikan Kesehatan Reproduksi.

Pihak sekolah mengirimkan pelajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, BNN, PKK Propinsi NTB, Kepolisian, Kementerian Agama yang membahas tentang pernikahan usia dini, kesehatan reproduksi, dan narkoba. Kepala Sekolah berhasil membuat jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga NGO di Kabupaten Nusa Tenggara Barat.

Faktor pendukung lainnya adalah keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kesehatan Reproduksi terletak pada proses kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kesehatan Reproduksi. Saat ini pembelajaran bagi peserta didik diberikan sesuai dengan KTSP dan Kurikulum tahun 2013 untuk pendidikan reproduksi bagi peserta didik SMA, terutama melalui pembelajaran mata pelajaran Biologi. Sedangkan dari bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi merupakan penguatan pengetahuan dan pemahaman dari perspetif norma agama, norma sosial, norma perilaku dengan mengemas pendidikan karakter bagi peserta

didik. Materi-materi tersebut cukup membekali peserta didik untuk memahami kesehatan reproduksi.

Faktor penghambat dalam mensosialisasikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi diantaranya adanya pemahaman masyarakat yang masih memperbolehkan putra-putrinya untuk menikah dini. Budaya lingkungan masyarakat Sasak dengan tradisi kawin *merariq* berdasarkan persepsi hampir seluruh peserta didik yang menjadi obyek penelitian mempunyai perspektif dan menyatakan “benar” bahwa faktor budaya dan lingkungan mempunyai pengaruh terhadap perilaku penyimpangan seksualitas. Hal ini bisa menghambat program pemerintah dalam bidang Pendewasaan Usia Pernikahan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu pelibatan Tuan Guru sebagai tokoh agama yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Sasak sangat perlu disinergikan dalam program-program Pendidikan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat untuk memberikan dakwah terkait sosialisasi tentang keremajaan dan kesehatan reproduksi.

Kondisi psikologis sebagai faktor terjadinya perilaku penyimpangan seksualitas karena keretakan hubungan orang tua dan depresi yang dialami oleh remaja juga sebagai faktor pendukung terjadinya perilaku penyimpangan seksualitas yang dapat juga dipengaruhi oleh kondisi budaya dan lingkungan. Faktor penghambat lainnya berhubungan dengan faktor sosial ekonomi dan demografi yang mampu mempengaruhi perilaku menyimpang seksualitas tersebut. Selain itu hampir keseluruhan siswa menyatakan benar bahwa terjadinya penyimpangan seksualitas adalah karena kurangnya informasi tentang fungsi alat reproduksi.

Faktor lainnya adalah posisi Guru PAI belum mempunyai tugas khusus terkait dengan materi kesehatan reproduksi, karena pembelajaran materi kesehatan reproduksi memang menjadi wilayah domain pembelajaran dalam perspektif Pendidikan Biologi. Guru PAI hanya memberikan pemahaman Pendidikan Kesehatan Reproduksi dari perspektif religius sehingga penyampaian materi masih sangat normatif dalam koridor norma-norma religius terkait dengan kesehatan reproduksi itu. Bagi remaja jaman *now* yang sangat membutuhkan berbagai informasi terkait kesehatan reproduksi, tentunya sangat mengharapkan Guru PAI mempunyai kemampuan

mengeksplorasi materi perzinahan maupun pernikahan dikaitkan dengan pembelajaran kesehatan reproduksi.

Saat ini, Pendidikan Kesehatan Reproduksi masih disampaikan secara normatif karena guru harus bisa memberikan batasan-batasan dalam memberikan materi bahan ajar kepada peserta didik dikarenakan adanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pornoaksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai konsekuensi hukum bila ada perbuatan yang dikategorikan melanggar UU tersebut.

Rekomendasi

Usaha untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kesehatan reproduksi membutuhkan peran serta dari berbagai pihak. Setiap sekolah hendaknya memperhatikan tingkat pengetahuan dan pemahaman setiap siswa didiknya dengan peningkatan pemberian informasi yang jelas dan akurat. Sikap dan perilaku setiap peserta didik dapat dilakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan dan program-program yang dapat menghindarkan peserta didik dari perilaku penyimpangan seksual yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, merujuk kepada hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kementerian Agama membuat kebijakan agar kesehatan reproduksi dimasukkan dalam muatan kurikulum PAI.
2. Kementerian Agama agar menyusun dan menerbitkan buku saku tentang kesehatan reproduksi ditinjau dari agama Islam.
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan perlu mendesain pola penyuluhan bagi remaja dengan model *peer conseling* terkait kesehatan reproduksi.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mendesain program pendekatan sosial budaya bagi masyarakat adat untuk mengubah pola pikir bahwa kesehatan reproduksi bagi remaja menjadi hal penting bagi generasi milenial untuk mencegah pernikahan dini. sehingga Program Pendewasaan

Usia Pernikahan yang digagas oleh pemerintah bisa tercapai hasilnya dengan baik.

5. Selama ini peran Tuan Guru (kyai) belum dilibatkan dalam program kesehatan reproduksi. Masyarakat Sasak akan lebih mematuhi dan melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan reproduksi bila disentuh secara langsung oleh Tuan Guru (kyai) dalam menyikapi kesehatan reproduksi melalui dakwah keagamaan.

Daftar Pustaka

- Anshori LAL. 2012. *Pendidikan Islam Transformatif*. Jakarta: Referensi.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ath-Thawiil, Utsman. 1997. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. terj. Saefuddin Zuhri. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- BKKBN. 2013. *Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas yang Komprehensif*. Jakarta: BKKBN.
- Djabar, Abdul. 2014. *Remaja Hari ini adalah Pemimpin Masa Depan*. BKKBN: Jakarta.
- Fanggidaej, Lenny. 1995. *Kamus Pendidikan*. Jakarta: Restu Agung.
- Hurlock, EB. 1998. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Terj.) Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Irawati. 2011. *Pengetahuan dan Sumber Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Volume 1, Nomor 2.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kompas. 2017. *Selamatkan Anak dari Eksploitasi; Perlu Aksi Nyata secara Lintas Sektoral* tanggal Kompas 29 Desember 2017.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2016. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak*. 2011-2016.
- Kurniawan, Tri Prapto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga*. Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Lestari dan Nagtini. 2010. *Pendidikan Islam Kontekstual*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lukman. 2004. *Remaja Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: BKKBN.
- Moleong, Lexy J.. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cengkareng: CV. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santrock, W. John. 2007. *Life Spant Development. Perkembangan Masa Hidup Jilid 2*. Wisnu Chandra (terj). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1993. *Tarbiyatul Aulad Fil-Islam. Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Saifullah Kamalie dan Hery Noer Aly. (terj). Semarang: Asy-Syifa'.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Wibowo, A.M. 2011. *Dampak Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Reproduksi Sehat Siswa (Uji Perbedaan Dampak PAI terhadap Jenis Kelamin dan Jurusan Peserta Didik pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah)*. Jurnal Analisa Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011.

EPILOG

MODERASI BERAGAMA DAN KECAKAPAN LITERASI DIGITAL BAGI MASA DEPAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Umi Masfiah dan Noor Miyono

Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya yang secara alami terkumpul di dalam negeri ini. Keragaman budaya yang dilandasi oleh perbedaan perilaku masing-masing individu, kelompok maupun suku, serta dengan membawa cara hidup yang khas, melahirkan konsep multi budaya. Konsep multi budaya melihat perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, tidak hanya terfokus pada satu aspek perbedaan saja. Konsep ini berbeda dengan konsep lintas budaya yang memiliki fokus utama pada perbedaan etnis.

Keragaman budaya sering kali menimbulkan praktik kekerasan yang mengatas namakan agama, radikalisme, hingga terorisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini kejadian tersebut ada di tanah air, menguji kesatuan dan persatuan bangsa. Fakta adanya konflik keagamaan dan tindak kekerasan, menjadi salah satu indikator adanya tanda-tanda perpecahan bangsa. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi membutuhkan upaya penumbuhan dan pengembangan sikap pemersatu bangsa, berupa sikap moderat sebagai landasan utama dalam kehidupan masya-

rakat dengan ragam budaya dan agama, seperti bangsa Indonesia ini.

Penumbuhan dan pengembangan sikap moderat merujuk pada penanaman sikap moderasi beragama. Penanaman sikap ini perlu pula mempertimbangkan kecakapan literasi digital, mengingat bangsa Indonesia saat ini telah memasuki era dengan perkembangan teknologi cukup pesat. Perkembangan teknologi pada satu sisi dapat mengakibatkan kemunculan fenomena negatif berupa disinformasi. Disinformasi merupakan dampak pendistribusian *fake news* yang beredar secara online di dunia maya. Masyarakat mudah sekali menyerap informasi secara umum karena penyebaran disinformasi (Patriati dan Asyrotin, 2019: 66). Disinformasi adalah penyampaian informasi yang salah, baik yang dilakukan dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Disinformasi yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena masyarakat mudah percaya dengan informasi yang diperoleh tanpa melihat atau mencari lagi dari mana sumber informasi aslinya. Untuk itu, pada tataran inilah kemampuan literasi menjadi penting.

Literasi tidak hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar (Irianto & Febrianti, 2017). Literasi tidak lagi hanya dipandang sebagai kemampuan dasar atau alat yang mendukung proses pembelajaran akademik, tetapi sudah menjadi faktor pendukung kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang akurat dan terpercaya. Termasuk kemampuan berpikir seorang individu dalam menyelesaikan permasalahan, serta etika sikap sosial dalam berinteraksi antar kelompok dalam bermasyarakat.

Fenomena disinformasi akibat perkembangan teknologi yang kontradiktif dan konspiratif ini membuktikan semakin sulitnya prediksi pola pikir dan nilai moral generasi modern. Perbedaan nilai kehidupan kelompok yang dapat menyeret semua golongan masyarakat tidak lagi terelakan hingga meningkat pada taraf permasalahan krisis sikap erosi nilai, erosi moral, erosi norma dan dehumanisasi dalam dunia tanpa batasan. Maka, seseorang harus mampu memposisikan diri dalam ketahanan mental, disiplin diri yang adaptif, toleransi sosial, dan tatanan nilai dalam menghadapi

dampak negatif yang dibawa kemajuan teknologi untuk menghindari krisis tersebut.

Berkaitan dengan persoalan di atas, pembahasan tentang moderasi beragama dan kecakapan literasi, khususnya literasi digital memiliki makna penting bagi masa depan masyarakat multikultural di Indonesia termasuk masa depan pendidikannya. Moderasi beragama menjadi salah satu penyangga tegaknya harmoni kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan literasi digital merupakan sarana utama mengkomunikasikan konsep, dan pengetahuan tentang moderasi beragama.

Masyarakat pada era sekarang sangat bergantung pada media digital untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidup. Hasil temuan *We Are Social Media Company* awal tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari 88 juta pengguna Internet pada awal 2016 hingga 132 juta warganet pada awal 2017. Jumlah itu merupakan lebih dari separuh (51%) penduduk Indonesia, yaitu 262 juta. Sementara 79% dari total warganet, 106 juta jiwa, merupakan pengguna aktif media sosial (medsos) (Setowara, ed., 2018: 10).

Data pengguna internet di Indonesia semakin meningkat pada tahun 2020 ini, berkaitan dengan wabah Virus Covid-19. Berdasarkan laporan terbaru *We Are Social*, pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 17% atau 25 juta pengguna internet, sehingga ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan 64% setengah penduduk Indonesia telah mengakses dunia maya¹ (Haryanto, 2020)

Saat Pandemi Covid-19 melanda dunia, literasi digital menjadi satu alternatif pilihan dalam berkomunikasi. Akses internet, sebagai bagian dari aktifitas literasi digital memiliki makna penting yang sama seperti dalam kegiatan menulis, membaca dan berhitung dan berbagai disiplin ilmu lainnya (Nasrullah dkk., 2017: 4). Literasi digital dapat mengembangkan wawasan pemikiran, menyalurkan

¹ Baca juga: 53% Penduduk Indonesia Sudah Belanja Online. Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), non-smartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), table (23%), konsol game (16%), hingga virtual reality device (5,1%). (Haryanto, 2020)

ide dan gagasan. Saat ini, seseorang dapat dengan mudah menyampaikan ide dan gagasannya hanya dengan sekali klik saja, gagasannya tersebut dapat diakses jutaan manusia lain. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa; penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin dihindarkan lagi, termasuk ketika berbicara tentang peran literasi digital bagi pengembangan moderasi keagamaan pada masyarakat multikultural.

Beberapa kajian tentang moderasi keagamaan yang telah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi, setidaknya memiliki 3 jenis kecenderungan, yakni: *pertama*, kecenderungan kajian moderasi agama secara tekstual bersumber pada teks Alquran (Mabrur, 2019); Kolis, 2017; Rouf, 2020; Arif, 2020; Fanani, 2017; Fuad, 2020; Mubarak & Rustam, 2018; Junaedi, 2019; Mansur, 2017; Abdillah, 2019; (Nurul, Uin, & Makassar, 2020). *Kedua*, kajian moderasi beragama pada lembaga pendidikan Islam dan organisasi keagamaan (Sutrisno, 2019; Sutrisno, 2019a; Nurdin & Syahrotin Naqqiyah, 2019; Khotimah, 2020; Aziz, 2020; Harto & Tastin, 2019; Prihatin, 2020; Hiqmatunnisa & Zafi, 2020; Anbiya & Asyafah, 2020). *Ketiga*, kajian tentang moderasi beragama perpektif tokoh (S. Arif, 2020; Dahlan, 2017; Syaripudin, 2018; Al Zamzami, 2019; Hapsin, 2014; Alifuddin, 2015).

Kecenderungan kajian moderasi yang telah dilakukan oleh beberapa penulis tersebut, telah membuka wawasan tentang pengertian moderasi dan bagaimana penerapannya pada lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Persoalan yang perlu dikaji selanjutnya adalah tantangan moderasi beragama pada era teknologi digital, ketika semua aspek kehidupan bertumpu pada dunia maya. Konsep dan praktik moderasi beragama perlu untuk disebarluaskan secara intensif melalui teknologi internet dan kanal-kanal informasi berbasis internet lainnya.

Kemampuan menggunakan dan memanfaatkan media internet inilah yang disebut sebagai literasi digital. Paul Gilster dalam Setowara (2018) mendefinisikan “literasi digital” sebagai: *“the ability to understand and use information in multiple formats from a wide variety of sources when it is presented via computers”* yang berarti literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari beragam sumber yang disajikan (Nasrullah dkk, 2017: 4 Setowara, ed. , 2018: 25).

Dauglas A.J. Belshaw dalam Nasrullah (2017: 7) menyatakan bahwa ada delapan elemen yang mendasar untuk mengembangkan literasi digital. Elemen tersebut adalah: (1) kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, (2) kognitif, daya pikir dalam menilai konten, (3) konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual, (4) komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital, (5) kepercayaan diri yang bertanggung jawab, (6) kreatif, melakukan hal baru dengan cara yang baru, (7) kritis dalam menyikapi konten, (8) bertanggung jawab secara sosial.

Elemen-elemen dasar pengembangan literasi digital di atas menegaskan secara rinci bahwa, literasi tidak sekedar dipahami sebagai kemampuan melek huruf, yakni dapat membaca dan menulis, namun literasi mencakup kemampuan merespon dan memahami ilmu pengetahuan termasuk kemampuan menuliskan dan mengabarkan hal-hal positif untuk membangun masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, kecakapan literasi media digital mendorong masyarakat secara sadar dapat berpartisipasi aktif menyebarkan konten-konten positif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk konten moderasi beragama.

Sosialisasi moderasi beragama melalui media digital, juga memerlukan dukungan melalui penerapan ideologi moderat dalam dunia pendidikan sejak dini. Beberapa kasus sikap intoleran yang terjadi di Indonesia, persemaiannya melalui institusi pendidikan, baik lembaga pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Beberapa siswa, mahasiswa, dan guru serta dosen menjadi obyek sasaran kelompok-kelompok intoleran. Kenyataan ini tentu menimbulkan keprihatinan mengingat lembaga pendidikan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menyemai prinsip moderasi beragama.

Lembaga pendidikan dapat menjadi laboratorium moderasi beragama di tengah ancaman radikalisme dan sikap intoleran yang ada dimasyarakat. Pemahaman dan pengenalan peserta didik tentang fitrah ragam perbedaan umat manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan kebangsaan, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Pada aspek inilah pengarusutamaan prinsip moderasi beragama melalui peran serta lembaga pendidikan

keagamaan menjadi sangat strategis, terlebih pada masyarakat multikultural seperti bangsa Indonesia ini.

Inspirasi Moderasi Beragama

Inspirasi moderasi beragama secara konsep sesungguhnya telah disebutkan dengan jelas dalam teks Alquran Surah al-Baqarah: 143.

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...(Q.S. al-Baqarah: 143)

Quraish Shihab menjabarkan maksud kalimat; “*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu*” adalah agar umat Islam menjadi umat yang moderat (ummatan wasathan; pertengahan). Posisi pertengahan diumpamakan bahwa keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan (Shihab, 2012: 415). Lebih lanjut dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa:

Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal dimana dapat mengantarkan manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan dimana pun. Allah menjadikan umat manusia pada posisi pertengahan *agar kamu*, wahai umat Islam, *menjadi saksi atas perbuatan manusia* yakni umat yang lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw. syahid yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku (Shihab, 2012: 415)

Seseorang yang memiliki sikap moderat, dalam penafsiran tersebut, dianggap dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain. Sikapnya tidak condong terhadap golongan tertentu yang menjadikannya ber-

buat tidak adil. Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah panutan utama dalam bersikap berada pada pertengahan, suatu posisi netral yang membuat seseorang dapat menilai segala sesuatu dari berbagai aspek, sehingga ia dapat memutuskan persoalan berkaitan dengan seseorang atau golongan, tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan pemikiran yang sempit. Dapat dikatakan bahwa moderasi dianggap sebagai kumpulan dari sikap toleran dan akomodatif.

Sikap toleran telah ditanamkan para ulama sejak dahulu. Sejarah pemikiran para ulama selalu mengedepankan konsep *wasathan* (pertengahan). Imam al-Ghazali menggabungkan antara syari'at dengan hakikat sebagai wujud dari konsep *wasathan*. Hakikat adalah fondasi sedangkan syari'at adalah atap, dan temboknya adalah akhlak serta perilaku. Ulama Nusantara seperti Hasyim Asy'ari, menunjukkan bahwa *wasathan* adalah menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Ramuan konsep *wasathan* tersebut mewarisi sikap *wasathan* Wali Sanga pada masa lampau yang telah mengislamkan Nusantara dengan prinsip *washatan*, sehingga masyarakat memiliki sikap moderat (Rahmat, 2018: v).

Prinsip *wasatan* melahirkan sikap *al-washaṭiyyah* (moderasi) dan *al-waqi'iyah* (realistis), yakni menempatkan kenyataan sebagai pertimbangan penting dalam mengambil keputusan hukum. Realistis di sini adalah tidak menyerah pada keadaan, tetapi mempertimbangkan kondisi yang ada serta berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keadaan ideal (Rahmat, 2018: 22). Keberhasilan penerapan prinsip moderasi dan *al-waqi'iyah* dakwah Wali Sanga terbukti telah memberikan landasan kuat bagi pembentukn sikap moderasi masyarakat bangsa.

Selain praktik nyata penerapan sikap moderasi dan realistis (*waqi'iyah*) dalam kehidupan masyarakat seperti telah disebutkan di atas, konsep *waqi'iyah* juga dapat ditemukan pada konsep kaidah ushul fikih. Beberapa prinsip ushul fikih yang berlandaskan pada konsep moderasi dan *waqi'iyah* (Rahmat, 2018: 22-23). di antaranya: (1) kemudaratan harus dihilangkan, (2) dalam kondisi sempit ada kelapangan, dan dalam kondisi lapang di situ ada kesempitan, (3) menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, (4) turun ke realitas yang lebih rendah ketika tak mungkin mencapai idealitas yang lebih tinggi, (5) beradaptasi dengan suatu kaum selama seseorang tersebut berada di kediaman

mereka, dan hormatilah mereka selama seseorang berada di kampung mereka.

Moderasi Beragama dan Literasi dalam Praktik Kehidupan Beragama

Moderasi beragama merupakan suatu sikap memiliki pengetahuan yang sangat luas, selalu berhati-hati, dan mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas pandang/perilaku (Shihab, 2019). Dapat dikatakan, moderasi beragama merupakan suatu cara memposisikan diri di tengah-tengah selalu bertindak adil dan berimbang. Ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia dan sejenisnya; penggunaan cara berfikir rasional; pendekatan kontekstual dalam memahami Islam dan penggunaan ijtihad (Firmansyah, dkk, 2020: 197).

Moderasi beragama dapat dirumuskan sebanyak mungkin ukuran, ciri-ciri, indikator untuk menentukan konsep, pola, sikap dan perilaku beragama tertentu apakah tergolong moderat atau sebaliknya. Indikator moderasi beragama yakni: (1) Komitmen kebangsaan, (2) Toleransi, (3) Anti-kekerasan; dan (4) Akomodatif terhadap budaya lokal. (5) Terbuka, (6) Dialog, (7) Toleransi. Ketujuh indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang di praktikan seorang di Indonesia dan seberapa kerentanan yang dimiliki. Kerentanan itu diperlukan agar menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama (Kholid, 2017: 16).

Kondisi keragaman bangsa Indonesia, baik secara historis maupun sosiologis menunjukkan bahwa agama Islam dianut mayoritas bangsa Indonesia, namun pada tingkat provinsi atau daerah, semua agama baik; Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu ada di sana. Keragaman agama-agama di Indonesia tersebut menjadi mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia. Meskipun di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan Negara Republik Indonesia. Di sinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam

mewujudkan kedamaian. Tugas untuk menyadarkan masyarakat tentang multikultural ini tidaklah mudah, bahkan membangun kesadaran kalangan masyarakat bahwa kebhinekaan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebhinekaan adalah perkara yang lebih sulit, karena, penyikapan terhadap kebhinekaan kerap berimpitan dengan pelbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Tugas penanaman sikap yang adil dalam memandang kebhinekaan menjadi bagian dari tugas penyuluh keagamaan, karena penyuluh keagamaan merupakan ujung tombak moderasi beragama. Fenomena keragaman budaya di atas, mengharuskan para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kompetensi dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Sehingga penyuluh perlu meningkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Para penyuluh juga diharapkan dapat menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok binaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam kelompok masyarakat, maka penyuluh dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas, sehingga perlu memahami multikultural agar dapat lebih efektif dalam pelayanan publik.

Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Multikultural

Pendidikan di Indonesia haruslah peka menghadapi perputaran globalisasi, termasuk persoalan keragaman, sehingga pengalaman pahit masa lalu tidak perlu terulang kembali. Untuk itu, pendidikan multikultural menjadi salah satu jawaban atas beberapa problematika kemajemukan tersebut. Moderasi beragama atau apa pun bentuk dan istilah yang digunakan dalam perspektif agama-agama tampak jelas dipahami dan dijalankan sebagai landasan, pandangan hidup, dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan setiap individu pemeluk agama di tengah masyarakat. Sikap moderat menjadi

pesan dan ajaran agama yang menjadi niscaya untuk dijalankan oleh setiap penganut agama ketika mereka membangun komunikasi dengan pihak lain.

Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya dalam satu tempat. Mereka berinteraksi dengan beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Akar pendidikan multikultural secara intensif menyebarkan pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etnis, dan agamanya. Pendidikan yang memperhatikan secara serius latar belakang peserta didik merupakan “cikal bakal” bagi munculnya pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan dengan tujuan utamanya mengubah struktur lembaga pendidikan. Yakni supaya peserta didik, baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Kawuryan 2009; 14).

Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk menampakkan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam lingkungan yang berbeda, baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai, dan ideologi. Diharapkan melalui pendidikan multikultural, peserta didik memiliki kemampuan untuk dapat bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Pendidikan multikultural mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Tilaar 2004: 59).

Tujuan pendidikan berbasis multikultural dapat diidentifikasi; (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan peserta didik yang beranekaragam; (2) untuk membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan peserta didik dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok (Banks, 1993: 56-58).

Pendidikan Islam berwawasan multikultural dapat menanam simpati, apresiasi, dan empati terhadap penganut budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi penganut budaya dan agama yang berbeda dapat belajar untuk melawan ketidak toleranan, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan *uniformitas* global. Pendidikan Islam yang dimaksud adalah pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural dengan model pendidikan mengedepankan pluralisme, toleransi, keadilan, saling menghargai perbedaan (*agree indisagreement*), dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain (*to livetoegether*), dapat menciptakan kesejukan dan kenyamanan (anti hegemoni dan anti dominasi).

Dengan mensejajarkan persaudaraan antar sesama agama (ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama bangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaraan antar sesama manusia (ukhwah basyariyah), serta globalisasi pendidikan Islam yang arif dan bijaksana. Jadi globalisasi bisa menjelma menjadi peluang (*apportunity*), bisa pula menjadi ancaman (*threat*). Maka dalam menghadapi hal ini, pendidikan Islam berupaya menarik-alur arus global, yang sesuai ditarik atau diambil dan dicerna, sementara yang tidak sesuai, diulur, dilepas atau ditinggalkan (Alam dan Dafizar, 2018: 105-106).

Terdapat tujuh asumsi paradigmatik pendidikan Islam berbasis multikultural, yaitu mendidik mahasiswa untuk: 1) belajar hidup dalam perbedaan; 2) membangun saling percaya; 3) memelihara saling pengertian; 4) menjunjung sikap saling menghargai; 5) terbuka dalam berpikir; 6) apresiasi dan interdependensi; 7) resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan (Baidhawi, 2008: 77-78).

Basis multikultural adalah pluralisme, yang menjadi fakta sosial yang tidak bisa diingkari. Pluralisme harus dipelihara dan dikelola dengan baik guna memperkuat struktur politik dan mengukuhkan sistem demokrasi bangsa Indonesia. Pluralisme agama pada intinya adalah toleransi agama (*religious tolerance*). Komunitas agama harus mampu menerima kenyataan pluralitas kehidupan modern serta tak bisa ditawar-tawar dan suatu keharusan. Namun isu pluralisme dan multikulturalisme tersebut selama hampir masa penguasa Orde Baru nyaris tidak tersentuh, lembaga pendidikan tidak pernah dipercaya untuk mentransformasi serta menginternalisasikannya kepada peserta didiknya. Baru kemudian Undang-Undang SISDIKNAS 2003 membuat suatu ancangan kearah pendidikan multikulturalisme, karena menyadari memang negara ini diwarnai multiagama, multietnik, dan multi budaya.

Pendidikan berbasis multikultural dapat diambil beberapa pemahaman, antara lain disebutkan oleh Zainiyati (2007: 137-138);

Pertama, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Karena itu, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia.

Kedua, pendidikan multikultural mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi; potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan dan budaya. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda dalam hal tingkatan ekonomi, aspirasi politik, agama, atau tradisi budaya.

Ketiga, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknya menjadi panutan bagi pihak

lain. Dengan demikian, upaya pemaksaan tersebut tidak sejalan dengan nafas dan nilai pendidikan privilege.

Keempat, privilege yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia. Dengan demikian, privilege dan privasi yang hanya memperhatikan kelompok tertentu menjadi tidak relevan (Zainiyati, 2007: 137-138)

Dukungan Pemerintah terhadap Penumbuhan Sikap Moderasi Beragama

Gambaran mengenai moderasi beragama, kecakapan literasi digital bagi masa depan pendidikan masyarakat multikultural di Indonesia telah diuraikan cukup rinci pada pembahasana di atas. Pada bagian ini penting pula disebutkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penumbuhan budaya moderasi beragama. Tentu saja, uraian ini hanyalah merupakan bagian kecil dari banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas telah memasukkan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kemudian terkait dengan pengembangan literasi sebagai media pengembangan moderasi beragama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Permendikbud ini yang telah melahirkan program Gerakan Literasi Sekolah dan perkembangan gerakan literasi lainnya termasuk literasi digital sebagai media penting sosialisasi moderasi beragama pada masyarakat multikultural.

Demikian pula Kementerian Agama, sebagai penjaga harmoni kehidupan umat beragama, juga telah menerbitkan buku putih berjudul: Moderasi Beragama, terbitan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019. Langkah tersebut selanjutnya diikuti oleh Balai Litbang Agama Semarang, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Jakarta, melalui penerbitan buku bunga rampai dengan tema; Pendidikan Masyarakat dari Moderasi, Literasi dan Perkawinan Dini ini. Diharapkan buku ini dapat menambah informasi akan makna penting moderasi beragama, terutama bagi bekal kehidupan masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. 2019. Moderasi Beragama Untuk Indonesia yang Damai: Perspektif Islam. In *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*. Hlm. 33–40. diakses dari <http://prosiding.iahntp.ac.id>
- Alam, Masnur, Dafizar 2018. Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural, *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 02; 103-124
- Al-Zamzami, M. 2019. Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website. *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1): 123–148. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>
- Alifuddin, M. (2015). Dakwah Berbasis Multikultur (Paradigma dan Strategi Tokoh Agama dalam Membangun Harmoni Antar Iman Di Kendari). *Jurnal Dakwah*, 16 (1): 37–57.
- Anbiya, B. F., & Asyafah, A. 2020. Implementasi Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Unity of Science. *Journal of Moral and Civic Education*, 4 (1): 32–41. <https://doi.org/10.24036/8851412412020220>
- Arif, M. K. 2020. Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Alquran, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11 (1); 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Arif, S. 2020. Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13 (1): 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>
- Aziz, A. 2020. Akar Moderasi Beragama di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama). *Ar-Risalah: Media Keislaman*,

- Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18 (1); 142-157. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348>
- Banks, J.A. 1993. “*Multicultural Education: Historical Development, Dimentions and Practrice*” In *Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- Baidhawi, Zakiyuddin. 2008. “Multicultural Education for Strengthening Civil Values in Pesantren”, 2008h; 78-84.
- Dahlan, M. 2017. Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11 (2): 313-334. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Fanani, A. 2017. Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2 (1): 53. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705>
- Fuad, A. J. 2020. Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31 (1); 153–168. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>
- Hapsin, A. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22 (2); 351–380. <https://doi.org/10.21580/WS.22.2.270>
- Harto, K., & Tastin, T. 2019. Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik. *At-Ta’lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18 (1): 89-110 <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1280>
- Hiqmatunnisa, H., & Zafi, A. A. 2020. Penerapan Nilai-Nilai Moderasi islam dalam Pembelajaran Fikih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning. *JIPIS*, 29(1), 27–35. <https://doi.org/10.33592/JIPIS.V29I1.546>
- Irianto, P. O. Febrianti, L. Y. 2017. Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA. In *Konferensi Internasional Pendidikan dan Bahasa 1: Pengembangan Bahasa Internasional di UNISSULA*; 640–647. Semarang:

- UNISSULA. diambil dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1282/989>
- Junaedi, E. 2019. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kawuryan, Sekar Pubarini. 2009. *Bahan Ajar Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP Universitas Negeri
- Kholid, Hidayatullah. 2017. Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1: 01-19
- Khotimah, H. 2020. Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (1); 62-68 <https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i1.3008>
- Kolis, N. 2017. Wahdat Al-Adyan Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1 (2); 166–180.
- Mabrur, M. 2019. Moderasi Alquran dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern. *Mumtaz: Jurnal Studi Alquran Dan Keislaman*, 1 (2); 31–50. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.9>
- Mansur, S. 2017. Kerukunan dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(2):127-172. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i02.1025>
- Martini, E. 2018. Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Modal Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 21–27. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018>
- Mubarok, A. A., & Rustam, D. G. 2018. Islam Nusantara : Moderasi Islam di Indonesia. *Jurnal of Islamic*, 3 (2): 153–168.
- Nurdin, A., dan Syahrotin Naqqiyah, M. 2019. Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14 (1); 82–102. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.82-102>

- Nurul, K., Uin, I., & Makassar, A. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Alquran. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* (Vol. 13): 38-59 <https://doi.org/10.35905/KUR.V13I1.1379>
- Prtaiwi, Anggi, Eflinnida Nurul Komaril Asyarotin. 2019. Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan Sebagai Solusi Disinformasi pada Generasi Millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* Vol. 7, No. ISSN 2303-2677 (Print) ISSN 2540-9239 (Online)
- Prihatin, B. (2020). Peran Madrasah dalam Membnagun Moderasi Agama dI Indonesia di Era Milenial *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, (Vol. 1 No. 1 (2020): EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran), 136–150. Retrieved from <http://jurnalmaarif.com/index.php/edukasia/article/view/13>
- Ramli. 2019. *Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 12 No. 2 Juni 2019: 135-162. diambil dari <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>
- Rouf, A. 2020. Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 105–140. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.148>
- Sutrisno, E. 2019a. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Sutrisno, E. 2019b. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 323–348. Retrieved from <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/113>
- Siradj, Said Aqil. 2018. Pengantar dalam, Rahmat, Imdadun, M. 2018. *Islam Nusantara Islam Indonesia Ijtihad Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: LKiS
- Syaripudin, S. 2018. Principles Of Moderation In Islamic Politics. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(01): 31-43. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1177>

- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. 1. Jakarta: Lenterah Hati.
- Suwanto, S. A. 2015. Analisis Literasi Informasi Pemakai Taman Bacaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(1), 89–100. <https://doi.org/10.24198/jkip.v3i1.9492>
- Tilaar, HAR. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- Widodo, P., & Karnawati, K. 2019. Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 9–14. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. 2007. Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Sekolah. *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 1, No. 2: 135-145

Bibliografi

- Abdullah, Anzar. 2016. Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *Jurnal Addin Vol.10 No.1 Februari 2016*. Hlm. 1-28
- Abdullah, Mukhammad. 2019. Mengurai Model Pendidikan Pesantren Berbasis Moderasi Beragama: dari Klasik ke Modern. *Prosiding Nasional*
- Abdillah, M. 2019. Moderasi Beragama Untuk Indonesia yang Damai: Perspektif Islam. In *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*. Hlm. 33–40. diakses dari <http://prosiding.iahntp.ac.id>
- Adriyos, Benny. 2019. “Rakernas Kemenag 2019 Usung Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat” <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/rakernas-kemenag-2019-usung-moderasi-beragama-untuk-kebersamaan-umat> diakses 14 Desember 2019
- Affan Ghaffar, 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afridah, W; Fajariani, R. 2017. Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa Sma Kanjeng Sepuh Gresik. *Medical and Health Science Journal*, Vol. 1 (1) February 2017: 53-57.
- Aijudin, Anas, 2017. Mengelola Pluralisme Melalui Dialog Antar Agama. Tinjauan Teoritik. *Jurnal SMarT, Vol. 03, No. 01, 2017*.

- Alagha, Joseph. "Moderation and the Performing Arts in Contemporary Muslim Societies." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 32 (3): 44-68. 2015.
- Alam, Masnur, Daflizar 2018. Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural, *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 02; 103-124
- Al-Zamzami, M. 2019. Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website. *Jurnal Bimas Islam*, 12 (1): 123–148. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.98>
- Alifuddin, M. 2015. Dakwah Berbasis Multikultur (Paradigma dan Strategi Tokoh Agama dalam Membangun Harmoni Antar Iman Di Kendari). *Jurnal Dakwah*, 16 (1): 37–57.
- Anshori LAL. 2012. *Pendidikan Islam Transformatif*. Jakarta: Referensi.
- Anbiya, B. F., & Asyafah, A. 2020. Implementasi Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Unity of Science. *Journal of Moral and Civic Education*, 4 (1): 32–41. <https://doi.org/10.24036/8851412412020220>
- Arif, M. K. 2020. Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Alquran, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah*, 11 (1); 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- Arif, S. 2020. Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13 (1): 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>
- Aziz, A. 2020. Akar Moderasi Beragama di Pesantren (Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18 (1); 142-157. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348>
- Amin, R. 2014. Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam, *Al-Qalam*, 20(3), p. 23. doi: 10.31969/alq.v20i3.339.
- Anisah, S. S. and Dharma Tohjiwa, A. 2016. Pusat Batik Surakarta Hadiningrat Di Laweyan, Surakarta, *Jurnal Ilmiah Desain Konstruksi*, 15(1), pp. 60–68.

- Andrew N. Weintraub, 2011. "The Study of Islam and Popular Culture in Indonesia dan Malaysia", dalam Andrew N. Weintraub dkk, *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*. New York: Routledge
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Astuti, TMP. 2013. *Penghargaan Sosial Semu dan Liminalitas Perempuan Migran*. Semarang: Widya Karya.
- Asrori, Ahmad. 2015. Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.9 No.2 Desember 2015. Hlm. 253-268
- Ath-Thawail, Utsman. 1997. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. terj. Saefuddin Zuhri. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aynina, Rizki. 2019. "Sejarah dan Perkembangan Lagu Syubbanul Wathan". *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Azca, Muhammad Najib. 2013. "Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru". *Jurnal Maarif* Vol. 8, No. 1 — Juli 2013, hlm. 14-44
- Azra, Azyumardi. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. New Jearsey: Allen & Unwin.
- Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Historical Development, Dimentions and Practrice" *In Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2008. "Multicultural Education for Strengthening Civil Values in Pesantren", 2008h; 78-84.
-, 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga

- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe, Sulastin Sutrisno, and Moh. Syakir. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bayat, Asef, 2011. *Post-Islamisme*, Yogyakarta: LKiS.
- Bbc. com. "Diusir dari Desa Karena Agama, Bagaimana Mencegah Intoleransi di Tingkat Warga?" Update, 3 April 2019, diakses pada 17 Oktober 2019 dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47801818>
- Behrend, T. E. 1995. *Serat Jatiswara: Struktur Dan Perubahan Di Dalam Puisi Jawa 1600-1930*. Jakarta: INIS.
- Bhiku Parekh, 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: harvard University Press
- BKKBN. 2009. *Pedoman KIE: Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN DIY. 2010. *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)*. Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BKKBN. 2013. *Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas yang Komprehensif*. Jakarta: BKKBN.
- BPS Gunungkidul. 2019. *Gunungkidul Dalam Angka 2019*. Wonosari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis*. Jakarta : Rajawali Press.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burke, Peter. 1993. *History and Social Theory*. New York: Cornel University Press.
- Chambert-Loir, Henri. 2009. *Hikayat Nakhoda Asik Sapirin Bin Usman. Hikayat Merpati Mas Muhammad Bakir*. Depok dan Jakarta: Masup Jakarta, Ecole française d'Extrême-Orient, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- CnnIndonesia.com. 2018. DMI temukan 7,89 Persen Materi Ceramah Ulama berisi Kebencian. Terbit pada 27 Juli 2018, di akses pada 5 Mei 2020, dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180727161824-20-317521/dmi-temukan-689-persen-materi-ceramah-ulama-berisi-kebencian>
- Connolly. Peter, 2002. *Approaches to the Study of Religion*. Yogyakarta: LKiS.
- Dewi, Prameswari Puspa. 2018. *Modul Kesehatan Reproduksi: Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: Kementerian PPA kerjasama dengan Rutgers WPF Indonesia.
- Dahlan, M. 2017. Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11 (2): 313-334. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Dinas Pariwisata. tt. *Exotic Gunungkidul*. Wonosari: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kerjasama dengan UNESCO.
- Din Syamsudin, 2018. Sepuluh prinsip Islam Wasathiyah. Dalam <http://https://gorontalo.antaraneews.com/berita/50712/din-syamsudin-ada-10-prinsip-islam-wasathiyah>, diunggah 2 Agustus 2019
- Djabar, Abdul. 2014. *Remaja Hari ini adalah Pemimpin Masa Depan*. BKKBN: Jakarta.
- Djamilah, Reni Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 3 (1) Mei 2014: 1-16.
- Effendy, Bachtiar, 2009. *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta; Paramadina.
- Efendi, M.Arif. 2018. "Kemenag Canangkan Program Moderasi Beragama Tanggulangi Paham Ekstrim". <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-canangkan-program-moderasi-beragama-tanggulangi-paham-ekstrim> diakses 14 Desember 2019

- Efrem Limsan Siregar, 2018. *Perkuat-ekonomi-di-internal-muhammadiyah-karanganyar-bakal-punya-toko-sendiri*. Available at: <https://solo.tribunnews.com>, Accessed: 23 April 2020.
- Eliade, Mircea. 1959. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, The Significance of Religious Myth, Symbolism, and Ritual within Life and Culture*. New York: A Harvest Book.
- Elsa online. "Ringkasan Laporan Kondisi Kebebasan Beragama di Jawa Tengah 2018." Updated 2 Februari 2019, diakses 2 Juni 2019, dari: <https://elsaonline.com/ringkasan-laporan-kondisi-kebebasan-beragama-di-jawa-tengah-2018/>
- Fadrik Aziz Firdausi, 2019. *Pada Era Pergerakan Nasional, Surakarta adalah Kota Radikal*, <https://tirto.id/>. Available at: <https://tirto.id/pada-era-pergerakan-nasional-surakarta-adalah-kota-radikal-enT4>, Accessed: 9 May 2020
- Fanggidaj, Lenny. 1995. *Kamus Pendidikan*. Jakarta: Restu Agung.
- Fanani, A. 2017. Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *SHAHIH : Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2 (1): 53. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705>
- Fuad, A. J. 2020. Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31 (1); 153–168. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991>
- Farih, Amin. 2016. Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, hlm. 251-284. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.2.969>
- Fatmawati, Laila; Pratiwi, Rani Dita ; dan Erviana, Vera Yuli. 2018. Pengembangan Modul Pendidikan Multikultural Berbasis Karakter Cinta Tanah Air dan Nasionalis pada Pembelajaran Tematik. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol.8 No.1 Januari 2018. Hlm. 80-92

- Fauzi, Ahmad. 2018. Moderasi Islam Untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 02 No.02 Juli-Desember 2018. Hlm.232-244.
- Fathurahman, Oman. 2010. "Filologi Dan Kajian Islam Indonesia." in *Filologi dan Islam Indonesia*, edited by Muchlis. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (cet. 14)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fealy, G. and White, S. 2008. *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia, Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*.
- Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Truth and Method*. London: Continuum.
- Geldard, K dan Geldard, D. 2011. *Konselin Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda (edissi 3)*. Diterjemahkan oleh Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gufron, U. 2019. Corak Moderasi Beragama Keluarga Mualaf Tionghoa (Studi Kasus Jamaah Masjid Lautze Jakarta Pusat)', *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), pp. 205–232. doi: 10.37302/jbi.v12i2.115.
- Gunawan, Muhammad Arif. 2018. "Nilai-nilai Islam dalam Lagu Ya Lal Wathon dan Implementasinya bagi Pengokohan Jiwa Nasionalisme Siswa MI Ma'arif Al-Hasani Gresik". *Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Hadiansyah, Firman, Ratna Djumala, Syaifuddin Gani, Anwar Hikmat, Meyda Noorthertya Nento, Nur Hanifah, Miftahussururi, and Qori Syahriana Akbari. 2017. *Materi Pendukung Literasi Budaya Dan Kewargaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasan, Noorhaidi, 2014. *The Making of Public Islam: Piety, Democracy and Youth in Indonesian Politics*, Yogyakarta: SUKA Press.
- Hakiki, G dkk. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia bekerjasama dengan BPS, BAPPENAS, PUSKAPA Universitas Indonesia.

- Hanapi, Mohd Shukri. 2014. The *Wasatiyyah* (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of its Implementation in Malaysia. *International Journal of Humanities and Sosial Science*. 4 (1): 51-62
- Hapsin, A. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22 (2); 351-380. <https://doi.org/10.21580/WS.22.2.270>
- Harto, K., & Tastin, T. 2019. Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 18 (1): 89-110 <https://doi.org/10.29300/attalim.v18i1.1280>
- Haris, Munawir. 2015. "Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 7 (02): 257-272. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>
- Haryanto, Joko Tri. 2018. "Nilai Kerukunan Pada Cerita Rakyat Dayuhan-Intingan Di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan". *Jurnal Smart* Vol.4 No.1 Juni 2018, hlm: 1-14. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.598>
- Hasan, Ismail dan Naipospos, Bonar Togor. 2010. *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasan, Noorhaidi, 2014. *Islam Politik; Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press
- Hatta, M., 2019. Media Sosial, Sumber keberagamaan Alternatif Anak Milenial Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat', *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 22(1), pp. 1-30. doi: 10.15408/dakwah.v22i1.12044.
- Hilmy, Masdar. 2013. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam*, 07 (01): 24-48.

- Hiqmatunnisa, H., & Zafi, A. A. 2020. Penerapan Nilai-Nilai Moderasi islam dalam Pembelajaran Fikih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning. *JIPIS*, 29(1), 27–35. <https://doi.org/10.33592/JIPIS.V29I1.546>
- Horton, Paul B., Hunt, Chester L. 2006. *Soosiologi*, Jilid 2, terj. Aminuddin Ram. Jakarta : Penerbit Eirlangga
- Hurlock, EB. 1998. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Terj.) Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Idharam, Syaikh, 2011. *Mereka Memalsukan Kitab-kitab Karya Ulama Klasik: Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren..
- Irawati. 2011. *Pengetahuan dan Sumber Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Volume 1, Nomor 2.
- Irianto, P. O. Febrianti, L. Y. 2017. Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA. In Konferensi Internasional Pendidikan dan Bahasa 1: Pengembangan Bahasa Internasional di UNISSULA; 640–647. Semarang: UNISSULA. diambil dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1282/989>
- Ismail SM, dkk. (ed.), 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iswanto, Agus. 2019. “Menelisik Sosok Dan Ajaran Sunan Kalijaga Melalui Manuskrip.” *Manuskripta* 9 (1): 203–12.
- Jati, W. R., 2016. Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(2). doi: 10.21274/epis.2016.11.2.375-402.
- Junaedi, E. 2019. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Johns, Antohy. 1961. “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History.” *Journal of Southeast Asian History* 2(2):14.
- Johns, Antohy. 1995. “Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations.” *Journal of Southeast Asian Studies* 26(1):15.

- John, M. Echols dan Hasan Sadily. Tth. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Penerbit Gramedia pustaka Utama
- Junaedi, E., 2019. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag', *Harmoni*, 18 (2), pp. 182–186. doi: 10.32488/harmoni.v18i2.414.
- Kahmad , Dadang S, 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya
- Kartika Anggraeni, 2018. *Transaksi E-Commerce Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*, *tempo.com*. Available at: <https://bisnis.tempo.co/read/1150204/transaksi-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/full&view=ok>, Accessed: 9 May 2020
- Kansteiner, Wulf. 2002. "Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies." *History and Theory* 41(2):179–97.
- Kamali, Mohamad Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam : The Qur'ānic Principle of Wasa'iyah*. New York: Oxford University Press.
- Kawuryan, Sekar Pubarini. 2009. *Bahan Ajar Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: FIP Universitas Negeri
- Kholid, Hidayatullah. 2017. Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah, *Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1: 01-19
- Khotimah, H. 2020. Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (1); 62-68 <https://doi.org/10.19105/rjpai.v1i1.3008>
- Kolis, N. 2017. Wahdat Al-Adyan Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1 (2); 166–180.
- KBBI online. majelis. diakses pada 17 Juni 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/majelis>
- KBBI online. Taklim. diakses pada 17 Juni 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taklim>
- KBBI online. Taklim. diakses pada 20 Juli 2020 dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taklim>

- Kersten, Carool. 2017. *A History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khamami Zada, 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju
- Komnas HAM. 2016. Laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan 2016. Jakarta : Komnas HAM RI. <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf> diunduh tanggal 30 Januari 2020
- Kompas. 2017. *Selamatkan Anak dari Eksploitasi; Perlu Aksi Nyata secara Lintas Sektoral* tanggal Kompas 29 Desember 2017.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2016. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak*. 2011-2016.
- Kondisi Umum, <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>, diakses 18 April 2020.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurtz, Lester, 1995. *Gods in the Global Village* (London: the Words Religions in Sociological Perspective
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, Tri Prapto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktek Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 1 Purbalingga Kabupaten Purbalingga*. Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Lestari dan Nagtini. 2010. *Pendidikan Islam Kontekstual*. Pustaka Pelajar. Yogjakarta.
- Lukman. 2004. *Remaja Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: BKKBN.
- Liebman, Charles S. 1983. "Extremism as a Religious Norm." *Journal for the Scientific Study of Religion* 22(1):75–86.
- Maas, Paul. 1958. *Textual Criticism*. Oxford: Oxford University Press.

- Masfiah, S; Shaluhiyah, Z; Suryoputro, A. 2013. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8 (1) Januari 2013: 69-78.
- Masfiah, Umi, dan Haryanto, Joko Tri.. 2016. "Prolog: Melacak Radikalisme Kelompok Keagamaan dalam Konstelasi Kebangsaan". Dalam Haryanto, JT (ed). (2016). *Radikalisme dan Kebangsaan: Gerakan Sosial dan Literatur Organisasi Keagamaan Islam*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Mantu, Rahman. 2015. Bina-Damai dalam Komunitas Pesantren: Sebuah Upaya Counter-Radikalisme. *Jurnal Walisongo* Vol.23 No.1 Mei 2015. Hlm. 131-151
- Marsono. 2011. "Akulturasi Penyebutan Konsepsi Tuhan Pada Teks Sastra Suluk." *Jumantara* 2(1):1-22.
- Marsono. 2019. *Akulturasi Islam Dalam Budaya Jawa: Analisis Semiotik Teks Lokajaya Dalam LOr. 11.629*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marmi. 2013. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masud, Abdurrahman. 2019. *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Mawarti, S., 2017. Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi Dalam Pembelajaran Agama Islam, *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), p. 70. doi: 10.24014/trs.v9i1.4324.
- Mabrur, M. 2019. Moderasi Alquran dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern. *Mumtaz: Jurnal Studi Alquran Dan Keislaman*, 1 (2); 31-50. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.9>
- Mansur, S. 2017. Kerukunan dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(2): 127- 172. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i02.1025>

- Martini, E. 2018. Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Modal Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 21–27. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2.018>
- Mubarok, A. A., & Rustam, D. G. 2018. Islam Nusantara : Moderasi Islam di Indonesia. *Jurnal of Islamic*, 3 (2): 153–168.
- Miftahuddin. 2010. Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Mozaik*. Vol.5(1) Juni 2010, p 41–54
- Moleong, Lexy J.. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- MUI. 2018. “Definisi Islam Wasathiyah.” Retrieved October 5, 2020 (<https://mui.or.id/produk/infografis/23935/definisi-islam-wasathiyah/>).
- Muljana, Slamet. 2007. *Nusantara, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- Musthofa, SB; Winarti, P. 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Di Pekalongan Tahun 2009-2010. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1 (1) Desember 2016: 33-41.
- Muliati, Binti dan Sari, Rismalia. 2018. Menanamkan Karakter Bangsa Melalui Lagu-lagu Patriotik bagi Peserta Didik Tingkat Pendidikan Dasar. *Jurnal al-Hikmah* Vol.6 No.1 Maret 2018. Hlm. 1-11
- Munir, Ahmad, dan Saputra, Agus Romdlon. 2019. Impelemntasi Konsep Islam Wasathiyah Studi Kasus MUI Eks Karesidenan Madiun. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* Vol.13 No.1 tahun 2019. Hlm. 67-88.
- Nurdin, A., dan Syahrotin Naqqiyah, M. 2019. Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14 (1); 82–102. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.82-102>

- Nurul, K., Uin, I., & Makassar, A. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Alquran*. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Vol. 13): 38-59 <https://doi.org/10.35905/KUR.V13I1.1379>
- Nurgiyantoro, Burhan. 1998. *Transformasi Unsur Pewayangan Dalam Fiksi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuriyanto, L. K., 2015. Social Integration Management Of Places Of Worship For Islam And Christian In Surakarta', *Analisa*, 22(1), p. 29. doi: 10.18784/analisa.v22i1.144.
- Nuriyanto, L. K., 2017. Kerukunan Umat Beragama Di Kota Surakarta', *Penamas*, 30(2), p. 145. doi: 10.31330/penamas.v30i2.174.
- Palmer, Richard E. 1980. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Fifth Prin. Evanston: Northwestern University Press.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2016. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2015. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2017. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2016. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pengadilan Agama Wonosari. 2018. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari 2017. *Laporan tidak diterbitkan*. Wonosari: Pengadilan Agama Wonosari.
- Pertiwi, KR; Salirawati, D. 2014. Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Permasalahannya. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19 (2) Oktober 2014: 104-115.
- Pigeaud, Theodore. 1967. *Literature of Java: Catalogue Raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands*. Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde.

- Pitirin A. Sorokin. 1974. *Sosial Stratification*, dalam Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit UI
- Poerwadarminta, W. J. .. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen.
- Pownall, Frances. 2004. *Lessons from the Past : The Moral Use of History in Fourth-Century Prose*. Ann Harbour: The University of Michigan Press.
- Pratama, Lulu Syifa dkk. 2017. Variasi Pemahaman Keagamaan Mahasiswa IAIN Surakarta. *Academika*. 1 (1): 113-125
- Prtaiwi, Anggi, Eflinnida Nurul Komaril Asyarotin. 2019. Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan Sebagai Solusi Disinformasi pada Generasi Millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* Vol. 7, No. ISSN 2303-2677 (Print) ISSN 2540-9239 (Online)
- Prihatin, B. (2020). Peran Madrasah dalam Membnagun Moderasi Agama di Indonesia di Era Milenial *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, (Vol. 1 No. 1 (2020): *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*), 136–150. Retrieved from <http://jurnalmaarif.com/index.php/edukasia/article/view/13>
- Qomar, Muzammil, 2002. *NU Liberal: dari Tradisionalisme ke Kosmopolitanisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Cengkareng: CV. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raditya, Iswara N. 2019. “Kronologi & Sejarah Bom Bunuh Diri di Indonesia: Bali Hingga Medan”, diakses dari <https://tirtoid.id/kronologi-sejarah-bom-bunuh-diri-di-indonesia-bali-hingga-medan-elAt> , diunduh 2 Juni 2020.
- Raho, Bernard. 2007, *Teori-Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Ramli. 2019. *Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 12 No. 2 Juni 2019: 135-162. diambil dari <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>

- Ramadhan, Mu'ammarr. 2015. Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan Multikultural dan Inklusivisme (Studi pada Pesantren al-Hikmah Benda Sirampog Brebes). *Jurnal Smart Vol.01 No.02 Desember 2015*. Hlm.177-190.
- Republika.co.id. "Ulama Dunia Dukung Pesan Bogor." *Republika.co.id*, update 3 Mei 2018, diakses 16 Desember 2019 dari: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/03/p858c8313-ulama-dunia-dukung-pesan-bogor>
- Ridho, S., 2017. Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), p. 88. doi: 10.22146/jps.v4i2.28582.
- Ricklefs, M. C. 2001. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Hampshire: Palgrave.
- Rizqo, Kanavio Ahmad. "Konferensi Ulama Hasilkan Lombok Message, Sepakat Lawan Rasisme." Update, Sabtu 28 Juli 2018, diakses pada 14 Juni 2019, dari: <https://news.detik.com/berita/d-4138345/konferensi-ulama-hasilkan-lombok-message-sepakat-lawan-rasisme>
- Robson, S. O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Universitas Leiden.
- Rouf, A. (2020). Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 105–140. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.148>
- Rusmayani. 2018. "Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa di Sekolah Umum." *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 - 22 April 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.
- Sangidu. 2016. *Tugas Filolog: Teori Dan Aplikasinya Dalam Naskah-Naskah Melayu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santrock, W. John. 2007. *Life Spant Development. Perkembangan Masa Hidup Jilid 2*. Wisnu Chandra (terj). Jakarta: Erlangga.
- Saputra, Inggar. 2019. Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara Vol.3 No.1 Januari-Juni 2019*. Hlm.205-237.

- Sutrisno, E. (2019a). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Sutrisno, E. (2019b). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 323–348. Retrieved from <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/113>
- Siradj, Said Aqil, 2018. Pengantar dalam buku berjudul Islam Nusantara Islam Indonesia Ijtihad Kemaslahatan Bangsa. Lkis, SAS.: 2018
- Schimmel, Annemarie. 1975. *Mystical Dimensions of Islam*. Bandung: Mizan.
- Schwedler, Jillian. 2011. “Review Article; Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis.” *World Politics* 63(2):347–76. DOI:10.1017/s0043887111000050
- Setiawan, Bambang. 2012. Siapa Kelas Menengah Indonesia. Dalam <http://https://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia?page=all>, diunggah tanggal 27 Agustus 2019.
- Shaleh, Badrus, 2005. “Pesantren, Konflik dan *Peace Building*”, dalam *Republika*, tanggal 23 Februari 2005.
- Shepard, William P. 1930. “Recent Theories of Textual Criticism.” *Modern Philology* 28 (2):129–41.
- Shihab, Alwi. 2001. *Islam Sufistik: “Islam Pertama” Dan Pengaruhnya Hingga Kini Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Sihombing, Adison Adrianus, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasajo. 2020. “Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia.” *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 19(55):18–32.
- Simuh. 1998. *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Ngabehi Ranggawarsita*. Jakarta: UI Press.
- Siraj, Said Aqil, 2013. *Meneguhkan Islam Nusantara. Biografi Pemikiran dan Kiprah Kebangsaan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA*. Jakarta & Surabaya: Khalista

- Sodik, Mochammad, 2006. "Pendekatan Sosologi" dalam Dudung Abdurrahman (ed.) *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Solihat, M. dkk (ed). 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Pustaka Citasendo
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaripudin, S. (2018). Principles Of Moderation In Islamic Politics. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(01): 31-43. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1177>
- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Cet. 1. Jakarta: Lenterah Hati.
- Suwanto, S. A. (2015). Analisis literasi informasi pemakai taman bacaan masyarakat. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(1), 89–100. <https://doi.org/10.24198/jkip.v3i1.9492>
- Suara.com. 2019. *Salib Dipotong hingga Tolak Sedekah Laut, 4 Kasus Intoleransi di Yogyakarta*. Terbit pada 03 April 2019, di akses pada 6 April 2019, dari: <https://www.suara.com/news/2019/04/03/163344/salib-dipotong-hingga-tolak-sedekah-laut-4-kasus-intoleransi-di-yogyakarta>
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2016. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anaka di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik kerjasama dengan UNICEF.
- Sudewa, Alex. 1991. *Sêrat Panitisastra: Tradisi, Resepsi, Dan Transformasi*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suharto, Toto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2004. "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas". Makalah dalam *Workshop Yayasan Interseksi*,

- Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?*, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004
- Suprpto, Rohmat. 2014. Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan Multikultural-inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo). PROFETIKA Jurnal Studi Islam Vol.15 No.2 Desember 2014. Hlm.246-260
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Susanto, A., 2019. Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), pp. 232–245. doi: 10.36052/andragogi.v7i2.92.
- Suryoputro, A; Ford, NJ; Shaluhiah, Z. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Makara Kesehatan*, Vol. 10 (1) Juni 2006: 29-40.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno, Sulastin. 2008. *Hikayat Hang Tuah: Analisis Struktur Dan Fungsi*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa.
- Sutrisno, E., 2019. Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions', *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), pp. 323–348.
- Sutopo, HB, 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Teoretis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS
- Tilaar, HAR. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- The Wachid Institute, 2014. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi*. Jakarta : The Wachid Institute dan The Body Shorp.

- The Religious Literacy Project Harvard Divinity School. 2020. "Four Principles of Religious Literacy." Retrieved April 12, 2020 (<https://rlp.hds.harvard.edu/our-approach/four-principles>).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Tsany, F. 2015. Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. Vol. 9 (1) Juni 2015: 83-103.
- Ujan, Andre Ata et.al. 2009. *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT.Indeks
- Ujang Sumarwan, 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Uno, Hamzah B. 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 1993. *Tarbiyatul Aulad Fil-Islam. Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Saifullah Kamalie dan Hery Noer Aly. (terj). Semarang: Asy-Syifa'.
- Wahid Foundation. 2016. Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Wahid Foundation. Hlm. 7.
- Wahid Foundation. 2018. "presentasi laporan tahunan kemerdekaan beragama berkeyakinan wahid foundation 2018. Bahan presentasi. <https://drive.google.com/file/d/1b16CEUlwXcDZXhDhR-rj71goChb1DZWE/view> diakses pada tanggal 30 Januari 2020
- Wahid, Abdurrahman, 1994. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Muh. Shaleh Isre (ed.), Yogyakarta: LkiS

- Widodo, P., & Karnawati, K. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 9–14. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>
- Wellek, Rene and Austin Warren. 2014. *Teori Kesusastraan*. Cetakan Ke. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wheatley, Stephanie. 2011. “From Violence to Voting: Toward an Islamist Theory of Moderation.” Disertasi untuk program doctor pada Departemen Church studi Universitas Barley.
- Wibowo, A.M. 2011. *Dampak Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Reproduksi Sehat Siswa (Uji Perbedaan Dampak PAI terhadap Jenis Kelamin dan Jurusan Peserta Didik pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah)*. Jurnal Analisa Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011.
- Wirosardjono, Soetjipto, 1987. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin
- Wiratno, Tri. and Santosa,. Riyadi. (no date) *Bahasa, Fungsi Bahasa, dan Konteks Sosial*. Available at: <http://repository.ut.ac.id/4240/1/BING4214-M1.pdf> (Accessed: 22 April 2020).
- Witzel, Michael. 2014. “Textual Criticism in Indology and in European Philology during the 19th and 20th Centuries.” *Electronic Journal of Vedic Studies (EJVS)* 21(3):9–90.
- Woodward, Mark. 1989. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Arizona: The University of Arizona Press.
- Woodward, Mark. 2011. *Java, Indonesia and Islam*. London and New York: Springer.
- World Economic Forum. 2015. *New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology*. Geneva: World Economic Forum.
- Yahya, Fata Asyrofi. 2018. “Meneguhkan Visi Moderasi dalam Bingkai Etika Islam Relevansi dan Implikasi Edukatifnya.” *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 -

22 April 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.

Yaqin, Muhammad Ainul. 2018. “Dzikir Manâqib Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural.” *2nd Proceedings Annual Conference on Muslim Scholars*. 21 - 22 April 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, di Hotel Mercure – Grand Mirama Surabaya.

Yusuf al-Qardhawi. 2018. *Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta : Pustaka Al-Kausar.

Yulianti, N. 2015. Hubungan Pergaulan Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja Pada Siswa Kelas XI IPS Di SMA N 1 Semin Gunungkidul Yogyakarta. *Skripsi*. Prodi Ilmu Keperawatan STIK ‘Aisyiyah Yogyakarta.

Zainiyati, Husniyatus Salamah. 2007. Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Sekolah. *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 1, No. 2: 135-145

Zakiah, dkk. 2016. “Radikalisme Kelompok-Kelompok Keagamaan dalam Konstelasi Kebangsaan”. *Laporan Hasil Penelitian* Balai Litbang Agama Semarang.

Zakiah, dkk. 2019. *Laporan hasil penelitian Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.

Zakiah. 2019. “Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta.” *Harmoni; Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 18 (2): 28-50.

Zakiah, 2019. Moderasi Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta. dalam *Jurnal Harmoni*. 18(2): 28-50

Zakky, 2018. *Pengertian Wirausaha Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, www.zonareferensi.com. Available at: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-wirausaha>, Accessed: 9 May 2020

- Zhafira, A., 2017. Efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan antara religiusitas Islam dan intoleransi politik', *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), pp. 122–135. doi: 10.7454/jps.2017.11
- Zoetmulder, P. .. 1991. *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme Dan Monisme Dalam Sastra Suluk Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Biodata Penulis

Rosidin, SE, MM

Ahli Peneliti Madya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Menyelesaikan Sarjana (S1) diperoleh dari Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (FE UNDIP) Semarang, tahun 1996 dan S2 pada Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (FE USM) selesai tahun 2011.

Karya tulis/artikel yang pernah di hasilkan sampai saat ini, seperti : Keluarga Sakinah Suku Sasak, Pembinaan Pada Masyarakat Praya Barat Lombok tengah NTB, ISBN: 978-602-278-011-3, Penerbit: Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, Nopember 2012; Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyuluhan Dan Sikap Terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam Di Kalimantan Tengah, Jurnal At-Tabsyir, Volume 1 No. 1, Januari-Juni 2013, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fak. Dakwah STAIN KUDUS; Sufisme Perkotaan Dan Nalar Beragama Inklusif Studi Atas Peran Majelis Jamuro Dalam Upaya Deradikalisasi Gerakan Keagamaan Di Surakarta, Jurnal Analisa, Vol. 21 Nomor 01, Juni 2014, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang; KDRT: Problem dan Pemecahannya oleh Lembaga Agama di Brebes Jawa Tengah, Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vo. 5 No. 1, Januari – Juni 2014, Kudus: STAIN Kudus; Relasi Minoritas-Mayoritas Umat Beragama : Pengalaman Masyarakat Tegal dalam Pendirian Rumah Ibadah Kong Miao, Jurnal Penamas, Vo. 28 No. 1 April-Juni 2015, Jakarta: Balai Penelitian

dan Pengembangan Agama Jakarta; Nilai-Nilai Kerukunan Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bawean Gresik, Jurnal al Qalam Vol. 21 No. 1 Juni 2015, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; Tradisi Lupis Raksasa dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekalongan, Jurnal al Ulum, Vol. 17 No. 1 Juni 2016, Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo; Relasi Sosial Majelis Mujahidin Dalam Konstelasi Kebangsaan, Jurnal al Qalam Vol. 22 No. 1 Juni 2016, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; Indeks Kualitas Pelayanan Perkawinan di Jawa Tengah, Jurnal Ijtihad Vol. 16 No. 2 Desember 2016, Salatiga: IAIN Salatiga; Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu di Sumba Barat, NTT, Jurnal Penamas Vol. 29 No. 3 Oktober-Desember 2016, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta; Indeks Budaya Kerja dalam Pelayanan Perkawinan di Kabupaten Banyumas, Jurnal Dialog Vol. 39 No. 2 Desember 2016, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Indeks Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Keluarga Majelis Taklim di Kabupaten Sragen, “Jurnal SM@RT”, Vol. 03 No. 1 Juni 2017. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Banyumas. Jurnal “Bimas Islam”, Vol. 10 No. 4 Desember 2017. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI; Pemahaman Agama Dalam Konteks Kebangsaan: Studi Kasus Pada Organisasi Rohis SMA Negeri 1 Sragen, “Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan”, Vol. 2 No. 2 Desember 2017. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI; Determinan Budaya Kerja Guru Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Demak, “Jurnal Edukasi”, Vol. 15 No. 3 Desember 2017. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI; Persepsi Jamaah Terhadap Pemberdayaan oleh Takmir Masjid di Kota Madiun, “Jurnal Inferensi” Vol. 12 No. 1 Juni 2018, Salatiga: IAIN Salatiga; Indeks Pengelolaan Masjid Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, “Jurnal Dialog” Vol. 41 No. 1 Juni 2018, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; Korelasi Pengelolaan Masjid dan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Jember Jawa Timur, “Jurnal Al Qalam” Vol. 25 No. 1 Juni 2019, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; Nilai Kerukunan Umat Beragama Dalam Tradisi Merti Bumi

Tunggularum Kabupaten Sleman, “Jurnal Panangkaran” Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2019, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Strategi Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Muallaf Turi Kabupaten Sleman, “Jurnal al Qalam” Vol. 14 No. 1, Januari-Juni 2020, Amunta: Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur’an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan.

Drs. H. Sulaiman, M. Ag.

Peneliti Utama pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Menempuh pendidikan S-1 di IAIN Walisongo (1984) dan S-2 menempuh program Master Studi Islam di kampus IAIN Walisongo Semarang (2002).

Beberapa karya dalam bentuk buku, antara lain: Jamaah Salafi Minhaj as-Sunnah, penerbit Pustaka Zaman Semarang (2009); Konflik dan Integrasi Keluarga Beda Agama, penerbit Akvimedia Semarang; Islam Aboge: Persinggungan antara Islam dan Budaya Lokal di Banyumas, penerbit Akvimedia Semarang (2012); Adapun artikel diterbitkan dalam bunga rampai: Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Umat Beragama, penerbit Arti Bumi Intaran Yogyakarta (2015); Bimbingan Manasik Haji: Upaya Pemandirian Jamaah Haji, penerbit Arti Bumi Intaran Yogyakarta (2015); “Relasi Kelompok LDII Kediri dalam Konstelasi Kebangsaan”, penerbit Arti Bumi Intaran Yogyakarta (2016). Artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah, antara lain: “Agama Konghuchu: Sejarah, Ajaran dan Keorganisasiannya di Pontianak Kalbar”, terbit di Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang (2010); “Problematisasi Pelayanan KUA Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur” terbit di Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang (2011); “Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur” terbit di Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang (2011); “Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial”, terbit di Jurnal Harmoni, puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta (2013); “Varian pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa di Berbagai Universitas” terbit di Jurnal Al Qalam, Balai Litbang Agama Makassar (2013); “Kepuasan Jamaah Haji oleh KBIH di Kabupaten Jepara” terbit di jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang (2014); “Nilai-Nilai Kerukunan

dalam Tradisi Lokal (Studi Interaksi Kelompok Umat Beragama di Ambarawa, Jawa Tengah) ” terbit di Jurnal Harmoni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2014); “Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Pati, Jawa Tengah” terbit di Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang (2015); “Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai dalam pemberdayaan umat beragama di Purworejo, Jawa Tengah ” diterbitkan di Jurnal Smart Balai Litbang Agama Semarang (20016)

Zakiah, M.A., M.I.S.Adv

Peneliti Madya pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Menempuh pendidikan S-1 di IAIN Walisong Semarang, S-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S-2 di the University of Queensland Australia. Ia telah menghasikan beberapa karya tulis yang diterbitkan dalam jurnal, buku bunga rampai, dan prosiding. Berikut di antara karya-karyanya: “Responsibility to protect in Syrian crisis: what can be expected from the Muslim community?” (Analisa Journal of Social Science and Religion, 2019), “Indeks Kualitas Pelayanan Pernikahan oleh KUA di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah” (Jurnal Al-Qalam, 2017), “Mamacan di Desa Bayan Lombok Utara: Menjaga Tradisi Lokal dan Diseminasi Ajaran Islam”, dalam “Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia, Jamhari Makruf, dkk (ed) (penerbit Australian Embassy Jakarta, Australia Global Alumni, PPIM UIN Jakarta, dan FISIP UIN Jakarta, 2017). “Dewi Maleka; the Javanese Islam Manuscript”, (Indonesian Journal of Islam and Muslim Society, 2016), “Konflik dan Kerukunan Antarumat Beragama di Grabag Kabupaten Magelang (Jurnal Harmoni, 2016), “Female Leadership in Indonesia Pesantren” (Jurnal Penamas, 2016), “Epilog; Gerakan Keagamaan Islam sebagai Gerakan Sosial. Dalam “Radikalisme and Kebangsaan; Gerakan Sosial dan Literatur Keagamaan (Penerbit Arti Bumi Intaran Yogyakarta, 2016), The Chronicle of Terrorism and Islamic Militancy in Indonesia (Analisa Journal of Social Science and Religion, 2016), “Agama dalam Konstruksi Media Massa; Studi terhadap framing Kompas dan Republika pada berita Terorisme” (Analisa Journal of Social Science and Religion, 2015).) “Regional Security in Africa: the dynamic and challenges” (Journal of the Politic, Program Paska Sarjana Universitas Hasanudin, 2015), “Understanding Marital disputes

Management in Religious office and syariah court in Malaysia (book review)” (Heritage of Nusantara; International Journal of Religious Literature and Heritage, 2014). “Kitab Al-Sanī al-Mathālib; interkoneksi Nahwu dan Tasawuf” (Jurnal Walisongo, 2012), “Islamic Welfare System Dealing with Poor People in Rural Areas” (Indonesian Journal of Islam and Muslim Society, 2011).

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE, MSi

Peneliti Madya pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Sarjana (S1) diperoleh dari Jurusan Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank Semarang, tahun 1997, serta Strata 2 (S2) pada Program Studi Manajemen Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta (FE UNIBA) selesai tahun 2011.

Karya tulis yang dimuat dalam sejumlah jurnal ilmiah, di antaranya: “Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT al-Anwar dan Firdaus Mojokerto Jawa Timur” (Jurnal EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2014), “Pengaruh Implementasi Pendidikan Agama terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik SMA di Bawah Yayasan Keagamaan” (Jurnal EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2015), “Bimbingan Konseling melalui Pendidikan Multikultural Terhadap Anak-Anak dan Remaja dalam Penanggulangan Paham Radikalisme” (Jurnal KONSELING RELIGI, 2014), “*Social Integration Management Of Places Of Worship For Islam And Christian In Surakarta*” (Jurnal Analisa: Journal of Social Science and Religion, 2015), “Pengaruh Pengelolaan Masjid terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Surabaya” (Jurnal Jurnal Bimas Islam, 2018), “Kerukunan Umat Beragama Di Kota Surakarta” (Jurnal Penamas, 2017), “Kualitas Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Tegal (The Quality of Marriage Services Offered by KUA in Tegal District), (Jurnal SMART; Studi Masyarakat, Religi, dan Tradis 2016) dan “Modal Sosial Dalam Membingkai Kerukunan Umat Beragama Di Surakarta Social Capital In Framing Religious Harmony In Surakarta (Jurnal Al Qalam)

Selain karya tulis diatas yang berupa karya tulis di berbagai jurnal ilmiah diatas, juga terdapat beberapa karya berupa bunga

rampai dan prosiding, yaitu seperti: Gerakan Sosial dan Keagamaan Mahasiswa (Religiusitas Dan Kesejahteraan Psikologis Dalam Aktivitas Organisasi Keagamaan Mahasiswa Di Universitas Negeri Tanjungpura; Prolog: Semangat Beragama Dan Berbangsa Remaja Di Sekolah; Pola Kehidupan Beragama Remaja Setingkat Sma Di Kabupaten Karanganyar; Potret Pelayanan Pernikahan Di KUA Adiwerna dan KUA Dukuhturi Kabupaten Tegal; Nilai Kerukunan Dalam Tradisi Kolak Ayam, Malam Selawe, Dan Pasar bandeng Di Kabupaten Gresik; Manajemen Bimbingan Manasik Haji Oleh KUA Banjarmasin Utara; Pembinaan Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur); Membangun Damai Dengan Implementasi PBM No. 9 dan 8 2006 (Kasus Pendirian Gereja ethel Injil Sepenuh (GBIS) Generasi Pilihan Pucangsawit Surakarta); **dan** Tradisi Sosial Bubur Banjar Pada Bulan Ramadhan Masjid Darussalam di Surakarta

Joko Tri Haryanto, S.Ag, M.S.I

*Joko Tri Haryanto adalah Peneliti Madya di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan kepakaran di bidang Agama dan Kemasyarakatan. Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 di Pascasarja IAIN Walisongo Semarang, 2008 pada konsentrasi Tasawuf dan Etika Islam. Karyanya yang dimuat dalam jurnal ilmiah di antaranya: “Nilai Kerukunan pada Cerita Rakyat Dayuhan dan Intingan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan” dimuat dalam Jurnal SMaRT Volume 04 nomor 01 Juni 2018 Balai Litbang Agama Semarang; “Pesan Kerukunan Cerita Lisan Masyarakat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Malang”, dimuat dalam Jurnal SMaRT Volume 02 no.02 Desember 2016 Balai Litbang Agama Semarang. Karya-karyanya dalam buku / bagian buku, antara lain: *Beragama ala Mahasiswa Milenial, Gerakan dan Relasi Keagamaan Mahasiswa Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan*. Jakarta: Litbang Diklat Press (2019); “Prolog: Aktivisme Mahasiswa Muslim antara Gerakan Sosial dan Generasi Milenial” ditulis Bersama Zakiyah; dalam Zakiyah dan Haryanto, Joko Tri (ed). *Gerakan Sosial Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta : Arti BumiIntaran (2019); “Epilog: Corak Keagamaan Mahasiswa Milenial” dalam Zakiyah dan Haryanto, Joko*

Tri (ed). *Gerakan Sosial Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran (2019); *Negara Melayani Agama dan Kepercayaan*. Jakarta: Litbang Diklat Press (2019); “Pengembangan Kearifan Lokal Bagi Penyuluhan Kerukunan Beragama”, dalam Sulaiman, dkk. *Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Beragama, Sebuah Bunga Rampai Kearifan Lokal di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta : Arti Bumi Intaran (2018); *Panduan Tehnis Mengurus IMB Rumah Ibadah* [ditulis bersama Setyo Boedi Oetomo]. Yogyakarta: Arti BumiIntaran (2017); “Paradoks Nasionalisme, Wacana Kebangsaan dalam Pandangan Jamaah Salafy Ittibaus Sunnah Klaten” dalam Haryanto, Joko Tri, dkk. *Radikalisme dan Kebangsaan, Gerakan Sosial dan Literatur Organisasi Keagamaan Islam*. Yogyakarta : CV. Arti Bumi Intaran (2016); “Praktik Sosial Kerukunan pada Masyarakat Desa Pengalangan Kec. Menganti Gresik” dalam Sulaiman, dkk. *Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Beragama*. Yogyakarta : CV. Arti BumiIntaran (2015).

Dr. Mibtadin, S.Fil.I., MSI

Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di STAIN Surakarta pada tahun 2001 dengan mengambil Jurusan Ushuluddin Prodi Aqidah Filsafat dan selesai 2005. Tahun 2008 menempuh jenjang Magister (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil Program Studi Agama dan Filsafat, dan diselesaikan tahun 2010. Selang dua tahun kemudian, tahun 2012 mengambil program doktor (S3) atas sponsor beasiswa dari Diktis Kemenag RI, dan selesai tahun 2017 dengan menulis disertasi yang berjudul: *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil. Studi Gerakan Sosial LKiS, Fahmina Institute, dan The Wahid Institute*” (proses penerbitan) . Beberapa karya penulis yang telah terbit seperti: Kontributor pada buku “*Ketika Mekkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi*,” ed. Mirza Tirta Kusuma, (Gramedia Pustaka Utama, 2014), “*Masjid, Khutbah, dan Ujaran Kebencian. Kajian Atas Materi Khutbah Jum’at yang Berpotensi Mengandung Unsur Ujaran Kebencian pada Masjid-masjid di Kota Surakarta*”(Yogyakarta: Gerbang Media, 2019); “*Masjid, Ideologi, dan Radikalisme. Pemetaan Potensi Radikalisme melalui Halaqoh Masjid-masjid di Kota Surakarta*” (Yogyakarta: Gerbang Media, 2017), “*Manusia, Agama, dan Negara. Renungan Pemikiran Abdurrahman*

Wahid” (proses cetak, Gerbang Media Yogyakarta), dan penelitian lainnya. Beberapa tulisan juga dapat ditemukan di berbagai jurnal seperti Analisa, SMaRT, Dinika, Al-Ahkam, Hermenia, Al-A’raf, Shahih, Esensia, Pusaka, dan Al-Ulum. Penulis kini sebagai ketua Lakpesdam PCNU Surakarta adalah tenaga pendidik pada Institut Islam Mamba’ul Ulum (IIM) Surakarta, sekaligus sebagai Ketua Pusat Pengkajian Islam dan Jurnal Al-Ulum (PPI-J) di kampus tersebut. Selain aktif di dunia akademik, penulis juga aktif pada gerakan sosial, bersama Mas Anas, mendirikan dan mengelola Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP), lembaga nirlaba yang bergerak di bidang riset, pendampingan, dan pengembangan masyarakat.

Agus Iswanto, MA.Hum

Agus Iswanto adalah Peneliti Ahli Madya pada Balai Litbang Agama Semarang. Studi sarjana strata 1 (S1) di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya menyelesaikan studi strata dua (S2) di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan spesialisasi filologi naskah keagamaan dan pengkajian Islam. Beberapa karya yang baru-baru ini diterbitkan antara lain: “Building Harmony Through Religious Reception in Culture: Lesson Learned from Radin Jambat Folktales of Lampung” di *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol. 02., No. 02, 2017; “Tradisi Islam, Tradisi Arab dan Tradisi Jawa: Membaca Karya dan Pemikiran K.H. Ahmad ar-Rifai Kalisalak,” di *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 2, 2017; “Ideologi dalam Literatur Keagamaan pada Aktivis Dakwah Kampus dan Kajian Islam di ITB Bandung,” di *Jurnal SMART Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 3, No. 1, 2017; “Membaca Kecenderungan Pemikiran Islam Generasi Milenial,” dalam *Harmoni, Jurnal Multikultur dan Multireligius*, Vol. 17, No. 1, 2018; “Antara Ketaatan Beragama dan Toleransi Sosial: Membaca Pemikiran Guru Marzuki Muara di Betawi tentang Kafir (1877 – 1934) di *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, LIPI, Vol. 18, No. 1, 2016, “Menilik Sosok dan Ajaran Sunan Kalijaga melalui Manuskrip” dalam *Jurnal Manuskripta*, Vol. 9, No. 1, 2019, “Naskah-naskah Keislaman di Klungkung dan Karangasem, Bali: Sebuah Penelusuran Awal terhadap

Koleksi Masyarakat,” Prosiding Seminar Nasional Naskah dalam Kajian Antar Disiplin, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2019. Karya-karya lainnya bisa dilihat pada <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MDezWOkAAAAJ>. Bisa dihubungi melalui agus.iswanto83@gmail.com dan 08170406878.

Setyo Boedi Oetomo, S. Pd

Peneliti Muda pada Balai Litbang Agama Semarang-Kementerian Agama peminatan bidang Agama dan Tradisi Keagamaan. Pendidikan S1 ditempuh di IKIP Negeri Malang (1994). Studi S2 di UNNES Semarang tidak selesai. Karya ilmiah dalam bentuk buku, bagian buku, dan prosiding antara lain: 1) Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Ibadat Karya, diterbitkan Arti Bumi Intaran – Yogyakarta tahun 2017 (bersama Joko Tri Haryanto); 2) Artikulasi Kearifan Lokal Dalam Praktik Kepemimpinan di FKUB Gresik, dalam Belajar Kearifan Budaya Membangun Kerukunan Beragama (Sebuah Bunga Rampai tentang Kearifan Lokal di Jawa Tengah dan Jawa Timur) diterbitkan Arti Bumi Intaran – Yogyakarta; 3) Bimbingan Manasik Haji di KUA Rungkut Surabaya: Dilema Dualisme Otoritas, dalam Bimbingan Manasik Haji-Upaya Membangun Kemandirian Jemaah Haji (Sebuah Bunga Rampai Pelayanan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat), diterbitkan Arti Bumi Intaran-Yogyakarta; 4) Implementasi Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Semarang, dalam Problematika Pendirian Rumah Ibadat: Prosiding Bidang Kehidupan Keagamaan, Vol. 2 (1) 2015; 5) Walat, Isin, dan Gentenan: Nilai Kearifan Lokal Tengger Untuk Menjaga Kerukunan Kehidupan Beragama, dalam Agama dan Kearifan Lokal Model Kerukunan Beragama Komunitas Samin dan Tengger: Prosiding Bidang Kehidupan Keagamaan Vol. 2 (2) 2015. Jejak publikasi ilmiah antara lain: Konflik Penolakan Ritual Doa Leluhur Paguyuban Padma Buana di Pedukuhan Mangir Bantul, Yogyakarta, Jurnal SMArT Vol. 6 (1) 2020; Kepedulian Siswa Madrasah Aliyah Terhadap Produk Pangan Halal Di Kota Surakarta, Jurnal SMArT Vol. 5 (2) 2019 (satu dari tiga penulis utama); *The Map of SMA/SMK Islamic Education Teachers’ Competencies In Central Java*, di Jurnal Analisa Vol. 3 (02) 2018 (satu dari lima penulis utama); Literasi Al-Quran

Siswa SMP Di Jawa Timur, Jurnal SUHUF Vol. 11 (1) 2018 (satu dari dua penulis utama); Strategi Akomodasi Komunitas Tengger Dalam Mempertahankan Identitas Keagamaannya, Jurnal SMaRT Vol. 1 (1) 2015; *Gatekeeper Role in Building Network of Interreligious Figures Based Local Wisdom In Gresik*, Jurnal Analisa Vol. 22 (1) 2015.

Arnis Rachmadhani, SS, M.S.I,

Peneliti Madya di Balai Litbang Agama Semarang, Pendidikan S2 ditempuh di IAIN Walisongo Semarang, saat ini sedang menempuh studi program S3 di Universitas Wahid Hasyim Semarang pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Penelitian yang pernah dilakukan adalah Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Masyarakat di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta (Studi Kasus KUA Kecamatan Jepon Kabupate Blora Jawa Tengah); Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus BAZDA Kabupaten Sragen Jawa Tengah); Studi tentang Pemberdayaan Perempuan Islam Pada Pimpinan Aisyiyah di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat; Studi Kasus Potensi Ahmadiyah Qadian Purwokerto Jawa Tengah; Religi Etnis Cina di Jawa Pada Era Global; Dinamika Kehidupan Umat Beragama di Surakarta; Bimbingan Manasik Ibadah Haji di NTB; Indeks Modal Sosial Dalam Membingkai Kehidupan Umat Beragama di Surakarta; dan Perkalwina Waktu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara, dan Analisis Terhadap Konflik Sampang II.

Umi Masfiah, MAg

Peneliti ahli madya di Balai Litbang Agama Semarang. Lahir di Banyumas, 18 Oktober 1975. Pendidikan terakhirnya Pasca Sarjana (S2) Etika Islam/Tasawuf UIN Walisongo Semarang. Beberapa karya yang baru terbit adalah; (1) "Pemikiran Kalam Kiai Muhammad Sami'un Purwokerto dalam Naskah Aqaid 50" dalam Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, Des 2017; (2) "Ajaran Sarengat, Tarekat, Hakekat, dan Makrifat dalam Naskah Serat Jasmaningrat"

dalam Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi, Juli 2016; (3) “Falsafah Damai untuk Borneo (Studi terhadap Pesan Damai dalam Karya Cendekiawan Muslim Kalbar Pasca Reformasi),” dalam Smart: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi Juni 2015; (4) “Nilai-Nilai Toleransi dalam Buku PAI terbitan Yudhistira, Aneka Ilmu, dan Bengawan Ilmu” dalam buku Bunga Rampai berjudul *Indigeneous Pemikiran Ulama Jawa* tahun 2015; (5) “Paguyuban Tulis Tanpo Papan Kasunyatan Jati Singgangsono (TTPKJS) di Yogyakarta” dalam *Prosiding Eksistensi dan Ajaran Penghayat Kepercayaan di Jawa*, 2017.

Dr. Noor Miyono, M.Si

Noor Miyono adalah dosen Pascasarjana Universitas PGRI Semarang dengan kepakaran di ilmu Manajemen Pendidikan. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA IKIP Semarang, S-2 Sains Manajemen di Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan S-3 Manajemen Pendidikan Unnes lulus pada tahun 2010.

Aktif mengikuti seminar nasional dibidang pendidikan dan aktif menulis menulis pada Jurnal Nasional terakreditasi dan Internasional. Disamping menjadi dosen juga pernah menjadi asesor pada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa tengah sejak 2007 sampai 2019. Pernah menjadi konsultan Pendidikan dasar bidang BOS dan DAK pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pada tahun 2011-2012. Menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Semaang periode 2008-2017. Karya-karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:”Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah dan Iklim Sekolah terhadap Profesionalisme Guru SMP Negeri di Rayon 06 Kabupaten Semarang” (Jurnal Manajemen Pendidikan Tahun 2019, “Pengaruh Peran Kepala Sekolah dan Budaya Kerja terhadap Motivasi Berprestasi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang” (Jurnal Manajemen Pendidikan Tahun 2020 dan masih banyak lagi karaya tulis lainnya. Semua karya tulisnya dapat diakses di: <https://scholar.google.co.id/citations?user=0vXEf1QAAAAJ&hl=id&oi=ao>

Indeks

A

Agama Islam, iv, viii, 7, 44, 63, 73,
200, 209, 210, 212, 214, 215,
218, 220, 221, 222, 228, 230,
231, 232, 237, 255, 268, 270,
279, 283, 284, 287, 292
Ahmadiyah, 26, 27, 51, 292
Alquran, 4, 14, 15, 16, 21, 26, 27, 28,
29, 39, 43, 44, 73, 75, 76, 81,
82, 84, 97, 112, 118, 119, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 135, 140, 202, 217, 221,
242, 244, 253, 255, 256, 260,
270, 272
al-Wasathiyah, 42

B

Babad Tanah Jawi, 152, 158, 161
Buddha, 146, 159, 160, 169, 218
Budi Pekerti, 221, 251

D

Dhandanggula, 156
duqqoh, 119, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139,
140

F

Front Jihad Islam, 66

G

Gerakan Anti Merariq Kodek, 226
Griya Lansia, 80, 84, 86
Gunungkidul, vii, viii, IX, 77, 182,
183, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201,
203, 204, 206, 262, 263, 280

H

Hermeneutika, 147
hukum Islam, 60, 208, 211, 215, 220,
221, 222, 231

I

Islam moderat, 14, 16, 73, 97, 133,
136

K

Katholik, 30, 185, 189, 218, 293
Kesehatan Reproduksi, iv, viii, 7, 196,
197, 198, 204, 205, 207, 209,
211, 212, 214, 215, 216, 217,
219, 220, 221, 222, 224, 225,

226, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 236, 259, 262, 263, 267,
269, 270, 271, 272
Kristen, 28, 30, 46, 66, 72, 77, 148,
185, 189, 218, 246, 257, 279

L

literasi, viii, 6, 7, 118, 119, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 163, 164,
167, 175, 198, 201, 202, 203,
240, 241, 242, 243, 251
literasi digital, 240, 241, 242, 243,
251
LITERASI DIGITAL, 239
Lombok Barat, iv, viii, IX, 7, 212, 216,
218, 224, 225, 227

M

majelis taklim, 5, 6, 28, 29, 44, 67,
68, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 184
Malang, iii, vii, viii, IX, 7, 13, 17, 18,
19, 23, 28, 30, 31, 34, 70, 114,
197, 265, 288, 291
Masyarakat Kelas Menengah, iii, viii,
7, 16
moderasi, iii, vii, viii, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
13, 14, 15, 16, 18, 40, 41, 42,
43, 45, 60, 61, 64, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82,
83, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 97,
98, 103, 109, 110, 111, 112,
113, 120, 122, 123, 124, 125,

132, 134, 135, 136, 139, 140,
143, 144, 145, 146, 149, 153,
162, 163, 166, 167, 171, 175,
240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 251, 252, 281
moderasi bergaama, 246
moderasi Islam, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15,
16, 42, 43, 60, 73, 93, 94, 103,
112
moderat, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 25,
34, 41, 43, 56, 59, 60, 70, 71,
72, 73, 82, 87, 92, 93, 97, 98,
103, 110, 111, 112, 124, 125,
133, 134, 136, 137, 138, 140,
146, 167, 168, 239, 240, 243,
244, 245, 246, 247
Multikulturalisme, iv, viii, 7, 98, 100,
102, 106, 115, 257, 277, 278

N

naskah Lokajaya, 7
nyewu, 29, 78

P

pengajian Legawa, 118, 125, 126,
133, 134, 135, 136, 137, 138,
139
Perumahan Arraya, 19
perumahan Permata Jingga, 13, 19,
33
pesantren, viii, 5, 6, 7, 23, 39, 73, 91,
92, 93, 94, 103, 104, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 117,
118, 119, 121, 122, 123, 124,

125, 130, 131, 132, 133, 135,
136, 137, 139, 152, 161
Pesantren Honocoroko, iv, viii, 7,
118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139
Pesantren Waria Al Fatah, 66
pluralisme, 2, 71, 249, 250
Pupuh, 156, 164, 166, 168, 170, 171,
172, 173, 174

R

radikal, 3, 12, 27, 28, 55, 56, 60, 62,
71, 72, 73, 74, 92, 94, 95, 96,
97, 133, 136, 264

S

samadya, 3, 4
Surakarta, iii, iv, vii, viii, IX, 7, 35, 38,
39, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 70,
105, 106, 142, 151, 161, 260,
264, 272, 273, 277, 283, 287,
288, 289, 290, 291, 292
SURAKARTA, 37

T

terorisme, 11, 92, 95, 96, 103, 112,
239
toleran, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 41, 42,
43, 70, 73, 92, 93, 102, 103,
104, 112, 124, 125, 131, 137,
245

U

ummatan wasathan, 3, 75, 76, 244
ummatan washatan, 4, 75

W

wasathiyah, 3, 15, 35, 43, 74, 87, 97,
110, 111, 112, 178
Wonogiri, iv, viii, IX, 7, 45, 54, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 130, 131, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140

Y

Yogyakarta, iv, viii, IX, 5, 7, 9, 36, 39,
47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
86, 87, 89, 90, 114, 141, 142,
151, 161, 177, 178, 179, 182,
185, 189, 192, 195, 197, 198,
204, 205, 206, 236, 255, 256,
259, 261, 262, 263, 265, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 276, 277, 278, 279, 280,
283, 285, 286, 288, 289, 290,
291, 293

PENDIDIKAN MASYARAKAT

MODERASI, LITERASI DAN PERNIKAHAN DINI

Artikel yang ada pada bunga rampai ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang kurun waktu tahun 2018 sampai 2019. Buku ini hadir untuk memotret moderasi Islam di lembaga pendidikan agama non formal, seperti majelis taklim, pesantren dan perkawinan usia dini. Lokasi penelitian tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Fokus penelitian tersebut adalah model transmisi moderasi beragama kepada jamaahnya, nilai-nilai moderasi lembaga pendidikan non formal melalui budaya, maupun nilai-nilai moderasi Islam yang ada di teks klasik. Sementara itu, perkawinan usia dini memfokuskan pada pendidikan kesehatan reproduksi pada masyarakat.



KEMENTERIAN
AGAMA
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang

